

**DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(R K P D)
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)
TAHUN ANGGARAN 2022**



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 65 TAHUN 2022

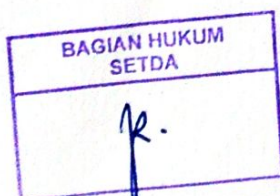
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

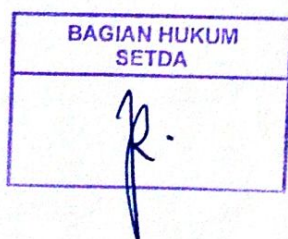
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

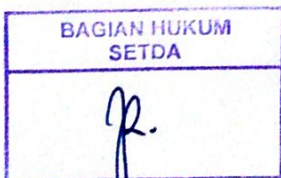
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

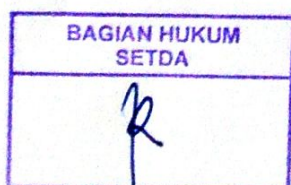
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.



3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah di Kabupaten Balangan.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
10. Rencana Kerja dan Anggran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.



18. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

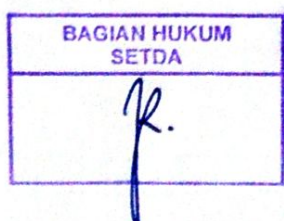
BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dari tanggal 1 Januari 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - c. BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - g. BAB VII : Penutup.
- (3) Uraian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan RKPD penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil *reses* DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan Daerah.



- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
- a. pedoman penyempurnaan rancangan rencana kerja SKPD Tahun 2023;
 - b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2023; dan
 - c. pedoman dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2023.

Pasal 4

Dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD.
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023 dengan DPRD.

BAB III KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

Pasal 5

Kaidah-kaidah dalam pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi urusan Perencanaan Daerah menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja SKPD bila belum sesuai dengan RKPD;
- c. Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan program dan kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah Daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil *reses* yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2023 dapat dilakukan penyesuaian.
- d. Kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;



- e. Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. Penyesuaian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi urusan Perencanaan Daerah setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
- g. RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2023 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

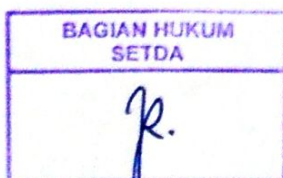
Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2023 dapat diubah dalam hal terjadi:
 - a. Perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - b. Penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - c. Terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perubahan APBD Kabupaten Tahun 2023.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

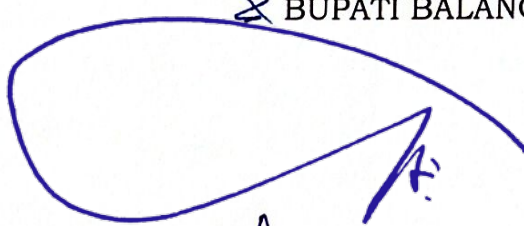
Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

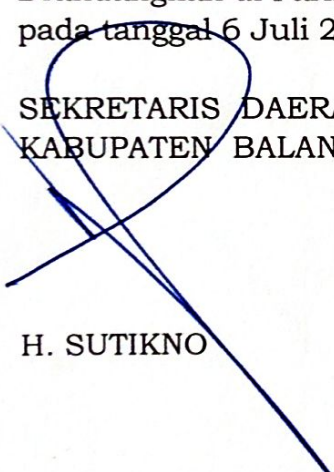
Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI BALANGAN, 


H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 65

BAGIAN HUKUM
SETDA



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

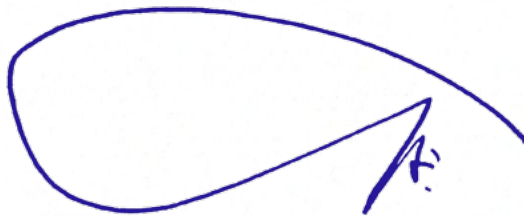
Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

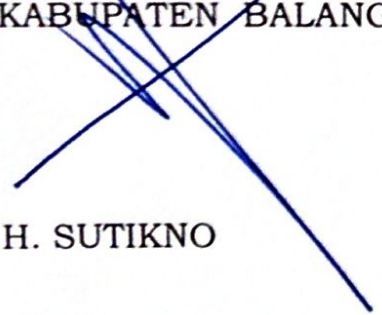
BUPATI BALANGAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate mark.

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'S' shape with a long, sweeping tail.

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 65



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2023 ini dapat dilaksanakan tepat waktu, dimana RKPD ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara (PPPAS) Tahun Anggaran 2023 serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pada masa tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, maka kami mengharapkan seluruh stakeholder, khususnya SKPD yang secara teknis merupakan pelaku dan ujung tombak pembangunan dapat mengoptimalkan seluruh potensi untuk pencapaian target RPJMD tahun 2021-2026.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses penyusunan dan penetapan RKPD ini. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kepeduliannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Paringin, Juli 2022



H. ABDUL HADI, S.Ag. M.I.Kom



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.5. Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2023.....	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-10
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-10
2.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs.....	II-250
2.3 Pencapaian Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Balangan.....	II-251
2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-253
2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-261
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH....	III-264
3.1 Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-264
3.2 Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-270
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-282
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan.....	IV-283
4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	IV-289
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-323
5.1 Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023.....	V-323
5.2 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran Dprd.....	V-351
5.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2022.....	V-353
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-356
6.1 Indikator Kinerja Makro Daerah.....	VI-357
6.2 Indikator Kinerja Utama Daerah.....	VI-358
6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah.....	VI-359
BAB VII PENUTUP.....	VII-381



7.1	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	VII-381
7.2	Kaidah-Kaidah Pendanaan.....	VII-382



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Satuan Geomorfologi Dirinci Tiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2008	II-11
Tabel 2. 2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan	II-17
Tabel 2.3 Luas Tiap Pengguna Lahan Kabupaten Balangan	II-23
Tabel 2. 3 Wisata Alam Kabupaten Balangan Tahun 2021.....	II-25
Tabel 2. 4 Wisata Agro Dan Buatan Kabupaten Balangan Tahun 2021	II-27
Tabel 2. 5 Wisata Sejarah Dan Budaya Kabupaten Balangan Tahun 2021	II-27
Tabel 2. 7 Wisata Religius Kabupaten Balangan Tahun 2021.....	II-27
Tabel 2. 8 Objek wisata Yang Mendapatkan SK Pokdarwis.....	II-27
Tabel 2. 9 Sistem Perkotaan Perdesaan di Kabupaten Balangan.....	II-30
Tabel 2. 10 Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Balangan 2016-2021	II-40
Tabel 2. 11 Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-41
Tabel 2. 12 Daerah Potensi Banjir Di Wilayah Kabupaten Balangan	II-41
Tabel 2. 13 Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Banjir Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan	II-44
Tabel 2. 14 Jumlah desa yang mengalami Bencana Tanah Longsor menurut Kecamatan Kabupaten Balangan	II-46
Tabel 2.15 Jumlah Kejadian Bencana Tanah Amblas di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-46
Tabel 2. 16 Jumlah Kejadian Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-47
Tabel 2. 17 Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2021	II-48
Tabel 2.18 Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2017-2021.....	II-49
Tabel 2.19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-50
Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Angkatan Kerja	II-51



Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Menurut Agama yang dianut	II-51
Tabel 2.22 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2017-2021	II-52
Tabel 2.23 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah) 2017-2021.....	II-53
Tabel 2.24 Peranan PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%), 2017-2021.....	II-56
Tabel 2.25 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Balangan (miliar rupiah), 2017-2021	II-57
Tabel 2.26 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten /Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan 2017-2021.....	II-61
Tabel 2.27 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-63
Tabel 2.28 Jumlah Penduduk dan Garis Kemiskinan Kabupaten Balangan.....	II-67
Tabel 2.29 Jumlah, P0,P1,P2 Penduduk Miskin Tahun 2017-2021.....	II-65
Tabel 2.30 Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021....	II-68
Tabel 2.31 Prevalensi Stunting Kabupaten Balangan Tahun 2020 –2021.....	II-74
Tabel 2.32 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-78
Tabel 2.33 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-78
Tabel 2.34 Gedung Olahraga di Kabupaten Balangan.....	II-81
Tabel 2.35 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tahun 2017-2021	II-82
Tabel 2.36 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Balangan.....	II-83
Tabel 2.37 Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Balangan	II-84
Tabel 2.38 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).....	II-87
Tabel 2.39 Capaian Predikat LAKIP Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021....	II-93
Tabel 2.40 Rincian Pemilaian atas Perbandingan Tahun 2020 dan 2021.....	II-94
Tabel 2.41 Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-97
Tabel 2.42 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Balangan Tahun 2021	II-99



Tabel 2.43 Rata-rata lama sekolah	II-101
Tabel 2.44 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-103
Tabel 2.45 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021.....	II-104
Tabel 2.46 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-105
Tabel 2.47 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-105
Tabel 2.48 Rekapitulasi Capaian Indikator Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-107
Tabel 2.49 Capaian Pelayanan Dasar Pendidikan Kabupaten Balangan	II-110
Tabel 2.50 Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-111
Tabel 2.51 Capaian Indikator SPM Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-124
Tabel 2.52 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-139
Tabel 2.53 Capaian Indikator Sub Urusan Penataan Ruang Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021.....	II-141
Tabel 2.54 Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-141
Tabel 2.55 Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-142
Tabel 2.56 Capaian Indikator Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-144
Tabel 2.57 Capaian Indikator SPM Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-145
Tabel 2.58 PPKS Yang Tertangani	II-146
Tabel 2.59 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-150
Tabel 2.60 Capaian Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-150
Tabel 2.61 Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-153



Tabel 2.62 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Balangan	II-156
Tabel 2.63 Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-160
Tabel 2.64 Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-162
Tabel 2.65 Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-164
Tabel 2.66 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan tahun 2020-2021	II-166
Tabel 2.67 Klasifikasi Status Desa Kabupaten	II-168
Tabel 2.68 Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-171
Tabel 2.69 Capaian Bidang Keluarga Berencana	II-173
Tabel 2.70 Capaian Indikator Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-178
Tabel 2.71 Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-179
Tabel 2.72 Capaian Indikator Koperasi dan UKM Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-182
Tabel 2.73 Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-183
Tabel 2.74 Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-184
Tabel 2.75 Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-184
Tabel 2.76 Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-185
Tabel 2.77 Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Pariwisata dan Olahraga Tahun 2021	II-185
Tabel 2.78 Daftar organisasi pemuda aktif di Kabupaten Balangan tahun 2021	II-187
Tabel 2.79 Pelatih Yang Bersertifikat	II-188



Tabel 2.80 Cabang dan Jumlah Atlet Yang Berprestasi	II-189
Tabel 2.81 Capaian Indikator Urisan Statistik Tahun 2020 dan 2021	II-190
Tabel 2.82 Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-191
Tabel 2.83 Capaian Bidang Kebudayaan	II-191
Tabel 2.84 Capaian Indikator Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-192
Tabel 2.85 Cagar Budaya Atau Diduga Cagar Budaya Di Kabupaten Balangan	II-193
Tabel 2.86 Capaian Indikator Perpustakaan Kabupaten Balangan Tahun 2017- 2021	II-196
Tabel 2.87 Capaian Indikator Kearsipan Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-199
Tabel 2.88 Capaian Indikator Pariwisata Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-201
Tabel 2.89 Tempat Makan Kabupaten Balangan Tahun 2021	II-203
Tabel 2.90 Capaian Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-203
Tabel 2.91 Jumlah Petani di Kabupaten Balangan Menurut Kecamatan 2021	II-204
Tabel 2.92 Luas Panen Tanaman Pangan di Kabupaten Balangan 2016-2021 (Ha)	II-205
Tabel 2.93 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021 (Ton)	II-206
Tabel 2.94 Produktivitas Tanaman Pangan di Kabupaten Balangan Tahun 2017- 2021 (Ton/Ha)	II-207
Tabel 2.95 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Sawah Di Setiap Kecamatan Tahun 2021	II-207
Tabel 2.96 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kacang-kacangan dan Umbi- umbian Di Setiap Kecamatan Tahun 2021	II-207
Tabel 2.97 Luas Panen Sayuran di Kabupaten Balangan Tahun 2018-2020 (Ha)	II-208
Tabel 2.98 Produksi Sayuran di Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 (Kwintal)	II-209



Tabel 2.99 Produktivitas Sayuran di Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021 (Kwintal/Ha)	II-209
Tabel 2.100 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah-buahan di Kabupaten Balangan 2021	II-210
Tabel 2.101 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Obat di Kabupaten Balangan 2018-2021	II-211
Tabel 2.102 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Semua Tanaman Obat-Obatan Di Setiap Kecamatan Tahun 2021	II-212
Tabel 2.103 Banyaknya Hewan Ternak Besar dan Kecil di Kabupaten Balangan, 2016-2021 (ekor)	II-213
Tabel 2.104 Banyaknya Produksi Daging Ternak di Kabupaten Balangan, 2016-2021	II-213
Tabel 2.105 Banyaknya Unggas di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 (Ekor)	II-213
Tabel 2.106 Produksi Daging Ayam Buras, Ayam Ras Pedaging dan Itik di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 (Kg)	II-214
Tabel 2.107 Luas Areal Tanaman Perkebunan di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 (Ha)	II-214
Tabel 2.108 Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Balangan 2015-2021 (Ton)	II-215
Tabel 2.109 Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-216
Tabel 2.110 Capaian Indikator Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021	II-217
Tabel 2.111 Capaian Indikator Perindustrian Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021	II-219
Tabel 2.112 Capaian Indikator Transmigrasi Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021	II-220
Tabel 2.113 Jumlah Rumah Tangga Perikanan di Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021	II-222
Tabel 2.114 Produksi Perikanan (ton) menurut Tempat Pemeliharaan di Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021	II-223
Tabel 2.115 Jumlah Nelayan (orang) berdasarkan Alat Tangkap yang Beroperasi di Perairan Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021	II-224



Tabel 2.116 Luas Areal Budidaya Perikanan (m ²) di Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021	II-224
Tabel 2.117 Produksi Benih Ikan Tahunan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) Gunung Manau Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021	II-226
Tabel 2.118 Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (POKLAHSAR) Di Kabupaten Balangan Tahun 2021.....	II-226
Tabel 2.119 Perencanaan Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-227
Tabel 2.120 Capaian Indikator Keuangan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	II-228
Tabel 2.121 Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021.....	II-231
Tabel 2.122 Capaian Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021.....	II-234
Tabel 2.123 Capaian Indikator Pengawasan Kabupaten Balangan Tahun 2016 - 2021	II-237
Tabel 2.124 Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga Kabupaten Balangan 2015-2021	II-240
Tabel 2.125 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Kabupaten Balangan 2015 – 2021	II-241
Tabel 2.126 Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Selatan, Januari - Desember dan rata-rata Tahun 2016 - 2021 (2018=100)	II-243
Tabel 2.127 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016 s.d. 2021 Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-244
Tabel 2.128 Produk Layanan OSS DPMPSTP Beserta Lama Waktu Pelayanan Kabupaten Balangan	II-245
Tabel 2.129 Rasio Ketergantungan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021...	II-249
Tabel 2.130 Rasio Penduduk Menurut Mata Pencarian (%).....	II-250
Tabel 2.131 Capaian indikator masing-masing TPB Kabupaten Balangan.....	II-251
Tabel 2.132 Capaian Indikator Tujuan Dalam RPJMD tahun 2016-2021 di tahun 2021	II-252
Tabel 2.133 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 sampai Tahun 2021.....	II-254



Tabel 2.134 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 pada Tahun 2021.....	II-256
Tabel 2.135 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD.....	II-261
Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Balangan Tahun 2020-2023 (dalam ribu).....	III-270
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Balangan Tahun 2020-2023 (dalam ribu)	III-279
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Balangan Tahun 2020-2023 (dalam ribu).....	III-280
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023	IV-286
Tabel 4.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023	IV-300
Tabel 4.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	IV-321
Tabel 5.1 . Matrik Rencana Program Prioritas Per Urusan Kabupaten Balangan Tahun 2023.....	V-325
Tabel 5.2 Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022.....	V-353
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Balangan 2023	VI-357
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Balangan 2023.....	VI-358
Tabel 6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023	VI-361



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan.....	I-7
Gambar 2.1 <i>Peta Geologi Kabupaten Balangan</i>	II-13
Gambar 2.2 <i>Peta Geomorfologi Kabupaten Balangan</i>	II-14
Gambar 2.3 Batas Administrasi Kabupaten Balangan.....	II-16
Gambar 2.4 Luas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Balangan dalam Satuan Km ²	II-16
Gambar 2.5 Persentase Luas Penggunaan lahan 2020.....	II-22
Gambar 2.6 Peta Rawan Banjir Kabupaten Balangan.....	II-44
Gambar 2.7 Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2017–2021 (jiwa)	II-47
Gambar 2.8 <i>Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021</i>	II-50
Gambar 2.9 <i>Pangsa PDRB Balangan Tahun 2020</i>	II-55
Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 – 2021	II-60
Gambar 2.11 PDRB Per Kapita Kabupaten Balangan dengan dan Tanpa Sektor Pertambangan dan Penggalian tahun 2016 – 2021	II-62
Gambar 2.12 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.....	II-63
Gambar 2.13 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021.....	II-66
Gambar 2.14 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021	II-67
Gambar 2.15 Prevalensi Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2021	II-74
Gambar 2.16 Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan 2016-2021	II-90
Gambar 2.17 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan 2016-2021	II-90
Gambar 2.18 Dana Perimbangan Kabupaten Balangan 2016-2021	II-91
Gambar 2.19 Pendapatan Transfer Kabupaten Balangan Tahun 2021	II-92
Gambar 2.20 Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Balangan 2016-2021	II-92
Gambar 2.21 Putus Sekolah Tingkat SD	II-99
Gambar 2.22 Putus Sekolah Tingkat SMP	II-100



Gambar 2.23 Capaian Pelayanan Terduga TB tahun 2021	II-134
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha (persen)	III-266
Gambar 3.2 IHK dan Tingkat Inflasi Mei 2022, Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) di Kalimantan Selatan	III_268

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan RKPD Kabupaten Balangan tahun 2023 memuat rancangan penyusunan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD Tahun 2023 ini selain berpedoman pada RPJMD tahun 2016-2021, juga mengacu pada hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022 sampai Triwulan I Tahun 2022, perkembangan sosial dan ekonomi daerah tahun berjalan dan realisasi dari pendapatan daerah di RKPD Tahun 2022 serta dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Rumusan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam RKPD juga dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan data dan asumsi-asumsi yang tepat dan akurat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Tahun 2022. Proses Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, Musrenbang RKPD di Kecamatan, dan Musrenbang RKPD Kabupaten, termasuk di dalamnya penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (Forum PD). Selanjutnya untuk mengawal usulan ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi baik di tingkat provinsi maupun pusat, pemerintah Kabupaten Balangan juga berperan serta aktif dalam Forum PD Daerah Kalimantan Selatan, Musrenbang Daerah Kalimantan Selatan, dan Musrenbang Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman dan acuan bagi Bupati bersama DPRD dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. RKPD juga merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diketahui capaian kinerja RPJMD sebagai

wujud kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun yang bersangkutan. Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023 akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rancangan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 disusun dengan landasan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta ketentuan pelaksanaannya.
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan



22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
28. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Ftsik Tahun Anggaran 2019
29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
31. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
32. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
34. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.



35. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
36. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447)
37. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
38. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
39. Permendagri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
40. Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal
41. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
42. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16),
44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021;
45. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);

47. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
48. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Balangan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2016-2021 yang diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Tahun 2016-2021 dan RPJMN 2015-2019.

1. RKPD – RPJMD

Dokumen RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai dokumen operasional tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan, dan rencana program kegiatan prioritas pembangunan daerah.

2. RKPD – Renja PD

Dokumen RKPD sebagai Pedoman penyusunan dan penetapan anggaran Rencana Kerja PD. Selanjutnya rencana PD digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.

3. RKPD – RKPD Kalimantan Selatan – RKP

Dokumen RKPD Kabupaten harus mengacu, disinkronkan dan diserasikan dengan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKP (Nasional). Sinkronisasi dilakukan terkait dengan tema, prioritas, sasaran, target kinerja pembangunan, dan juga indikasi program-program pembangunan prioritas.

4. RKPD – RTRW

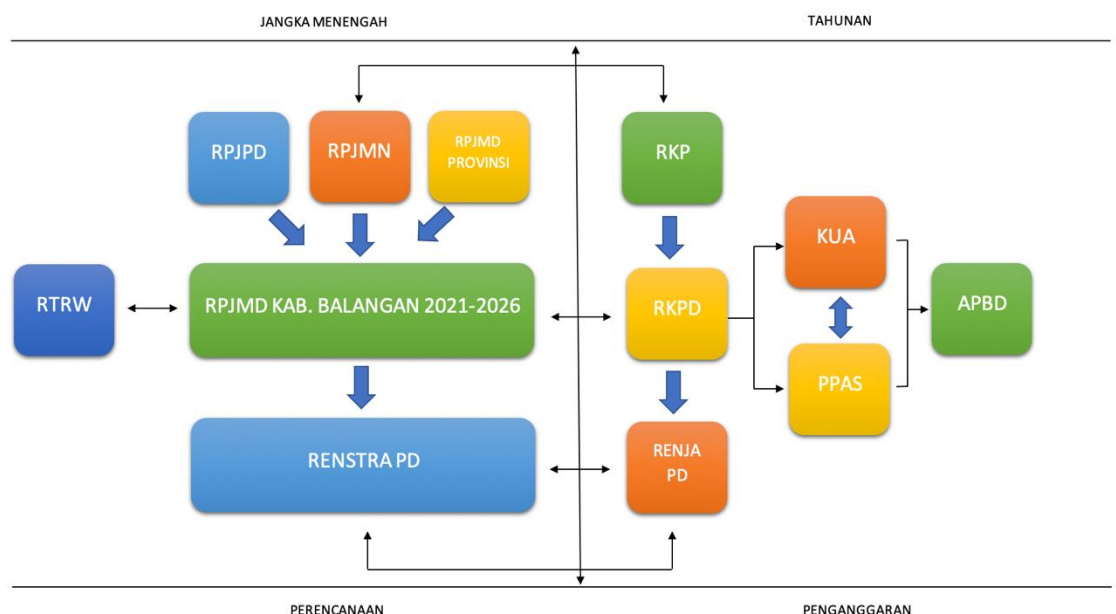
RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 mengacu kepada RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 dalam proses penyusunannya. Perencanaan terkait tata ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2023 perlu diakomodir dalam RKPD tahun 2023. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

5. RKPD – SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditetapkan dan menjadi komitmen bersama dunia Internasional dalam meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya. RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 dalam penyusunannya juga berpedoman pada pengarusutamaan pencapaian SDGs dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan indikator dan target serta penganggaran terkait target SDGs yang telah ditetapkan.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Alur Perencanaan dan Penganggaran



Gambar 1.1 Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman resmi dan acuan pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahun 2023 dan sekaligus acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Balangan secara berjenjang. Dengan telah tersedianya acuan resmi maka

akan mempermudah untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk terlibat di dalam pelaksanaan segenap program dan kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah untuk:

- 1 Menyesuaikan program dan kegiatan prioritas pembangunan mengikuti Perubahan Perangkat Daerah.
- 2 Untuk mengintegrasikan, mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan menyinergikan program-program pembangunan di daerah.
- 3 Sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD.
- 4 Sebagai pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2023

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah



BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023
- 4.2. Prioritas dan Program Pembangunan Tahun 2023

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

- 7.1. Kaidah Pelaksanaan
- 7.2. Kesimpulan

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah otonom baru pada wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan ibukota berada di Kota Paringin. Pembentukan Kabupaten Balangan secara hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Balangan berasal dari nama sebuah sungai yang mengalir dari daerah Pegunungan Meratus hingga ke Sungai Barito. Kabupaten Balangan mempunyai motto “SANGGAM” yaitu singkatan dari Sanggup Bagawi Gasan Masyarakat, yang berarti Kesanggupan melaksanakan pembangunan yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakat.

Dalam upaya untuk lebih mendekati pada kondisi riil dan paling akhir, maka Gambaran Umum Kondisi Daerah pada dokumen RKPD ini dilakukan penambahan berupa data dan informasi tahun terakhir.

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

Wilayah Kabupaten Balangan secara umum merupakan dataran, perbukitan dan pegunungan (klasifikasi bentuk lahan absolut Van Zuidam, 1985). Dari klasifikasi tersebut, dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Balangan mempunyai nilai kemiringan lereng berkisar antara 2% sampai 30%. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1-3, Neopleosin Tf-Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1-3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 %) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah-jenis Paleogen To, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong.



Jenis batuan pada bagian utara formasi Tanjung (Tet) memiliki sebaran sekitar 5%, tersusun atas perselingan antara batu pasir, batu lempung, batu lanau, batu gamping, dan konglomerat aneka bahan. Sedangkan bagian timur sebaran formasi Berai (Tomb) ada di sekitar Gunung Berai Kecamatan Awayan, tersusun oleh batu gamping bersisipan napal dan batu lempung dengan ketebalan lapisan rata-rata 1-6 meter. Formasi Warukin (Tmw) merupakan tutupan dominan yang hampir mencapai 70% tersebar di bagian utara dan timur Paringin, tersusun dengan perselingan batu pasir kuarsa dan batu lempung bersisipan serpih dan batu bara dengan ketebalan lapisan rata-rata 2 meter. Formasi Dahor tersebar sekitar 15% di bagian tengah dan barat, tersusun oleh batu pasir kuarsa bersisipan lempung dan limonit. Endapan Quarter (Qa) tersebar di daerah dataran bagian selatan (Gambar 2.1).

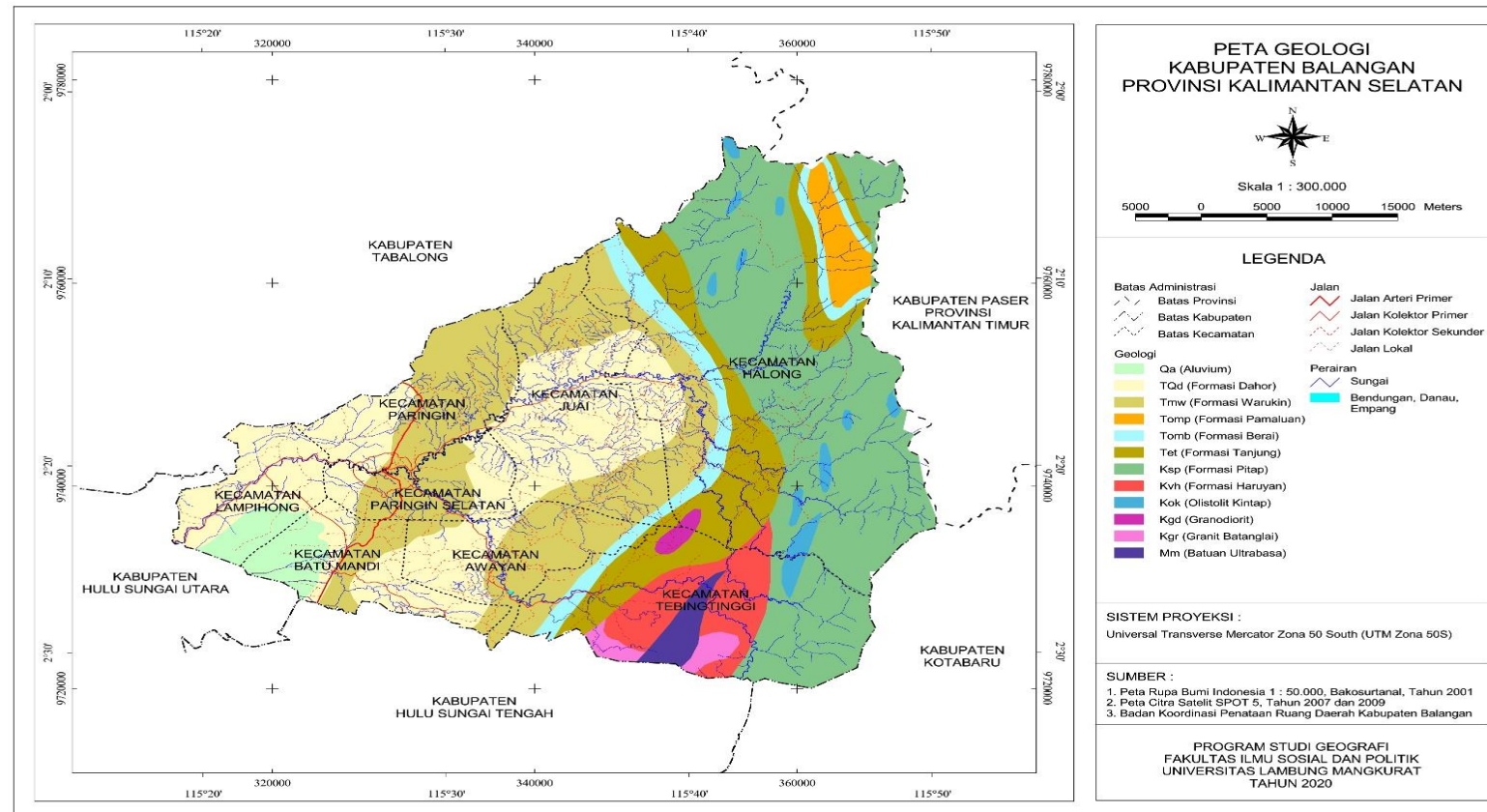
Berdasarkan sebaran satuan geomorfologi pada tiap-tiap wilayah kecamatan, Kecamatan Halong dan Juai tercatat sebagai wilayah kecamatan dengan kondisi geomorfologi yang bervariasi. Sedangkan Kecamatan Tebing Tinggi merupakan wilayah kecamatan yang memiliki kondisi geomorfologi dengan satuan perbukitan relatif curam dan pegunungan curam. Wilayah kondisi landau hamper terdapat di setiap kecamatan kecuali Tebing Tinggi. Luas wilayah Kabupaten Balangan berdasarkan satuan geomorfologi, dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.2.

Tabel 2. 6
Luas Wilayah Menurut Satuan Geomorfologi Dirinci Tiap
Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2008

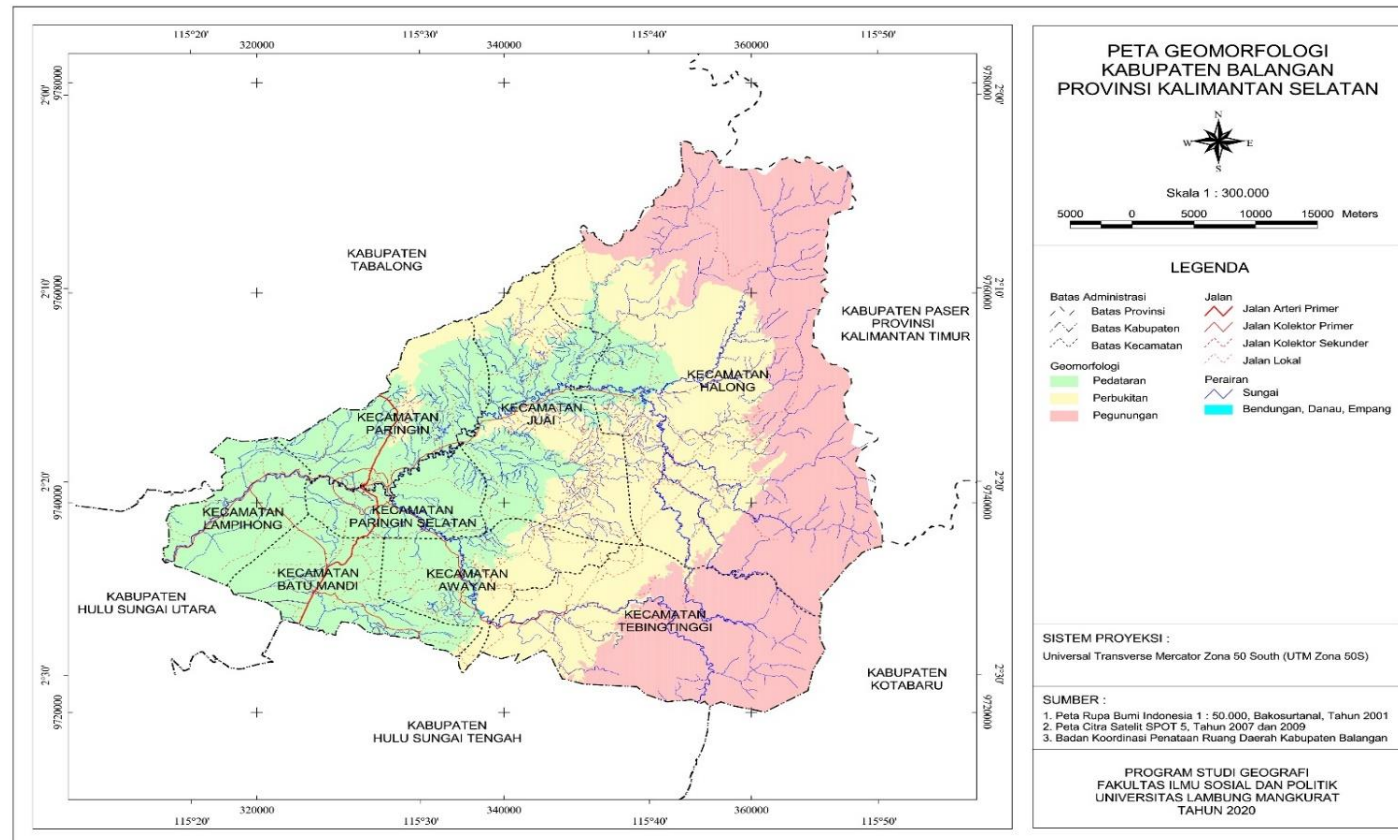
No.	Kecamatan	Luas Satuan Geomorfologi					
		Dataran (Landai)		Perbukitan (Relatif Curam)		Pegunungan (curam)	
		Km ²	%	Km ²	%	Km ²	%
1.	Halong	12,09	1,90	154,21	33,60	485,99	63,00
2.	Juai	141,71	21,80	150,11	32,80	1,80	0,20
3.	Tebing Tinggi	-	-	66,20	14,40	283,21	36,70
4.	Batu Mandi	181,01	27,90	4,86	1,10	-	-
5.	Awayan	55,32	8,50	67,65	14,80	-	-
6.	Lampihong	70,58	10,90	-	-	-	-
7.	Paringin	126,71	19,50	15,29	3,30	-	-
8.	Paringin Selatan	61,62	9,50	-	-	-	-
	Total	649,01	100	458,30	100	770,99	100



*Sumber: SRTM Data V4 (Path 60 Row 13), CIAT-CSI 2008 (Diolah Menggunakan Software Global Mapper 8.0 Dengan Metode Interpolasi Reuter Et Al. (2007); Diolah 2010. Luasan Satuan Geomorfologi Dihitung Menggunakan Piranti Lunak Berbasis GIS, Mapinfo 8.0 SCP.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) 2016, Kab. Balangan*



Gambar 2.1
Peta Geologi Kabupaten Balangan



Gambar 2.2
Peta Geomorfologi Kabupaten Balangan

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1 Kondisi Geografis

A. Letak, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi

Balangan sebagian besar merupakan daerah dataran dengan ketinggian antara 25-100 meter diatas permukaan laut, secara geografis terletak pada 2° 01' 37" sampai dengan 2° 35' 58" Lintang Selatan dan 114° 50' 24" sampai dengan 115° 50' 24" Bujur Timur. Luas wilayah Balangan, adalah berupa daratan seluas 1828,10 km2 dengan batas administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir

Provinsi Kalimantan Timur

Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara

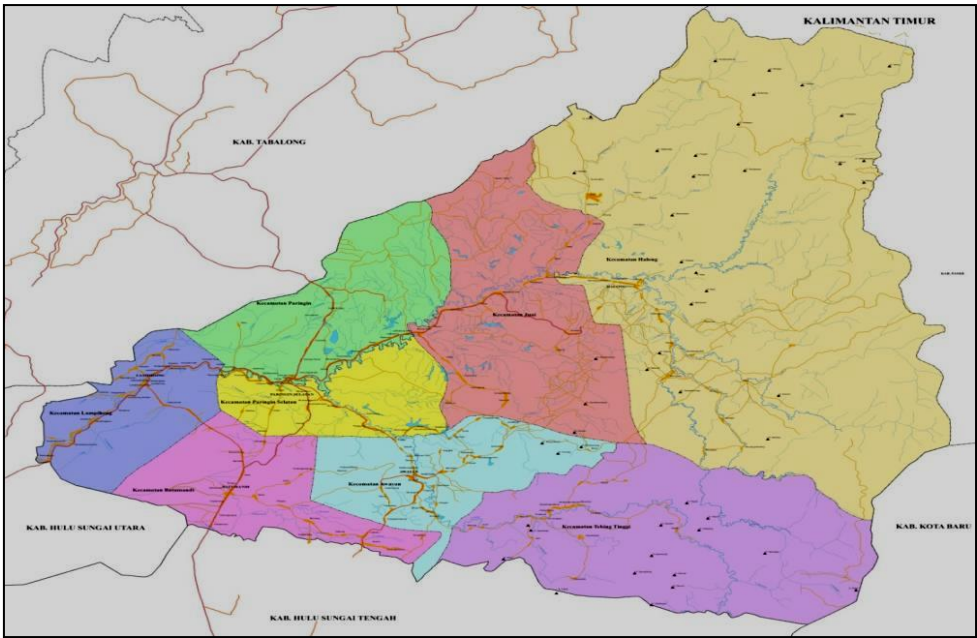
Sebelah Timur : Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Pasir

Provinsi Kalimantan Timur

Wilayah administrasi Kabupaten Balangan terdiri dari 8 wilayah kecamatan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan no. 23 tahun 2006 luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Lampihong (100,09 km2), Batumandi (112,25 km2), Awayan (122,73 km2), Tebing Tinggi (285,15 km2), Paringin (138,65 km2), Paringin Selatan (85,48 km2), Juai (230,82 km2), seta Halong (752,91 km2).

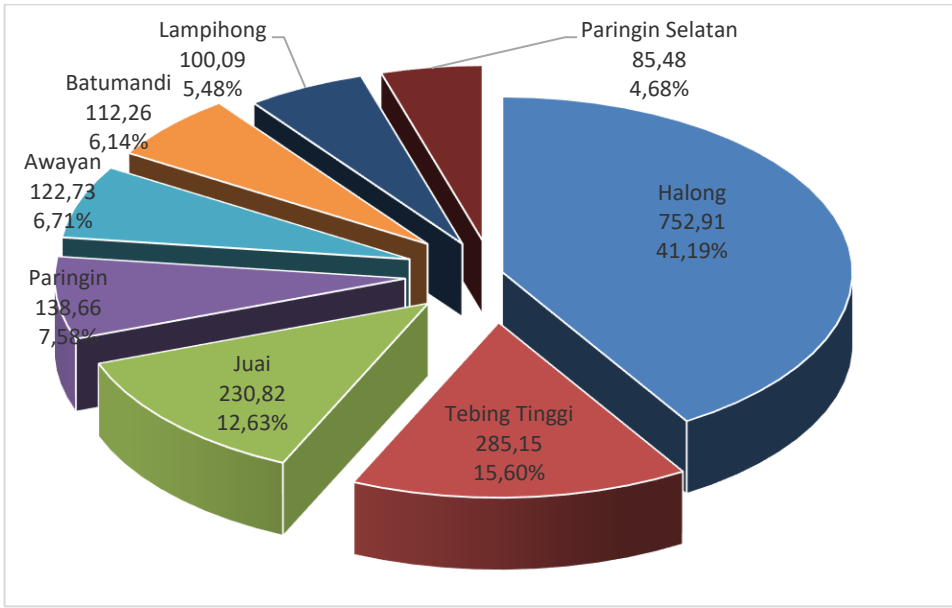
Kabupaten Balangan secara administrasi pemerintahan saat ini terdiri atas 154 desa dan 3 kelurahan (berdasarkan Perda No. 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.3, 2.4, dan Tabel 2.2 berikut.

Gambar 2.3
Batas Administrasi Kabupaten Balangan



Sumber: RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2014

Gambar 2.4.
Luas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Balangan
dalam Satuan Km²



Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka, 2022



Tabel 2. 7
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan

No	Kecamatan	Kelurahan (Buah)	Desa (Buah)
1	Lampihong	-	27
2	Paringin	2	14
3	Juai	-	21
4	Halong	-	24
5	Batu Mandi	-	18
6	Paringin Selatan	1	15
7	Awayan	-	23
8	Tebing Tinggi	-	12
	Jumlah	3	154

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka, 2022

B. Topografi

Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38 %). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19 %. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketinggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal.

Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2 %, 2-8 %, 8-15 %, 15-25 %, 25-40 % dan lebih besar dari 40 %. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap, erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2 % yaitu mencapai 69 % dari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, di mana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun).

Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40 m yaitu hanya 2 %, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16 % dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal).

C. Geologi

Kondisi geologis di salah satu wilayah kabupaten diasumsikan cukup mewakili kondisi geologis lingkup kawasan tersebut, karena proses ekologi yang terjadi secara alami pada umumnya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang di lingkup wilayah yang cukup luas. Tinjauan kondisi geologi terdiri dari tinjauan terhadap jenis batuan, jenis tanah dan tekstur tanah yang terdapat di Kabupaten Balangan.

Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1 3, Neopleosin Tf Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1 3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 %) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah jenis Paleogen Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong. Untuk jenis tanah yang terdapat di kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, kompleks podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial unfuk budidaya pertanian karena di samping subur juga tidak peka terhadap erosi. Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin. Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73 %), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44 %). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703

Ha (3,64 %). Tanah aluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin.

Tekstur tanah di Kabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76 % dari luas wilayah. Tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98 % dan 1,26 % dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi.

D. Hidrologi

Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi). Sungai-sungai utama yang mengalir di daerah Kabupaten Balangan adalah Sungai Pitap, Sungai Balangan, Sungai Mantuyan, Sungai Tabuan, Sungai Galumbang, Sungai Halong, Sungai Uren, Sungai Ninian, Sungai Jauk, Sungai Batumandi, Sungai Lokbatu dan Sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu : pola pengaliran anastomatik, pola pengaliran dendritik, pola pengaliran rektangular dan pola pengaliran subdendritik.

1. Pola Pengaliran Anastomatik

Pola pengaliran anastomatik adalah pola pengaliran modifikasi yang membentuk meander yang terbentuk di dataran banjir, delta ataupun rawa. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten Balangan dengan luas kira-kira 25 %. Pola pengaliran ini terdapat dibagian barat-selatan daerah kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh Sungai Pitap, Sungai Muning, Sungai Lok Batu, Sungai Juuh, Sungai Batumandi, Sungai Jauk, Sungai Pelasan serta Sungai Kambiyain dengan anak-anak sungainya

2. Pola Pengaliran Dendritik

Pola pengaliran dendritik adalah pola pengaliran dasar yang bentuk umum seperti daun, berkembang pada batuan dengan kekerasan relatif sama, perlapisan batuan sedimen relatif datar serta tahan akan pelapukan, kemiringan landai,

kurang dipengaruhi struktur geologi, pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 25 %. Pola Pengaliran ini terdapat di bagian barat hingga bagian tengah daerah kabupaten Balangan. Pola Pengaliran ini terdapat di sungai Balangan, sungai Ninian, sungai Juai, sungai Jungkal serta sungai Jingan dengan anak-anak sungainya

3. Pola Pengaliran Rektangular

Pola pengaliran rekrangular adalah pola pengaliran dasar dimana induk sungai dengan anak sungai yang memperlihatkan arah lengkungan menganan, pengontrol struktur atau sesar yang memiliki sudut kemiringan, tidak memiliki perulangan perlapisan batuan dan sering memperlihatkan pola. Pengaliran yang tidak menerus. Pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 30 %. Pola pengaliran terdapat dibagian timur daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Balangan, sungai Halong, sungai Uren, sungai Mantuyan, serta sungai Tabuan dengan anak-anak sungainya.

4. Pola Pengaliran Subdendritik

Pola pengaliran subdendritik adalah pola pengaliran modifikasi yang berbentuk mendaun yang umumnya terbentuk didaerah yang mempunyai kekerasan batuan relative sama yang berkembang pada batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten Balangan sekitar 20 %. Pola pengaliran ini terdapat dibagian utara daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Galumbang, sungai Lalayau serta sungai Tutupan dengan anak-anak sungainya.

Kondisi Hidrologi ditinjau dari pola drainase tanah di Kabupaten Balangan sebagian besar kecamatan di Kabupaten Balangan memiliki potensi pengembangan yang baik karena Sebagian besar kecamatan yang ada ternasuk pada kelas tidak pernah tergenang kecuali Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi. Wilayah dengan jenis drainase kering sangat cocok untuk lahan budidaya tanaman pangan lahan kering dan perkebunan, sementara wilayah dengan jenis drainase tergenang periodik dapat digunakan sebagai lahan budidaya basah dan kering.

E. Klimatologi

Keadaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan ke dalam Iklim Hutan Tropika Humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm serta suhu udara rata-rata harian 32,0°C dan minimal 133,3°C. Kelembaban udara relatif rata-rata harian di

wilayah ini pada tahun yang sama mencapai 201,5%. Curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Masing-masing memiliki angka yang berbeda. Dalam lingkup wilayah Kabupaten Balangan, tinggi curah hujan antara 2.000 mm/tahun hingga 2.500 mm/tahun dialami oleh sebagian wilayah Kecamatan Halong, Juai, Paringin, Batumandi, dan sebagian besar wilayah Kecamatan Lampihong. Sebagian dari wilayah kecamatan-kecamatan tersebut dan seluruh wilayah Kecamatan Awayan dan Tebing Tinggi memiliki tinggi curah hujan yang berkisar antara 2.500 mm/tahun hingga 3.000 mm/tahun. Dilihat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Batu Mandi dan Juai, rata-rata curah hujan per hari pada tahun 2015 di Kabupaten Balangan sebesar 16,5 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 117,7 hari atau sekitar lebih dari 3 bulan.

F. Penggunaan Lahan

persentase penggunaan lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan, dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 29 %, tanah bukan sawah 25 %, hutan negara 21 %, dan tanah sawah 18 %. Dengan dominasi perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya, kabupaten balangan dapat dikatakan memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif besar, dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup signifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain-lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran. Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat Ibukota Kabupaten Balangan, dan disepanjang jalan berupa perumahan penduduk, sementara dominasi hutan dimaksud bukan lagi hutan murni yang belum terjamah, melainkan berupa hutan karet yang cukup padat.

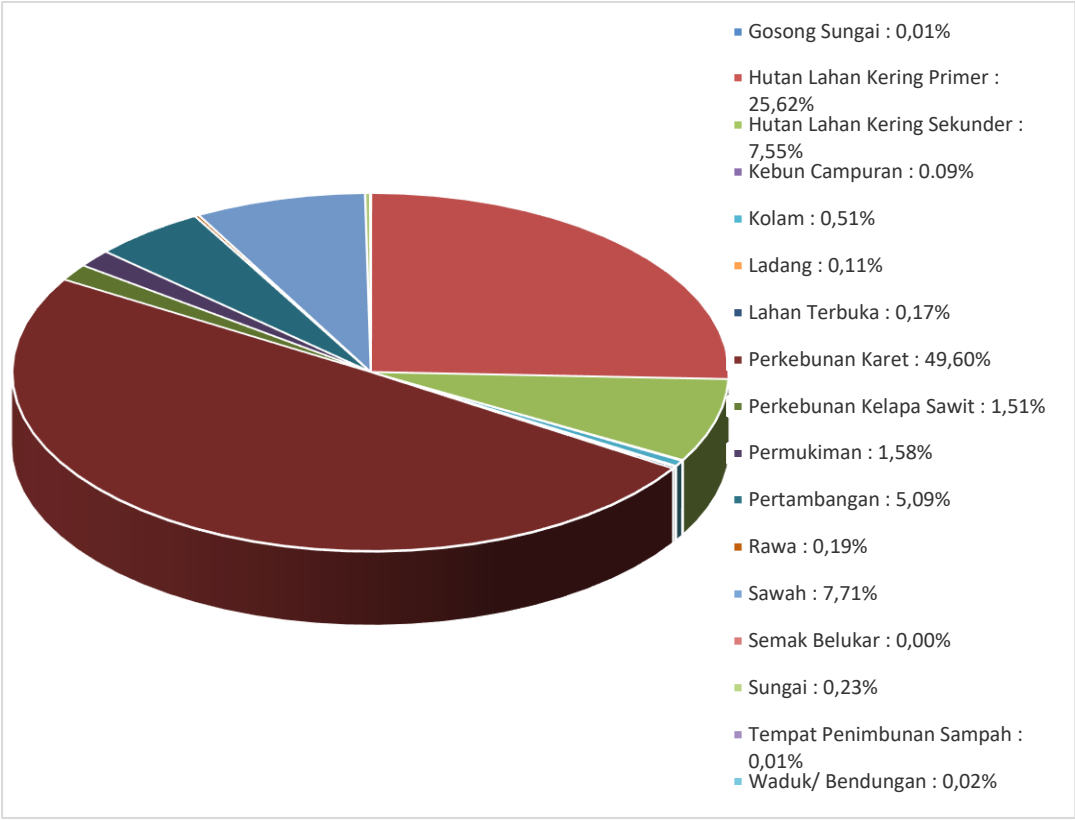


Tabel 2. 8
Luas Tiap Pengguna Lahan Kabupaten Balangan

Jenis Penggunaan Lahan (Land Utilization)		Luas (Ha)
1	Tanah Sawah/ <i>Wetland</i>	14.100,19
2	Tanah Bukan Sawah	94.750,81
	a. Kebun Campuran	163,03
	b. Ladang	196,38
	c. Kelapa Sawit	2.755,55
	d. Perkebunan Karet	90.701,69
	e. Kolam	934,16
3	Bukan Lahan Pertanian	73.998,92
	a. Permukiman	2.897,40
	b. Hutan Lahan Kering Sekunder	13.801,52
	c. Hutan Lahan Kering Primer	46.844,17
	d. Rawa	348,35
	e.Semak Belukar	1,71
	f. Lahan Terbuka	305,17
	g. Bendung/Waduk	45,07
	h. Sungai	415,24
	i. Gosong sungai	13,60
	j. Pertambangan	9.315,67
	k. Timbunan Sampah	11,02

Sumber : DPUPRKP, Peta RBI Kab. Balangan Skala 1:50.000, Tahun 2021

Gambar 2.5
Persentase Luas Penggunaan lahan 2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang, data dan grafik diolah 2021

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Balangan memiliki potensi pengembangan wilayah di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, sektor pertambangan, sektor pariwisata. dan potensi sebagai Kawasan agropolitan sesuai dalam RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Balangan adalah :

A. Sektor Pertanian

Wilayah potensial untuk pengembangan pertanian tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Balangan. Oleh sebab itu apabila dikembangkan seluruh lahan potensial pertanian, maka pendapatan daerah dari sektor pertanian dapat ditingkatkan. Berdasarkan tabel 2.3 diketahui bahwa penggunaan tanah sawah pada tahun 2022 adalah 7,71%, penggunaan lahan berupa kegiatan untuk tanah perkebunan karet 49,60% dan perkebunan kelapa sawit adalah sebesar 1,51%. Guna meningkatkan produksi pertanian, maka perlu menggalakan program penggunaan bibit unggul serta menciptakan prasarana irigasi, agar pengembangan pertanian lahan basah tidak tergantung pada musim, dan pengembangan irigasi harus memperhatikan kemampuan dan bentuk alam guna tetap terjangganya bentang alam yang berarti kecilnya biaya fisik, maupun resiko yang ditimbulkannya terhadap lingkungan.

Sektor pertanian di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi:

- 1) Sektor pertanian tanaman pangan dapat dilihat komoditi unggulan tanaman pangan kabupaten Balangan adalah padi, jagung, kedelai serta tanaman hortikultura lainnya.
- 2) Sektor Perkebunan dapat dilihat bahwa komoditi unggulan tanaman perkebunan adalah *Karet* dengan lokasi prioritas Kecamatan Awayan, Sawit dengan lokasi prioritas di Kecamatan Juai, Lampihong dan Batu Mandi dan Kelapa (Gula Aren) dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Awayan.
- 3) Sektor Peternakan dapat dilihat bahwa peternakan dikembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Balangan. Komoditi unggulan peternakan di Kabupaten Balangan adalah Ayam Buras dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Paringin, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong dan Sapi Potong dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong.
- 4) Sektor Perikanan dikembangkan di seluruh kecamatan dengan prioritas utama yaitu perikanan darat di Kecamatan Lampihong dan Juai. Untuk perikanan maka jenis komoditi yang utama diunggulkan adalah ikan nila dengan skor pertama, patin, lele/mujair skor kedua dan ikan mas skor ketiga. Sektor perikanan potensi sebagai Kawasan agropolitan.

B. Sektor Pertambangan

Sejak tahun 1992 Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah penghasil batu bara yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap ekspor batu bara di Kalimantan Selatan. Sektor pertambangan dan galian merupakan sektor yang cukup penting dalam menunjang perekonomian wilayah Kabupaten Balangan dan merupakan sektor dengan kontribusi terhadap PDRB terbesar (60,69%).

Potensi bahan galian di Kabupaten Balangan berupa bahan galian golongan C, terutama yang terdapat dalam kawasan hutan di Kabupaten Balangan. Berbagai jenis bahan tambang lainnya tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Balangan seperti bijih besi, kaolin, lempung, pasir kuarsa, batu gamping sirtu bahkan batu bara. Berdasarkan hasil pemetaan neraca Sumber Daya



Alam, Kabupaten Balangan memiliki potensi batubara yang tersebar di beberapa kecamatan terutama di Kecamatan Paringin, Tebing Tinggi, Halong, Juai, Awayan dan Batu Mandi. Diperlukan upaya-upaya pengawasan dan pengendalian pada kawasan pertambangan pada cara atau teknik pengolahannya dalam rangka menjaga keseimbangan Kawasan pertambangan.

C. Sektor Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Aspek ekonomi pariwisata berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata, seperti usaha perhotelan, transportasi, telekomunikasi, bisnis eceran, dan penyelenggaraan paket pariwisata. Sektor pariwisata di Kabupaten Balangan banyak terdapat objek wisata alam yang tersebar di beberapa kecamatan. Kawasan wisata yang ada di Kabupaten Balangan jika dikelompokkan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wisata alam pegunungan, wisata agro dan buatan, wisata sejarah dan budaya, serta wisata religius. Tabel dibawah ini adalah objek wisata yang ada di Kabupaten Balangan.

Tabel 2. 9
Wisata Alam Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Nama Tempat Wisata	Lokasi
1.	Air Terjun Tayak	Desa Uren Kecamatan Halong
2.	Air Terjun Tumate	Desa Aniungan Kecamatan Halong
3.	Air Terjun Pemandian Anggang	Desa Uren Kecamtan Halong
4.	Air Terjun Buntar	Desa Mamigang Kecamatan Halong
5.	Sawang	Desa Marajai Kecamtan Halong
6.	Air Terjun Tanjung Jamalu	Desa Kapul Kecamatan Halong
7.	Gunung Batu Kiras	Desa Kapul Kecamatan Halong
8.	Wisata Goa Belawan	Desa Kapul Kecamatan Halong
9.	Telaga Pemujaan	Desa Kapul Kecamatan Halong
10.	Watu Braii	Desa Hauwai Kecamatan Halong
11.	Puncak Baringin	Desa Puyun Kecamatan Halong
12.	Pisang Tulis Belibing	Desa Hauwai Kecamatan Halong
13.	Air Panas	Desa Kapul Kecamatan Halong
14.	Gua Berangin Belawan	Desa Liyu Kecamatan Halong
15.	Batu Begantung	Desa Liyu Kecamatan Halong
16.	Banyu Babau	Desa Liyu Kecamatan Halong



17.	Air Panas	Desa Liyu Kecamatan Halong
18.	Air Terjun Sidandu	Desa Puyun Kecamatan Halong
19.	Wisata Goa	Desa Marajai Kecamatan Halong
20.	Puncak Gunung Hauk	Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi
21.	Arus Deras Nanai	Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi
22.	Kampung Anggrek	Desa Liyu Kecamatan Halong
23.	Air Terjun Batu Bainggi	Desa Dayak Pitap
24.	Danau Baruh Bahinu	Desa Binjai Kecamatan Parsel
25.	Gunung Batu Sungsum	Desa Gunung Batu Sungsum Kec.Tebing Tinggi

Tabel 2. 10
Wisata Agro Dan Buatan Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Nama Tempat Wisata	Lokasi
1.	Buper Eks Tambang Batubara	Kecamatan Paringin
2.	Tugu Perjuangan Rakyat Paringin	Kecamatan Paringin
3.	Hutan Kota Balangan	Kecamatan Paringin
4.	Taman Hijau Balangan	Kecamatan Paringin Selatan
5.	Danau Tampang	Desa Tampang, Kec. Lampihong
6.	Waterpark Ar-Raudah	Kelurahan Paringin Kota, Paringin
7.	Danau Tangkup	Desa Lok Haur Lampihong

Tabel 2. 11
Wisata Sejarah Dan Budaya Kabupaten Balangan Tahun 2021

10	Nama Tempat Wisata	Lokasi
1.	Benteng Tundakan	Desa Tundakan, Kec. Awayan
2.	Aruh Adat Dayak Meratus Halong	Desa Kapul, Kec. Halong
3.	Aruh Adat Dayak Pitap	Desa Dayak Pitap, Kec. T.Tinggi
4.	Aruh Adat Dayak Deah	Desa Liyu, Kec. Halong
5.	Rumah Bubungan Tinggi Tarangan	Desa Tarangan Kec. Paringin Selatan
6.	Pahajatan	Desa Tungkap, Kec. Paringin Selatan
7.	Rang Pitu (Sumur Magis)	Desa Liyu, Kec. Halong
8.	Desa Wisata Budaya Wadian Tambai	Desa Kapul Kecamatan Halong



Tabel 2. 12
Wisata Religius Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Nama Tempat Wisata	Lokasi
1.	Makam Datu Kandang Haji	Desa Teluk Bayur Kec. Juai
2.	Makam Datu Martika	Desa Tampang Kec. Lampihong
3.	Mesjid Syuhada Kyai Martasura	Desa Hujan Mas Kec. Paringin
4.	Mesjid Al-Akbar (Islamic Centre)	Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan
5.	Makam Datu Amir Husin	Desa Lampihong Kanan Kec. Lampihong
6.	Mesjid Jannatul Ma'wa	Desa Buntu Karau, Kec. Juai
7.	Mesjid Bangkal	Desa Bangkal, Kec. Halong
8.	Kubah Makam K.H.Tarmiji	Desa Nungka Kecamatan Awayan

Tabel 2. 13
Objek wisata Yang Mendapatkan SK Pokdarwis

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi
1.	Desa Wisata Wadian Tambai	Desa Kapul, Kecamatan Halong
2.	Air Terjun Tayak	Desa Uren, Kecamatan Halong
3.	Gunung Hauk & Arus Deras Nanai	Desa Ajung, Kecamatan Tebing Tinggi
4.	Riam Bainggi	Desa Dayak Pitap, Kecamatan Tebing Tinggi
5.	Gua gunung batu	Desa Sungsum, Kecamatan Tebing Tinggi
6.	Desa Wisata Rano Liyu	Desa Liyu, Kecamatan Halong
7.	Baruh Bahinu Binjai	Desa Binjai, Kecamatan Paringin Selatan
8.	Taman Bunga	Desa Tampang, Kecamatan Lampihong
9.	Racah Mampulang	Desa Balida, Kecamatan Paringin
10.	Gunung Belawan	Desa Kapul, Kecamatan Halong

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Balangan, 2021

2.1.1.3 Rencana Penggunaan Lahan

A. Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan di Indonesia umumnya memiliki karakteristik urban (perkotaan) dan rural (perdesaan) yang saling berkaitan. Kondisi tersebut juga terjadi di wilayah perencanaan, berdasar pada karakteristik Kabupaten Balangan tersebut maka perlu untuk dilakukan arahan sistem penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan agar kegiatan perkotaan dan perdesaan di wilayah perencanaan dapat saling bersinergi sehingga disparitas pertumbuhan wilayah perdesaan dan perkotaan dapat tereliminir. Sistem penetapan kawasan perkotaan dan perdesaan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan ini menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual yang dikemukakan oleh beberapa ahli tata ruang. Berikut akan dipaparkan konsep-konsep serta teori yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan di wilayah perencanaan.

1. Kawasan Perdesaan

Perdesaan merupakan suatu bagian wilayah yang tidak berdiri sendiri. Suatu wilayah bisa disebut perdesaan karena mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan perkotaan. Pengertian desa menurut Kamus Tata Ruang (1997) adalah permukiman kecil di luar kota, jumlah penduduknya terbatas, luas daerah geografisnya terbatas, kepadatan penduduk rendah, berpola hubungan tradisional, mata pencaharian utama dibidang pertanian. Dalam pengembangan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak otomatis ini menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan perdesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan.

2. Kawasan Perkotaan

Menurut Draft RPP pengelolaan dan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan (2001), pengertian Kota adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah bercirikan perkotaan, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar hasil kajian dengan menggunakan pendekatan konsep dan teori mengenai kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan diatas, maka ditetapkan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Balangan sebagai berikut.

- a) Kawasan perkotaan ditetapkan adalah perkotaan Paringin.

- b) IKK pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan.
- c) Kawasan perdesaan adalah seluruh wilayah administrasi desa di Kabupaten Balangan, selain dari wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan.

Arahan pengembangan sistem perdesaan adalah penataan struktur ruang perdesaan sebagai sistem pusat kegiatan di perdesaan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di perdesaan. Sistem pusat kegiatan di desa pusat pertumbuhan secara spasial sudah dapat dikembangkan dalam subcluster of services, dengan infrastruktur/kegiatan pelayanan yang dikembangkan antara lain pelayanan kegiatan finansial seperti kantor kas, kegiatan perdagangan dalam bentuk kawasan pertokoan yang dapat melayani wilayah yang lebih luas. Permukiman disekitar pusat desa dapat dikembangkan dalam sistem cluster, sehingga tidak mengganggu lahan pertanian yang ada disekitarnya. Intensitas kegiatan dikelola dalam perpektif pemberdayaan kegiatan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan kawasan produksi di sekitarnya ataupun di desa lain yang secara struktural menjadi wilayah belakang yang dilayani oleh pusat kegiatan desa ini.

Pengelolaan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan di kawasan perdesaan. Pengelolaan sistem perdesaan di Kabupaten Balangan akan dikembangkan dengan konsep pengembangan desa-desa agropolis. Pengembangan desa agropolis secara struktural akan terkait pula dengan pengembangan interaksi desa-kota, dan membuat keterkaitan antar pusat-pusat permukiman tersebut dalam pola sistem jaringan (network system), sesuai dengan konsep penataan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Balangan dan pola pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang diarahkan dapat memicu perkembangan wilayah yang berbasis pada sektor primer.

Pengembangan sistem perdesaan dibedakan atas tipologi kegiatan yang akan dikembangkan, yaitu pengembangan sistem pusat permukiman pada desa pertanian, desa industri, dan desa wisata.

Desa-desa pertanian secara umum akan berada pada kawasan dengan karakter rural murni dengan kegiatan murni produksi pertanian (sektor basis). Sehingga pada desa pertanian sistem pusat permukiman akan berkembang untuk skala unit desa. Fungsi pusat permukiman pada desa pertanian diarahkan untuk pelayanan permukiman yang menyebar di sekitar daerah pertanian (*farm village type*), maka pada kawasan tersebut dapat difungsikan sebagai pusat permukiman



pada desa pertanian, berupa pusat pelayanan pemerintahan, pengembangan pasar/perdagangan skala desa, pelayanan kesehatan setara puskesmas/puskesmas pembantu.

Desa industri dimungkinkan akan berkembang dengan kegiatan industri berbasis pertanian. Desa industri ini lebih prospektif dikembangkan untuk menjadi desa pusat pertumbuhan. Sistem pusat permukiman diarahkan dapat melayani skala beberapa pusat permukiman desa pertanian. Sehingga secara hirarki pusat permukiman desa industri lebih tinggi dari pusat permukiman di desa pertanian murni.

Pusat-pusat permukiman di desa industri diarahkan terhubung satu dengan yang lainnya, dan secara struktural diarahkan berinteraksi kuat dengan kota-kota kecil atau besar di sekitarnya. Pusat permukiman di desa yang dimungkinkan dikembangkan kegiatan industri pengolahan pertanian, juga diarahkan untuk dikembangkan kegiatan perdagangan dan sebagai pusat koleksi hasil produksi dari berbagai desa pertanian yang ada disekitarnya. Setiap pusat pelayanan dikembangkan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial-ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

Desa wisata kedepan merupakan kawasan perdesaan yang sangat potensial untuk berkembang dan dikembangkan di wilayah perencanaan, mengingat potensi sektor pariwisata yang dimiliki di wilayah perencanaan cukup besar. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat saling bersinergi dan berinteraksi dengan desa pertanian dan desa industri, baik secara spasial dan khususnya secara ekonomi.

Tabel 2. 14
Sistem Perkotaan Perdesaan di Kabupaten Balangan

Peran	Perkotaan
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Paringin (Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan)
Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	Batumandi (Kecamatan Batumandi)
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	1. Muara Pitap berada di Kecamatan Paringin Selatan 2. Simpang Tiga berada di Kecamatan Lampihong 3. Putat Basiun berada di Kecamatan Awayan 4. Tebing Tinggi berada di Kecamatan Tebing Tinggi 5. Mungkur Uyam berada di Kecamatan Juai 6. Halong berada di Kecamatan Halong



Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	1. Mantimin berada di Kecamatan Batumandi 2. Pudak berada di Kecamatan Awayan 3. Bihara berada di Kecamatan Awayan 4. Tabuan berada di Kecamatan Halong 5. Mauya berada di Kecamatan Halong 6. Haur Batu berada di Kecamatan Paringin 7. Gunung Pandau berada di Kecamatan Paringin Selatan 8. Layap berada di Kecamatan Paringin 9. Bungin berada di Kecamatan Paringin Selatan

Sumber : RTRW Kabupaten Balangan, 2014

Dalam Sistem Perkotaan, di dalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, mengarahkan Kota Paringin sebagai PKL. Kota Paringin sebagai PKL harus memenuhi kriteria :

- a) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten dan atau beberapa kecamatan.
- b) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten dan atau beberapa kecamatan.

Kawasan Perkotaan Paringin, meliputi perkotaan secara fungsional, yaitu Kelurahan Paringin Kota dan Kelurahan Paringin Timur di Kecamatan Paringin, dan Kelurahan Batu Piring di Kelurahan Paringin Selatan. Kawasan Perkotaan Batumandi meliputi Desa Batumandi dan Desa Teluk Mesjid di Kecamatan Batumandi merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yang dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp).

Dalam sistem struktur ruang yaitu pembentukan peran dan fungsi perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan. Prioritas pembangunan sistem perkotaan di Kabupaten Balangan meliputi

- a) Mempercepat pengembangan Perkotaan Paringin dan Batumandi sebagai PKL dan PKLp melalui pengembangan paringin baru dan Batumandi sebagai Kota Agropolitan.
- b) Mendorong dan mempercepat pengembangan perkotaan Batumandi sebagai fungsi PKLp dan PPK sebagai kota tani dan jasa industri agribisnis (pengolahan pertanian) dengan daerah hinterland nya.
- c) Mendorong pengembangan perkotaan Halong dan Tebing Tinggi sebagai perkotaan dengan fungsi PPK yang didukung dengan pengembangan Kawasan

Strategis Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan Industri Ekowisata berbasis sumberdaya alam.

- d) Meningkatkan pengembangan kota-kota yang berperan sebagai PPL yang ada disekitar pertumbuhan perkotaan dengan fungsi PPK maupun desa-desa pendukungnya, melalui pengembangan sistem jaringan jalan dan sistem jaringan transportasi.

Sesuai dengan potensi dan kondisi fisik alami daerah lingkungan yang ada serta prioritas wilayah, maka Kabupaten Balangan dalam kerangka pembangunan jangka panjang terbagi beberapa fungsi dan peran wilayah sesuai dengan potensi dan kondisi wilayahnya, yaitu

- a) Wilayah Kecamatan sebelah selatan dan barat yang meliputi kecamatan Batumandi dan Lampihong dengan kegiatan utama yang dikembangkan di wilayah ini antara lain: mendorong pertanian berkelanjutan pada dan agroindustri (investasi industri pengolahan dan industri pertanian), mendorong pertumbuhan aktivitas pertanian tanaman pangan.
- b) Wilayah Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan sebagai pusat kota yang dilayani oleh sistem jaringan jalan lingkaran timur dan lingkaran barat, perlu dilakukan pengendalian terhadap meningkatkan aktivitas pembangunan kawasan-kawasan perumahan.
- c) Kecamatan Paringin, perlu dilakukan pengendalian dampak aktivitas pertambangan dari perusahaan-perusahaan pertambangan.
- d) Wilayah Batumandi, Lampihong, Paringin Selatan dan sepanjang DAS Sungai Balangan perlu didorong pertumbuhan aktivitas perikanan.
- e) Wilayah kecamatan Awayan dan Juai merupakan basis komoditas karet di Kabupaten Balangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), diatur melalui Sistem Jaringan Transportasi Nasional (Sistranas) mengenai jaringan jalan nasional terdiri atas jalan arteri primer, kolektor primer, jalan strategis nasional, dan jalan tol.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi darat di Kabupaten Balangan meliputi :

- a) Jaringan jalan dan jembatan
- b) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
- c) Jaringan layanan lalu lintas

Rencana pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Balangan meliputi :

- a) terminal penumpang tipe C di Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin;
- b) rencana pengembangan terminal penumpang tipe B di Kelurahan Batu Piring atau Desa Haur Batu; dan
- c) rencana pengembangan sub terminal penumpang di Desa Batu Mandi, Desa Halong, Desa Simpang Tiga, Desa Mungkur Uyam, Desa Putat Basiun, Desa Simpang Nadung;

Rencana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi rencana pengembangan terminal barang di Desa Haur Batu di Kecamatan Paringin dan rencana jaringan layanan lalu lintas di Kabupaten Balangan antar kecamatan.

B. Jaringan Energi

Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan meliputi standar kebutuhan perencanaan listrik yang mencapai kapasitas rumah tangga mencapai 900 watt, untuk fasilitas umum mencapai 30% dari fasilitas rumah tangga, untuk penerangan jalan mencapai 2% dari rumah tangga. Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan disuplai oleh 2 (dua) Gardu Induk yaitu GI Tanjung di Kabupaten Tabalong dan GI Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan jaringan transmisi adalah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan GI Amuntai dan dan GI Tanjung.

Adapun perencanaan pengembangan jaringan energi di Kabupaten Balangan dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat diantaranya dilakukan dengan :

- a) Penambahan daya dan jaringan energi listrik di seluruh kecamatan disesuaikan dengan demand;
- b) Pengembangan sistem distribusi tenaga listrik di Kabupaten Balangan;
- c) Pembangunan jaringan energi listrik; (di sebagian Kecamatan Halong dan sebagian Kecamatan Tebing Tinggi);
- d) Pengusahaan listrik masuk desa dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat;
- e) Prasarana energi dapat dibangun bersamaan dengan dan atau memanfaatkan jaringan jalan guna memudahkan distribusi pada wilayah-wilayah pelayanan;

- f) Pengusahaan partisipasi badan-badan usaha (negeri dan swasta) untuk berperan dalam pelayanan listrik; dan
- g) Mengusahakan sumber energi sebagai pengganti energi bahan bakar minyak, meliputi energi tidak terbarukan (batubara, gas metan, dll), dan terbarukan (tenaga air, tenaga matahari, bio gas, bio diesel dan limbah);
- h) Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana energi dan sistem jaringan energi disiapkan dengan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten.

C. Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi kabupaten terdiri dari sistem jaringan kabel dan nirkabel. Adapun perencanaan untuk peningkatan pelayanan jaringan kabel berupa pelayanan telepon umum dan layanan sambungan tak bergerak (fixed/mobile telephone) dilakukan oleh PT. Telkom yaitu meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis meliputi Kecamatan Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Juai, dan Kecamatan Batu Mandi dalam rangka meningkatkan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat dan dunia usaha.

Eksisting menara BTS di Kabupaten Balangan ada di Kecamatan Lampihong (Desa Simpang Tiga dan Desa Lajar), Juai (Desa Marias, Desa Mungkur Uyam, Desa Tawahan), Halong (Desa Halong), Paringin Selatan (Desa Margo Mulyo, Desa Harapan Baru), Paringin (Desa Balida, Kelurahan Paringin Kota, Desa Lesung Batu dan Desa Dahai), Awayan (Desa Pandam, Desa Pulantan, Desa Putat Basiun), Batumandi (Desa Batumandi, Desa Mampari). Direncanakan untuk kedepannya pembangunan menara BTS di setiap desa-desa pusat pertumbuhan dan desa-desa pelosok dalam rangka meningkatkan pelayanan telekomunikasi.

Sedangkan untuk perencanaan sistem jaringan nirkabel dalam hal ini adalah *mobile cellular service* oleh operator cellular berupa peningkatan jaringan dan cakupan pelayanan melalui pembangunan *base transceiver station* (BTS) yang dapat diuraikan sebagai berikut

- a) Pembangunan menara jaringan telekomunikasi/ BTS meliputi Kelurahan Batu Piring, Kelurahan Paringin Timur, Desa Tabukan, Desa Mauya, Desa Simpang Nadung, Desa Tebing Tinggi, dan Dayak Pitap;

- b) Rencana pengembangan menara jaringan telekomunikasi untuk melayani kebutuhan telekomunikasi pada desa-desa pusat pertumbuhan dan terutama pada wilayah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi; dan
- c) Rencana pengembangan serat optik yang meliputi Kecamatan Batu Mandi, Paringin Selatan dan Paringin

D. Jaringan Sumber Daya Air

Jaringan sumber daya air meliputi wilayah sungai, cekungan air tanah, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air minum, dan sistem pengendalian banjir. Wilayah sungai (WS) Kabupaten Balangan adalah WS Barito mencakup Daerah Aliran Sungai Barito. Cekungan Air Tanah Kabupaten Balangan adalah Cekungan Air Tanah Palangkaraya-Banjarmasin. Jaringan irigasi Kabupaten Balangan dibagi menjadi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu D.I. Bendung Pitap di Kecamatan Awayan yang merupakan penggabungan dari beberapa jaringan irigasi, meliputi : D.I. Paringin; D.I. Putat Basiun; D.I. Lok Batu; dan D.I. Sikuntan.

Sedangkan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten yang terdiri dari : D.I. Batu Mandi; D.I. Lok Batu; D.I. Paran; D.I. Suapin; dan D.I. Tundakan. Untuk meningkatkan ketersediaan jaringan irigasi direncanakan pembangunan Bendung Bihara dalam rangka mengatasi permasalahan air pada daerah hulu agar pembagian aliran ke daerah hilir dapat terbagi dengan baik. Bendung Pitap yang merupakan bendung nasional dalam jaringan irigasi nasional yang meliputi saluran irigasi primer dan sekunder.

Rencana pengembangan jaringan irigasi meliputi :

- a) rencana pengembangan kapasitas jaringan irigasi provinsi di Bendungan Balangan;
- b) rencana pengembangan daerah irigasi (DI) Provinsi berupa D.I Bendung Pitap;
- c) rencana pengembangan saluran rawa provinsi di Kecamatan Batu Mandi;
- d) rencana pengembangan daerah rawa di Kecamatan Batu Mandi;
- e) Rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi yang ada; dan
- f) Pengembangan daerah irigasi pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan.

Rencana jaringan air baku untuk air minum meliputi

- a) rencana pengembangan sumber air baku, (Bendung Pitap, Bendung Bihara; dan Sungai Balangan
- b) Saluran Air Baku (SAB) Perusahaan Air Minum di Balangan yang merupakan Saluran Air Baku (SAB) nasional dalam jaringan air bersih nasional.

Sistem pengendalian banjir, meliputi : pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir di seluruh sungai rawan banjir; dan normalisasi sungai-sungai di kabupaten meliputi sungai Balangan.

E. Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan terdiri dari sistem pengelolaan persampahan, sistem jaringan air minum, sistem drainase, sistem jaringan air limbah, jalur evakuasi bencana, sistem proteksi kebakaran.

1) Rencana sistem pengelolaan persampahan

Sistem pengelolaan persampahan meliputi rencana pengembangan sistem jaringan prasarana persampahan berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Batu Merah di Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong dengan cakupan pelayanan Kabupaten Balangan. Sistem pengelolaan direncanakan menggunakan sistem *sanitary landfill* untuk sampah domestik dan sampah non domestik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPA sistem *sanitary landfill* dan TPA sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;

Rencana pengembangan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) diarahkan untuk diletakkan di pusat-pusat permukiman dan pusat kegiatan di seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan. Sedangkan pada fasilitas- sosial dan fasilitas umum wajib dilengkapi dengan menempatkan sarana persampahan berupa container minimal tempat sampah/ bak sampah. Untuk memudahkan pembuangan sampah dan penerapan konsep 3R maka untuk TPS diterapkan sistem pemilahan sampah, untuk sampah kering, sampah basah, sampah yang bisa didaur ulang.

Rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dengan konsep 3 R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) yaitu mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang yang terdapat di seluruh kecamatan dan di pusat” permukiman. Kondisi saat ini masih terkendala dalam hal pengurangan sampah karena minimnya sarana TPS 3R, yang terbangun hanya 6 buah di 6 kecamatan, sedangkan target minimal 2 buah

TPS 3R di setiap kecamatan dan di permukiman padat penduduk. Disamping itu mengaktifkan pemilahan sampah sebelum dibuang ke TPA juga harus diprioritaskan mengingat volume sampah yang dibuat ke TPA sangat banyak dan menyebabkan umur TPA menjadi lebih pendek dari seharusnya. Pengembangan ulat magot dari bank sampah saat ini mulai digalakkan untuk mengurangi kasus sampah organik yang menggunung. Disamping itu permintaan akan ulat magot sebagai pakan ternak juga semakin meningkat.

Kondisi TPA Batu merah yang sudah hampir penuh atau lebih singkat dari umur rencana perlu segera disikapi dengan manajemen operasional, terutama pemenuhan akan alat berat bulldozer untuk memadatkan tumpukan sampah. Kemudian dari segi pengangkutan diperlukan adanya sistem pengaturan dan penjadwalan untuk pengambilan sampah sehingga sampah tidak sempat menumpuk karena tidak terangkut. Selain itu juga perlu diperhatikan manajemen organisasi operasional kebersihan dan persampahan yaitu peningkatan koordinasi dan kerjasama instansi operasional kebersihan dan peningkatan peran masyarakat dan swasta untuk pengelolaan persampahan.

2) Rencana sistem jaringan air minum

Rencana sistem jaringan air minum dapat dijelaskan sebagai berikut

- a) Saluran Air Baku (SAB) perusahaan air minum Balangan yang merupakan Saluran Air Baku (SAB) nasional dalam jaringan air bersih nasional;
- b) rencana jaringan air bersih ke kelompok pengguna berupa Rencana Instalasi Pengolahan Air (IPA) bersih,
- c) penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat berupa penyediaan sarana air bersih meliputi sumur bor, sumur gali dan hidran umum di seluruh Kecamatan di Kabupaten Balangan.

F. Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung menurut Keppres No. 32/1990, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, kawasan suaka laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam,

kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan kawasan rawan bencana. Berdasarkan Kemhut No.453/Kpts-II/1999 Kawasan Hutan di Kabupaten Balangan seluas 90.643 Ha yang terdiri atas HL = 51.938 Ha; HP = 31.195 Ha; dan HPT = 7.510 Ha. Dan jika berdasarkan Kemhut No.435/Kpts-II/2009 Kawasan Hutan di Kabupaten Balangan seluas 90.373 Ha yang terdiri atas HL = 65.791 Ha; HP = 24.568 Ha; dan HPT = 24 Ha.

Sedangkan jika berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 Wilayah Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan berdasarkan daerah limitasi yang meliputi 77.840,77 ha atau sekitar 41,44 % dari keseluruhan luas Kabupaten Balangan. Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan tersebar di seluruh bagian Kabupaten Balangan meliputi Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Rawan Banjir, dan Rawan Longsor di Kecamatan Awayan 18.698,7 (24 %); Kecamatan Batu Mandi 766,8 (0,9 %); Kecamatan Halong 41.676,9 (53,5 %); Kecamatan Juai 5.254,7 (6,7 %); Kecamatan Lampihong 3.345,2 (4,3 %); Kecamatan Paringin Selatan 3.836,7 (4,9 %); Kecamatan Paringin 3.143,3 (4 %); dan Kecamatan Tebing Tinggi 1.118,2 (1,4 %).

G. Rencana Kawasan Budidaya

Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya di Kabupaten Balangan masih tetap memperhatikan kecenderungan pemanfaatan ruang saat ini. Berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 rencana kawasan budidaya di Kabupaten Balangan sebesar 109.989,23 ha atau sebesar 58,56 %, yang tersebar diseluruh daerah di Kabupaten Balangan. Adapun sebaran kawasan budidaya meliputi Kecamatan Awayan 11.162 Ha (10 %); Kecamatan Batu Mandi 10.519 Ha (9,56 %); Kecamatan Halong 31.553 Ha (28,69 %); Kecamatan Juai 17.546 Ha (15,95 %); Kecamatan Lampihong 7.895 (7,18 %); Kecamatan Paringin Selatan 6.539 Ha (5,59 %); dan Kecamatan Paringin 11.073 Ha (10,07 %) dan Kecamatan Tebing Tinggi 13.698 Ha (12,45 %).

Perwujudan pola ruang kawasan budidaya dalam RTRW Kabupaten Balangan adalah meliputi Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perkebunan/Tanaman Tahunan, Kawasan Peternakan dan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Permukiman.

2.1.1.4 Wilayah Rawan Bencana

Lokasi Kawasan bencana di Kabupaten Balangan secara umum berada di wilayah Kabupaten Balangan bagian Timur dan tengah tepatnya di Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi, Sedangkan potensi rawan bencana lainnya adalah rawan banjir yang berada pada areal sekitar Sungai Balangan dan Sungai Pitap yakni sekitar Kecamatan Lampihong, Paringin dan Kecamatan Juai. Berikut merupakan rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Balangan:

- a) Perkembangan penduduk perlu diawasi dan dikendalikan dan atau menghutankan Kawasan Rawan Bencana Alam dengan cara reboisasi.
- b) Pencegahan terhadap longsor dapat memanfaatkan unsur alam, seperti penanaman pohon pada wilayah potensial longsor.
- c) Pengembangan organisasi masyarakat, yang siap dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.
- d) Pembuatan Check Dams penahan erosi di lereng gunung dan celah antar bukit dan atau pembuatan DAM penahan dan kantong-kantong pasir yang mengatur erosi di daerah pegunungan.
- e) Membangun sumur resapan di area pemukiman untuk meresapkan air hujan ke tanah.
- f) Melindungi dan meningkatkan fungsi hutan sebagai sarana penyimpanan air.
- g) Menjaga kolam-kolam penampungan dan rawa sebagai penyangga air dan sumber air sungai.
- h) Membangun checkdam di hulu untuk menghambat aliran sediment ke hilir.
- i) Konservasi tumbuhan pada daerah aliran sungai sebagai daerah peresapan air.

A. Kebakaran

Potensi bencana kebakaran biasa disebabkan karena kondisi lingkungan yang memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan jarak antar bangunan yang sangat dekat. Kawasan yang rentan terhadap bencana kebakaran, rata-rata adalah kawasan kumuh yang memiliki kondisi fisik bangunan yang terbuat dari kayu, serta memiliki jarak antar bangunan yang sangat rapat. Kebakaran terjadi diseluruh kecamatan di Kabupaten Balangan. Bencana kebakaran di Kabupaten Balangan tercatat dalam Kabupaten Balangan dalam angka memiliki rata-rata frekuensi terjadi bencana kebakaran dalam kurun waktu lima tahun sebanyak 107 kali. Frekuensi kebakaran paling tinggi terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 29 kali (lihat Tabel 2.10). Frekuensi kebakaran dari Tahun 2016-2019 semakin



meningkat, kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kondisi fisik bangunan, dimana perumahan khususnya perumahan perkampungan dan perumahan di kawasan kumuh yang terdapat di Kabupaten Balangan masih menggunakan bahan dasar dari kayu. Selain itu juga dari hasil survey lapangan terhadap kawasan kumuh terhadap jarak antar bangunan di Kabupaten Balangan, tercatat sekitar 60% rumah dikawasan kumuh Kabupaten Balangan memiliki jarak antar bangunan berkisar antara 1-2,5 meter dan juga pengaruh cuaca yang sangat dominan atau kemarau Panjang pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 frekuensi kebakaran menurun menjadi hanya 19 kali kejadian, dan pada tahun 2021 frekuensi kebakaran turun lagi dengan jumlah 12 kali kejadian.

Tabel 2. 15
Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Tiap Kecamatan di Kabupaten Balangan								
	Halong	Juai	Tebing Tinggi	Awayan	Batumandi	Paringin	Paringin Selatan	Lampihong	Jumlah
2016	2 Kali	-	-	2 Kali	2 Kali	2 Kali	-	2 Kali	10 Kali
2017	3 Kali	2 Kali	1 Kali	3 Kali	1 Kali	4 Kali	2 Kali	6 Kali	22 Kali
2018	7 Kali	2 Kali	1 Kali	4 Kali	6 Kali	4 Kali	1 Kali	2 Kali	27 Kali
2019	4 Kali	6 Kali	-	2 Kali	3 Kali	7 Kali	1 Kali	6 Kali	29 Kali
2020	4 Kali	2 Kali	-	2 Kali	1 kali	2 kali	3 Kali	5 Kali	19 Kali
2021	3 Kali	-	-	2 Kali	-	1 Kali	3 Kali	3 Kali	12 Kali

Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2016-2021 data diolah 2021

B. Banjir

Bencana banjir terjadi akibat beberapa faktor, berkaitan dengan jumlah curah hujan yang terjadi dengan daya tampung dari akuifer dan cekungan-cekungan ataupun alur sungai yang ada di daerah Kabupaten Balangan. Jumlah frekuensi bencana banjir di Kabupaten Balangan dari dari Tahun 2016-2020 adalah sebanyak 158. Jumlah banjir paling tinggi di Tahun 2017 yaitu sebanyak 87 kali (lihat Tabel 2.11) dimana pada tahun 2017 Kecamatan yang paling sering mengalami kejadian bencana Banjir pada tahun 2017 adalah Kecamatan Juai mengalami kejadian bencana banjir sebanyak 38 kali, Kecamatan Halong 22 kali dan kecamatan Lampihong sebanyak 20 kali, dan pada tahun 2021 ada sejumlah 47 kali kejadian banjir yang terdampak dibeberapa kecamatan diantaranya kecamatan Halong dan Juai.



Tabel 2. 16
Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana Banjir Tiap Kecamatan di Kabupaten Balangan								
	Halong	Juai	Tebing Tinggi	Awayan	Batumandi	Paringin	Paringin Selatan	Lampihong	Jumlah
2016	4 Kali	4 Kali	-	-	1 Kali	1 Kali	-	2 Kali	12 Kali
2017	22 Kali	38 Kali	-	2 Kali	-	3 Kali	2 Kali	20 Kali	87 Kali
2018	5 Kali	4 Kali	-	-	-	2 Kali	-	4 Kali	15 kali
2019	3 Kali	4 Kali	1 Kali	2 Kali	2 Kali	-	1 Kali	-	13 Kali
2020	2 Kali	10 kali	2 Kali	2 Kali	4 Kali	3 Kali	3 Kali	5 kali	31 kali
2021	9 kali	8 Kali	4 kali	7 Kali	3 Kali	4 Kali	10 Kali	3 Kali	47 Kali

Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2021

Setelah tahun 2017, potensi rawan bencana banjir di Kabupaten Balangan cenderung mengalami penurunan dimana tahun 2018 kejadian banjir sebanyak 15 kali dan di tahun 2019 kejadian banjir turun menjadi 13 kali bahkan ditahun 2019 Kecamatan Paringin dan Kecamatan Lampihong tidak mengalami kejadian bencana banjir, namun di 2020 meningkat menjadi 31 kali dan pada tahun 2021 Bencana Banjir secara keseluruhan (total) meningkat menjadi 47 Kali kejadian. Pada wilayah Kecamatan Paringin Selatan terjadi peningkatan jumlah kejadian pada tahun 2021 yaitu 10 kali, hal ini patut menjadi perhatian dan kewaspadaan bersama mengingat frekuensi banjir yang meningkat di wilayah Kecamatan Paringin Selatan. Potensi rawan bencana lainnya adalah banjir yang berada pada areal sektor sungai Balangan dan sungai Pitap. Tingkat potensi banjir di Kabupaten Balangan terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yakni potensi banjir dengan tingkat tinggi, tingkat menengah dan tingkat rendah (lihat Tabel 2.12). Tingkat potensi banjir yang terdapat di Kabupaten Balangan berada pada kisaran tingkat tinggi, menengah, dan rendah. Potensi banjir menengah terdapat disebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan yaitu Kecamatan Halong, Juai, Tebing Tinggi, Awayan, Lampihong dan Paringin Selatan. Potensi banjir rendah ada di Kecamatan Batu Mandi dan Kecamatan Paringin.

Tabel 2. 17
Daerah Potensi Banjir Di Wilayah Kabupaten Balangan

Kecamatan	Potensi Banjir		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Halong	Halong	Binju	Marajai
	Kapul	Binjai Punggal	Karya
	Liyu	Baruh Panyambaran	Palapi
	Bangkal	Malunyuk	Hauwai



	-	Bahan Hilir	Puyun
		Tabuan	
		Mauya	
		Mantuyan	
Juai	Teluk Bayur	Buntu Karau	
	Mungkur Uyam	Ninian	Mungkur Uyam
	Bata	Lalayau	Sirap
	Mihu		Marias
	Galumbang		Pamurus
	Juai		
Tebing Tinggi	-	Langkap	Gunung Batu
	-	Mayanau	Sungsum
		Ju'uh	Simpang Nadung
		Auh	Tebing Tinggi
			Campan
Awayan	-	Tundakan	Putat Basiun
		Ambakiang	Pasar Awayan
		Badalungga	Pulantan
		Badalungga Hilir	Muara Jaya
		Awayan	Piyait
			Tundakan Hulu
Paringin Selatan	-	Baruh Bahinu Dalam	Murung Abuin
		Tungkap	Bungin
		Tarangan	Kel. Batu Piring
		Kaladan	Murung Sari
			Binjai
			Telaga Purun
			Galumbang
Paringin	-	Paringin Timur	Layap
	-	Hujan Mas	Kalahiyang
	-	Teluk Keramat	Paran
			Lamida Bawah
			Lok Batu
			Babayau
			Kel. Paringin Kota
Batumandi	-	Banua Hanyar	Tariwin
	-	Teluk Mesjid	Lok Batu
	-	Batumandi	Riwa
			Kasai
			Bungur
			Mampari
Lampihong	Mundar	Matang Hanau Papuyuan Jimamun	Lok Hamawang Tanah Habang Kanan Tanah Habang Kiri



		Kusambi Hulu	Kandang Jaya Lajar Kusambi Hilir Simpang tiga Sungai Awang Teluk Karya Hilir Pasar Matang Lurus Sungai Tabuk Lampihong Kanan Pimping Maliau

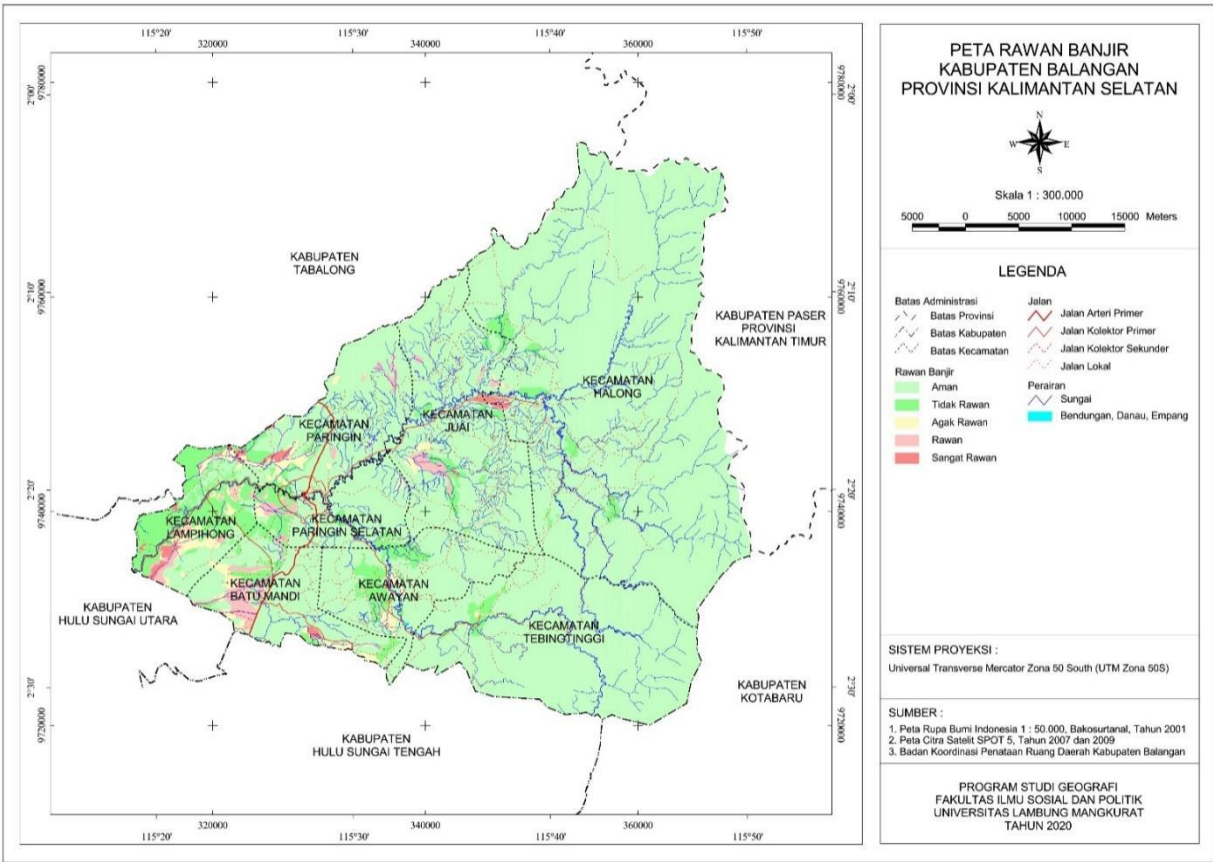
Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2021

Potensi banjir tinggi dengan sebaran terbanyak berada pada Kecamatan Juai, diikuti dengan Kecamatan Halong, dan sebagian kecil di Kecamatan Lampihong. Meningkatnya status potensi level banjir pada sebagian kecamatan diikuti dengan data jumlah desa yang terdampak banjir, secara keseluruhan dapat dicermati bahwa terjadi peningkatan tajam jumlah desa terdampak yakni 91 desa. angka ini paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan data ini didukung dengan jumlah desa dengan intensitas banjir cukup tinggi yang berada pada Kecamatan Halong, Juai, dan Lampihong. Data desa terdampak banjir dapat dilihat dibawah ini (Tabel 2.13. dan Gambar 2.6).

Tabel 2. 18
Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Banjir
Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan

Kecamatan	Tahun					
	2011	2014	2018	2019	2020	2021
Halong	12	18	19	3	6	17
Juai	8	9	14	5	11	13
Tebing Tinggi	4	7	5	1	-	9
Batu Mandi	-	4	7	4	5	7
Awayan	5	13	15	1	4	11
Lampihong	8	11	9	-	6	20
Paringin	-	4	2	2	3	10
Paringin Selatan	1	8	1	-	1	11
Total	38	74	72	16	36	91

Sumber : BPBD kabupaten Balangan, 2021



Gambar 2.6.

Peta Rawan Banjir Kabupaten Balangan

C. Tanah Longsor/ Tanah Amblas

Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Bagian utara timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yaitu Kecamatan

Halong, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan. Potensi tanah longsor dapat terjadi pada sekitar daerah kemiringan lereng 25-40 % dan lebih dari 40 % dengan ketinggian 500 mdpl. Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsor mendatar dan jatuhnya batuan.

Daerah rawan bencana di Kabupaten Balangan berupa tanah longsor atau gerakan tanah (erosi dan abrasi akibat tekanan arus air sungai) dan banjir. Kawasan bencana tanah longsor berada di bagian selatan timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yakni Kecamatan Halong, Tebing Tinggi dan Awayan, potensi dapat terjadi pada sekitar daerah kemiringan lereng 25 - 40% dan lebih dari 40% dengan ketinggian 500 mdpl. Jumlah desa yang mengalami kejadian tanah longsor di Kabupaten Balangan paling banyak di Tahun 2018 (lihat Tabel 2.14). Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah (*mass movement*) adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki stabilitas lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsor mendatar dan jatuhnya batuan.

Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Balangan terjadi disebagian besar kecamatan yaitu Kecamatan Halong, Juai, Awayan, Tebing Tinggi, Paringin, Paringin Selatan, Lampihong. Kecamatan yang tidak ditemukan bencana tanah amblas hanya di Kecamatan Batumandi dari Tahun 2016-2020 (lihat Tabel 2.15). Bencana tanah amblas paling tinggi terjadi pada Tahun 2018. Jumlah kejadian tanah amblas di Kabupaten Balangan dari Tahun 2015-2020 adalah sebanyak 52 kali, dan pada tahun 2021 jumlah kejadian tanah amblas berjumlah 10 Kali. Kejadian tanah longsor pada tahun 2021 terkonsentrasi di wilayah Halong dan Tebing Tinggi yang merupakan daerah dengan kontur dataran tinggi dan cenderung berbentuk perbukitan.

Tabel 2. 19
Jumlah desa yang mengalami Bencana Tanah Longsor
menurut Kecamatan Kabupaten Balangan

Kecamatan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Halong	3	-	-	2	4	4
Juai	-	-	1	-	2	-
Tebing Tinggi	-	3	2	-	-	6
Batu Mandi	-	-	-	-	-	-
Awayan	-	-	-	-	-	-
Lampihong	1	-	4	3	2	-
Paringin	-	-	1	1	2	-
Paringin Selatan	1	-	5	2	-	-
	5	3	13	8	10	10

Sumber : BPBD kabupaten Balangan, 2021

Tabel 2. 20
Jumlah Kejadian Bencana Tanah Amblas di Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana Tanah Amblas Tiap Kecamatan di Kabupaten Balangan								
	Halong	Juai	Tebing Tinggi	Awayan	Batumandi	Paringin	Paringin Selatan	Lampihong	Jumlah
2016	-	-	-	2 Kali	-	3 Kali	-	-	5 Kali
2017	3 kali	1 Kali	2 Kali	1 kali	-	5 Kali	5 Kali	1 Kali	18 Kali
2018	5 Kali	2 Kali	-	-	-	3 Kali	3 Kali	8 Kali	21 Kali
2019	1 Kali	-	-	-	-	-	3 Kali	4 Kali	8 Kali
2020	3 Kali	1 kali	-	-	-	4 Kali	-	2 Kali	10 kali
2021	4 Kali		6 Kali						

Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2021

D. Cuaca Ekstrim

Cuaca Ekstrim termasuk salah satu jenis bencana di Kabupaten Balangan. Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Balangan terjadi disebagian besar kecamatan yaitu Kecamatan Halong, Juai, Awayan, Batumandi, Paringin, Paringin Selatan, dan Lampihong. Kecamatan yang tidak ditemukan bencana cuaca ekstrim hanya di Kecamatan Tebing Tinggi dari Tahun 2016-2020 (lihat Tabel 2.16). Bencana cuaca ekstrim paling tinggi terjadi pada Tahun 2020. Tahun 2017 sama sekali tidak ditemukan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Balangan, untuk tahun 2021 ada 17 kali kejadian cuaca ekstrem dibeberapa wilayah desa dibeberapa kecamatan.

Tabel 2. 21
Jumlah Kejadian Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana Cuaca Ekstrem Tiap Kecamatan di Kabupaten Balangan								Jumlah
	Halong	Juai	Tebing Tinggi	Awayan	Batumandi	Paringin	Paringin Selatan	Lampihong	
2016	-	-	-	-	-	-	-	2 Kali	2 Kali
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	1 Kali	-	1 Kali	4 Kali	4 Kali	2 Kali	2 Kali	14 Kali
2019	4 Kali	1 Kali	-	1 Kali	5 Kali	3 Kali	8 Kali	4 Kali	26 Kali
2020	2 Kali	-	-	6 Kali	4 Kali	3 Kali	7 Kali	10 kali	32 kali
2021	2 Kali	-	-	3 Kali	3 Kali	3 Kali	2 Kali	4 Kali	17 Kali

Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2021

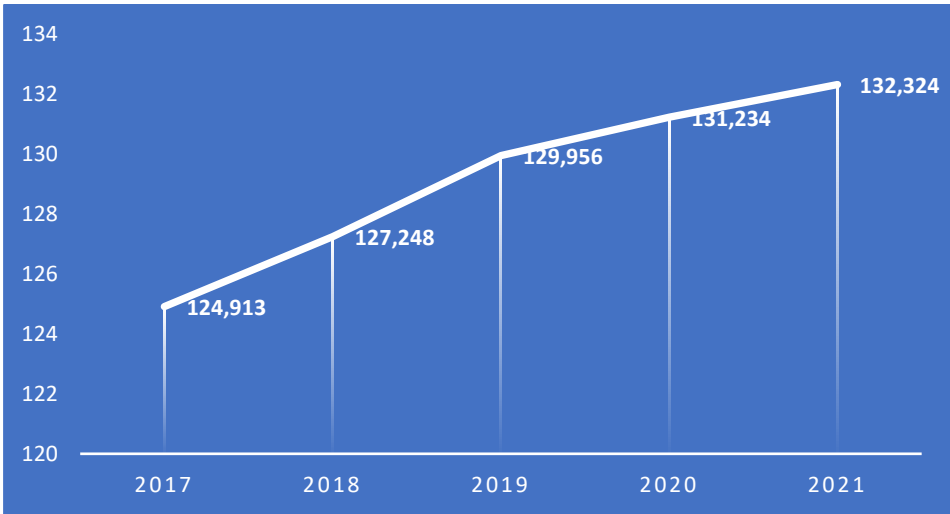
E. Angin Puyuh

Bencana angin puyuh di Kabupaten Balangan selama lima Tahun terakhir teradapat dua kejadian bencana Bencana Angin Puyuh yang terjadi di Kecamatan Paringin.

2.1.1.5 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2021 berdasarkan pada Data Agregat Kependudukan Semester II adalah 132.324 jiwa dengan jumlah tren mengalami peningkatan penduduk dari tahun ke tahun. Dengan luas wilayah 1.828,10 km², Balangan memiliki rata-rata kepadatan penduduk 70,33 jiwa per kilometer persegi. Perkembangan penduduk Balangan dari tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada gambar 2.7. berikut.

Gambar 2.7
Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan
Tahun 2017 – 2021 (jiwa)





Sumber : Agregat Kependudukan Kabupaten Balangan 2017 -2021

Tahun 2019 hingga tahun 2020 populasi penduduk Kabupaten Balangan mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 ke tahun 2021 populasi penduduk Kabupaten Balangan mengalami peningkatan. Tahun 2019 populasi penduduk Kabupaten Balangan sejumlah 131,43 (ribu), tahun 2020 sejumlah 130,36 (ribu), dan tahun 2021 sejumlah 132,21 (ribu) dengan luas Kabupaten Balangan sejumlah 1.828, 10 km². Penyebaran penduduk di Kabupaten Balangan paling besar berada pada Kecamatan Halong sebesar 15,56% atau 6.649 jiwa dengan jumlah 7.264 jiwa atau mencakup hanya 5,49 % dari jumlah penduduk Balangan. Populasi penduduk Kecamatan Halong sebesar 1,16%. Hal ini diikuti dengan luas wilayah kecamatan Halong sebesar 659,84 kilometer persegi atau 35,13% terhadap luas keseluruhan wilayah Kabupaten Balangan. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2020-2021 juga didukung terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya jumlah penduduk dari Kabupaten/Kota lain di dalam Kalimantan Selatan dan diluar daerah yang menetap di wilayah Balangan.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2021

Jenis Kelamin	2017	2018	2019	2020	2021
Laki-laki	64.219	65.191	66.325	65.905	66.821
Perempuan	63.284	64.314	65.103	64.450	65.392
Jumlah	127.503	129.505	131.428	130.355	132.213

Sumber : BPS Kab. Balangan Tahun 2022

Pada tahun 2021 Jumlah penduduk Kabupaten Balangan dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 50,54% atau 66.821 jiwa, sedangkan penduduk dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 49,46% atau 65.392 jiwa. Terdapat selisih sebanyak 1.429 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki memiliki angka tertinggi dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Perkembangan penduduk menurut kelompok umur menggambarkan jumlah komposisi usia dan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah. Pada Kabupaten Balangan sendiri memiliki piramida penduduk tipe ekspansif, hal ini sangatlah wajar mengingat usia Kabupaten Balangan yang masih muda dan secara umum Indonesia berstatus sebagai negara berkembang. Piramida penduduk tipe ekspansif memiliki ciri-ciri usia tua yang mengerucut atau lebih sedikit, sementara pada usia muda dan usia produktif cenderung lebih lebar atau lebih banyak



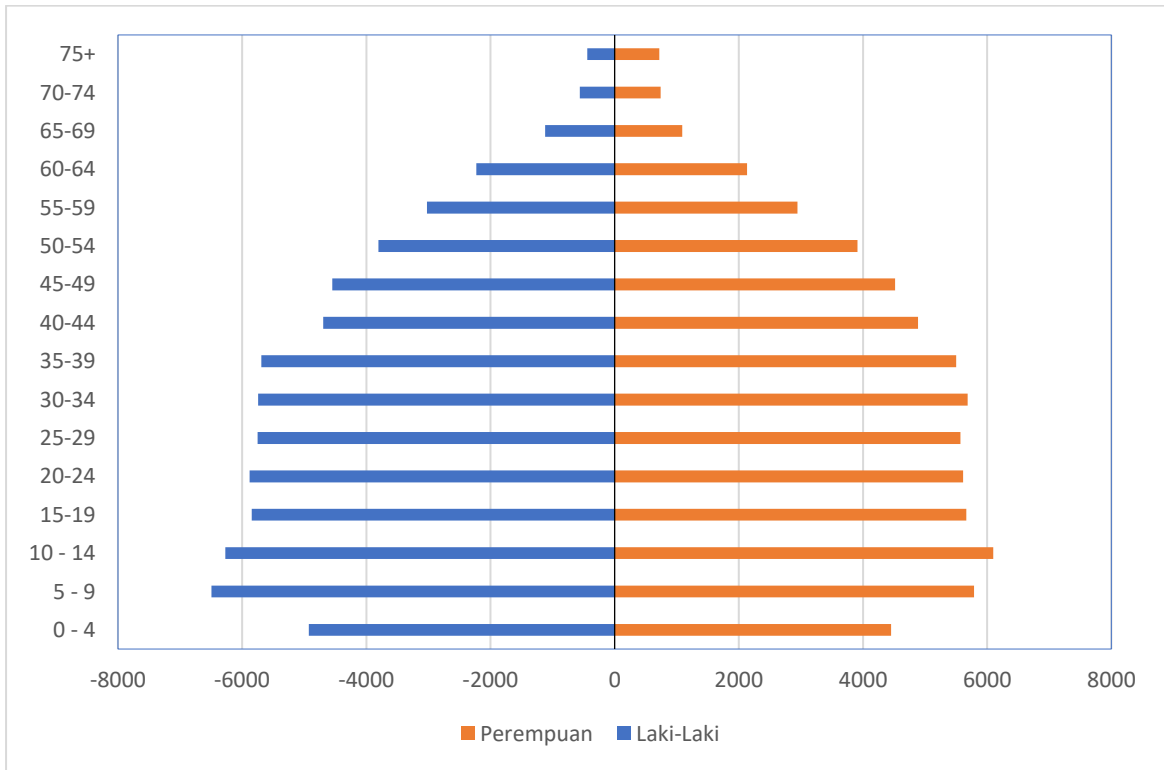
jumlahnya. Sehingga hal ini menggambarkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Balangan terkait dengan bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika masyarakat usianya lebih banyak pada kategori usia produktif, apabila kesempatan ini tidak dimaksimalkan bisa menjadi bumerang bagi daerah.

Tabel 2.18.
Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan
berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2017-2021

Usia	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
0-4	13.338	13.221	13.110	12.300	12.149
5-9	12.699	12.938	13.133	13.115	13.228
10-14	11.883	12.078	12.297	11.100	11.410
15-19	10.528	10.634	10.753	10.990	10.981
20-24	10.246	10.277	10.325	11.488	11.484
25-29	10.109	10.127	10.135	11.300	11.344
30-34	9.741	9.762	9.788	11.397	11.460
35-39	9.740	9.798	9.849	9.755	9.853
40-44	9.411	9.571	9.718	9.064	9.168
45-49	8.421	8.707	8.983	7.854	8.061
50-54	6.939	7.226	7.525	7.191	7.431
55-59	4.572	4.808	5.045	5.765	6.006
60-64	3.393	3.634	3.890	4.219	4.453
65-69	2.020	2.126	2.250	2.450	2.611
70-74	1.387	1.447	1.518	1.271	1.427
75+	1.107	1.149	1.186	1.096	1.147
Total	125.534	127.503	129.505	130.355	132.213

Sumber : Data BPS Kabupaten Balangan, 2021

Gambar 2.8
Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan
berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021



Sumber : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Balangan, 2021

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Balangan yang berdasarkan tingkat Pendidikan menggambarkan jumlah komposisi peningkatan taraf Pendidikan masyarakat yang lebih baik dan maju, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang melanjutkan Pendidikan sampai tahap perguruan tinggi, seperti tersaji pada tabel 2.19 berikut :

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2019	2020	2021
SD	43.326	43.515	42.965
SMP	19.370	18.481	18.792
SLTA	23.729	24.134	25.489
Perguruan Tinggi	8.663	6.415	8.905
Jumlah/ Total	95.058	92.545	96.151

Banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Balangan berdasarkan klasifikasi bukan Angkatan kerja meningkat dari tahun sebelumnya, yang berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran terbuka yang semakin menurun dari tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari tabel yang tersaji seperti dibawah ini :

Tabel 2.20

Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Angkatan Kerja

Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja	2019	2020	2021
Bukan Angkatan Kerja	25924	22341	23676
Bekerja	65072	70928	70707
Pengangguran Terbuka	1549	1789	1768

Penduduk Kabupaten Balangan mayoritas beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari data yang tersaji seperti dibawah ini :

Tabel 2.21

Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Menurut Agama yang dianut

Agama	2018	2019	2020	2021
Islam	122.855	123.985	124.776	125.054
Protestan	859	877	904	939
Katolik	259	272	275	267
Hindu	1.875	1.901	1.854	1.791
Budha	4.108	4.199	4.230	4.167
Lainnya	-	-	64	106
Jumlah	129.956	131.234	132.103	132.324

Sumber : BPS Kab. Balangan Tahun 2022

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB yang diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Kabupaten Balangan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2021 mencapai 11,75 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,03 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 10,72 triliun rupiah. Meningkatnya nilai PDRB ini dipengaruhi



oleh sektor pertambangan , industri pengolahan, informasi dan komunikasi, real estate, jasa Pendidikan dan jasa kesehatan. Namun Jika dilihat PDRB tanpa Batu Bara pada tahun 2021 sebesar 4,620 Triliun rupiah naik sebesar 2,15 Trilyun dibandingkan tahun 2020.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan, dari 9,18 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 9,48 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Balangan mengalami peningkatan ekonomi sekitar 0,3 %.

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Kondisi tersebut disandarkan pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi. Saat suatu kategori lapangan usaha yang mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Tabel 2. 22
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.186,81	1,250,01	1.326,25	1.311,57	1.406,44
B	Pertambangan dan Penggalian	6.259,74	6.680,77	6.680,58	6.317,73	7.130,83
C	Industri Pengolahan	200,61	207,48	213,25	212,25	231,37
D	Pengadaan Listrik, Gas	3,41	3,89	4,14	4,42	4,68
E	Pengadaan Air	23,37	25,99	28,20	30,15	30,50
F	Konstruksi	446,64	477,80	500,03	501,84	525,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	544,16	590,46	641,00	640,39	671,41
H	Transportasi dan Pergudangan	186,63	204,30	219,82	216,77	221,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32,34	36,44	39,45	40,27	41,73
J	Informasi dan Komunikasi	130,52	143,02	149,41	157,48	165,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	31,51	35,31	39,09	40,66	40,79
L	Real Estate	97,46	105,22	111,12	115,76	121,72
M,N	Jasa Perusahaan	6,90	7,70	8,62	8,68	9,12



O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	445,91	480,45	520,17	551,73	544,62
P	Jasa Pendidikan	326,07	350,09	378,60	396,31	416,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,73	94,59	103,49	110,42	122,26
R, S, T, U	Jasa Lainnya	53,00	58,17	64,45	65,42	66,85
PDRB		10.061,82	10.751,68	11.027,66	10.722,30	11.750,38
PDRB TANPA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN		3.802,08	4.070,91	4.347,08	4.404,57	4.619,55

Sumber : BPS Kab.Balangan, 2021

Tabel 2. 23
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah) 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	926,02	970,79	1.010,08	991,90	1.027,02
B	Pertambangan dan Penggalian	6.063,91	6.220,99	6.382,36	6,143,65	6.379,57
C	Industri Pengolahan	137,22	141,59	144,75	140,77	146,76
D	Pengadaan Listrik, Gas	2,17	2,34	2,45	2,55	2,65
E	Pengadaan Air	17,39	18,63	20,05	21,27	21,38
F	Konstruksi	324,61	332,34	340,00	339,68	342,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	378,77	392,78	412,45	407,92	412,95
H	Transportasi dan Pergudangan	134,87	141,49	148,58	145,31	147,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23,88	25,45	27,35	27,28	27,64
J	Informasi dan Komunikasi	105,97	110,35	114,59	122,32	128,69
K	Jasa Keuangan da Asuransi	22,06	23,88	25,78	26,94	25,86
L	Real Estate	75,04	79,14	81,40	83,42	86,25
M,N	Jasa Perusahaan	4,66	5,02	5,42	5,28	5,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	296,87	308,07	328,66	340,48	331,63
P	Jasa Pendidikan	233,54	244,42	255,91	265,57	271,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61,32	64,83	68,28	72,28	78,70
R, S, T, U	Jasa Lainnya	36,45	39,06	41,75	41,26	41,69
PDRB		8.844,75	9.121,16	9.409,83	9.177,87	9.477,29
PDRB TANPA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN		2.780,84	2.900,17	3.027,47	3.034,22	3.097,72

Sumber : BPS Kab. Balangan, 2021

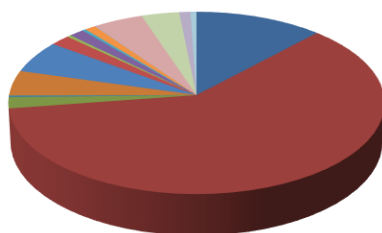
Pada saat kondisi tersebut terjadi, maka sebetulnya telah berjalan proses restrukturisasi / rebalancing dalam perekonomian wilayah. Pada umumnya, seiring pembangunan yang berlangsung, proses tersebut berjalan diawali dengan membesarnya pangsa kelompok kategori primer kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa kelompok kategori sekunder dan tersier



(misalnya kategori industri dan jasa). Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan perubahan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama.

Namun demikian, pada prakteknya kondisi tersebut tidak selalu berjalan. Kondisi yang dijelaskan di atas, berlangsung di Kabupaten Balangan. Bukti nyata terlihat dari mulai menurunnya distribusi PDRB kelompok kategori primer yakni kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori lapangan usaha pertambangan. Pada tahun 2017 share kelompok kategori primer ini mencapai 74,01 %, dan di tahun 2021 share-nya menjadi 72,66 % atau berkurang sebesar 1,35% selama kurun waktu 5 tahun. Penurunan *share* kategori lapangan usaha primer dalam ini diikuti oleh meningkatnya share kelompok kategori sekunder dan tersier (perdagangan, real estat dan jasa). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian di Balangan dalam penciptaan nilai tambah. Postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan menunjukkan bahwa corak perekonomian Kabupaten Balangan masih agraris.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.97
Pertambangan dan Penggalian	60.69
Industri Pengolahan	1.97
Pengadaan Listrik dan Gas	0.04
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.26
Konstruksi	4.47
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.71
Transportasi dan Pergudangan	1.88
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.36
Informasi dan Komunikasi	1.41
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.35
Real Estat	1.04
Jasa Perusahaan	0.08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.63
Jasa Pendidikan	3.54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.04
Jasa Lainnya	0.57
PDRB	100



Gambar 2.9
Pangsa PDRB Balangan Tahun 2020

PDRB Kabupaten Balangan masih sangat didukung oleh komoditas pertambangan. Rata-rata peranan komoditas pertambangan selama tahun 2017-2021 sebesar 60,91 %. Tetapi ada kecenderungan terjadi penurunan peranan komoditas pertambangan dari tahun 2017 sebesar 62,21% turun menjadi 60,69% pada tahun 2021. Meskipun demikian, komoditas pertambangan merupakan kategori komoditas yang sangat berpengaruh pada PDRB Balangan.

Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Balangan dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Balangan mengalir melalui keran ekspor ke India, China dan beberapa Negara di kawasan Asia Utara. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa ekonomi kabupaten Balangan ini memiliki korelasi cukup kuat dengan dinamika global yang terkait tata niaga dan pertumbuhan ekonomi negara importir komoditas tersebut. Akibatnya, pada saat pertumbuhan ekonomi Negara tujuan ekspor mengalami perlambatan akan berimbas pada komoditas ekspor Kabupaten Balangan. Aktivitas ekonomi Kabupaten Balangan yang masih tergantung pada komoditas pertambangan membuat Kabupaten Balangan menjadi rentan terhadap risiko penurunan harga dan permintaan Komoditas yang berimbas pada PDRB Kabupaten Balangan.

Data distribusi PDRB Balangan memperlihatkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Pada tahun 2021, pangsa PDRB kategori ini mencapai 5,71 %. Besarnya pangsa



kategori ini di Balangan sebagian besar didukung oleh kinerja subkategori perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan motor) dan dukungan dari kinerja kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan.

Tabel 2. 24
Peranan PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (%), 2017-2021

	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry and Fishery	11.80	11.63	12,03	12.23	11.97
B	Pertambangan dan Penggalian /Mining and Quarrying	62.21	62.12	60.58	59.92	60.69
C	Industri Pengolahan /Manufacturing	1.99	1.99	1.93	1.98	1.97
D	Pengadaan Listrik, Gas / Electricity and Gas	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
E	Pengadaan Air / Water Supply. Sewerage, Waste Management And Remediation Activities	0.23	0.24	0.26	0.28	0.26
F	Konstruksi / Construction	4.44	4.44	4.53	4.68	4.47
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale And Retail Trade; Repair of Motor Vehicles And Motorcycles	5.41	5.49	5.81	5.97	5.71
H	Transportasi dan Pergudangan /Transportation And Storage	1.85	1.90	1.99	2.02	1.88.
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation And Food Service Activities	0.32	0.34	0.36	0.38	0.36
J	Informasi dan Komunikasi /Information And Communication	1.30	1.33	1.35	1.47	1.41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi /Financial And Insurance Activities	0.31	0.33	0.35	0.38	0.35
L	Real Estate / Real Estate Activities	0.97	0.98	1.01	1.08	1.04
M,N	Jasa Perusahaan / Bussiness Activities	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	4.43	4.47	4.72	5.15	4.63
P	Jasa Pendidikan / Education	3.24	3.26	3.43	3.70	3.54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Human Health Services And Social Work Activities	0.86	0.88	0.94	1.03	1.04
R,S,T, U	Jasa lainnya / Other Service Activities	0.53	0.54	0.58	0.61	0.57
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kab. Balangan, 2021



Perekonomian Kabupaten Balangan menunjukkan pertumbuhan yang meningkat selama tahun 2017-2019, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020, dan dapat kembali meningkat pada tahun 2021. Peningkatan dan penurunan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, serta pertumbuhan ekonomi.

Nilai PDRB Kabupaten Balangan (atas dasar harga berlaku) yang selama periode 2017 - 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan peningkatan produksi barang dan jasa. Adapun kontraksi (penurunan) pada tahun 2020 terjadi terutama akibat adanya pandemi COVID-19. Berbagai aktivitas pembatasan kegiatan baik skala nasional maupun internasional pada musim pandemi tahun 2020 menjadikan kondisi perekonomian Balangan mengalami kontraksi pada tahun ini. Namun nilai tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun 2021.

Berdasarkan PDRB ADHB, komponen Ekspor Impor selama 2 tahun berturut-turut, yaitu 2019 dan 2020, mengalami pertumbuhan negative setelah beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami perbaikan hingga tahun 2018. Namun, kedua komponen tersebut kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan baik secara volume maupun nilai, terutama nilai batubara yang meningkat cukup signifikan di tahun 2021. Di sisi lain, impor menjadi pengurang dalam komponen PDRB pengeluaran dan ini juga menjadi penyebab perlambatan ekonomi di Balangan.

Nilai PDRB Balangan (atas dasar harga berlaku) selama periode tahun 2017 – 2021 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020, nilai PDRB Balangan atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, sebagai dampak dari pandemi yang terjadi pada tahun tersebut. Dari seluruh komponen di tahun 2021, hanya Komponen Konsumsi pemerintah yang mengalami penurunan nilai tambah, sedangkan komponen yang lainnya seluruhnya mengalami peningkatan. Dengan demikian, kenaikan hampir seluruh komponen tersebut mampu menaikkan nilai PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku secara total.

Tabel 2.25
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Balangan (miliar rupiah), 2017-2021

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.108,90	2.271,70	2.488,04	2.503,01	2.569,69
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	90,56	100,28	112,58	109,74	113,21
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	981,55	1.055,50	1.108,12	1.118,07	1.099,61
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.038,62	2.217,80	2.464,84	2.451,22	2.516,05
Perubahan Inventori	9,31	103,24	50,92	1,97	2,66
Net Ekspor Barang dan Jasa	4.832,88	5.003,15	4.803,16	4.538,29	5.449,15
Produk Domestik Regional Bruto	10.061,82	10.751,68	11.027,66	10.722,30	11.750,38

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS, Berbagai sensus, survei dan sumber lain

B. Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian negara di dunia, perekonomian antar negara kini semakin terintegrasikan. Hal ini mengakibatkan perlambatan ritme ekonomi global yang kemudian turut membawa dampak yang menyebar ke berbagai negara/wilayah. Luasnya dampak penyebaran krisis tersebut juga turut menyebabkan pemulihan perekonomian global menjadi berlarut-larut, perekonomian Balangan sebagai salah satu bagian integral perekonomian nasional juga tidak luput dari dampak krisis global. Kategori lapangan usaha pertambangan (batubara) merupakan kategori yang sangat dominan dalam perekonomian Balangan. Oleh karena itu, jalur perdagangan (ekspor) dari kategori lapangan usaha ini menjadi rentan terhadap dampak perekonomian global, yang mempengaruhi pergerakan ekonomi Balangan.

Pertumbuhan perekonomian Balangan cenderung mengalami percepatan selama tahun 2015–2019, namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Balangan mengalami perlambatan dari 3,18% menjadi -2,47%, kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 3,26% hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Selatan yang juga melambat dari 4,08% menjadi -1,81% pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,48%. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan nilai tambah bruto pada kategori lapangan usaha yang cukup dominan di Balangan, yakni kategori pertambangan dan penggalan 3,84%, industri pengolahan -4,26%, pertanian, kehutanan dan perikanan 3,54% dan transportasi dan pergudangan 1,54%.

Subkategori pertambangan batu bara sangat berperan dalam kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalan. *Share* subkategori pertambangan yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Balangan. Potret tersebut tergambar dari fluktuasi pertumbuhan ekonomi Balangan dalam beberapa tahun belakangan.

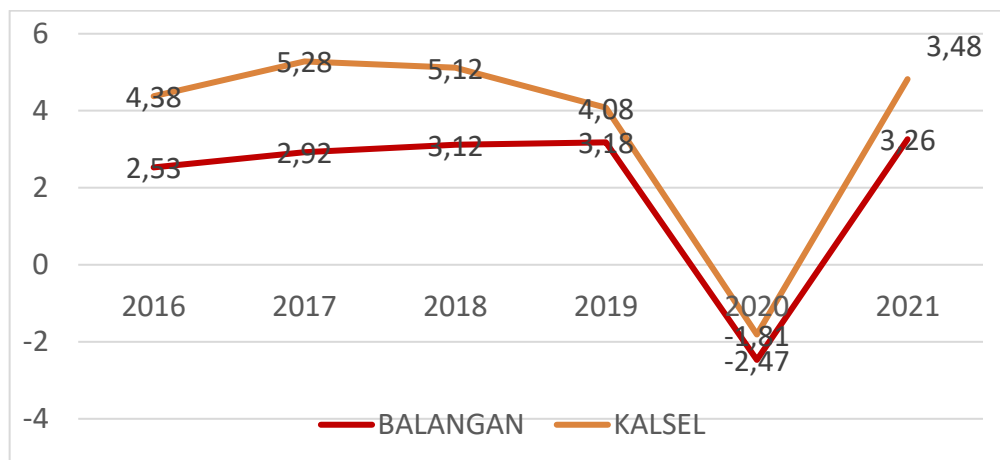
Salah satu efek dari perlambatan akibat krisis yang terjadi di dunia pada kisaran tahun 2015 ke bawah adalah perubahan permintaan dunia akan batubara. Hal ini tampak dari kecenderungan melambatnya permintaan beberapa komoditas dunia hingga pada tahun 2015 termasuk diantaranya batubara. Krisis global dan berlebihan produksi minyak USA, bahkan tertinggi selama seperempat abad terakhir turut menyebabkan permintaan batubara cenderung menurun bahkan hingga tahun 2015. Perlambatan permintaan dunia terhadap batubara tercermin dari turunnya harga batubara dan penurunan volume perdagangan batubara (ekspor impor).

Kondisi tersebut tentu menyebabkan negara/wilayah yang memproduksi batubara juga terimbas. Kasus tersebut juga berimbas pada perekonomian Balangan. Namun perlambatan pertumbuhan ekonomi Balangan mulai membaik pada tahun 2016, yaitu mencapai 2,62 %. Kondisi perekonomian semakin membaik hingga pada tahun 2019 dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 3,18 %. Sama halnya dengan penyebab kondisi perlambatan ekonomi di Balangan sebelumnya. Percepatan pertumbuhan ekonomi ini dipicu salah satunya oleh peningkatan produksi batubara dan perbaikan harga batu bara di pasar global.

Pada tahun 2021, Perekonomian Kabupaten Balangan semakin membaik. Pemulihan perekonomian global terus berlangsung tahun 2021, Pelonggaran aktivitas akibat pandemi mendorong terjadinya peningkatan permintaan global, Sebagian besar negara telah mempercepat program vaksinasi, namun terjadi peningkatan kasus Covid-19 akibat penyebaran varian baru. Peningkatan ini menghambat rantai pasokan global di tengah kenaikan permintaan, hal ini mendorong terjadinya kenaikan harga, peningkatan harga komoditas internasional seperti Batubara 8,75 %, palm oil 15,80 % dan karet 4,75 %. Catatan peristiwa Kabupaten Balangan selama tahun 2021 seperti nilai ekspor komoditas unggulan batu bara mengalami peningkatan tahun 2021, Terjadi peningkatan produksi pertanian yaitu Padi hasil KSA, tanaman perkebunan, dan peternakan tahun 2021, Terjadi penurunan produksi pertanian yaitu tanaman hortikultura, baik SBS (Sayuran Buah Semusim), BST (Buah Sayur Tahunan), dan TBF (Tanaman Biofarmaka) tahun 2021, serta perikanan, Realisasi Belanja Pemerintah tahun 2021 mengalami penurunan untuk jenis belanja barang, pegawai dan modal, Penumpang angkutan umum (taksi & travel) mengalami peningkatan karena sudah mulai melonggarnya aturan pembatasan beraktivitas dan bepergian, Terjadinya pengalihan jalur kendaraan akibat perbaikan jembatan Paringin yang dimulai dari

akhir September 2021, Kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara online (tidak tatap muka di sekolah) selama tahun 2021, Terjadinya pembangunan rumah hunian secara besar-besaran tahun 2021, seperti di kompleks perumahan Batupiring, Bungin, Muara Pitap, Paringin Kota, dan sebagainya, dan terjadinya peristiwa banjir di Bulan Januari dan November 2021.

Gambar 2.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2016 – 2021



Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2022

Tabel 2. 26
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten /Kota
Di Provinsi Kalimantan Selatan 2017-2021

KABUPATEN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
KALIMANTAN SELATAN	5,28	5,12	4,08	-1,81	3,48
TANAH LAUT	4,64	4,65	3,76	-1,99	3,47
KOTABARU	5,02	4,89	4,19	-1,87	3,36
BANJAR	4,66	5,01	4,54	-1,96	3,21
BARITO KUALA	5,79	5,22	5,06	-1,04	3,17
TAPIN	5,14	5,01	4,26	-1,50	3,41
HULU SUNGAI SELATAN	6,12	6,14	5,32	-1,19	4,18
HULU SUNGAI TENGAH	5,73	5,15	4,80	-1,01	3,01
HULU SUNGAI UTARA	5,77	5,81	5,54	-0,67	3,23
TABALONG	3,74	3,77	3,69	-2,62	3,28
TANAH BUMBU	4,14	4,14	3,64	-1,46	4,23
BALANGAN	2,92	3,12	3,18	-2,47	3,26
KOTA BANJARMASIN	6,40	6,38	6,13	-1,91	3,41
KOTA BANJAR BARU	6,96	6,90	6,93	-1,88	3,32

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2022

C. PDRB Per Kapita

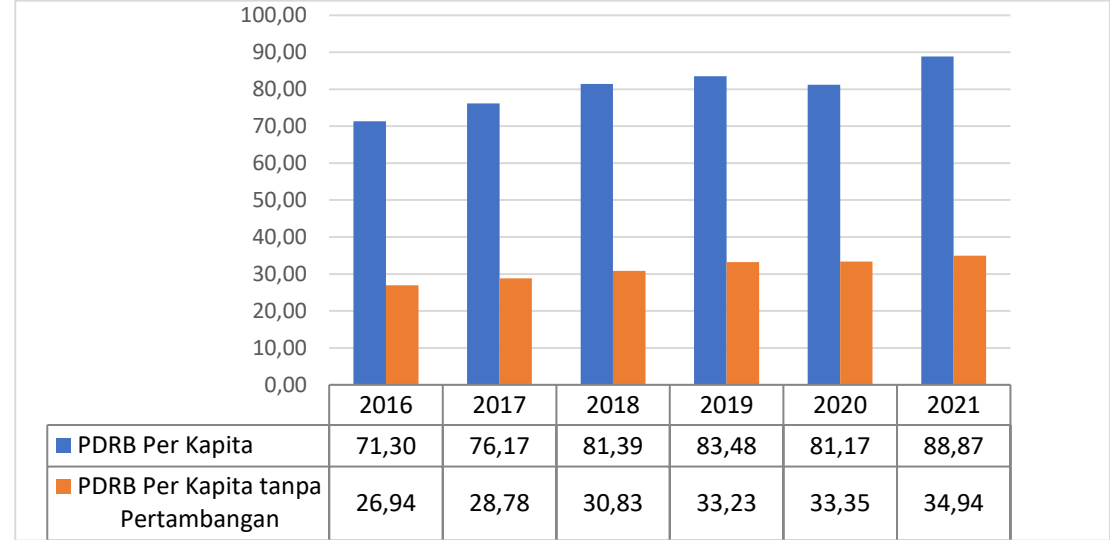
Tujuan utama pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga banyak dimensi yang tercakup dan target yang perlu dicapai. Oleh karenanya, pembangunan tidak hanya cukup pada pencapaian pertumbuhan ekonomi saja. Pertumbuhan hanyalah salah satu syarat bagi tercapainya kesejahteraan. Tanpa pertumbuhan, tujuan pembangunan akan sulit terwujud. Ukuran kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator yang komprehensif, karena masalah aspek multidimensi yang melatar belakanginya. Namun demikian, banyak literatur dan kajian akademik yang menggunakan berbagai alternatif, diantaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB perkapita.

Besaran PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan

pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada aktifitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

Perkembangan PDRB perkapita di Balangan dapat dilihat pada gambar 2.11. Selama kurun tahun 2016 - 2021 PDRB perkapita Balangan dengan sektor Pertambangan dan Penggalian meningkat dari 71,30 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 83,48 juta rupiah pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 81,17 juta rupiah dn meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 88,87 juta. Dari sisi PDRB perkapita tanpa Sektor Pertambangan dan Batu Bara pendapatan perkapita Kabupaten Balangan cukup rendah yaitu 34,94 juta rupiah ditahun 2021.

Gambar 2.11
PDRB Per Kapita Kabupaten Balangan dengan dan
Tanpa Sektor Pertambangan dan Penggalian tahun 2016 – 2021



Sumber : BPS Kabupaten Balangan, 2022

D. Indeks Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauhmana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat.

Koefisien gini (*gini ratio*) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai *gini ratio* berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi

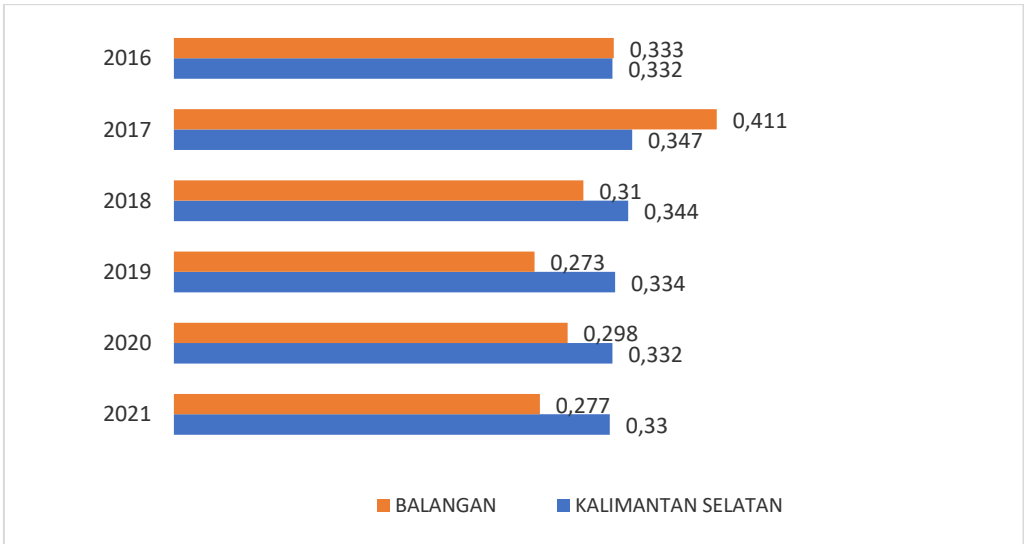
ketimpangan berdasarkan *gini ratio* dibagi menjadi 3 bagian, *gini ratio* antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai *gini ratio* antara 0,40-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai *gini ratio* kurang dari 0,40 termasuk ketimpangan rendah.

Tabel 2. 27
Perkembangan Indeks Gini
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

Indeks Gini	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Balangan	0,333	0,411	0,31	0,273	0,298	0,277
Kalsel	0,332	0,347	0,344	0,334	0,332	0,33

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, data diolah 2022

Gambar 2.12
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan
dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2022

Nilai koefisien gini rasio Kabupaten Balangan pada tahun 2021 adalah 0,277 yang berarti ketimpangan pendapatan di wilayah Balangan dapat digolongkan dalam kelompok ketimpangan menengah atau bisa dikatakan cukup merata. Selama periode tahun 2016-2021, kondisi gini rasio Kabupaten Balangan cenderung bergejolak antara baik dan turun.

Dinamika angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau buruk. Dibandingkan tahun



2020, gini rasio Kabupaten Balangan mengalami penurunan dari 0,298 pada tahun 2020 menjadi 0,277 pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin membaik, dalam ketimpangan rendah dan sedang. Dibandingkan dengan Indeks Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan, Indeks Gini Ratio Kabupaten Balangan jauh lebih baik.

E. Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang mempunyai multidimensi. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut yaitu pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Terdapat 3 indikator dalam mengukur kemiskinan suatu wilayah yaitu P0 merupakan persentase penduduk miskin terhadap total penduduk; P1 Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan; P2 Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan indeks ketimpangan pengeluaran semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Kinerja pemerintah Kabupaten Balangan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin terus menunjukkan hasil positif kecuali pada tahun 2021.

Penduduk miskin di Kabupaten Balangan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, tahun 2017-2020 menurun dan pada tahun 2021 angka kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 6,07% dari tahun 2020 sebesar 5,32%. Perkembangan garis kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 28
Jumlah Penduduk dan Garis Kemiskinan Kabupaten Balangan

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2017	368.580	7213	5,68
2018	382.835	7214	5,59
2019	396.532	7266	5,55
2020	441.448	7060	5,32
2021	453.928	8062	6,07



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, 2017-2021

Tabel 2.29 Jumlah, P0,P1,P2 Penduduk Miskin Tahun 2017-2021

Jumlah Penduduk Miskin				
(000)				
2017	2018	2019	2020	2021
7213	7214	7266	7064	8062
Garis Kemiskinan				
(Rupiah/Kapita/Bulan)				
2017	2018	2019	2020	2021
368.580	382.835	396.532	441.488	453.928
Persentasi Penduduk Miskin				
P0				
2017	2018	2019	2020	2021
5,68	5,59	5,55	5,32	6,07
Tingkat Kedalaman				
P1				
2017	2018	2019	2020	2021
0,80	1,04	0,87	0,88	0,78
Tingkat Keparahan				
P2				
2017	2018	2019	2020	2021
0,16	0,25	0,20	0,24	0,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, 2017-2021

Pada tahun 2021 persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Balangan sebesar 6,07% dimana dari 10.000 penduduk Balangan terdapat sekitar 607 orang yang pengeluaran per orangnya dibawah garis kemiskinan. Kondisi ini lebih tinggi dari Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,38%.

Dampak pandemi COVID-19 menambah 0,75% penduduk miskin di Kabupaten Balangan. Kenaikan harga barang-barang dan disisi lain terdapat pengangguran baru yang berarti tidak mempunyai sumber daya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka waktu lama menambah penduduk miskin secara signifikan. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, diperlukan strategi dan sinergitas antar pemangku kepentingan pembangunan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Balangan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari.

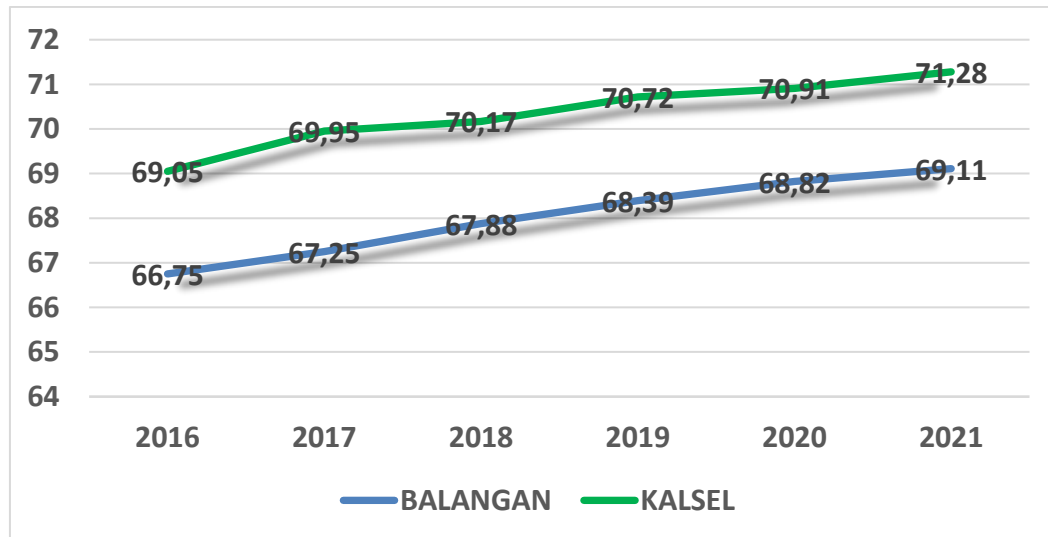
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Garis Kemiskinan Kabupaten Balangan sebesar Rp. 453.928/kapita/bulan.

Angka Kemiskinan pada Tahun 2021 naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan efek pandemi covid yang berimplikasi meningkatnya jumlah warga miskin, karena terjadinya kontraksi ekonomi pandemi yang mulai terasa di semua tempat. Oleh karena itu, menjadi tantangan bersama ke depan, agar kebijakan pembangunan dapat lebih terintegrasi bagi upaya pengentasan kemiskinan.

F. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu gambaran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Report* (HDR) merupakan ukuran untuk melihat kualitas dan dampak kinerja pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Angka IPM suatu daerah mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak.

Gambar 2.13
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

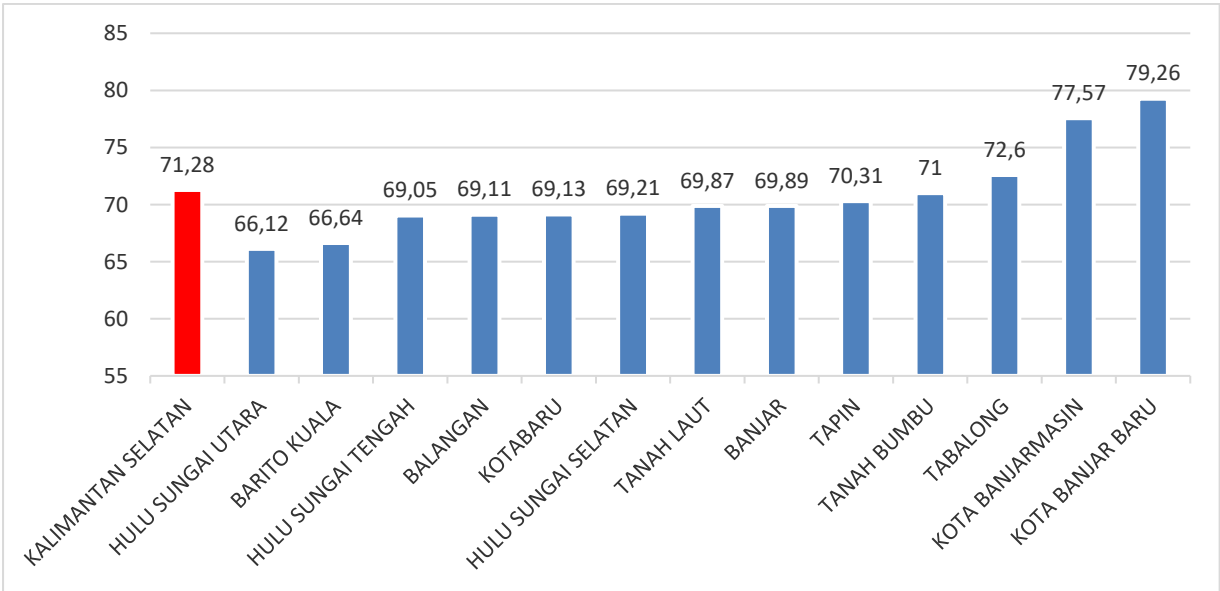


Sumber : BPS Kabupaten Balangan, 2022

Perkembangan capaian IPM Kabupaten Balangan selama periode 2016-2021 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2016 angka IPM Kabupaten Balangan sebesar 66,75 dan terus meningkat menjadi 69,11 pada tahun 2021, meskipun angkanya masih di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan. Secara umum, perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan telah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Balangan.

Dengan pembangunan yang dilaksanakan dan fokus pada pengembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan diharapkan ditahun mendatang IPM Kabupaten Balangan akan mengalami peningkatan yang signifikan dan SDM kabupaten Balangan dapat berperan dalam pengembangan berbagai bidang baik ditingkat lokal dan nasional.

Gambar 2.14
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota
Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021



Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka 2021

Terlihat pada gambar 2.14, IPM Kabupaten Balangan berada pada posisi ke 10 dari 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan. Peningkatan angka ini tentunya tidak terlepas dari perkembangan semua indikator penyusunnya, yaitu angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah serta pengeluaran perkapita.

Tabel 2. 30
Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

TAHUN	ANGKA HARAPAN HIDUP	ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH	RATA RATA LAMA SEKOLAH	PENGELUARAN/ PERKAPITA (dalam ribu rupiah)
2016	67,07	11,77	6,71	10.953
2017	67,19	12,07	7,03	11.186
2018	67,37	12,36	7,04	11.442
2019	67,59	12,37	7,27	11.557
2020	67,72	12,46	7,55	11.452
2021	67,85	12,47	7,69	11.500

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2022

Penduduk adalah kekayaan nyata suatu bangsa. Perkembangan penduduk baik secara kualitas maupun kuantitas dipengaruhi oleh banyak faktor. Tidak hanya sekedar berbicara pembangunan semata, tetapi juga harus paham tentang pembangunan yang berkualitas dengan resiko yang seminim mungkin dengan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Kualitas hidup yang dimiliki suatu negara

ataupun wilayah, menggambarkan kesejahteraan rakyat dan keberhasilan dari program-program yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia. Terkait dengan kualitas hidup terdapat unsur Umur Harapan Hidup (UHH) didalamnya. UHH merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk yang menggambarkan kualitas hidup.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan UHH adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi UHH adalah pendapatan perkapita, pendidikan, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, pengangguran dan nilai tukar, hubungan langsung dengan kesejahteraan sosial, kesehatan manusia dan pembangunan ekonomi.

UHH di Kabupaten Balangan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan namun sangat lambat. UHH tahun 2020 adalah 67,72 tahun dan terjadi peningkatan di tahun 2021 sebesar 0,13 tahun atau menjadi 67,85 tahun. Walau terjadi peningkatan namun masih dibawah target yang diinginkan sebesar 67,92 tahun dan dengan pencapaian ini Kabupaten Balangan berada di urutan 8 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang tentunya sangat berpengaruh terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan. Lambatnya peningkatan UHH di Kabupaten Balangan tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain dari sektor kesehatan, karena suatu kabupaten yang memiliki standar atau kualitas kesehatan yang baik akan memiliki UHH yang lebih tinggi. Dari sektor kesehatan yang sangat berpengaruh terhadap lambatnya peningkatan UHH karena di tahun 2021 terjadinya peningkatan signifikan terhadap kematian bayi dibandingkan tahun 2020, yaitu sebanyak 30 orang atau 13,20/1.000 KH yang terdiri atas kematian neonatal 10/1.000 KH. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi mempunyai korelasi dengan UHH karena dalam perhitungan UHH digunakan indikator AKB di dalamnya. Masih tingginya kematian bayi di Kabupaten Balangan terkait erat dengan faktor endogen yaitu faktor yang dibawa bayi sejak awal konsepsi dan faktor eksogen yaitu faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar karena masih kurang optimalnya pelayanan bayi baru lahir dan bayi yang sesuai standar. Selain itu juga sangat dipengaruhi

peningkatan penyakit terutama penyakit menular seperti Covid-19 dari tahun 2020 hingga tahun 2021 menjadi sebanyak 1.605 kasus dan sebanyak 78 yang meninggal dunia yang tentu saja berdampak terhadap perubahan pola mortalitas.

Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB untuk menekan kematian bayi yang berkorelasi terhadap perhitungan UHH antara lain memberikan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, melahirkan dan bayi baru lahir serta bayi sesuai standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang terus disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, penanganan seluruh ibu hamil, melahirkan dan neonatus dengan komplikasi, pelaksanaan kelas ibu hamil sebanyak 58 kelas, pelaksanaan kelas balita sebanyak 20 kelas, memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk seluruh ibu hamil yang mengalami KEK dan bayi kurus, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) untuk inisiasi menyusui dini pada bayi baru lahir dan pemberian ASI eksklusif, peningkatan kompetensi bidan dalam mendeteksi komplikasi ibu hamil dan risiko tinggi pada bayi baru lahir dengan mengadakan *Orientasi Neonatal Essential* dan pembelajaran kasus kematian BBLR oleh dr Spesialis Anak, pelatihan *Blended Learning* Dokter, pelatihan *Blended Learning* Bidan, dan *Blended Learning* MTBS, pelaksanaan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) tingkat kabupaten dan puskesmas dan rehab poskesdes. Selain upaya tersebut Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mengendalikan angka kesakitan memberikan vaksinasi covid-19 kepada masyarakat Balangan sebanyak 82,84% untuk vaksinasi ke 1 dan 39,83% untuk vaksinasi ke 2 serta 0,98% untuk vaksinasi ke 3, pemberian imunisasi dasar lengkap kepada bayi sebanyak 71,1% dan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) sebesar 48,71%, penanganan terhadap penyakit lainnya seperti Demam Berdarah *Dengue* (DBD) sebanyak 8 orang, Tuberculosis (TBC) 439 orang, malaria sebanyak 39 orang, Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), pneumunia, diare dan penyakit menular lainnya. Sedangkan untuk pengendalian penyakit tidak menular dengan memberikan pelayanan kepada usia produktif sesuai standar sebesar 17.501 atau 21% di 103 posbindu dan puskesmas, pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar sebesar 6.935 orang atau 94,34% di 115 posyandu usia lanjut, puskesmas maupun kelompok

usia lanjut binaan Bidang Kesehatan masyarakat dengan TP PKK Kabupaten Balangan, serta mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Selain dari sektor kesehatan, UHH juga dipengaruhi oleh banyaknya pengangguran karena pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan. Masih tingginya pengangguran di kabupaten Balangan tahun 2021 sebesar 2,44% berdampak terhadap kemiskinan. Tahun 2020 jumlah penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan dengan pengeluaran per orang per bulan kurang dari Rp 453.928,- sebanyak 7.064 jiwa menjadi 8.062 jiwa pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 998 jiwa, dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,32% di tahun 2020 menjadi 6,07% pada tahun 2021 atau meningkat 0,75% dan lebih tinggi dari persentase kemiskinan Propinsi Kalimantan Selatan yang hanya sebesar 4,8%. Dari 8.062 jiwa penduduk miskin dan dari jumlah PPKS yang tercatat oleh Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Anak hanya sebesar 54,91% yang mendapatkan bantuan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Faktor meningkatnya kemiskinan sangat berpengaruh terhadap lambatnya peningkatan UHH di Kabupaten Balangan karena kemiskinan dapat menempatkan seseorang pada kondisi kesehatan yang tidak menguntungkan. Beberapa alasan yang dapat menjadi penyebab terjadinya hal ini adalah keterbatasan akses kelompok miskin terhadap perolehan informasi dan layanan kesehatan yang memadai, rendahnya pengetahuan dan perilaku hidup yang tidak mengindahkan kesehatan. Kelaparan yang menyertai kemiskinan menambah lemahnya daya tahan tubuh si miskin sehingga kelompok miskin semakin sulit keluar dari status kesehatan yang rendah. Sebaliknya, kesehatan juga memegang peranan besar dalam merubah status individual seseorang menjadi miskin atau mengangkatnya dari kemiskinan. Kondisi kesehatan yang buruk menyebabkan berkurangnya produktivitas. Produktivitas yang menurun mengakibatkan semakin terbatasnya penghasilan yang diperoleh. Apabila kemudian yang dihadapi adalah kasus katastrofik, maka dibutuhkan sumber pembiayaan yang lebih besar untuk menutup ongkos pengobatan. Pada titik ini, buruknya kondisi kesehatan berakibat lebih berat bagi kelompok miskin karena aset utama yang dimiliki kelompok miskin adalah tenaga untuk bekerja. Kondisi ini cepat atau lambat mendorong yang bersangkutan dalam jebakan lingkaran kemiskinan atau memperdalam status kemiskinannya. Untuk

mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari kemiskinan terhadap kesehatan maka pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan upaya dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Balangan dengan persentase kepesertaan sebesar 98% dan yang dibayarkan sebanyak 68.649 orang yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat diukur dengan kenaikan PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Norton (2002) menyatakan bahwa apabila pertumbuhan pendapatan per kapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Pendapatan yang merata akan berdampak pada membaiknya tingkat kesehatan dan pendidikan (Yasa, 2015). Pendapatan per kapita juga mempengaruhi UHH karena semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi tingkat kepedulian seseorang akan pentingnya kesehatan yang berdampak pada UHH.

Keberhasilan sektor pendidikan dapat dilihat dari Rata-Rata lama Sekolah (RLS) yang mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya, serta seseorang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding dengan orang yang pendidikannya lebih rendah sehingga berdampak terhadap kesejahteraan hidupnya yang sangat berpengaruh terjadinya kemiskinan. Lambatnya peningkatan UHH di Kabupaten Balangan dari sektor pendidikan tentu dipengaruhi oleh lambatnya pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang mana HLS tahun 2021 hanya 7,69 tahun dan hanya tumbuh 0,08% atau meningkat 0,01 tahun dari HLS tahun 2020, serta lambatnya pertumbuhan RLS yang mana RLS tahun 2021 hanya 12,47 tahun dan hanya tumbuh 1,85% atau meningkat 0,14 tahun. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa semakin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani dan sebaliknya rendahnya RLS berarti semakin rendah pendidikan yang dijalani sehingga berdampak terhadap terjadinya kemiskinan yang akhirnya menyebabkan seseorang terbatas akses terhadap perolehan informasi dan layanan kesehatan yang memadai, rendahnya pengetahuan dan perilaku hidup yang tidak

mengindahkan kesehatan serta kelaparan yang menyertai kemiskinan sehingga menambah lemahnya daya tahan tubuh si miskin sehingga kelompok miskin semakin sulit keluar dari status kesehatan yang rendah yang pada akhirnya berdampak terhadap UHH.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan RLS dan HLS di tahun 2021 antara lain dengan memberikan beasiswa prestasi UN kepada anak sekolah SD/ sederajat sebanyak 593 orang, SMP/ sederajat sebanyak 126 orang, SMA/ sederajat, sebanyak 287 orang, prestase akademik sebanyak 60 orang, beasiswa luar negeri sebanyak 12 orang, beasiswa kedokteran sebanyak 12 orang, beasiswa tidak mampu sebanyak 15 orang, pelaksanaan paket A, B dan C namun belum optimal, pelaksanaan Akreditasi Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dan sosialisasi sekolah penggerak serta rehab gedung sekolah dan penambahan ruangan sekolah.

Indeks pengeluaran diproksi dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Nilai dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Rata-rata pengeluaran riil penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2021 yaitu sekitar 11,500 juta rupiah.

G. Stunting

Perlu diketahui bahwa penyebab *stunting* antara lain dari faktor gizi yaitu rendahnya asupan makanan bergizi pada anak, kurangnya keragaman menu makanan, pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makanan pada anak, sedangkan dari faktor ibu yaitu kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan sehingga ibu mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak, masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan *Antenatal Care* (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), masih kurangnya akses kepada makanan bergizi dan kurangnya akses air bersih dan sanitasi, sedangkan berdasarkan kajian tentang *stunting* yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan yang berkerjasama dengan Poli Teknik Kementerian Kesehatan Banjarmasin pada tahun 2020 di Kabupaten Balangan dengan hasil penelitian menyimpulkan berdasarkan hasil uji statistik di Kabupaten Balangan ada hubungan antara penyakit infeksi dan kondisi psikologis sebelum



hamil dengan status *stunting* ($p<0,05$) sehingga perlunya intervensi sejak masa remaja agar ibu siap untuk hamil dan mengurangi risiko *stunting*.

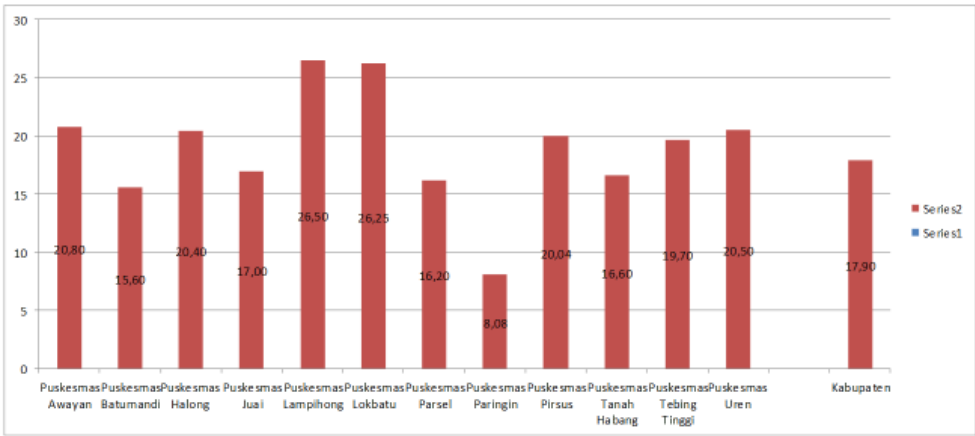
Tabel 2. 31
Prevalensi Stunting Kabupaten Balangan Tahun 2020 – 2021

NO	Jumlah Sasaran	Tahun 2020					Jumlah sasaran	Tahun 2021				
		Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	Stunting		Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	Stunting
1	8.534	635	1.566	6.315	18	25,79%	8.992	342	1.268	7.342	10	17,90%

Sumber : EPPGBM 2021

Berdasarkan Tabel diatas tren prevalensi stunting di Kabupaten Balangan pada tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2020 yaitu terjadi penurunan 7,89% atau dari 25,79% ditahun 2020 menjadi 17,90% ditahun 2021 dengan sasaran Balita sebanyak 8.992 orang. Stunting tahun 2021 berjumlah 1.610 Balita yang terdiri atas 342 Balita sangat pendek dan 1.268 Balita pendek atau terjadi pengurangan sebesar 590 Balita stunting dibanding tahun 2020 dan terjadi peningkatan Balita normal dari 6.315 orang menjadi 7.342 orang. Walaupun terjadi penurunan yang signifikan namun prevalensi stunting di Kabupaten Balangan masih merupakan penyumbang negatif karena berada di atas prevalensi stunting di Propinsi Kalimantan Selatan sebesar 10,70% dan urutan ke 2 tertinggi se Propinsi Kalimantan Selatan.

Gambar 2.15
Prevalensi Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2021



Berdasarkan grafik diatas prevalensi stunting di Kabupaten Balangan tertinggi di wilayah kerja Puskesmas Lampihong sebesar 26,50% dan yang terendah di wilayah kerja Puskesmas Paringin sebesar 8,08%.

Terjadi penurunan prevalensi stunting yang signifikan di Kabupaten Balangan pada tahun 2021 tentunya tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan yaitu dengan berkomitmen untuk mengurangi prevalensi stunting melalui pembentukan Tim Percepatan Penanganan Stunting di Kabupaten Balangan dengan SK Bupati Balangan Nomor 188.45/492/Kum Tahun 2019 tanggal 29 April 2019 dan Pada tahun 2020 kembali Tim KP2S Kabupaten Balangan membentuk Tim Percepatan Penanganan Stunting dengan SK No 188.45/325/Kum Tahun 2020 dan SK No 188.45/343/Kum Tahun 2021.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan baik dari intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan sebesar 30% dan 70% intervensi gizi sensitif oleh Dinas lainnya yang terkait. Anggaran untuk penanganan stunting tahun 2021 dari seluruh SKPD terkait penanganan stunting baik dari anggaran APBD II Rp 482.757.100,- dan anggaran dari dana desa Rp 4.279.245.735,- dengan total keseluruhan Rp 4.762.002.835,-.

Intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan sasaran antara lain remaja putri, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui dan Balita. Intervensi gizi spesifik yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menurunkan prevalensi stunting antara lain dengan mengatasi kekurangan zat besi pada ibu hamil yang dapat menyebabkan anemia melalui pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama hamil sehingga nutrisi terhadap zat besi dapat terpenuhi, pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri untuk mencegah anemia. Terus mendorong inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif, mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 24 bulan kepada ibu masa menyusui. Pemberian imunisasi dasar lengkap untuk bayi untuk mencegah menderita penyakit berat seperti TBC, polio, campak, hepatitis, difteri dan tetanus. Pemberian vitamin A dosis tinggi pada Balita di bulan februari dan agustus yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak sehingga tidak mudah sakit yang pada akhirnya secara tidak langsung karena anak sering sakit dapat menyebabkan kekurangan gizi. Selain itu juga Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Balangan melalui jaringannya memberikan PMT bahan pangan lokal kepada ibu hamil KEK, memberikan MP ASI berupa biskuit selama 90 hari yang mana biskuit tersebut berasal dari kementerian

kesehatan, pemberian PMT tersebut dengan harapan dapat merubah status ibu hamil KEK menjadi tidak KEK lagi sehingga tidak melahirkan BBLR maupun prematur yang kedepannya berpotensi stunting. Memberikan PMT selama 90 hari kepada Balita yang mengalami gizi kurang dan buruk untuk perbaikan asupan nutrisinya. Kegiatan lain yang dilakukan surveilans kasus gizi kurang dan gizi buruk, orientasi pemberian Makan Untuk Bayi dan Anak Balita (PMBA) untuk petugas gizi, pembinaan kader BKB, BKR dan BKL serta pembentukan pendamping keluarga dan intervensi lainnya.

Intervensi gizi sensitif yang dilakukan oleh sektor lain yang terkait seperti Dinas PUPR antara lain pembangunan toilet umum di Desa Tigarun, Uprating IPA Desa Lok Tabuan, penambahan sumur dalam terdindungi/broncaptering di Desa Hukai. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Anak antara lain dengan melatih Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) sebanyak 40 orang, melatih kader posyandu sebanyak 48 orang, pembinaan Pokjanel Posyandu tingkat kabupaten, rembuk stunting tingkat desa, pembentukan rumah sehat desa, penyuluhan perkawinan anak, seminar parenting pada peringatan hari ibu dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pola asuh anak, pelayanan konseling puspaga bagi calon penganten serta kegiatan lainnya. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan mensosialisasikan pangan alternatif, mensosialisasikan hatinya PKK, memberikan bantuan demplot serta kegiatan pertanaman dirumah anggota kelompok. Dinas Kominfo dengan memberitakan terkait stunting di Kabupaten Balangan melalui media baik cetak maupun elektronik, sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor dan rembuk stunting tingkat Kabupaten yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKUMPIDA) untuk berkomitmen bersama menurunkan stunting di Kabupaten Balangan dengan berbagai kesepakatan.

Walaupun terjadi penurunan signifikan prevalensi stunting di Kabupaten Balangan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 namun masih belum sesuai dengan harapan Nasional sebesar 14% di tahun 2024, sehubungan hal tersebut maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Tim KP2S Kabupaten Balangan lebih serius lagi untuk menanganinya dengan memfokuskan anggaran untuk penanganan stunting dan terus mengimplementasikan 8 aksi

konvergensi/integrasi penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Balangan sehingga selaras pencapaiannya dengan target Nasional sebesar 14%.

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan melalui SKPD terkait untuk menurunkan stunting kedepannya, khususnya untuk tahun 2022 dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan anggaran APBD II. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan anggaran DAK fisik dengan kegiatan stunting sebesar Rp 699.825.000,-, DAK nonfisik dengan BOK stunting Rp 387.450.500,-, dengan APBD II sebesar Rp 641.425.950,-. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Anak dengan anggaran APBD II sebesar Rp 316,682.000,-. Dinas PUPR untuk pembangunan toilet umum sebesar Rp 1.197.600.000,- dengan anggaran APBD II, pembangunan tangki saptik tank individual dan pembuatan sambungan rumah dengan anggaran DAK dan APBD II sebesar Rp 1.990.000.000,-. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan APBD II sebesar Rp 132.315.000,- serta peran support anggaran dari CSR Adaro Group sebesar Rp 1.227.000.000,-

H. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Balangan. Semakin tinggi TPAK, maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Berdasarkan tabel 2.32, TPAK Kabupaten Balangan dari tahun 2017 -2021 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin berkurang pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di Kabupaten Balangan. Penurunan TPAK di kabupaten Balangan kemungkinan juga dapat disebabkan karena angka penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya.

Sedangkan untuk TPAK Kabupaten Balangan tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 berdasarkan berdasarkan Berita resmi statistik BPS Kalimantan selatan, publikasi Keadaan Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan Agustus 2021 telah mengalami penurunan menjadi 75,38 %. Artinya pada tahun 2021 di antara 100 penduduk usia kerja, terdapat 75 hingga 76 orang merupakan angkatan kerja.



Sisanya, 24,62 % bukan termasuk angkatan kerja seperti mereka yang sekolah dan mengurus rumah tangga.

Tabel 2. 32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Balangan
Tahun 2017 – 2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	79,03	75,67	69,63	76,50	75,38

Sumber : BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Balangan

I. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Balangan memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja. Pertambahan penduduk usia kerja yang tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang memadai memberikan dampak peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan pada tahun 2017 sebesar 1,90 %, meningkat menjadi 2,28 % ditahun 2019 dan terus meningkat pada tahun 2020 menjadi 2,46 %, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2,44 %

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan meningkatnya kesempatan bagi para pencari kerja, ini dapat dilihat dari jumlah lowongan kerja yang tersedia baik melalui kegiatan Bursa Kerja Online ataupun lowongan yang dilaporkan perusahaan pemberi kerja serta lowongan CPNS/ Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Balangan Tahun 2021 dan meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keterampilan sehingga mampu untuk bersaing di dunia kerja ataupun berusaha mandiri dengan keterampilan yang telah dimiliki.

Tabel 2. 33
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,90	2,24	2.28	2,46	2,44

Sumber : BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Balangan

J. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kebudayaan menjadi identitas suatu daerah. Perkembangan kebudayaan dimaksud sangat ditentukan oleh interaksi tiga pilar utama antara lain nilai-nilai seni budaya yang berlaku di masyarakat, kegiatan yang dilakukan oleh pemangku seni budaya atau tokoh adat dan peran pemerintah daerah.

Persoalan seni budaya adalah persoalan melestarikan dan melakukan revitalisasi budaya daerah untuk kemudian dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman sehingga dapat bersaing dengan perkembangan kebudayaan global. Untuk pengembangan seni budaya di Kabupaten Balangan maka pada tahun 2021 pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan berbagai upaya antara lain dengan melaksanakan even seni dan budaya yang bersifat langsung/tatap muka yaitu workshop mamanda, workshop tari tradisional, bengkel seni rupa, jelajah cagar budaya bagi siswa siswi SMP, penambahan juru pelihara cagar budaya dan Event Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan yaitu Aruh Sastra Ke 18 yang dilaksanakan di Gedung Budaya Garuda Maharam, serta even seni dan budaya lainnya. Adanya penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Balangan di Kabupaten Balangan diharapkan dapat menambah kecintaan masyarakat terhadap seni budaya daerah, sehingga dapat bisa terus mengembangkan seni dan budaya, khususnya budaya lokal dan memadukan potensi yang dimiliki agar memiliki ciri khas dan akhirnya dapat mengangkat perekonomian masyarakat.

Pelestarian nilai-nilai budaya sangat perlu dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya melalui pagelaran seni, festival tari dan pertunjukan seni budaya lainnya, namun perlu dipadukan dengan bidang lainnya melalui kurikulum pendidikan, literatur atau buku yang menjadi rujukkan budaya Banjar sehingga pelestarian dan pengembangan seni budaya ini dapat berlangsung secara baik dan berakar di masyarakat. Selain melakukan pengembangan seni budaya pemerintah daerah juga melaksanakan pelestarian budaya Daerah Balangan. Terkait hal tersebut untuk jumlah karya budaya yang diinventarisasi untuk dilestarikan antara lain cagar budaya atau yang diduga cagar budaya sebanyak 15 jenis yang dikelola oleh juru pelihara kabupaten dan propinsi. Sedangkan adat tradisi masyarakat Balangan yang terinventarisasi sebanyak 19 jenis antara lain aruh adat nimbak, ma'iwu, aruh adat bawanang, itatamba banua, minyaulahan, nimbuk/membatur, ngatet nahi, buanang, aruh adat baharin, jajampian, momen/kematian, manugal, bepalas/baancak, menyalamat, menatu wini, aruh adat bawanang, bahayaga, balimit, baburdah, bamaulid, bayasinan, menyalamat, mearuah, mehaul, bemandi-

mandi, beusung penganting, bejalan liuk, begunung api, basunat binian, mengayu, bamumula, bearak pengantin kepala andaro, bepantul, ondel-ondel Balangan, manugal dan mengatam.

Selain focus pada seni budaya pemerintah daerah juga focus pada olahraga untuk mempersiapkan bibit-bibit atlet yang berprestasi agar nantinya melahirkan atlet yang berpeluang untuk mendapatkan medali di berbagai kejuaraan baik daerah maupu nasional sehingga pemerintah daerah melalui Dinas Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2021 melaksanakan pembinaan terhadap atlet muda. Terkait hal tersebut untuk lebih meningkatkan prestasi dan pembinaan atlet yang sesuai dengan prosedur latihan olahraga, maka 11 orang pelatih dari 8 cabang olahraga dikirim dalam bimbingan teknis pelatih yang kemudia pelatih tersebut mendapatkan sertifikat sebagai lisensinya sebagai pelatih olah raga.

Dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Olahraga dan Pariwisata untuk meningkatkan kompetensi pelatih dari berbagai cabang olahraga untuk membina atlet pada akhirnya sebanyak 17 atlet di Kabupaten Balangan mampu bersaing di beberapa kejuaraan baik di daerah maupun nasional dengan medali emas sebanyak 6 medali, medali perak sebanyak 5 medali dan medali perunggu sebanyak 13 medali dari berbagai cabang olahraga antara lain olahraga gulat, dayung, renang, bulu tangkis, sepak bola, menembak, atletik, panahan, voli pasir, tekwondo, karate, judo dan tinju.

Selain memiliki 11 pembina atlet yang berlisensi untuk memberikan pembinaan pada atlet sehingga mampu bersaing di beberapa kejuaraan, kedepannya untuk meningkatkan peraihan medali di berbagai cabang olahraga tentu perlunya penambahan maupun pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Balangan khususnya untuk arena lapangan atau gedung olahraga karena atlet terbanyak dari cabang olahraga lapangan. Berikut Gedung olahraga yang ada di Kabupaten Balangan.



Tabel 2. 34
Gedung Olahraga di Kabupaten Balangan

No.	GEDUNG OLAHRAGA	ALAMAT / KECAMATAN
1	FUTSAL BSR	PARINGIN
2	FUTSAL RIZKAN	PARINGIN SELATAN
3	BULU TANGKIS	PARINGIN
4	BULU TANGKIS	TANAH HABANG
5	BULU TANGKIS	LAMPIHONG
6	BULU TANGKIS	LAJAR
7	BULU TANGKIS	MURUNG JAMBU
8	BULU TANGKIS	HARAPAN BARU
9	BULU TANGKIS	BARUH BAHINU
10	BULU TANGKIS	BATUMANDI
11	BULU TANGKIS	MUARA JAYA
12	BULU TANGKIS	PULANTAN
13	BULU TANGKIS	AWAYAN
14	BULU TANGKIS	HALONG
15	BULU TANGKIS	SURYATAMA
16	BULU TANGKIS	LASUNG BATU
17	BULU TANGKIS	DAHAI
18	BULU TANGKIS	JUAI
19	BULU TANGKIS	BUNTU KARAU
20	BULU TANGKIS	BABAYU
21	BULU TANGKIS	TEBING TINGGI

Sumber: Dispora Kabupaten Balangan, 2021

K. Pelayanan Publik

K.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Suatu pelayanan



dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Tabel 2. 35
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Balangan
Tahun 2017 - 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai IKM	80,71	79,71	84,59	82,53	81,05

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, setiap tahunnya kabupaten Balangan telah terdapat survei mengenai IKM. Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai indeks kepuasan layanan masyarakat pada dua tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2019 telah mencapai nilai indeks tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu 84,59, sedangkan untuk tahun 2021 yakni sebesar 81,05 dengan kualitas mutu B dan berada pada kategori Baik. Berdasarkan tabel diatas IKM Kabupaten Balangan untuk tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu terjadi penurunan sebesar 1,48 poin atau dari 82,53 menjadi 81,05. Terkait IKM tersebut didapatkan dari rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Balangan yang dilaksanakan di 43 SKPD atau Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat dari 43 SKPD atau Unit Kerja tersebut didapatkan nilai IKM terendah pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 76,88 dengan kualitas mutu B dengan kategori Baik, sedangkan nilai IKM tertinggi di Puskesmas Uren Kecamatan Tebing Tinggi dengan nilai 88,76 dengan kualitas mutu A dengan kategori Sangat Baik. Nilai ini didapat dari hasil kuesonir yang dibagikan kepada masyarakat penerima pelayanan di 43 SKPD atau Unit Kerja dengan menggunakan unsur pelayanan yang berpedoman pada peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB no.14 Tahun 2017. Walaupun terjadi penurunan nilai IKM di tahun 2021 namun masih tetap dalam kualitas mutu B. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan sehingga tetap dapat bertahan dengan kualitas mutu B antara lain memperbaiki fasilitas dan sarana pelayanan publik, melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), inovasi pelayanan, meningkatkan kinerja sumber daya manusia, meningkatkan



arahan dan dorongan yang diberikan kepada unit penyelenggara pelayanan yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Dengan adanya penilaian kinerja pelayanan publik setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya untuk dapat melakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian yang ada. Dilakukan berbagai pembenahan dengan evaluasi pelayanan yang bertujuan supaya pelayanan publik yang ada dapat terus membaik dan nilai IKM pun dapat terus meningkat.

K.2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2021. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2021 adalah 54,63 dengan kategori "CC". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 36
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Balangan

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A	Komponen Pengungkit			
	1. Pemenuhan	20,00	8,63	9,47



	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,43	5,58
	III. Reform	30,00	9,67	10,24
	Total Komponen Pengungkit	60,00	23,73	25,29
B	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,58	7,62
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,85	8,83
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,15	7,78
4.	Kinerja Organisasi	10,00	4,48	5,11
	Total Komponen Hasil	40,00	30,07	29,34
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	53,80	54,63

2. Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Balangan, sebanyak 10 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 37
Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Balangan

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	129	Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	Kualitas Kebijakan	0-100	53,81	Lembaga Administrasi Negara
3.	ASN Profesional	0-100	67,05	Badan Kepegawaian Nasional
4.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0-5	1,77	Kementerian PANRB
5.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	63,93	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,56	Kementerian PANRB
7.	Kapabilitas APIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8.	Maturitas SPIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
9.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	70,30	Ombudsman Republik Indonesia
10.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	51,92	Arsip Nasional Republik Indonesia

3. Hal- hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Balangan adalah:

a. Penerapan reformasi birokrasi yang dilakukan sudah mulai berfokus untuk mendorong peningkatan kualitas di level kabupaten. Implementasi reformasi birokrasi di level Perangkat Daerah (PD) juga sudah mulai ditingkatkan, dengan internalisasi budaya kinerja dengan langkah melakukan suwei budaya pemahaman dan budaya kinerja. Namun sebagian PD masih berfokus pada

- pemenuhan dokumen, sehingga belum terlihat bahwa pelaksanaan RB adalah untuk meningkatkan kinerja;
- b. Belum seluruh agen perubahan memiliki rencana kerja serta monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara berkala. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, baik triwulanan atau semesteran akan mempermudah pemantauan progres capaian rencana aksi, identifikasi kendala, serta upaya yang dapat dilakukan kedepan dalam mencapai target rencana kerja;
 - c. Telah ditetapkan agen perubahan di lingkup kabupaten dan PD. Namun, agen perubahan yang sudah ada belum cukup mendorong hasil perubahan. Hal ini ditandai dengan beberapa inovasi perubahan yang disusun dalam rencana aksi belum dapat di integrasi dan diimplementasikan pada sistem manajemen;
 - d. Telah diidentifikasi produk-produk hukum yang terdampak dari Undang Undang Cipta Kerja tahun 2021 pada surat nomor 180/12/Kum/2021 sebagai bagian dari deregulasi kebijakan. Pengembangan aplikasi SiSunduk juga dilakukan untuk mempermudah proses penyusunan produk hukum. Namun identifikasi produk hukum dan pengembangan aplikasi tersebut belum menggambarkan secara penuh analisis, pemetaan, dan keterkaitan peraturan satu dengan yang lain;
 - e. Telah ditindaklanjuti salah satu quick wins nasional pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu melakukan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional;
 - f. Peta proses bisnis yang telah disusun, memperlihatkan gambaran hubungan kinerja secara berjenjang. Namun dari peta proses bisnis yang ada belum seluruhnya dijabarkan ke dalam standar operasional prosedur (SOP) dan diformalkan;
 - g. Implementasi pemanfaatan *e-government* telah mulai dilakukan dengan adanya grand design penyelenggaraan *e-government*. Tetapi, masih perlu dioptimalkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi grand design penyelenggaraan e-govemment, integrasi sistem antar PD, pusat data aplikasi yang dimiliki, dan pemanfaatan sistem informasi dalam memberikan pelayanan, baik layanan internal maupun eksternal kepada masyarakat stakeholder;
 - h. Pemantauan kinerja individu dilakukan menggunakan aplikasi e-kinerja.

Adapun pemanfaatan aplikasi belum sepenuhnya optimal dalam pemantauan capaian kinerja secara berkala dan menyeluruh sehingga belum memberikan dampak perbaikan pada pencapaian kinerja ASN;

- i. Dalam hal pemantauan kinerja organisasi telah menggunakan aplikasi e- KINO untuk melihat rasionalisasi program yang mendukung Sasaran Strategis. Akan tetapi aplikasi tersebut belum sepenuhnya bisa berjalan optimal untuk melihat progres secara updated dan memberikan rekomendasi perbaikan kinerja PD, terlebih telah memasuki masa akhir RPJMD 2016 - 2021;
 - j. Penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas terus dilakukan dengan melaksanakan asistensi penyusunan profil risiko PD. Namun monitoring dan evaluasi atas *Whistle Blowing System* dan Penanganan Benturan Kepentingan belum sepenuhnya dilakukan. Monitoring dan evaluasi perlu untuk mengetahui sejauh mana sistem pengaduan yang dimiliki benar-benar digunakan, khususnya *Whistle Blowing System* oleh ASN;
 - k. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sudah mulai dibangun, yang ditandai dengan 3 unit kerja diusulkan pada tahun 2021, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Rumah Sakit Umum Daerah. Namun pembangunan Zona Integritas di unit-unit tersebut belum memberikan dampak signifikan dan internalisasi perubahan di dalam unit kerja/ PD terkait;
 - l. Telah berupaya dalam mempermudah pelayanan publik dan menciptakan berbagai macam inovasi sesuai dengan PD nya, seperti inovasi Galuh Sanggam dan Dik Jamila milik Disdukcapil, untuk mempermudah pelayanan dokumen kependudukan, registrasi, dan pendataan elektronik milik RSUD Balangan. Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pemanfaatan hasil survei kepuasan masyarakat dalam memperbaiki kualitas layanan, penerapan kebijakan pemberian kompensasi layanan, dan evaluasi atas dampak dari inovasi yang telah diciptakan.
4. Terkait komponen hasil, menunjukan bahwa pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Balangan memperoleh nilai yang belum cukup memuaskan sehingga masih perlu dilakukan perbaikan. Hal ini karena komponen hasil pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, yaitu pada Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi



(IPAK). Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 38
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Opini BPK	Opini	VP	Badan Pemeriksa Keuangan
2.	Nilai SAKIP	0-100	66,04	Kementerian PANRB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	88,33	Kementerian PANRB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	77,76	Suwei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpx)
5.	Suwei Internal Organisasi	0-100	75,52	SPI Internal oleh KPK

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan suwei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Terus melakukan peningkatan pemahaman reformasi birokrasi dari tingkat pemerintah daerah hingga ke level PD, agar arah perubahan reformasi birokrasi dapat dipahami seluruh pegawai dan budaya kinerja semakin baik. Langkah selanjutnya dalam internalisasi budaya kinerja dengan melakukan survei budaya pemahaman dan budaya kinerja adalah memanfaatkan hasil survei sebagai saran dan masukan perbaikan budaya kinerja di Pemerintah Kabupaten Balangan;
2. Memastikan keselarasan antara rencana aksi yang telah disusun dengan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran, sehingga seluruh kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi reformasi birokrasi adalah selaras untuk mencapai kinerja, dengan target kinerja yang direncanakan dan memperoleh dukungan anggaran dalam pelaksanaannya. Hal tersebut akan mampu mendorong keberhasilan pencapaian kondisi yang ingin diwujudkan;
3. Memaksimalkan peran agen perubahan yang telah ada dengan membuat rencana aksi secara menyeluruh serta melakukan monitoring dan evaluasi

secara berkala terhadap implementasi rencana aksi yang telah disusun dan dilakukan. Terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman tentang peran agen perubahan, serta melakukan dialog antara agen perubahan dan pimpinan unit kerja. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh inovasi yang telah diciptakan oleh agen perubahan telah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat menjadi bagian dari penguatan sistem manajemen organisasi;

4. Melakukan internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK dan melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 (delapan) area pembangunan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau sosialisasikan terhadap seluruh pegawai;
5. Mengoptimalkan area deregulasi kebijakan dengan memanfaatkan hasil identifikasi produk hukum yang telah dilakukan. Langkah selanjutnya adalah menyusun peta keterkaitan antara kebijakan pusat, pemerintah daerah dengan kebijakan dari PD, sebagai alat untuk mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang tumpang tindih dengan kebijakan di atasnya dan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi terkait efektivitas, serta dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan;
6. Menyusun dan memastikan peta proses bisnis yang ada telah sesuai dengan hasil penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan dengan memperhatikan kinerja yang akan dihasilkan;
7. Meningkatkan implementasi *e-government* melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terkait grand design penyelenggaraan e-government yang sudah dimiliki, melakukan penguatan integrasi sistem, dan mendorong pemanfaatan sistem informasi lebih maksimal, baik di lingkup internal pegawai maupun untuk pelayanan publik kepada masyarakat (pengguna layanan), sehingga seluruh pegawai dan masyarakat (pengguna layanan) dapat memperoleh kemudahan pelayanan;
8. Meningkatkan pengelolaan manajemen SOM secara menyeluruh. Mulai dari menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu pada kinerja organisasi, pemanfaatan pohon kinerja dalam menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui dialog kinerja, penyusunan dan evaluasi standar kompetensi jabatan, terus melaksanakan assessment kepada seluruh pegawai, dan menyusun *Human Capital Development Plan* (HCDP). Hasil dari hal-hal

tersebut agar dimanfaatkan dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penerapan manajemen talenta, pemberian reward and punishment, dan perbaikan manajemen SDM;

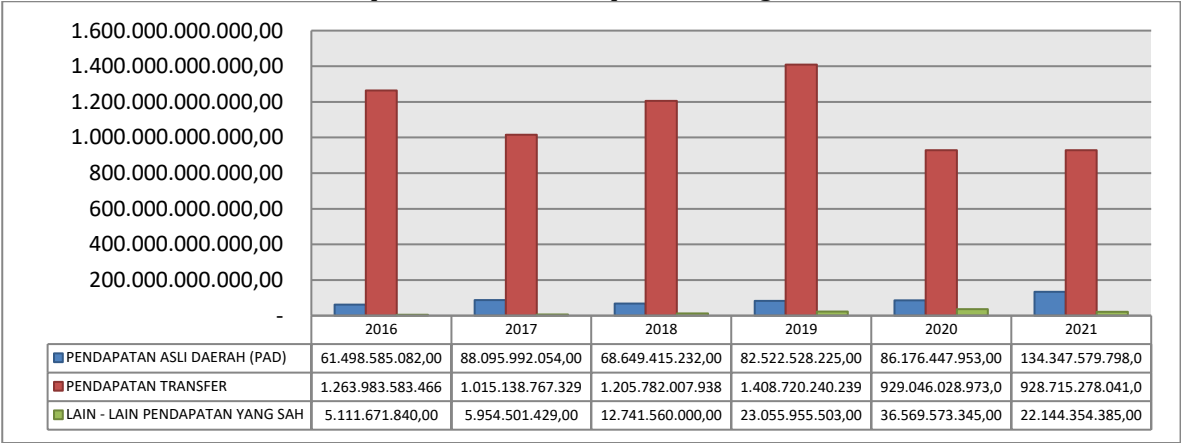
9. Mengoptimalkan aplikasi pemantauan kinerja yang ada dalam pemantauan capaian kinerja, agar bisa melakukan monitoring dan evaluasi pada pencapaian kinerja individu dan organisasi. Diharapkan dengan adanya tambahan fitur monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja akan menambah efektivitas dari pelaksanaan perencanaan berbasis kinerja *performance based planning* serta melihat progres kinerja secara updated,
10. Memperkuat implementasi kebijakan pengawasan internal seperti pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, *Whistleblowing System*, kebijakan benturan kepentingan, pelaporan LHKPN dan LHKASN, serta peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik dengan memanfaatkan hasil survei kepuasan masyarakat dalam menyusun inovasi pelayanan yang lebih baik, mendorong penerapan kebijakan reward and punishment, dan pemberian kompensasi layanan kepada penerima layanan, serta melakukan evaluasi atas efektivitas dan dampak dari inovasi yang sudah berjalan;
12. Meningkatkan strategi komunikasi dan penyebaran informasi untuk meningkatkan kedekatan dengan pengguna layanan. Penguatan strategi komunikasi dan penyebaran informasi ini diharapkan mampu menjelaskan kepada masyarakat (pengguna layanan) terkait berbagai upaya-upaya perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan peningkatan integritas atau budaya anti korupsi;
13. Melakukan koordinasi dengan seluruh instansi pembina indeks hasil antara untuk memperkuat komponen hasil antara yang masih kurang, kemudian dituangkan ke dalam rencana aksi, sehingga hasil indeks hasil antara semakin baik dan mendukung pencapaian penilaian reformasi birokrasi semakin baik.

L. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan dalam kurun waktu tahun 2016 - 2021 menunjukkan fluktuatif, dari sebesar Rp1.330 miliar tahun 2016, 1.109

miliar tahun 2017, 1.287 miliar tahun 2018, 1.514 miliar tahun 2019, 1,051 miliar tahun 2020 dan menjadi Rp 1.085 miliar pada tahun 2021.

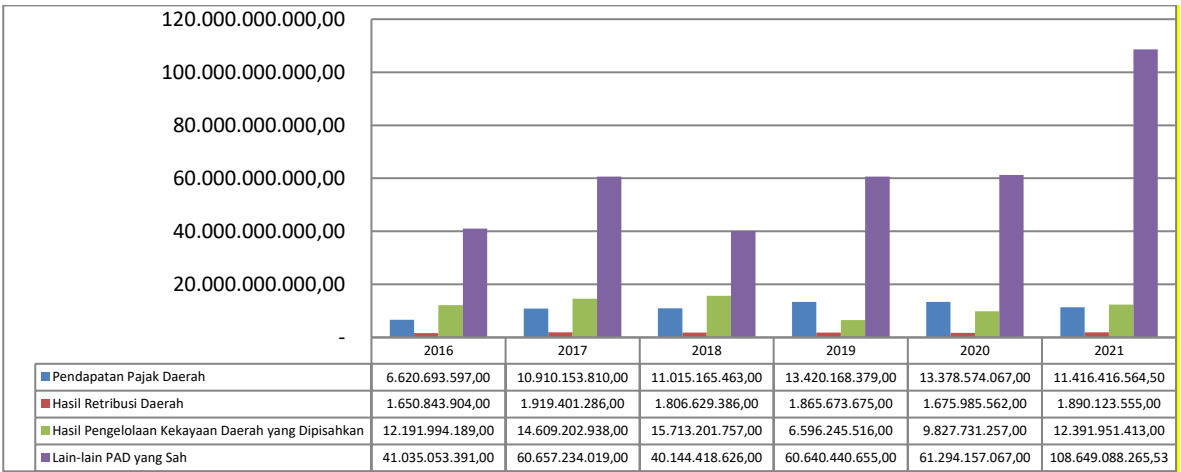
Gambar 2.16
Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan 2016-2021



Sumber : APBD Perubahan 2021, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022

Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan masih didominasi oleh Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode dimaksud tumbuh rata-rata 5,73 %. PAD pada Tahun 2016 sebesar Rp. 61,50 miliar tumbuh menjadi sebesar Rp 134,34 miliar pada tahun 2021 dengan pertumbuhan terendah sebesar -28,33 % pada tahun 2017-2018 disebabkan penurunan pada pos Pendapatan Retribusi Daerah dan penurunan cukup signifikan pada pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun dimaksud dan untuk tahun 2021 terjadi penurunan (-17,19 %) pada pos pendapatan pajak daerah dan adanya pertumbuhan yang cukup tinggi pada pos Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 43,59 % seperti terlihat pada gambar grafik berikut.

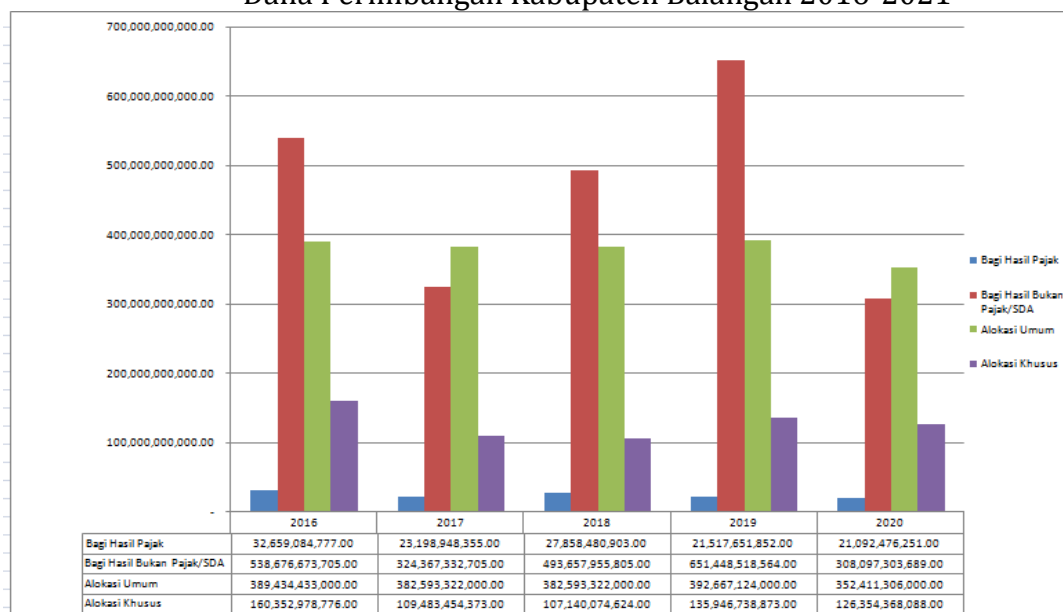
Gambar 2.17
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan 2016-2021



Sumber : APBD Perubahan 2021, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022

Sampai tahun 2020 Dana Perimbangan Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Hasil Pajak, Dana Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selama kurun waktu ini perkembangan dana perimbangan mengalami fluktuasi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk diprediksi pencapaiannya. Dana Perimbangan tumbuh rata-rata -6,98 % selama periode ini dengan pertumbuhan terendah pada tahun 2019-2020 sebesar -35,11 %.

Gambar 2.18
Dana Perimbangan Kabupaten Balangan 2016-2021

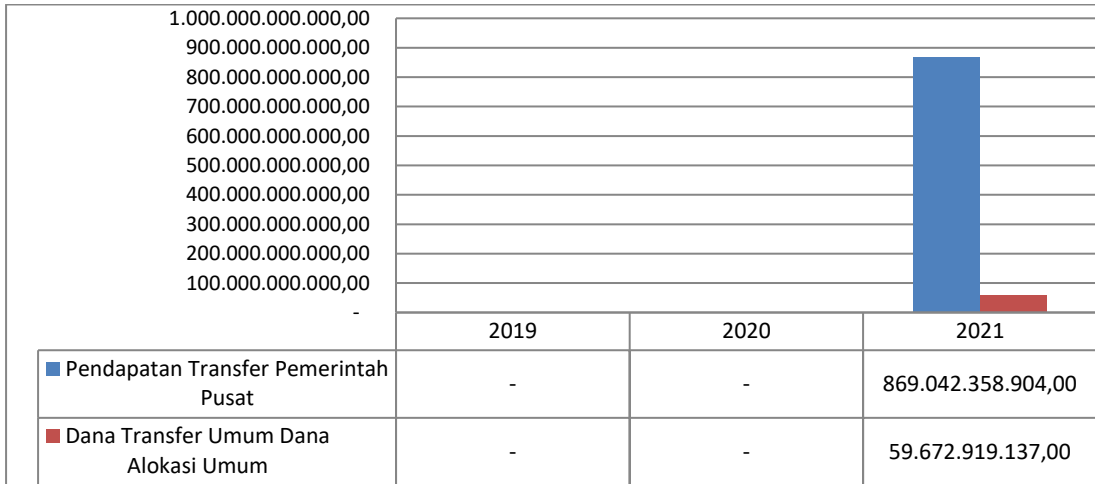


Sumber : APBD Perubahan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021

Transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak selama periode ini tumbuh rata-rata -8,40 % dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017-2018 sebesar 20,09 %. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tumbuh rata-rata 16,55 % selama periode ini. Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tahun 2016 sebesar Rp 5,11 miliar tumbuh menjadi Rp 36,56 miliar pada tahun 2020.

Sedangkan untuk tahun 2021 struktur Pendapatan Transfer terdiri atas pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan pos Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum dengan jumlah sebesar Rp 928,71 miliar.

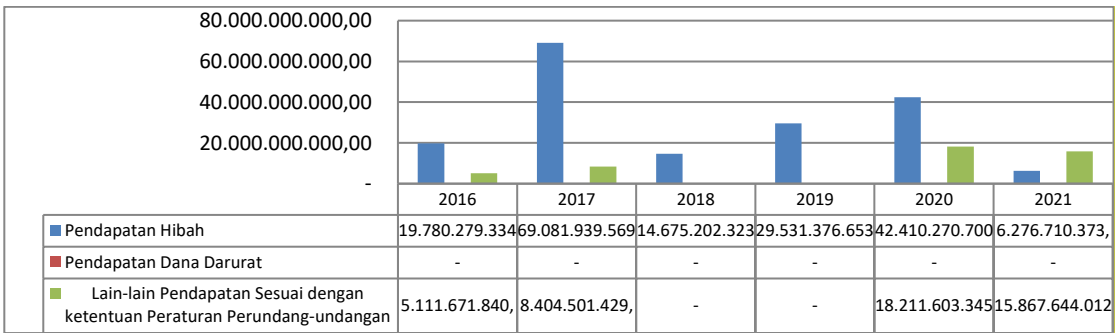
Gambar 2.19
Pendapatan Transfer Kabupaten Balangan Tahun 2021



Sumber : APBD Perubahan 2021, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022

Untuk Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Balangan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan, yaitu pada pos Pendapatan Hibah turun dari 42,41 miliar pada tahun 2020 menjadi 6,27 miliar pada tahun 2021 atau tumbuh -575,68 %. Begitu pula untuk pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dari 18,21 miliar tahun 2020 menjadi 15,86 miliar pada tahun 2021 atau tumbuh -14,77 % pada tahun 2021 seperti pada gambar 2.20

Gambar 2.20
Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Balangan 2016-2021



Sumber : APBD Perubahan 2021, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022

M. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Audit eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas mandiri. Berdasarkan table diatas Opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten



Balangan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 adalah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP adalah opini terbaik setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Opini ini berarti laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintahan Kabupaten Balangan sudah sesuai dengan pedoman atau standar akuntansi keuangan yaitu laporan keuangan lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, standard umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja dan laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten.

Harapannya WTP ini akan selalu dipertahankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan ini sudah dibuktikan dari upaya Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mempertahankan Opini BPK dengan WTP 9 (sembilan) tahun berturut-turut.

N. Predikat SAKIP

Tabel 2. 39
Capaian Predikat LAKIP Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai SAKIP	55,63 (CC)	56,83 (CC)	62,64 (B)	65,45 (B)	66,04 (B)	66,67 (B)

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, 2022

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan memperoleh nilai 66,67 atau predikat B dengan komposisi terdiri dari perencanaan kinerja (21,92), Pengukuran Kinerja (16,53), Pelaporan Kinerja (10,75), Evaluasi Internal (6,06) dan Capaian Kinerja (11,41). Penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Balangan menunjukkan hasil yang baik, namun memerlukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian atas perbandingan tahun 2020 terhadap capaian tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 40
Rincian Pemilaian atas Perbandingan Tahun 2020 dan 2021

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,78	21,92
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,41	16,53
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,58	10,75
d.	Evaluasi Internal	10	5,89	6,06
e.	Capaian Kinerja	20	11,38	11,41
Nilai Hasil Evaluasi		100	66,04	66,67
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Balangan adalah:

1. Perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan telah dikemas sebagai bentuk pertanggungjawaban seluruh penyelenggara pemerintahan yang termuat dalam RPJMD, Renstra, PK, IKU, dan dokumen perencanaan lainnya. Namun demikian, masih terdapat beberapa tujuan strategis pada Perangkat Daerah (PD) yang belum sepenuhnya menggambarkan kinerja *outcome* yang diharapkan dan belum dilengkapi oleh indikator kinerja yang terukur, relevan dan cukup, sehingga pencapaian kinerja pada tujuan strategis belum dapat diukur dan manfaatnya belum dirasakan pada masyarakat;
2. Penjabaran kinerja dari tingkat kabupaten sampai ke individu sudah diimplementasikan melalui perjanjian kinerja berjenjang, namun penjabaran kinerja tersebut belum berdasarkan kerangka berpikir logis (*logical framework*) sehingga belum tercipta hubungan kausalitas antar kinerja berjenjang;
3. Pelaksanaan program-program prioritas pembangunan daerah belum memperhatikan mekanisme *crosscutting* lintas PD. Masing-masing PD hanya berfokus pelaksanaan program kegiatan yang dimilikinya saja tanpa melihat aspek kolaborasi dengan PD lainnya;
4. Evaluasi program masih sebatas evaluasi atas apa yang dilakukan, capaian target fisik dan penyerapan anggaran belum sepenuhnya mampu memberikan informasi mengenai efektivitas dan efisiensi program

terhadap capaian kinerja. Hasil evaluasi program harus mampu memberikan informasi yang rinci terhadap pencapaian kinerja agar mampu memberikan masukan terhadap perencanaan berikutnya;

5. Pemanfaatan aplikasi *monitoring* kinerja yang ada belum berjalan optimal. Informasi kinerja yang dihasilkan dari mekanisme *monitoring* kinerja belum efektif memicu berbagai perbaikan yang diperlukan;

6. Pelaporan kinerja belum memberikan informasi mengenai analisis faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja yang memadai. Hal ini mengakibatkan laporan kinerja belum mampu memberikan umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja tahun berikutnya;

7. Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja melalui inspektorat, namun hasil evaluasi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di lingkungan PD.

Selanjutnya rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyempurnakan perumusan tujuan dan sasaran strategis pada RPJMD maupun renstra PD agar lebih berorientasi outcome dan melengkapinya oleh indikator kinerja yang terukur, relevan dan cukup, sehingga pencapaian kinerja pada tujuan dan sasaran strategis dapat diukur dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat;

2. Memperbaiki penjabaran kinerja dari level pemerintah kabupaten sampai ke individu dengan berpedoman pada kerangka berpikir logis (logical framework) sehingga membentuk keselarasan yang kinerja antar jenjang yang lebih sempurna dan juga dapat dipastikan bahwa setiap pegawai memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah;

3. Melakukan pengidentifikasian dan pemetaan crosscutting serta melakukan koordinasi antar PD dalam rangka mengawal dan melaksanakan program prioritas pembangunan daerah secara kolaboratif;

4. Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan cara memastikan tersedianya informasi terukur atas keberhasilan program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Balangan;

5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja organisasi yang memberikan analisis capaian kinerja yang lebih komprehensif agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk perbaikan kinerja berikutnya;

6. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi serta memastikan rekomendasi hasil rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Adapun beberapa langkah upaya perbaikan telah dilakukan oleh Pemda Balangan sesuai dengan LHE MENPANRB Nomor B/425/AA,05/2022 antara lain memperluas jumlah sampel SKPD, memperbaiki indikator kinerja dalam dokumen perencanaan mengingat Pemda Balangan pada tahun 2021 telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 diikuti dengan penyusunan Renstra SKPD dengan melibatkan pihak dari Bappeda Propinsi, Biro Organisasi Propinsi, dan Kemenpan RB, kemudian Pemda juga telah melakukan perbaikan SAKIP SKPD melalui menyelaraskan antara kinerja individu dalam aplikasi e-Kinerja BKPSDM Balangan, SKP dan perjanjian kinerja individu, melakukan update e-Kino dan melatih beberapa ASN untuk melakukan pengisian capaian kinerja triwulan. Ke depan akan ada integrasi e-Monev triwulan Bappedalitbang. akan keseluruhan program prioritas dan program urusan di RPJMD dengan e-Kino yang berisi monev triwulan program strategis yang menjawab IKU Pemda/IKU SKPD dan PK Kabupaten/PK SKPD.

O. Tingkat Maturitas SPIP

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah menetapkan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi. BPKP memiliki target maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah



(K/L/D) sebagai kelanjutan dari target penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang sebelumnya tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan penilaian implementasi unsur dan sub unsur SPIP.

Tingkat Maturitas SPIP Pemda adalah berada di Level 3. Level tersebut merupakan hasil QA (*Quality Assurance*) atas penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Inspektorat Kabupaten Balangan telah melaksanakan pembinaan ke SKPD mengenai penyusunan SPIP dan membuat database dokumen atas hasil penilaian maturitas yang akan dijadikan referensi dalam penilaian maturitas SPIP lingkup Kabupaten Balangan. Disamping itu Inspektorat Kabupaten Balangan juga telah melakukan evaluasi secara berkala atas efektifitas kebijakan dan implementasi rencana tindak pengendalian secara berkesinambungan serta memiliki program kerja pengawasan yang berbasis resiko.

Kedepan dalam rangka menuju hasil maturitas dengan score nilai yang lebih bagus lagi maka Inspektorat Balangan harus mengatasi berbagai kelemahan yang masih dihadapi saat ini yakni : (1) Jumlah SDM Pengawas tidak sebanding dengan jumlah obyek pemeriksaan, (2) Tingkat kepatuhan SKPD / Desa atas rekomendasi hasil pemeriksaan,(3) Adanya penugasan tambahan yang diberikan oleh Instansi vertikal (kementerian, provinsi, dll.) dan (4) Tindak lanjut hasil pengawsan terlambat ditindaklanjuti oleh SKPD akan mempengaruhi kinerja pengawasan.

Tabel 2. 41
Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2022

P. Inovasi

Beberapa inovasi-inovasi daerah yang menyokong pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat :

1. Batutukar dari DPMPTSP Transnaker
2. Si Suka Meli (Sistem Survey Kepuasan Masyarakat Secara Online) dari DPMPTSP Transnaker
3. PulpenDacil Kab. Balangan (Perluasan Layanan Pendidikan di Daerah Terpencil) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Dik Jamila Me WA (Dikampung Saja, Kami Melayani Melalui WA) dari Disdukcapil
5. Si-Suka (Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar) dari Disdikbud
6. Direkam Di Sekolah, Sweet Seventeen, KTP-Ku Datang dari Disdukcapil
7. Kompok Panggul (Komoditas Porang Pangan Unggul) dari Bappedalitbang
8. Coaching Klinik Penilaian Kinerja dari BKPSDM
9. Batarbangan (Berita Seputar Balangan) dari Diskominfo
10. Toko Tani Center dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
11. La-Lisa (Layanan Aduan Online Whatsapp) dari Satpol PP
12. E-Bapak Tani dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
13. Mama TB (Masyarakat Mawas TB) dari UPT Puskesmas Uren
14. Cepat Tau (Cegah Penyakit Diabetes Tidak Takut Periksa) dari UPT Puskesmas Juai
15. Candulita (Catatan Posyandu Balita) dari UPT Puskesmas Halong

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Keberhasilan pendidikan akan berakibat pada peningkatan kualitas dasar pelaku pembangunan yang berdampak pada keberhasilan pembangunan.

1) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Tahun 2021 HLS di Kabupaten Balangan 12,47 tahun dengan capaian kinerja 99,04%. HLS 12,47 berarti secara rata-rata menggambarkan penduduk usia 7 tahun akan mampu mengenyam pendidikan

formal selama kurang lebih 12,46 tahun (sekitar kelas 3 SLTA). Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019) yang hanya mencapai 12,37 tahun.

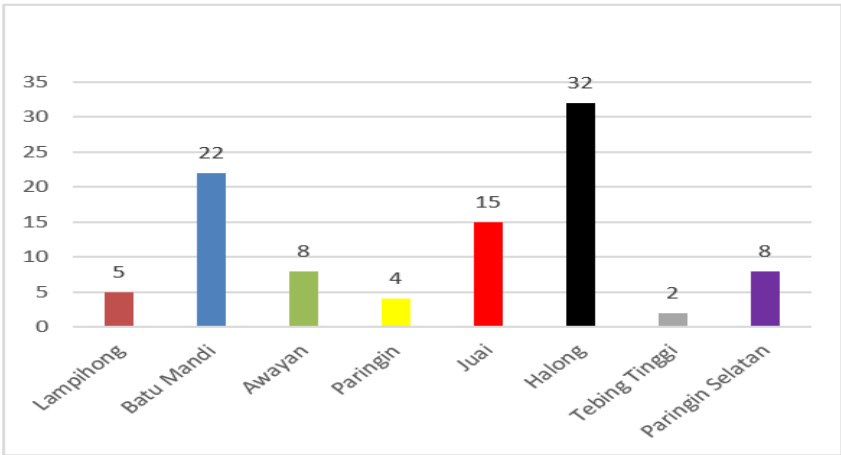
Tabel 2. 42
Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Balangan Tahun 2021

INDIKATOR	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,46 Tahun	12,59 tahun	12,47 tahun	99,04%

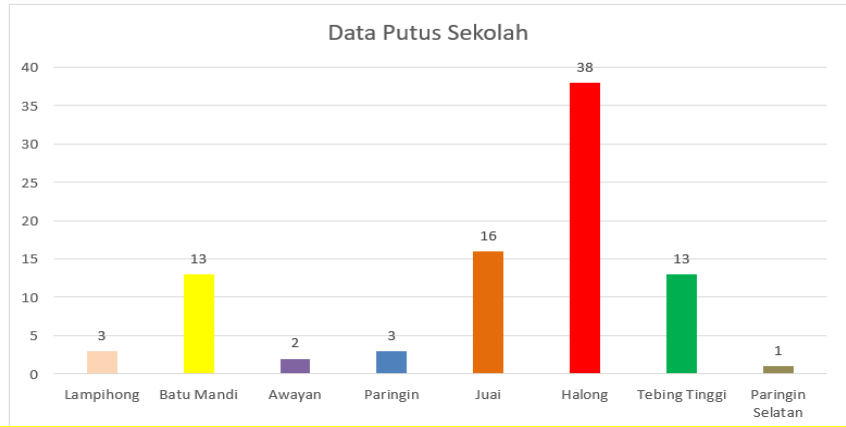
HLS menjadi salah satu dasar dimensi pembentukan IPM. Rendah dan lambatnya peningkatan HLS Kabupaten Balangan menjadi salah satu persoalan dan tantangan yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan hingga hanya mampu berada di peringkat ke 10 di Propinsi Kalimantan. Masih belum optimalnya kinerja HLS disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masih belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan karena belum optimalnya pendidikan kesetaraan dalam melayani masyarakat yang tidak mampu dan jarak yang jauh (terpencil) untuk mengakses pendidikan formal dimana masih ditemukan tidak tersedianya satuan pendidikan dalam jarak terjangkau dengan berjalan kaki maksimal 3 KM untuk SD/MI dan 6 KM untuk SMP/MTs dari kelompok permanen di daerah terpencil pemukiman. Masih rendahnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah yaitu hanya 61,68% yang memicu belum tercapainya target pendidikan wajib belajar 12 tahun dimana masih banyak di Kabupaten Balangan ditemukan Anak Putus Sekolah (APS) setiap tahunnya.

APS tahun ajaran 2021/2022 sebanyak 0,64% atau 96 orang untuk tingkat SD/MI dan 1,68% atau 89 orang untuk tingkat SMP/MTs. Masih tingginya APS tersebut antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga dan diperparah dengan adanya pandemic covid-19 yang memicu anak memilih bekerja karena terlalu lama tidak masuk sekolah sehingga menimbulkan kejenuhan dan akhirnya ketika sudah bekerja mereka merasa nyaman karena mampu memiliki uang sendiri.

Gambar 2.21
Putus Sekolah Tingkat SD



Gambar 2.22
Putus Sekolah Tingkat SMP



Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan HLS tahun 2021 di Kabupaten Balangan, karena dengan meningkatkan HLS dapat meningkatkan IPM Kabupaten Balangan. Upaya yang dilakukan antara lain dengan Akreditasi Nasional Berbasis Komputer (ANBK), sosialisasi agar masyarakat tidak putus sekolah akibat pandemic covid-19 meskipun proses belajar mengajar masih pertemuan daring selama beberapa bulan, sosialisasi sekolah penggerak, memberikan bantuan beasiswa sehingga memotivasi para siswa untuk tetap sekolah. Beasiswa di berikan kepada prestasi UN SD/MI sebanyak 593 orang, besiswa prestasi UN SMp/MTs sebanyak 126 orang, beasiswa prestasi UN SMA/MA/SMK sebanyak 80 orang, beasiswa prestasi akademik sebanyak 60 orang, beasiswa luar negeri sebanyak 12 orang, beasiswa kedokteran sebanyak 12 orang, beasiswa tidak mampu sebanyak 15 orang dengan anggaran sebesar Rp 5.044.500.000,-.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga berupaya memenuhi standar sarana dan prasarana di beberapa sekolah baik di SD, SMP maupun SMA seperti pembangunan ruang laboratorium, pembangunan ruang perpustakaan, rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi toilet, rehabilitasi ruang guru, rehabilitasi ruang UKS di beberapa sekolah. Yang tidak kalah penting upaya yang dilakukan untuk meningkatkan HLS adalah peran guru agar fokus dalam mendidik dan memotivasi muridnya untuk terus bersekolah sehingga pemerintah daerah memberikan apresiasi dengan meningkatkan kesejahteraan guru yaitu memberikan insentif kesejahteraan pada guru.

2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Dimensi RLS terdiri atas penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS Kabupaten Balangan pada tahun 2021 sebesar 7,69 tahun, Dengan kata lain rata-rata penduduk di Kabupaten Balangan yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMP/ sederajat atau masih belum bisa menikmati program wajib belajar (WAJAR) 9 tahun.

Tabel 2. 43
Rata-rata lama sekolah

INDIKATOR	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,55 Tahun	7,82 tahun	7,69 tahun	98,33%

Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Balangan masih dibawah angka Provinsi Kalimantan Selatan. RLS menjadi salah satu dasar dimensi pembentukan IPM. Rendah dan lambatnya peningkatan RLS Kabupaten Balangan menjadi salah satu persoalan dan tantangan yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan hingga saat ini hanya mampu berada di peringkat ke 10 di Propinsi Kalimantan. Kinerja RLS Kabupaten Balangan masih dibawah target yang diinginkan yaitu hanya 7,69 tahun dengan capaian kinerja 98,33%.

Persoalan peningkatan RLS Kabupaten Balangan disebabkan oleh banyaknya penduduk diatas umur 25 tahun di Kabupaten Balangan yang hanya mengenyam pendidikan di SD dan juga banyak yang tidak melanjutkan kejenjang SMP serta masih ada penduduk yang tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Selain hal tersebut juga dipengaruhi oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A belum 100% yaitu hanya 92,81%, APS SMP/MTs/Paket B hanya 67,65% dan APS SMA/SMK/MA/Paket C hanya 68,74% serta masih rendahnya Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs hanya 73,77%.

3) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka yang dimaksud dengan PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga Pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Untuk TK disebut sebagai PAUD Formal sedangkan di luar TK disebut sebagai PAUD Non Formal.

Pada tahun 2021 tercatat jumlah 4.888 anak di usia 5-6 tahun dan 4.364 yang sudah mendapatkan pelayanan Pendidikan anak usia dini (PAUD) atau cakupan layanan sekitar 89,28%. Dan masih terdapat 16 desa dari 157 desa dan kelurahan di Kabupaten Balangan yang masih belum memiliki PAUD.

4) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Misal, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan



jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. APK di Kabupaten Balangan Tahun 2021 pada jenjang PAUD sebesar 89,28 dari sebelumnya di tahun 2020 sebesar 71,77, sedangkan jenjang SD/MI/Paket A di tahun 2021 menjadi 108,08 dari sebelumnya di tahun 2020 sebesar 108,35 dan SMP/MTs/Paket B di tahun 2021 sebesar 85,26 dari sebelumnya di tahun 2020 sebesar 86,12. APK SMA/SMK/Paket C tahun 2021 sebesar 98,02 dari sebelumnya di tahun 2020 sebesar 95,00

5) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B) turut diperhitungkan. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Angka partisipasi murni (APM) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2021 sebesar 99,17 dari sebelumnya di tahun 2020 sebesar 99,27, sedangkan APM jenjang SMP/MTs di tahun 2021 sebesar 76,28 dari sebelumnya di tahun 2020 sebesar 82,69 dan APM jenjang SMA/SMK di tahun 2021 sebesar 65,83 dari sebelumnya di tahun 2020 sebesar 70,84.

Sedangkan untuk ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah dapat dilihat pada tabel 2.44. berikut.

Tabel 2. 44
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	208	208	209	211	212
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	14246	14631	14933	15164	15202
1.3	Rasio	1 : 68	1 : 70	1 : 71	1:73	1:72
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	42	42	42	42	43
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	7304	7100	7258	6985	6971



2.3	Rasio	1 : 174	1 : 169	1 : 173	1:166	1:162

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, 2021

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu sekolah untuk menampung penduduk usia sekolah. Berdasarkan tabel, rasio ketersediaan sekolah terhadap murid SD/MI sebesar 71 atau sepersepuluh ribu (729.038) yang artinya bahwa satu sekolah dapat menampung 71 siswa atau sepersepuluh ribu (729.038) siswa. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs memiliki rasio ketersediaan sebesar 166 atau sepersepuluh ribu (1.663.095) dimana satu sekolah dapat menampung 166 siswa atau sepersepuluh ribu (1.663.095) siswa.

Tabel 2. 45
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	1791	1786	1761	1939	1945
1.2	Jumlah Murid	14817	15085	14949	15216	15090
1.3	Rasio	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	621	614	601	594	670
2.2	Jumlah Murid	5977	5840	5616	5555	5135
2.3	Rasio	1:9	1:9	1:9	1:9	1:9

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, 2021

Rasio guru dan murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dan murid pada suatu jenjang tertentu. Rasio guru murid ini dapat menggambarkan beban tanggungan yang harus dijalani oleh seorang guru pada suatu daerah. Semakin kecil nilai rasionya, maka akan semakin kecil juga beban tanggungan seorang guru, sebaliknya semakin besar nilai rasionya, maka akan semakin besar juga beban tanggungan seorang guru diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah. Rasio ketersediaan guru di Kabupaten Balangan terhadap murid SD/MI sebesar 8 atau sepersepuluh ribu (873,8) siswa yang artinya bahwa setiap satu guru memiliki tanggungan sebanyak 8 murid atau sepersepuluh ribu (87.380) siswa. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs memiliki rasio

ketersediaan sebesar 10 atau sepersepuluh ribu (95.537) siswa dimana satu guru mengampu 9 siswa atau sepersepuluh ribu (95.537) siswa.

Tabel 2. 46
Perkembangan Angka Melek Huruf
di Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	59,415	65,494	65.831	97.897	97.897
2	Jumlah penduduk usai 15 tahun ke atas	59,775	65,779	66.116	98.396	98.182
3	Angka Melek Huruf	99.40	99.57	99,57	99,49	99,71

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Balangan tahun 2021

Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf yang didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pada tahun 2021, secara rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Balangan yang dapat membaca dan menulis sebesar 99,71 %.. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penduduk di Kabupaten Balangan sudah dapat menikmati pendidikan dengan baik, hal ini karena adanya kebijakan-kebijakan dalam penuntasan keaksaraan fungsional. Terdapat 0,29 % penduduk yang diindikasikan buta huruf. Kedepannya akan tetap melaksanakan kegiatan lebih intensif dalam penuntasan buta huruf melalui kegiatan keaksaraan fungsional khususnya pada daerah-daerah terpencil.

6) Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Untuk penghitungan ini termasuk pendidikan Non Formal (Paket A, dan Paket B). Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Balangan pada tahun 2021 untuk kelompok umur 7-12 tahun (APS SD/MI) sebesar 89,11.

Tabel 2. 47



Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1.1	Jumlah murid usia 7-12 thn	12.420	12.313	12.694	13.661	13.547
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	14.246	14.631	14.933	15.164	15.202
1.3	APS SD/MI	87,18	84,16	85,01	90,09	89,11
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah murid usia 13-15 thn	4.267	4.292	4.226	5.089	4.414
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	7.304	7.100	7.258	6.985	6.971
2.3	APS SMP/MTs	58,42	60,45	58,23	72,86	63,32

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, 2021

Pada kelompok umur 13-15 tahun, capaian Angka Partisipasi Sekolah sebesar 63,32. Angka Partisipasi Sekolah yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum serta makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya Angka Partisipasi Sekolah pada setiap kelompok umur. Dilihat dari kelompok umur di Kabupaten Balangan kelompok umur 7-12 tahun merupakan kelompok umur dengan peluang lebih besar dalam mengakses pendidikan serta kelompok umur dengan anak usia sekolah terbanyak dibandingkan dengan kelompok umur lainnya.

7) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun. Angka ini sangat dipengaruhi oleh jumlah anak putus sekolah.

Pada tahun 2021 angka putus sekolah pada SD/MI sebesar 0,64, SMP/MTs sebesar 1,68 dan SMA/SMK sebesar 1,11, hal ini menunjukkan bahwa masih ada murid yang putus sekolah. Putus sekolah diantaranya disebabkan banyak anak putus sekolah yang terjadi di daerah terpencil karena faktor ekonomi keluarga yang



mengharuskan anak ikut bekerja/berkebun membantu orang tua, sedangkan kebunnya selalu berpindah atau tidak menetap.

Persoalan putus sekolah ini tetap menjadi perhatian Pemerintah Daerah, karena diharapkan semua anak di Kabupaten Balangan terpenuhi kebutuhannya akan Pendidikan sesuai standar pelayanan minimal Pendidikan serta mencapai wajib belajar 12 tahun.

8) Angka Melanjutkan (AM)

Pada tahun 2020, angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs mengalami kenaikan dari 80,16 % di tahun 2019 menjadi 83,48 %, begitu juga yang dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2019 dari 97,12 menjadi 97,92. Sedangkan untuk jenjang SD/MI terjadi penurunan persentase angka putus sekolah dari 0,06 tahun 2019 menjadi 0,5.

Berikut rekapitulasi capaian indikator Pendidikan Kabupaten Balangan dari tahun 2016 – 2021.

Tabel 2. 48
Rekapitulasi Capaian Indikator Pendidikan
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1. Pendidikan						
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1.2	Angka partisipasi kasar (PAUD)	49,35	47,6	70,27	71,77	89,28
	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	103,12	100,11	98,78	108,35	108,08
	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	95,1	80,53	77,38	86,12	85,26
	Angka partisipasi kasar SMA/SMK/Paket C				95,00	98,02
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan	100	100	100	100	100
1.4	Angka Partisipasi Murni :					
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	87,18	84,64	85,01	99,27	99,17
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	58,42	60,45	58,23	82,69	76,28
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	46,35	49,15	51,03	70,84	65,83



No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.5	Angka partisipasi sekolah :					
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	95,09	91,7	91,22	89,83	92,88
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	84,08	84,94	65,97	83,87	67,65
1.5.3	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	54,37	56,3	57,36	54,19	68,74
1.6	Angka Putus Sekolah :					
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,08	0,04	0,06	0,5	0,64
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,37	0,15	0,07	0	1,68
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,02	0,04	0,04	0	1,11
1.7	Angka Kelulusan:					
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	97,01	100	100	100	100
1.8	Angka Melanjutkan (AM):					
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	88,74	86,39	80,16	83,48	73,77
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	95,38	98,65	97,12	97,92	90,88
1.9	Fasilitas Pendidikan:					
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100%	100%	100%	100%	100
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	100%	100%	100%	100%	100
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	116,47	115,04	114,67	114,23	115
1.11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	30,26	30,56	30,72	31,34	31,06
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1159,95	1163,86	1148,55	1143,8	1197,63



No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.13	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	918,2	856,26	882,1	885.01	986,03
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1:12	1:12	1:12	1:12	1:11
1.15	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1:25	1:25	1:25	1:25	1:23
1.16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	93,81%	94,49%	91,54%	92,23%	95,93
1.17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	97,78	98,76	98,77	99.78	99,7
1.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99.60%	99.69%	99.70%	99.49%	99,71

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, 2021

Pendidikan diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas yang nantinya dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam membangun daerah. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan upaya meningkatkan kualitas SDM, agar SDM dari daerah Balangan dapat menjadi manusia seutuhnya, sehat jasmani rohani, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas SDM yang demikian ini menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan. SDM Kabupaten Balangan diharapkan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain di bursa kerja dan dalam kancah dunia usaha. Adapun Indikator capaian pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Balangan antara lain angka partisipasi Kasar/APK, Angka partisipasi murni/APM, dan Angka putus sekolah, serta Angka kelulusan, fasilitas pendidikan, rasio ketersediaan sekolah, rasio guru serta angka melek huruf.

Berdasarkan peraturan SPM yang baru yaitu PP Nomor 2 tahun 2018, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) pendidikan anak usia dini;
- b) pendidikan dasar; dan
- c) pendidikan kesetaraan.



Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a) Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- b) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
- c) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Tahun 2020 Dinas Pendidikan melaksanakan pendataan dan inventarisir atas warga belajar yang putus sekolah melalui aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada tahap selanjutnya nama-nama anak yang diduga suspect Anak Tidak Sekolah dilihat NIK nya pada aplikasi SPM kemudian ditelusuri dan diverifikasi pada aplikasi Manajemen Dapodik, kalau dari hasil penelusuran ada namanya berarti anak itu bukan Anak Tidak Sekolah. Sementara perolehan nama yang ditemukan adalah sebanyak 51 orang atau 1,3% orang anak dari data suspect yang diperkirakan untuk Kabupaten Balangan sebanyak 3.915 turun dari tahun 2019 yaitu sebanyak 5.674. Untuk data pada bidang kesetaraan masih dilakukan pendataan dengan menyebar angket pada masyarakat dengan bekerjasama dengan desa, sedangkan capaian pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 49
Capaian Pelayanan Dasar Pendidikan Kabupaten Balangan

No	Jenjang pendidikan	Jumlah penduduk	Jumlah murid perjenjang	Persentase penerima layanan
1	PAUD (5-6 tahun)	4819	3.207	66,55
2	Dasar (7-15 tahun)	22.149	18.750	84,65
3	Kesetaraan (7-18 tahun)	29.488	23.665	80,36

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, 2020

B. Urusan Kesehatan

Terwujudnya pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang kesehatan. Oleh karena itu, beberapa indikator digunakan dalam analisis guna melihat perkembangan kondisi kesehatan. Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai

dengan tahun 2021, berikut adalah capaian indikator Kesehatan Kabupaten Balangan.

Tabel 2. 50
Capaian Indikator Kesehatan
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2. Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	13,3	18	16,5	16,3	7	13
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	2336	2267	2240	2209	2253	2265
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	2,9	2,2	3,1	2,2	1,3	0,88
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	8,9	12,7	11,1	11,3	7	10
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	214	176	178	181	89	309
2.6	Rasio posyandu	10	14	16	24	19,9 5	1,6
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 100.000 penduduk						
2.7.1	Rasio puskesmas	9	9	9	9,48	9,08	
2.7.2	Rasio poliklinik	-	-	-	-	2,27	
2.7.3	Rasio puskesmas pembantu	17	16	16	16,59	14,3 8	
2.8	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	0,78	0,78	0,78	0,79	0,75	1,12
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	-	0,74	0,5	0,36	0,43	10
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk						
2.10.1	Dokter gigi	3,19	0,28	3,86	5,3	5,3	8,3
2.10.2	Bidan	162,51	2,11	237,83	241,6	182,3	184,6
2.10.3	Perawat	168,88	2	221,61	210,3	190,6	189,1
2.10.4	Perawat gigi	15,14	0,45	0,5	0,69	0,62	18
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	84,1	88,3	111	123	101	100
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80	82	79	80	82	98,6



No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	87,3	86,6	85,49	94,27	78,2	40,38
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100
2.15	Prevalensi Stunting	-	-	34,3	26,7	25,7	17,9
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	81,02	79,67	90,1	89,2	82	73,8
2.17	Non polio AFP rate per 100.000 pddk	0	2	1	2	0	2
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	-	821	1,032	1,529	759	97,25
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100%	100%	100%	100%	100%	29%
2.20	Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	58	137	386	189	294	135
2.21	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	46,87	86,82	302,73	143,8	224	101
2.22	Jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	178	179	386	189	294	135
2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	78%	94,6%	96%	90%	89%	90%
2.24	Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	149	44	104	165	63	8
2.25	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	186%
2.26	Penderita diare yang ditangani	2.221	2.437	1.447	1.378	1.510	100
2.27	Angka kejadian Malaria	231,01	76,86	80,31	63,15	42,67	29,29
2.28	Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total populasi	0	0,003	0,008	0,47	0,09	0,05
2.29	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100
2.30	Cakupan kunjungan bayi	92	81,2	-	76,3	81,7	98
2.31	jumlah puskesmas	12	12	12	12	12	12
2.32	jumlah puskesmas pembantu	22	21	21	21	18	18
2.33	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	67	68	68	70	73	80
2.34	Cakupan pelayanan nifas	93	78	76	78	81	88



No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.35	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100	100	100	100	100	100
2.36	Cakupan pelayanan anak balita	54	52,6	51	61,7	76	95,6 3
2.37	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100	100	100	100	100	100
2.38	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	97	82	85	94,27	15,1 3	71,6 9
2.39	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100
2.40	Persentase Keluarga yang Melaksanakan PHBS	-	-	35,59	33	43	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, 2021

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Balangan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai. Pembangunan tersebut diarahkan kepada peningkatan fasilitas kesehatan dan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan dan ketersediaan obat.

1). Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 Kelahiran Hidup (KH). Kematian bayi adalah bayi yang mati dan mati dini <28 hari kelahiran. Kematian bayi dibagi menjadi 2, yaitu kematian bayi dini yang terjadi selama minggu pertama kehidupan (0-6 hari) dan kematian bayi lambat yang terjadi 7-28 hari kehidupan. Kematian bayi menurut penyebabnya yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya atau didapat selama kehamilan dan kematian bayi eksogen atau kematian post-neonatal disebabkan oleh faktor faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar (Rachmadiani dkk., 2018).

AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Berdasarkan tabel diatas, AKB di Kabupaten Balangan tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2020, dari 7/1.000 KH ditahun 2020 menjadi 13/1.000 KH AKB ditahun 2021 dengan total kematian bayi jika dikonversi ke absolut sebanyak 30 orang, yang antara lain disebabkan oleh Bayi Berat lahir Rendah (BBLR) sebanyak 17 orang, asfiksia sebanyak 4 orang, sepsis neonatorum 1 orang, pneoumonia 1 orang dan kasus lainnya sebanyak 4 orang. Kematian bayi tersebut terjadi di rumah sebanyak 2 orang, diperjalanan 1 orang dan di RS sebanyak 27 orang (RS tipe C sebanyak 21 orang, tipe B sebanyak 6 orang). Jika di bandingkan dengan Propinsi Kalimantan Selatan maka kabupaten Balangan termasuk penyumbang negatif karena berada diatas AKB Propinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 9/1.000 KH dan berada di urutan ke 11 tertinggi se Kalimantan Selatan

Tingginya kematian bayi tahun 2021 di Kabupaten Balangan salah satu penyebabnya karena masih banyaknya ibu hamil dengan resiko tinggi yang terkait erat dengan faktor endogen kematian bayi. Ibu hamil resiko tinggi tersebut antara lain ibu hamil dengan anemia sebanyak 464 orang, ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) sebanyak 323 orang, ibu hamil dengan penyakit penyerta seperti TBC, hipertensi maupun lainnya sebanyak 86 orang yang tentunya berdampak terhadap kelahiran bayi dengan BBLR dan asfiksia, yang mana selama tahun 2021 ditemukan kasus BBLR di kabupaten Balangan sebanyak 238 orang dengan kematian BBLR berjumlah 17 orang.

Adanya kematian bayi karena sepsis naonatorum dan pneoumonia menggambarkan masih adanya kematian bayi yang dipengaruhi oleh faktor eksogen yaitu faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar karena masih kurang optimalnya pelayanan bayi baru lahir dan bayi yang sesuai standar. Pelayanan bayi baru lahir sesuai standar tersebut antara lain terdiri atas standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama

periode neonatal, dengan ketentuan Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari, Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari. Sedangkan untuk standar kualitas antara lain Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam) yang meliputi pemotongan dan perawatan tali pusat, inisiasi Menyusu Dini (IMD), injeksi vitamin K1, pemberian salep/tetes mata antibiotic dan pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0). Sedangkan untuk Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) meliputi konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif, memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM, pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1, imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan dan penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Kurang optimalnya pelayanan terhadap bayi baru lahir dan bayi sesuai standar yang diamanatkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang terus disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tentu dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang proses kehamilan dan kehamilan berisiko tinggi, perawatan bayi baru lahir dan bayi yang berisiko tinggi. Selain itu juga dipengaruhi oleh kompetensi bidan di desa maupun di puskesmas serta masih adanya beberapa desa yang tidak ada bidan di desa yang merupakan akses terdekat untuk memberikan pelayanan kepada bayi baru lahir maupun bayi sehingga karena tidak ada bidan di desa tersebut akhirnya ditemukan kematian bayi seperti di Desa Batumandi.

Diketahuinya sebab kematian bayi dari sebelum tahun 2021 hingga tahun 2021 maka Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi masyarakat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kematian bayi tersebut. Upaya yang dilakukan selama tahun 2021 antara lain dengan mengintervensi faktor endogen penyebab kematian bayi yaitu dengan harapan tidak melahirkan BBLR yang merupakan salah satu penyebab terbesar kematian bayi di Kabupaten Balangan selama 5 tahun terakhir. Selain itu juga memberikan tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil sehingga dengan mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai standar maka tidak akan mengalami anemia pada saat kehamilan yang

terkait erat dengan faktor endogen serta upaya penanganan yang komprehensif terhadap ibu hamil anemia baik anemia ringan maupun berat.

Seperti disebutkan diatas faktor kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang proses kehamilan, maupun perawatan terhadap bayi baru lahir dan bayi yang merupakan pemicu faktor eksogen terhadap kematian bayi maka Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan di tahun 2021 berkoordinasi dengan 12 puskesmas mengadakan kelas ibu hamil sebanyak 58 kelas dan kelas ibu balita sebanyak 20 kelas, sehingga dengan adanya kelas ibu hamil dan balita tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan untuk ibu hamil dan keluarga tentang kehamilan, persiapan persalinan serta ibu dan keluarga juga tahun bagaimana perawatan yang benar terhadap bayi baru lahir dan bayi. Walaupun sudah ada kelas ibu hamil dan kelas balita sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga namun tentu masih sangat jauh dari yang diharapkan karena setidaknya setiap desa atau kelurahan memiliki kelas ibu hamil dan kelas balita yang setiap kelasnya/kelompok berjumlah sebanyak 10 orang ibu hamil dan 10 orang ibu balita yang didampingi keluarga pada waktu mengikuti kelas ibu hamil dan kelas balita.

Upaya lain yang dilakukan oleh Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi untuk meningkatkan kompetensi bidan dalam mendeteksi komplikasi ibu hamil dan risiko tinggi pada bayi baru lahir maka diadakan Oreintasi Neonatal Essensial dan pembelajaran kasus kematian BBLR oleh dr Spesialis Anak, pelatihan *Blended Learning* Dokter, pelatihan *Blended Learning* Bidan, dan *Blended Learning* MTBS dan juga melaksanakan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) baik tingkat puskesmas maupun kabupaten. Walaupun sudah dilaksanakan peningkatan kompetensi bidan namun kematian bayi di tahun 2021 tetap ditemukan bahkan meningkat dengan signifikan karena dari seluruh bidan yang ada di kabupaten Balangan hanya sebagian kecil yang mendapatkan pelatihan tersebut.

Walaupun RSUD Kabupaten Balangan sudah terakreditasi dan jumlah dokter spesialis anak sebanyak 2 orang untuk menangani apabila ada bayi baru lahir dan bayi yang berisiko tinggi yang di rujuk ke rumah sakit akan segera mendapatkan penanganan yang komprehensif, namun masih saja ada ditemukan kematian bayi di RS sebanyak 27 orang, hal ini kemungkinan dipengaruhi seperti yang disebutkan diatas yaitu terkait kompetensi bidan di desa maupun puskesmas dalam hal mendiagnosa untuk menentukan resiko tinggi dan rujukan yang akhirnya menyebabkan terlambat mengenali tanda bahaya dan risiko tinggi dan mengambil keputusan serta terlambat dirujuk ke RS. Selain itu kematian bayi di RS tentu juga

dipengaruhi kelengkapan alat di ruang Perinatologi RSUD Kabupaten Balangan yang masih terbatas dalam menangani bayi dengan komplikasi berat, sehingga untuk kasus berat yang memerlukan alat yang canggih seperti berat badan bayi lahir yang sangat rendah tidak dapat ditangani dengan komprehensif dan pada akhirnya kematian tidak dapat dihindari.

Berbagai upaya dilakukan selanjutnya pada tahun 2022 oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menekan kematian bayi antara lain dengan menggunakan anggaran tambahan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 2.761.653.000,- seperti yang disebutkan sebelumnya diatas.

2). Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) menurut batasan dari *The Tenth Revision of International Classification of Diseases* (ICD-10) adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan atau dalam 42 hari setelah kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut, atau penanganannya, akan tetapi bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan (WHO, 2015).

Kematian ibu dibagi menjadi kematian langsung dan tidak langsung. Kematian ibu langsung adalah sebagai akibat komplikasi kehamilan, persalinan, atau masa nifas, dan segala intervensi atau penanganan tidak tepat dari komplikasi tersebut. Kematian ibu tidak langsung merupakan akibat dari penyakit yang sudah ada atau penyakit yang timbul sewaktu kehamilan yang berpengaruh terhadap kehamilan, misalnya malaria, anemia, HIV/AIDS, dan penyakit kardiovaskular (Saifudin, 2010). Penyebab tidak langsung kematian ibu adalah masih banyaknya kasus 3 terlambat. Kasus 3 terlambat meliputi terlambat mengenali tanda bahaya persalinan dan mengambil keputusan terlambat dirujuk ke fasilitas kesehatan, terlambat ditangani oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (GKIA, 2016).

Berdasarkan tabel diatas, AKI tahun 2021 di Kabupaten Balangan terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 89/100.000 Kelahiran Hidup (KH) 2 orang, menjadi 309/100.000 KH (7 orang) ditahun 2021 atau terjadi peningkatan sebesar 220/100.000 KH (5 orang). 7 orang kematian ibu tersebut dengan rincian sebagai berikut, 2 orang di Kecamatan Batumandi di Desa Bungur dan Desa Batumandi, di Kecamatan Juai 2 orang yaitu Desa Mihu dan

Lalayau, di Kecamatan Lampihong 2 orang yaitu di Desa Merah dan Lampihong Selatan, Kecamatan Paringin Selatan 1 orang yaitu di Desa Harapan Baru dan 1 orang. 7 orang kematian ibu tersebut antara lain disebabkan oleh penyebab langsung yaitu 2 orang karena perdarahan, 2 orang karena Pre Eklamsi Berat, 1 orang karena hipertensi dan 1 orang karena penyerta lainnya yaitu dugaan TBC dan 1 orang dugaan preeklamsia yang mana kematiannya terjadi di rumah ibu sebanyak 2 orang, 1 orang di puskesmas dan sebanyak 4 orang di RS. AKI di kabupaten Balangan sebesar 309/100/000 dan jika di bandingkan dengan Propinsi Kalimantan Selatan termasuk penyumbang negatif karena berada diatas AKI Propinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 205/100.000 KH dan berada di urutan ke 3 tertinggi se Kalimantan Selatan. Jika di Bandingkan dengan yang di inginkan standar *Sustainable Development Goals* (SDGs) AKI di Kabupaten Balangan termasuk penyumbang negatif karena berada diatas 80/100.000 KH.

Kematian ibu selain penyebab langsung seperti yang disebutkan diatas tentu juga dipengaruhi oleh penyebab tidak langsung yang tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor seperti masih banyaknya ibu hamil dengan resiko tinggi antara lain ibu hamil dengan anemia sebanyak 464 orang dan ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) sebanyak 323 orang, ibu hamil dengan penyakit penyerta seperti TBC, hipertensi maupun lainnya sebanyak 86 orang yang tentunya dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti perdarahan, eklamsia baik pada saat kehamilan, persalinan dan nifas yang akhirnya dapat berakibat kematian.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berhak diperoleh setiap ibu hamil baik di pelayanan dasar seperti poskesdes dan puskesmas maupun pelayanan rujukan di RS antara lain pemenuhan standar kualitas 10 T yaitu pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran tinggi puncak rahim, penentuan presentase janin dan denyut jantung janin, pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus dan temu wicara (konseling), sedangkan SPM yang berhak diperoleh setiap ibu melahirkan yaitu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga penolong minimal 2 orang yang terdiri dari dokter dan bidan, atau 2 orang bidan, atau bidan dan perawat. Tidak terpenuhinya standar pelayanan minimal pada ibu hamil maupun bersalin pada table 2.51 (Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan) juga sangat mempengaruhi terhadap kematian ibu, yang mana pelayanan pada ibu hamil maupun bersalin masih belum mencapai 100% seperti yang ditargetkan oleh

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil sebesar 79% atau 2.069 ibu hamil, pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sebesar 95% atau 9.275 ibu bersalin. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil agar sesuai standar dan deteksi dini risiko tinggi maka Kementerian Kesehatan RI mendistribusi USG yang di gunakan untuk skrining faktor risiko pada ibu hamil antara lain untuk Puskesmas Paringin Selatan, Tebing Tinggi, Juai, dan Halong.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan keluarga akan kehamilannya baik normal maupun berisiko tinggi sebagai upaya menekan kematian ibu, sehingga tahun 2021 diadakan kelas ibu hamil sebanyak 58 kelas. 58 kelas ibu hamil tentu masih sangat jauh dari yang diharapkan karena setidaknya setiap desa atau kelurahan memiliki kelas ibu hamil yang setiap kelasnya/kelompok sebanyak 10 orang ibu hamil yang didampingi keluarga pada waktu mengikuti kelas ibu hamil. Sedikitnya kelas ibu hamil tersebut berdampak masih kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang kehamilan dan persalinan yang aman sehingga masih ada ibu yang bersalin di tolong oleh paraji (Bidan kampung) saja tanpa berdampingan dengan bidan di desa walaupun sudah diterbitkan Peraturan Daerah KIBBLA (Kesehatan Ibu bayi dan Balita) pada tahun 2017 dan berlanjut ke tahun 2021 sebagai upaya untuk menekan kematian ibu sebagai dasar kemitraan bidan dan dukun bayi.

Faktor pemberdayaan masyarakat juga salah satu faktor tidak langsung menyebabkan kematian ibu. Cakupan deteksi risiko ibu hamil tahun 2021 sebanyak 873 orang yang terdiri dari cakupan risiko masyarakat 377 atau 14% dan cakupan risiko oleh tenaga kesehatan sebanyak 496 atau 19%. Di lihat dari ke dua cakupan tersebut cakupan deteksi oleh tenaga kesehatan lebih tinggi dari masyarakat ini menandakan bahwa pemberdayaan masyarakat masih belum optimal untuk mendeteksi faktor risiko kehamilan yang terjadi pada dirinya dan keluarga serta masyarakat.

Selain faktor diatas juga tentu sangat dipengaruhi oleh keberadaan bidan di desa dan Poskesdes sebagai Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan akses terdekat untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak selain puskesmas. Rasio bidan dengan penduduk di Kabupaten Balangan sudah terpenuhi standar ideal yang diharapkan yaitu sebesar 120/100.000 penduduk dengan 138 buah Poskesdes. Walaupun sudah terpenuhi secara rasio namun jika berdasarkan 1 desa 1 bidan masih belum terpenuhi yaitu dari 154 desa ada 15 desa yang tidak memiliki

bidan di desa (Desa Matang Lurus, Batumandi, Baramban, Putat Basiun, Ajung, Dayak Pitap, Kambiayin, Murung Ilung, Balang, Balida, Baruh Bahinu dalam, Lingsir, Penimbaan, Buntu Karau dan Desa Puyun) padahal berdasarkan SPM untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin yang berhak diperoleh setiap ibu melahirkan yaitu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga penolong minimal 2 orang yang terdiri dari dokter dan bidan, atau 2 orang bidan, atau bidan dan perawat. Ketidak adaan bidan di desa diantaranya di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong yang pada akhirnya di desa tersebut ditemukan kasus kematian ibu.

Yang tidak kalah penting dari keberadaan bidan di desa tentu kualitas atau kompetensi bidan juga sangat berpengaruh terhadap kejadian kematian ibu. Dalam rangka peningkatan kompetensi bidan maka pada tahun 2021 karena keterbatasan anggaran jadi hanya di adakan Oreintasi Kohort Ibu Bayi dan Balita terintergrasi PPIA, Oreintasi *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN) untuk pelaporan kematian ibu dan bayi, Pelatihan *Blended Learning* (BL) untuk bidan sebanyak 5 orang, dokter sebanyak 4 orang karena Kabupaten Balangan menjadi lokus penanganan AKI oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta pelaksanaan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) sedangkan untuk peningkatan kompetensi seperti pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) dan pelatihan lainnya tidak dapat dilaksanakan padahal pelatihan tersebut sangat diperlukan untuk peningkatan kompetensi bidan di desa maupun bidan puskesmas yang ada di 12 puskesmas dalam hal mendeteksi dini kasus risiko dan pertolongan kegawatadaruratan persalinan yang mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sehingga tidak ada lagi kematian ibu di rumah dan puskesmas karena keterlambatan mendiagnosa untuk menentukan resiko tinggi pada ibu yang akhirnya menyebabkan keterlambatan melakukan rujukan ke RS untuk mendapatkan penanganan yang komprehensif oleh dokter *Spesialis Obstetri dan Ginekologi* (SPOG).

Walaupun RSUD Kabupaten Balangan sudah terakreditasi dan jumlah dokter *Spesialis Obstetri dan Ginekologi* (SPOG) sebanyak 2 orang untuk menangani apabila ada ibu hamil, bersalin dan nifas yang berisiko tinggi yang di rujuk ke rumah sakit akan segera mendapatkan penanganan yang komprehensif namun masih saja ada ditemukan kematian ibu di RS sebanyak 4 orang hal ini kemungkinan dipengaruhi seperti yang disebutkan diatas yaitu terkait kompetensi bidan di desa maupun puskesmas dalam hal mendiagnosa untuk menentukan resiko tinggi dan rujukan berencana pada ibu yang akhirnya menyebabkan terlambat

mengenali tanda bahaya persalinan dan mengambil keputusan serta terlambat dirujuk ke fasilitas kesehatan. Selain itu juga kemungkinan dipengaruhi oleh keterlambatan penanganan di RS.

Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menekan kematian ibu kedepannya, khususnya untuk tahun 2022 menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengadaan fisik sebesar Rp 2.761.653.000,- antara lain untuk Puskesmas Halong berupa renovasi/penambahan ruangan puskesmas mampu PONED, set pemeriksaan kesehatan mampu PONED sebanyak 1 paket, 1 set obsgyn, 1 set kegawatdaruratan maternal dan neonatal dan 1 set perawatan pasca persalinan, 1 paket USG 2D digital di Puskesmas Paringin, 1 paket sistem informasi Puskesmas Paringin. 1 paket kegawatdaruratan maternal dan neonatal di Puskesmas Lokbatu, Puskesmas Awayan, Puskesmas Tebing Tinggi, Puskesmas Paringin dan Puskesmas Jau. 1 paket perawatan pasca persalinan di Puskesmas Lokbatu, Puskesmas Awayan, Puskesmas Tebing Tinggi, Puskesmas paringin Selatan dan Puskesmas Juai. DAK nonfisik untuk jaminan persalinan Rp 52.886.000,-.

Selain dengan anggaran DAK serta berbagai upaya-upaya yang akan dilaksanakan di tahun 2022 dengan APBD II seperti kegiatan yang disebut diatas ditambah membangun Poskesdes Mamigang, renovasi Poskesdes Kedondong, Huawai, Gunung Batu, Binjai Punggal dan Gunung Manau dan tetap membayar premi asuransi kesehatan ke BPJS antara lain jaminan tersebut dapat digunakan untuk ibu hamil, ibu bersalin dan nifas agar memeriksakan dirinya dan bersalin ke fasilitas kesehatan.

3). Tenaga Kesehatan

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai modal Pembangunan Nasional.

Untuk rnewujudkan hal tersebut di atas diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang didukung antara lain oleh sumber daya tenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan. Oleh karena itu pola pengembangan sumber daya tenaga kesehatan perlu disusun secara

cermat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan yang berskala nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan Presiden Republik Indonesia bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik. Keteknisian medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian. Tenaga gizi meliputi nutrisisionis dan dietisien. Tenaga keterampilan fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara. Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.

Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Dalam rangka untuk melaksanakan upaya kesehatan dengan optimal tentu harus tersedia tenaga kesehatan sesuai standar. Berdasarkan tabel diatas untuk seluruh jenis tenaga kesehatan di Kabupaten Balangan tahun 2021 jika berdasarkan rasio dengan jumlah penduduk maka sudah terpenuhi sesuai standar.

Walaupun seluruh jenis tenaga kesehatan berdasarkan rasio dengan jumlah penduduk sudah terpenuhi sesuai standar namun untuk tenaga bidan dan tenaga gizi apabila berdasarkan 1 bidan di desa untuk 1 desa dan 1 tenaga gizi untuk 3 desa maka untuk 2 ketenagaan tersebut secara kuantitas belum terpenuhi. Tidak terpenuhinya ketersediaan bidan di desa dan tenaga gizi secara merata untuk seluruh desa tentu berdampak pada pemenuhan SPM untuk pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kabupaten Balangan sehingga masih tingginya AKI dan AKB serta lambatnya penurunan *prevalensi stunting* di Kabupaten Balangan tahun 2021.

4). Sarana Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan Presiden Republik Indonesia bahwa sarana adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2018 Tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan menyebutkan sarana adalah bangunan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan dan digunakan untuk penyelenggaraan atau penunjang pelayanan, prasarana adalah alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu Sarana dapat berfungsi.

Untuk melaksanakan upaya kesehatan dengan optimal maka Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Terkait pemenuhan SPM tersebut maka tidak hanya ketersediaan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan standar baik secara kuantitas dan kualitas akan tetapi yang tidak kalah pentingnya juga ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan dua hal yang saling menunjang antara yang satu dengan yang satunya lagi, namun bukan berarti jika tidak ada salah satu, maka salah satunya lagi tidak berfungsi sama sekali.

Berdasarkan tabel diatas untuk ketersediaan sarana kesehatan tahun 2021 seperti 1 buah rumah sakit, 12 buah puskesmas dan 19 puskesmas pembantu secara kuantitas sudah terpenuhi, namun untuk ketersediaan poskesdes belum terpenuhi untuk 1 desa 1 buah poskesdes, yang mana pada saat ini poskesdes hanya berjumlah 111 buah. Masih kurangnya jumlah poskesdes di Kabupaten Balangan tentu berdampak pada pemenuhan SPM pelayanan kesehatan ibu dan anak sehingga berdampak masih tingginya AKI dan AKB serta lambatnya penurunan *prevalensi stunting* di Kabupaten Balangan tahun 2021.

Seperti disebutkan diatas bahwa sarana dan prasarana merupakan dua hal yang saling menunjang antara yang satu dengan yang satunya lagi. Walaupun sarana kesehatan di Kabupaten Balangan sudah terpenuhi kecuali untuk poskesdes namun untuk prasarana masih banyak kekurangan baik di rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan poskesdes seperti alat-alat kesehatan yang sesuai standar, mobil ambulan, kendaraan roda dua khususnya untuk pelayanan daerah terpencil dan prasarana lainnya. Kekurangan prasarana tersebut tentu sangat berdampak terhadap optimalisasi pelayanan kesehatan khususnya untuk memenuhi upaya SPM wajib dasar dengan 12 indikator.



5). Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas 12 pelayanan kesehatan. Adapun data kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal tercantum pada tabel 2.51.

Tabel 2. 51
Capaian Indikator SPM Kesehatan
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	67	68	68	70	73,2	80
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	69	75,55	74,88	76,43	80,11	88
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	84,42	79,66	79,3	81,73	85,26	93
4	Pelayanan kesehatan balita	54	52,6	51	61,72	95,13	95
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	97	82	85	96,03	15,01	18
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	-	16	15	38	12	21
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	49,9	41,39	41,3	69,74	93,6	94
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	-	100	75	151	29,7	41
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	-	100	93	120,28	49	35
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	-	100	100	125	173	189
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	100	100	38	17	20
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	0	100	100	100	87	88

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, 2021

a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Seluruh ibu hamil di Kabupaten Balangan berhak memperoleh pelayanan kesehatan berkenaan dengan kehamilannya, baik di pelayanan dasar seperti Poskesdes dan Puskesmas maupun pelayanan rujukan di RS antara lain pemenuhan standar kualitas 10 T yaitu pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkaran lengan atas, pengukuran tinggi puncak rahim, penentuan presentase janin dan

denyut jantung janin, pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus dan temu wicara (konseling).

Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di Kabupaten Balangan pada tahun 2021 sebesar 2.084 orang atau 80% atau sebanyak 2.069 orang ibu hamil. Capaian pelayanan ibu hamil tersebut masih jauh dibawah target yang diinginkan sebesar 100%, walaupun capaian dibawah target namun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun hingga 2021. Berbagai faktor yang mempengaruhi masih belum tercapainya target SPM pelayanan kesehatan ibu hamil antara lain sasaran yang digunakan bukan sasaran real namun sasaran proyeksi sehingga pembagiannya lebih tinggi dari jumlah ibu hamil yang ada yang berdampak pada persentase capaian. Selain itu kurangnya pengetahuan ibu hamil dan keluarga akan pentingnya pemeriksaan kehamilan sesuai standar selama kehamilan tentu sangat mempengaruhi capaian SPM hal ini antara lain karena sedikitnya kelas ibu hamil, yaitu hanya 58 kelas ibu hamil. 58 kelas ibu hamil tentu masih sangat jauh dari yang diharapkan karena setidaknya setiap desa atau kelurahan memiliki kelas ibu hamil yang setiap kelasnya/kelompok sebanyak 10 orang ibu hamil yang didampingi keluarga pada waktu mengikuti kelas ibu hamil.

Selain faktor diatas juga tentu sangat dipengaruhi oleh keberadaan bidan di desa dan Poskesdes sebagai Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan akses terdekat untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu selain puskesmas. Rasio bidan dengan penduduk di Kabupaten Balangan sudah terpenuhi standar ideal yang diharapkan yaitu sebesar 120/100.000 penduduk dengan 138 buah Poskesdes. Walaupun sudah terpenuhi secara rasio namun jika berdasarkan 1 desa 1 bidan masih belum terpenuhi yaitu dari 154 desa ada 15 desa yang tidak memiliki bidan di desa (Desa Matang Lurus, Batumandi, Baramban, Putat Basiun, Ajung, Dayak Pitap, Kambiayin, Murung Ilung, Balang, Balida, Baruh Bahinu dalam, Lingsir, Penimbaan, Buntu Karau dan Desa Puyun). Selain itu juga karena terjadi perubahan mekanisme pelayanan Kesehatan yang disebabkan pandemic covid-19.

b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan SPM untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin maka setiap ibu di Kabupaten Balangan berhak memperoleh pelayanan persalinan. Pelayanan yang diperoleh setiap ibu bersalin dilakukan di fasilitas pelayanan Kesehatan dengan tenaga penolong minimal 2 orang yang terdiri dari dokter dan bidan, atau 2 orang bidan, atau bidan dan perawat. Pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Balangan masih dibawah target SPM dari sasaran 2.494 hanya sebesar 2.205 orang atau 88% pada tahun 2021 yang bersalin di fasilitas kesehatan. Walaupun capaian masih dibawah target namun dari setiap tahun terjadi peningkatan capaian yaitu dari 60% ditahun 2016 menjadi 88% ditahun 2021.

Berbagai faktor mempengaruhi belum tercapainya target SPM pelayanan kesehatan ibu bersalin antara lain karena sasaran yang digunakan bukan sasaran real namun sasaran proyeksi sehingga lebih tinggi pembagiannya yang berdampak pada persentase capaian. Selain faktor tersebut juga tentu sangat dipengaruhi oleh keberadaan bidan di desa dan Poskesdes sebagai Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan akses terdekat untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak selain puskesmas. Rasio bidan dengan penduduk di Kabupaten Balangan sudah terpenuhi standar ideal yang diharapkan yaitu sebesar 120/100.000 penduduk dengan 138 buah Poskesdes. Walaupun sudah terpenuhi secara rasio namun jika berdasarkan 1 desa 1 bidan masih belum terpenuhi yaitu dari 154 desa ada 15 desa yang tidak memiliki bidan di desa padahal berdasarkan SPM untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin yang berhak diperoleh setiap ibu melahirkan yaitu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga penolong minimal 2 orang antara lain terdiri dari 2 orang bidan.

c. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan bayi baru lahir sesuai standar tersebut antara lain terdiri atas standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam,

Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari, Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari. Sedangkan untuk standar kualitas antara lain Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam) yang meliputi pemotongan dan perawatan tali pusat, inisiasi Menyusu Dini (IMD), injeksi vitamin K1, pemberian salep/tetes mata antibiotic dan pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0). Sedangkan untuk Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) meliputi konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif, memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM, pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1, imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan dan penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Pelayanan bayi baru lahir di Kabupaten Balangan masih dibawah target SPM yaitu dari sasaran 2.375 orang hanya sebesar 93% atau 2.023 orang pada tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan bayi baru lahir sesuai standar. Walaupun capaian masih dibawah target namun dari setiap tahun terjadi peningkatan capaian yaitu dari 84% ditahun 2016 menjadi 93% ditahun 2021. Kurang optimalnya pelayanan terhadap bayi baru lahir sesuai standar dipengaruhi oleh sasaran yang digunakan bukan sasaran real namun sasaran proyeksi sehingga lebih tinggi pembagiannya yang berdampak pada persentase capaian, selain itu juga dipengaruhi masih ada pelayanan yang dilakukan diluar wilayah yang tidak dilaporkan dan tercatat oleh tenaga kesehatan di Balangan.

Selain faktor diatas juga dipengaruhi kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga akan pentingnya pemeriksaan bayi baru lahir sesuai standar hal ini antara lain karena sedikitnya kelas ibu hamil, yaitu hanya 58 kelas ibu hamil. 58 kelas ibu hamil tentu masih sangat jauh dari yang diharapkan karena setidaknya setiap desa atau kelurahan memiliki kelas ibu hamil yang setiap kelasnya/kelompok sebanyak 10 orang ibu hamil, dengan mengikuti kelas ibu hamil maka diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan yang signifikan terhadap kebutuhan pelayanan bayi lahir oleh ibu dan keluarga. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa faktor keberadaan bidan di desa sebagai Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan poskesdes sebagai akses terdekat untuk memberikan pelayanan kesehatan sangat berpengaruh terhadap pelayanan baru lahir.

d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit.

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan antara lain penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun, pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun, pemberian imunisasi dasar lengkap. Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan antara lain penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan), pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun, pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun, pemberian Imunisasi lanjutan. Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan antara lain penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan), pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun, pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun, selain itu juga pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin A, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan, edukasi dan informasi. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Pelayanan Kesehatan balita di kabupaten Balangan tahun 2021 sudah mendekati target SPM yaitu sebesar 95% atau 9.275 orang dari sasaran 9.755. Walaupun capaian dibawah target namun selama 5 tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 54% di tahun 2016 menjadi 95% pada tahun 2021. Berbagai faktor mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan balita antara lain sasaran proyeksi lebih tinggi dari balita real yang ada di kabupaten Balangan sehingga mempengaruhi persentase capaian. Selain faktor sasaran juga dipengaruhi kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang pemantauan pertumbuhan dan perkembangan kesehatan balita karena masih sedikitnya jumlah kelas balita di Balangan yaitu hanya ada 20 kelas balita, padahal dengan adanya

kelas balita dapat meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga akan pentingnya pemantauan kesehatan balita sehingga ibu dan keluarga tetap membawa balitanya ke puskesmas, poskesdes maupun posyandu apabila sudah mendapatkan imunisasi lengkap.

e. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Seluruh anak usia sekolah Pendidikan dasar di Kabupaten Balangan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi skrining kesehatan dan tindaklanjut hasil skrining kesehatan yang dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2021 di Kabupaten Balangan hanya sebesar 67% atau 13.480 orang dari seluruh usia pendidikan dasar. Rendahnya capaian SPM tersebut di pengaruhi oleh faktor pandemi covid-19 yang menyebabkan semua sekolah di Kabupaten Balangan tidak melaksanakan pembelajaran dengan metode tatap muka atau kegiatan belajar mengajar secara langsung sehingga pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi usia pendidikan dasar tidak dapat dilaksanakan. Walaupun selama tahun 2021 terjadi pandemic covid-19 namun sebanyak 13.480 orang anak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar hal ini dapat dilakukan oleh beberapa puskesmas sebelum ada penetapan kebijakan untuk belajar tanpa tatap muka. Pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh 13.480 orang anak antara lain skrining kesehatan dengan penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gizi dan mulut, penilaian ketajaman indera berupa ketajaman penglihatan dan pendengaran, penilaian kesehatan reproduksi. Selain mendapatkan skrining kesehatan juga memberikan penyuluhan kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan yang meliputi memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan dan melakukan rujukan jika diperlukan.

f. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Seluruh usia produktif di Kabupaten Balangan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar yang meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif di tahun 2021 jauh dari target yang diinginkan yaitu hanya sebesar 21% atau hanya 17.501 orang, hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain masih banyak desa di Kabupaten Balangan yang tidak memiliki posbindu, padahal posbindu adalah akses terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa skrining faktor risiko penyakit menular maupun tidak menular berupa pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan SADANIS dan IVA (Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko) dan anamnesa perilaku berisiko yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan.

Selain faktor diatas juga dipengaruhi karena situasi pandemik covid-19 sehingga pelayanan kesehatan untuk usia produktif di beberapa posyandu tidak dilaksanakan karena ada kebijakan tidak boleh mengumpulkan orang banyak agar tidak terjadi penularan covid-19.

g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Seluruh usia lanjut di Kabupaten Balangan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan tidak menular yang dilakukan di fasilitas Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar

perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut dan anamnesa perilaku berisiko. Selain skrining faktor risiko usia lanjut juga berhak mendapatkan tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi rujukan jika diperlukan dan mendapatkan penyuluhan Kesehatan.

Pelayanan pada usia lanjut di Kabupaten Balangan walaupun dibawah target yang diinginkan namun sudah cukup memuaskan yaitu sebesar 94% atau sebanyak 6.935 orang dari 7.351 orang sasaran. Belum tercapainya pelayanan kesehatan usia lanjut hingga 100% dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain masih banyak desa yang tidak memiliki posyandu usia lanjut yaitu hanya 115 posyandu atau sebesar 73% dari 157 desa di Kabupaten Balangan, padahal posyandu tersebut merupakan ujung tombak atau akses terdekat untuk usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan yang tempat tinggalnya jauh dari puskesmas.

Selain faktor diatas juga karena faktor kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang berwenang memberikan pelayanan kesehatan untuk usia lanjut seperti dokter, bidan, perawat dan tenaga gizi masih belum memiliki kompetensi yang optimal yang mana dari tenaga kesehatan tersebut yang sudah mendapatkan pelatihan untuk tim posyandu usia lanjut hanya berjumlah 13 orang. sedikitnya jumlah Lansia KIT yang dapat digunakan untuk pelayanan sesuai standar yaitu hanya ada 17 buah dari 115 posyandu juga menjadikan faktor yang mempengaruhi layanan untuk Kesehatan usia lanjut. Selain di itu juga dipengaruhi dari situasi pandemik covid-19 sehingga pelayanan kesehatan di beberapa posyandu tidak dilaksanakan karena ada kebijakan tidak boleh mengumpulkan orang banyak agar tidak terjadi penularan covid-19.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah dan edukasi.

Setiap penderita hipertensi di Kabupaten Balangan berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan penderita hipertensi sesuai standar. Capaian kinerja pemerintah Kabupaten Balangan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi atau orang dengan keluhan hipertensi sesuai standar adalah 41% atau 6.750 orang dari 16.346 orang sasaran. Dengan perhitungan jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Kabupaten Balangan dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama dikali 100%.

Rendahnya pelayanan kesehatan hipertensi hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain masih banyak desa di Kabupaten Balangan yang tidak memiliki posbindu, padahal posbindu adalah akses terdekat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti pengukuran tekanan darah minimal 1 kali sebulan dan edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat untuk penderita hipertensi yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan. Faktor kondisi pandemi covid-19 menyebabkan masyarakat merasa takut untuk melakukan cek kesehatan ke fasilitas kesehatan, faktor pembatasan jumlah pasien yang berkunjung ke fasilitas kesehatan dan pelayanan di posbindu ditiadakan jika sudah menjadikan rendahnya pelayanan penderita hipertensi.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi, melakukan rujukan jika diperlukan.

Setiap penderita DM di Kabupaten Balangan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebagai upaya pencegahan sekunder dengan target 100% dengan perhitungan jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama. Capaian kinerja pelayanan

penderita DM masih rendah yaitu hanya 35% atau 1.484 orang dari 4.200 orang sasaran. Rendahnya pelayanan kesehatan DM hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain masih banyak desa di Kabupaten Balangan yang tidak memiliki posbindu, padahal posbindu adalah akses terdekat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti pengukuran tekanan darah minimal 1 kali sebulan dan edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat untuk penderita DM yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Faktor kondisi pandemi covid-19 menyebabkan masyarakat merasa takut untuk melakukan cek kesehatan ke fasilitas kesehatan, faktor pembatasan jumlah pasien yang berkunjung ke fasilitas kesehatan dan pelayanan di posbindu ditiadakan sehingga menjadikan rendahnya pelayanan penderita DM.

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan *skizofrenia* meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi.

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat di Kabupaten Balangan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang ditangani sesuai standar dengan target 100%. Capaian kinerja daerah dalam penanganan ODGJ tahun 2021 sebesar 189% atau 353 orang dan 12 orang yang dipasung di rujuk ke RS Sambang Lihum Banjarmasin untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan komprehensif. Tingginya capaian kinerja tersebut dikarenakan jumlah penderita ODGJ diatas yang di targetkan oleh kabupaten yaitu dengan target sebanyak 187 orang sementara yang ODGJ 353 orang. Adapun untuk pemicu terjadinya ODGJ antara lain karena faktor genetik, faktor kesulitan ekonomi, faktor trauma dan faktor lainnya. Untuk penanganan ODGJ maka tahun 2021 dibentuk tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat yang diarahkan oleh bupati dan sebagai anggota terdiri atas SKPD terkait seperti Dinas sosial.

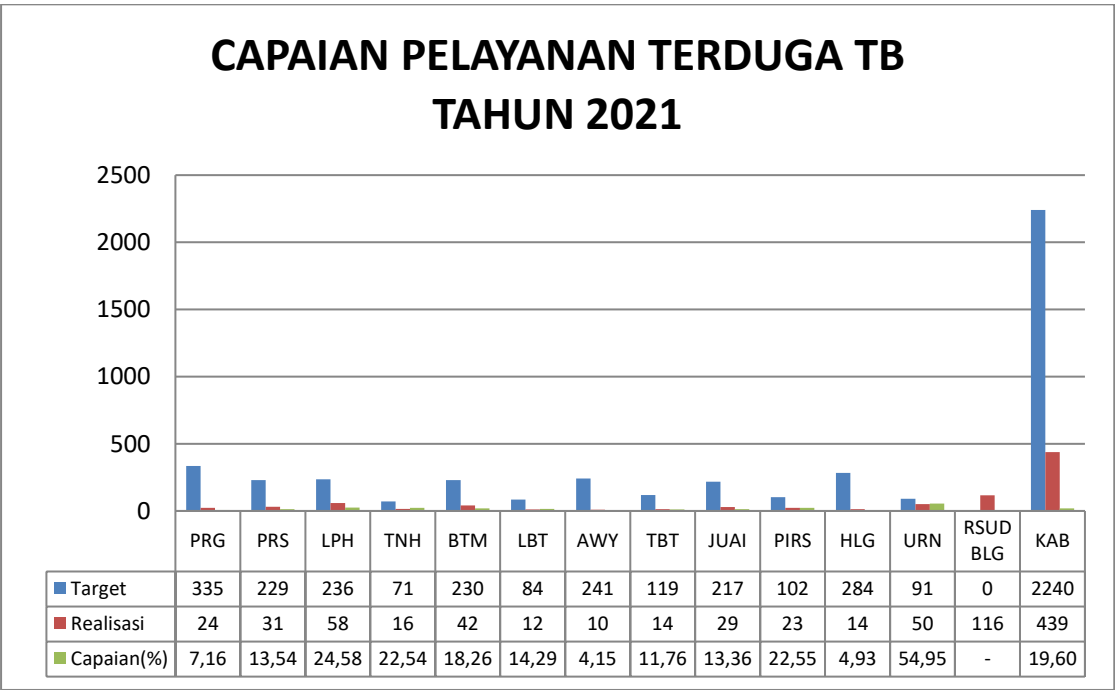
k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC

Pengendalian TBC merupakan salah satu program prioritas Nasional untuk program pengendalian penyakit karena berdampak luas terhadap kualitas hidup

dan ekonomi serta sering mengakibatkan kematian. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Orang terduga TBC adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk > 2 minggu disertai dengan gejala lainnya.

Setiap orang dengan terduga TBC di Kabupaten Balangan berhak mendapatkan pelayan kesehatan sesuai standar, sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengendalian TBC salah satunya adalah dengan penemuan secara aktif melalui kegiatan deteksi dini/ skrining TBC. Pelayanan kesehatan orang terduga TBC di kabupaten Balangan sebesar 20% atau 439 orang dari 2.240 orang sasaran, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangan di FKTP (puskesmas dan jaringan) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta berupa pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang dan edukasi.

Gambar 2.23
Capaian Pelayanan Terduga TB tahun 2021



Sumber : DKPPKB tahun 2022

Rendahnya pelayanan kesehatan orang terduga TBC yaitu hanya sebesar 20% dikarenakan oleh berbagai persoalan maupun kendala yang dihadapi dalam upaya tersebut antara lain dikarenakan terjadinya pandemi covid-19 yang menjadikan situasi atau perubahan kondisi dimana adanya pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat seperti pembatasan berkumpul, pembatasan aktivitas

maupun jaga jarak. Dalam rangka social distancing melakukan penundaan pelaksanaan kegiatan pengumpulan massa dan pelibatan komunitas dalam jumlah yang banyak seperti investigasi kontak, pelacakan kasus, skrining TBC dan lain-lain. Pada kondisi awal ini juga menimbulkan persoalan lain seperti adanya persepsi masyarakat yaitu dapat mencovidkan pasien yang datang ke fasilitas kesehatan, petugas takut melakukan kontak langsung dalam melakukan pelacakan/pemeriksaan kontak dan skrining. Selain hal tersebut juga karena beberapa upaya lain tidak bisa dilaksanakan secara optimal seperti penyuluhan, sosialisasi maupun koordinasi. Adanya sistem rujukan sampel scrining orang terduga TBC dari puskesmas ke rumah sakit yang belum optimal, sampel diperiksa hanya dalam jumlah terbatas (waktu pemeriksaan sampel hanya satu hari dalam seminggu yaitu pada hari sabtu) melalui pemeriksaan Test Cepat Molekuler (TCM) TB dan juga belum tersedia Alat TCM di puskesmas sebagai gold standar dalam penegakan diagnosa TB.

Walaupun banyak faktor yang menyebabkan rendahnya pelayanan kesehatan orang terduga TBC namun Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta jaringannya tetap melaksanakan beberapa kegiatan diantara melaksanakan skrining dan penemuan dini penyakit TBC baik dalam gedung maupun diluar gedung, penyuluhan, penemuan kasus secara aktif dan pasif, pengobatan dan pengawasan pengobatan dengan memperhatikan metode pelayanan dengan protokol kesehatan. Peningkatan status gizi petugas dan penderita dengan pemberian makanan tambahan (susu), kunjungan kontak erat, peningkatan kapasitas petugas serta monitoring dan evaluasi program sehingga penderita TBC yang menjalani pengobatan pada tahun 2021 sebanyak 135 orang dengan angka kesembuhan sebesar 95 % dari target angka kesembuhan (sukses rate) sebesar 90%. Dibandingkan dengan angka kesembuhan tahun 2020 sebesar 91% maka pada tahun 2021 angka kesembuhan atau *success rate* terjadi peningkatan dibandingkan dengan capaian angka kesembuhan ditahun 2020, hal ini menunjukkan adanya kedisiplinan dan kepatuhan penderta TBC cukup tinggi dalam menjalani pengobatan.

l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah adanya virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan manusia namun belum menimbulkan gejala, sedangkan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) merupakan sekumpulan gejala yang terjadi ketika HIV menyebabkan kerusakan serius pada sistem imun.

Artinya, orang yang terinfeksi HIV bisa saja hidup sehat, namun orang yang sudah pada kondisi AIDS pasti memiliki Virus HIV.

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku berisiko dan skrining orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :

- 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
- 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC
- 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS
- 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa
- 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual)
- 6) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
- 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.
- 8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap

Tingkat perkembangan penyakit menular seksual terutama HIV/AIDS di Kabupaten Balangan terus menunjukkan peningkatan, meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terus dilakukan, semakin tingginya mobilitas penduduk antar wilayah, menyebarnya sentra-sentra pembangunan ekonomi, meningkatnya perilaku seksual yang tidak aman dan menyimpang, meningkatnya

penyalahgunaan NAPZA melalui suntikan, secara simultan telah memperbesar tingkat risiko penyebaran penyakit ini. Terkait hal tersebut maka setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten Balangan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pada Tahun 2021 dilaksanakan pemeriksaan terhadap orang berisiko terinfeksi HIV sebanyak 2.539 sampel dari target sampel sebanyak 2.894 orang berisiko, jadi persentase orang yang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sebesar 88%. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan sebanyak 7 orang terdeteksi positif mengidap virus HIV atau dengan Angka *prevalensi* penderita HIV Kabupaten Balangan sebesar 0,05 per 1000 penduduk. Ditemukannya 7 orang terdeteksi HIV ditahun 2021 sehingga jumlah penderita HIV/ AIDS di Kabupaten Balangan sejak tahun 2018 sampai akhir Desember 2021 sebanyak 47 penderita. Tahun 2021 penderita meninggal dengan HIV sebanyak 5 orang diantaranya 3 orang meninggal belum menjalani pengobatan atau On ARV.

Walaupun capaian pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV dibawah target yang diinginkan sebesar 100% namun sudah cukup memuaskan hal ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain tersedianya alat/ bahan yang mencukupi untuk deteksi dini/ pemeriksaan orang berisiko teinfeksi HIV/ AIDS, system pelaporan secara *online* (SIHA) maka dapat mendukung ketepatan dan kecepatan pelaporan, selain itu juga karena dipengaruhi oleh faktor pelaksanaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat dukungan lintas program dan lintas sektor terkait dalam kegiatan diantaranya pemeriksaan dini pada kelompok berisiko yaitu ibu hamil, pasien TBC, Pasien IMS, transgender, penasun, WPS SL maupun tahanan sementara. Dimana kegiatan tersebut mendapat dukungan lintas program yang salah satunya deteksi dini HIV Ibu hamil yang pemeriksaannya dilakukan oleh bidan, kemudian pemeriksaan tahanan sementara yang aman dan pemeriksaan yang dilaksanakan di Polres.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup bina marga, cipta karya dan penataan ruang, serta sumber daya air. Salah satu capaian kinerja bina marga yaitu persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Hal tersebut mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Secara umum tren

panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Balangan mengalami peningkatan secara kontinyu.

Sampai dengan tahun 2021, panjang jalan Kabupaten Balangan adalah 672,253 km dan tidak seluruhnya dalam kondisi mantap. Dari panjang jalan tersebut, pada tahun 2021 hanya 438,620 km atau 65,24% yang kondisinya mantap, sedangkan 89,630 km atau 13,33% kondisinya rusak ringan dan 144,003 km atau 21,42% dalam kondisi rusak berat. Panjang jalan dalam kondisi mantap dari tahun 2016 s/d 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya, peningkatan angka ini dapat diartikan bahwa hambatan terhadap pergerakan arus barang dan jasa menjadi lebih rendah. Namun panjang jalan dalam kondisi rusak berat juga masih tinggi, salah satunya dipengaruhi oleh total beban kendaraan yang melewati, untuk itu pengawasan terhadap beban maksimal kendaraan perlu dilaksanakan secara berkala guna menjaga kualitas jalan serta pengurangan hambatan samping yang terjadi pada ruas jalan.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik juga terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebesar 0,174 meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,4170 dan turun lagi di Tahun 2021 menjadi 0,2020. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Balangan, upaya peningkatan kualitas jalan perlu terus dilaksanakan disertai dengan perencanaan dan pengawasan yang baik. Drainase, sebagai pendukung prasarana jalan di Kabupaten Balangan, terdapat di beberapa ruas saja terutama di sepanjang jalan yang tersedia. Pada tahun 2018, drainase ber kondisi baik tercatat sebesar 83,91% kemudian meningkat menjadi 86,90% di tahun 2019 dan terus meningkat menjadi 88,23% di tahun 2020 serta di tahun 2021 meningkat menjadi 88,79%. Keberadaan drainase sangat diperlukan agar tidak terjadi genangan serta aliran air di badan jalan yang dapat merusak struktur bangunan jalan itu sendiri. Kabupaten Balangan yang memiliki sejumlah areal persawahan, telah dilengkapi dengan jaringan irigasi. Sampai tahun 2021, jaringan irigasi dengan kondisi baik tercatat sebesar 57,84%.

Kabupaten Balangan yang memiliki sejumlah areal persawahan, telah dilengkapi dengan jaringan irigasi. Sampai tahun 2021, jaringan irigasi dengan kondisi baik tercatat sebesar 57,84%.

Selanjutnya, standar pelayanan minimal sistem penyediaan air minum (SPM SPAM) tahun 2018 menyatakan bahwa indikator SPM SPAM adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok



minimal 150 liter/orang/hari di wilayah perkotaan dan 60 liter/orang/hari di perdesaan, sedangkan SPM sanitasi tahun 2018 menyatakan bahwa indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai (dengan target SPM 80%) dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota (dengan target SPM 5%)

Pada tahun 2021 akses air minum layak Kabupaten Balangan yang mencapai 81,72% masih dibawah status capaian rata-rata provinsi (83,02%). Untuk itu, kinerja air minum Kabupaten Balangan perlu ditingkatkan agar dapat mencapai target yang disepakati bersama provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 88,68% pada tahun 2022 dan 94,34% pada tahun 2023. Serta dapat meningkatkan status air minum layak menjadi air minum aman hingga tahun 2024.

Standar Pelayanan Minimal tingkat pelayanan air limbah setempat diukur dari jumlah penduduk dengan tangki septik dan terlayani Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) terhadap jumlah penduduk yang menggunakan tangki septik, sedangkan Standar Pelayanan Minimal tingkat pelayanan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota diukur dari jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala kawasan terhadap jumlah penduduk di kabupaten.

Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Balangan secara teknis di layani oleh Sistem Individu/Setempat (On Site System) yang merupakan sistem pengolahan limbah dimana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki. Capaian akses sanitasi layak Kabupaten Balangan tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, maka status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Balangan yang telah mencapai 92,61% relatif di atas status capaian rata-rata provinsi (86,85%). Namun yang selanjutnya perlu diprioritaskan adalah peningkatan akses sanitasi aman yang saat ini capaiannya masih sangat rendah, yaitu 0,51% dari target 20%.

Tabel 2. 52
Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang Jalan Kabupaten Balangan	638,966	672,253	672,253	672,253	672,253	672,253



2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,174	0,306	0,337	0,379	0,417	0,202
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,0051	0,0053	0,0052	0,0051	0,0050	0,0051
4	Kondisi Jalan (km)						
	a. Baik	111,369	205,515	226,418	254,634	280,114	135,760
	b. Sedang	110,972	48,630	44,608	44,608	44,608	302,860
	c. RusakRingan	4,304	24,440	74,390	74,390	74,390	89,630
	d. RusakBerat	412,321	393,268	326,837	298,621	273,141	144,003
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	34,80	37,81	40,32	44,51	48,30	65,24
6	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam)	17,42	30,57	33,68	37,87	41,67	20,19
7	Persentase irigasi kabupaten dlm kondisi baik	-	-	46,99	46,99	19,10	23,43
8	Rasio Jaringan Irigasi	43.33	45.91	49.01	52.67	55.88	58.16
9	Persentase penduduk berakses air minum	61,92	83,23	94,76	95,45	80,59	81,72
10	Persentase akses sanitasi	76.35	77.38	79.41	80.45	95,09	92,61

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Balangan, 2021

Penyediaan RTH Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kabupaten paling sedikit 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun rencana. Rasio perhitungannya didasarkan pada luas jumlah RTH publik yang tersedia di kawasan perkotaan sampai akhir tahun pencapaian dibagi luasan RTH publik. Luas wilayah Kota/Kawasan perkotaan Kabupaten Balangan adalah 2.650 Ha dengan kebutuhan RTH public adalah sebesar 529,978 Ha.

Sampai dengan tahun 2021, luasan RTH Publik yang dikelola baru sebesar 103,667 Ha atau 19,59%. Dengan penambahan luas RTH pada tahun 2019 sebesar 1,7 Ha. Di satu sisi, keberadaan RTH dapat meningkatkan kualitas lingkungan terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Karena itu, keberadaan RTH perlu terus ditingkatkan. Namun, pengelolaan yang baik mutlak dibutuhkan sehingga ketersediaan serta aksesibilitas bagi warga



dapat terjamin. Keberadaan ruang publik sangat dibutuhkan oleh penduduk di Kabupaten Balangan untuk melaksan akan aktivitas social serta ekonomi. Selain sebagai tempat beraktivitas warga, keberadaan ruang terbuka hijau yang tertutupi oleh pepohonan juga berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan terutama dalam pengurangan suhu pemanasan global.

Berdasarkan hasil penilaian peninjauan kembali terhadap RTRW Kab. Balangan No. 24 tahun 2013-2032 terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang, 96% pelaksanaan pemanfaatan ruang telah terealisasi. Hal ini mengindikasikan adanya percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Balangan sehingga program dan kegiatan yang masuk dalam program jangka menengah dari tahun 2013-2019 telah terlaksana dan terealisasi. Sehingga didapatkan persentase ketaatan terhadap RTRW adalah 96%.

Tabel 2. 53
Capaian Indikator Sub Urusan Penataan Ruang Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0.0034	0.0366	0.0366	0.03912	0.039112	0.039112
2	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan	1,69%	18, 28%	18,30%	19,59%	19,59%	19,59%
3	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	85 %	80%	-	-	85 %	85 %
4	Ketaatan terhadap RTRW	85 %	92%	94%	96 %	96 %	96 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu indikator urusan perumahan rakyat adalah indikator rumah layak huni, dihitung berdasarkan Cakupan ketersediaan rumah layak huni yaitu jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga pada pada tahun 2021 sebesar 93,75%, angka ini bertambah dari tahun 2020 yang hanya 90,27%. Keberadaan rumah tidak layak huni di lingkungan masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masing-masing keluarga.

Tabel 2. 54
Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021



No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	84,39	85,24	85,24	89,00	90,27	93,75
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	78.07	82.45	82,45	84,50	85,89	92,68
3	Persentase kawasan kumuh yang tertangani (%)	-	-	67.68	87.87	96,37	100
4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan(%)	-	-	0.01	0.002	0,001	0,000
5	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU(%)	50	59.09	63.64	72.73	74.75	86,63
6	Persentase luas lahan bersertifikat(%)	7.2%	7.7%	8.0%	3.01%	10,39%	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2021

Cakupan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2021 sebesar 92,68%, pendanaan peningkatan RTLH ini didanai baik APBD II, APBD I maupun APBN. Keberadaan kawasan kumuh di Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2021 yang tertangani menggunakan dana APBD II, APBD I dan APBN mencapai 100%. Kawasan kumuh ini tersebar di tiga kelurahan dan penanganannya sudah mencapai 35,28 ha dari total Kawasan kumuh Kabupaten Balangan yaitu, 35,28 ha. Guna menekan luasan, upaya penataan terhadap permukiman kumuh seperti melalui peningkatan kualitas dan penataan lingkungan perlu terus dilaksanakan, diiringi dengan sosialisasi dan pembinaan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat untuk mencegah kumuh Kembali. Untuk capaian luas lahan bersertifikat mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang pada tahun 2020 capaiannya adalah 10,39% dibandingkan 3.01 % pada tahun 2020.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2. 55
Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)			2.355	2.355	2.355	



5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)			7 (100%)	32 (100%)	29 (100%)	
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	30 Desa	40 Desa	78 Desa	189 Desa	61 Desa	12 Desa
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
5.5	Persentase Penegakan PERDA			100%	100%	100%	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja & BPBD Kabupaten Balangan, 2021

Indikator ketentraman dan ketertiban umum selain terkait disiplin Perda maupun perlindungan masyarakat terkait juga dengan kebencanaan. Tahun 2021 untuk Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) terdapat 29 kejadian. Tahun 2020 sebanyak 42 kejadian, dan 2019 160 kejadian. Perkembangan pada tahun 2019 hingga 2021 terlihat angka penurunan kejadian, hal ini dipengaruhi oleh adanya peraturan membakar lahan di tahun 2020. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) manajemen pada wilayah kebakaran pada tahun 2016 hingga 2021 selama 15 menit dari lokasi kantor menuju lokasi bencana kebakaran. Adapun kendala yang dialami di lapangan seperti jarak yang jauh untuk dijangkau dari kantor, lokasi menuju wilayah kebakaran yang sempit dan sulit dijangkau. *Respon Time Rate* selama 15 menit dapat dijangkau didukung beberapa faktor, diantaranya jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, lokasi yang mudah dijangkau, dan adanya akses pendukung menuju tempat kejadian.

Kendala yang dialami dalam penanggulangan kebencanaan diantaranya belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia TRC, masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung ketika operasional lapangan seperti perahu, pelampung, baju pelampung, tenda, ban fiber dan mesin perahu untuk menunjang operasional lapangan evakuasi bencana banjir.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang mitigasi kebencanaan sehingga kedepannya perlu pelatihan dan sosialisasi. Anggota TRC selalu siap siaga turun lapangan untuk memantau daerah yang rentan terjadi kebakaran hutan, contohnya di Desa Tapau Banua Hanyar di Lahan Gambut Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong. Selain kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman ditahun 2021 sebanyak 12 kali kejadian kebakaran, tahun 2020 sebanyak 19 kali rumah penduduk yang terbakar disebabkan karena kelalaian manusia yang terjadi di beberapa Kecamatan seperti Paringin Selatan, Awayan,



Lampihong dan Halong. Anggota TRC meluncur dari kantor ke lokasi kejadian tingkat waktu tanggap respon sekitar 15 menit (tergantung lokasi yang dituju).

Pelayanan atau bantuan yang kami berikan kepada korban kebakaran berupa sembako, sandang dan pangan. Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Balangan dalam kurun waktu Januari-Maret, kemudian November-Desember tahun 2021 terjadi sebanyak 47 kali. Kecamatan terdampak banjir diantaranya Kecamatan Halong, Kecamatan Juai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batumandi, Kecamatan Awayan, Kecamatan Paringin Selatan, dan Kecamatan Paringin. Dibandingkan dengan tahun 2020 kurun Februari 2020 sampai 29 November 2020 dengan total terdampak 4.940 kk 15.786 jiwa, yang mengakibatkan beberapa kecamatan diwilayah Kabupaten Balangan yang terdampak banjir Kecamatan yang terdampak banjir seperti Halong, Juai, Tebing Tinggi, Awayan, Paringin Selatan, Paringin dan Lampihong. Terjadi kenaikan yang signifikan pada bencana banjir dan berdampak pada 9.548 rumah, 11.783 KK, dan 37.119 jiwa. Bencana Kebanjiran yang terjadi di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 dan 2021 masuk pada Pelayanan atau bantuan yang diberikan dengan adanya anggota TRC BPBD, melakukan evakuasi untuk masyarakat dan anak-anak sekolah yang tidak mampu melalui air yang cukup dalam.

F. Urusan Sosial

Tabel 2. 56
Capaian Indikator Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
6. Sosial						
6.1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan social	28.28%	14.10%	65.84%	40.95%	72%
6.2	Persentase PPKS yang tertangani	28.28%	14.10%	65.84%	40.95%	72%
6.3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	19.75%	52.95%	53.01%	20.66%	54,91%
6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	1.811%	33.00%	13.60%	149.80%	267,36 %
6.4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	100%	100%	100%	100%	100%



No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
6.5	Jumlah PPKS	42,211	18,458	18,286	47,523	96.059
6.6	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	19.76	52.96	53.01	20.66	54,91
	Rantra/BPNT	6,083	5,995	6,082	6,214	7.138
	PKH	2,257	3,780	3,612	3,604	3.652
		8,340	9,775	9,694	9,818	10.790

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Balangan, 2021

Tabel 2. 57
Capaian Indikator SPM Sosial
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial						
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial						
		Persentase (%) PPKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	19.75%	52.95%	53.01%	20.66%	54,91%
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial						
		Persentase (%) PPKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	-	1.13%	3.60%	0.08%	0,05%
2	Penanggulangan korban bencana						
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana						
		Presentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	1.811%	33.00%	13.60%	149.80%	267,36 %
	b. Evaluasi korban bencana						
		Presentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	-	-	-	-
3	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial						
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota						
		Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Balangan, 2021



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau yang sekarang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Capaian indikator angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.57 adalah sebesar 54,91%. Pencapaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2021 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebanyak 96.059 PPKS dan pada tahun 2021 ini menargetkan sebanyak 46,95% PPKS yang akan mendapat bantuan/pelayanan Sosial. Faktor penyebab mengapa indikator ini berada pada kualifikasi sangat tinggi yaitu tahun 2021 terealisasi sebanyak 54,91% atau 52.749 jiwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dapat terlayani sesuai standar, sehingga dengan terlayannya atau terbantunya PPKS sebanyak 52.749 pada tahun 2021 maka realisasi angka PMKS tahun 2021 sebanyak 52.749 PMKS (54,91 %).

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ada 26 (dua puluh enam) jenis PPKS namun yang ditangani di Kabupaten Balangan hanya 12 Jenis PPKS yaitu :

Tabel 2. 58
PPKS Yang Tertangani

NO	JENIS PPKS	Jumlah PPKS		Jumlah PPKS Yang dibantu	
		JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN
1	Anak Terlantar	177	orang	19	orang
2	Anak yang berhadapan Dengan Hukum	24	orang	24	orang
3	Lanjut Usia	4.442	orang	618	orang
4	Penyandang Disabilitas	1.240	orang	33	orang
5	Gelandangan	23	orang	6	orang
6	Pengemis	19	orang	-	orang
7	Korban Penyalahgunaan NAPZA	44	orang	44	orang
8	Korban bencana Alam	26.736	orang	26.736	orang
9	Korban Bencana Sosial	54	orang	54	orang
10	Perempuan rawan sosial ekonomi	1.079	orang	8	orang
11	Fakir miskin	60.656	orang	25.127	orang
12	Komunitas Adat Terpencil	1.565	orang	80	orang
JUMLAH PPKS		96.059	orang	52.749	orang

- a. Anak terlantar merupakan anak yang berumur dibawah 18 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai serta tidak ada orang tua atau pengasuh namun di Kabupaten Balangan Anak terlantar berjumlah 177 orang bukan tanpa pengasuh namun hanya pendidikan anak tersebut yang tidak diperhatikan oleh orang tuannya atau keluarganya, Tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial kabupaten Balangan sebanyak 19 orang dikirim untuk mengikuti pendidikan pelatihan keterampilan melalui Panti Sosial Bina remaja (PSBR) atau dengan capaian 10,73 %.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai serta tidak ada orang tua atau pengasuh serta mempunyai permasalahan dengan hukum di Kabupaten Balangan berjumlah 24 orang dan didampingi oleh Dinas Sosial untuk menyelesaikan kasus hukum tersebut berupa pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian dan penggunaan narkoba.
- c. Lanjut usia terlantar adalah orang lanjut usia yang tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri di Kabupaten Balangan Lanjut usia terlantar berjumlah 4.442 orang yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial kabupaten Balangan berupa pemberian kebutuhan dasar berupa sembako kepada 400 orang, mendapatkan bantuan alat kebutuhan dasar berupa alat bantu lansia sebanyak 13 orang dan bantuan uang saku dalam Panti jompo sebanyak 2 orang dari anggaran APBD Kabupaten. Sedangkan bantuan sarana Prasarana kamar lansia sebanyak 200 orang dari Kementrian Sosial, jadi jumlah Lansia yang mendapatkan bantuan berjumlah 618 orang atau 13,91 % dari jumlah lansia ini sifanya hanya bantuan konsumtif saja.
- d. Penyandang Disabilitas seseorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari – hari secara layak atau norma di Kabupaten Balangan berjumlah 1.240 orang, yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial dari Kabupaten Balangan sebanyak 33 orang yang diberikan alat bantu terdiri dari kursi roda, alat bantu dengar, tongkat kruk dan tongkat netra dari Dana APBD, Disabilitas yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial pada tahun 2021 sebanyak 33 orang atau 2,26 %.

- e. Korban bencana alam orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia yang terjadi karena alam berupa banjir, longsor dan puting beliung di kabupaten Balangan pada tahun 2021 berjumlah 8.401 Kepala Keluarga dengan 26.736 jiwa dan semuanya mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Balangan berupa kebutuhan pokok sehari – hari.
- f. Korban bencana sosial orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa sosial yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia berupa terjadinya kebakaran di Kabupaten Balangan pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 15 Kepala keluarga dengan 54 jiwa semuanya mendapatkan bantuan dari Dinas sosial Kabupaten Balangan.
- g. Perempuan rawan sosial ekonomi seorang wanita yang karena faktor kemiskinannya, keterbelakangan dan kebodohnya mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan atau ekonominya sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan sosialnya, di Kabupaten Balangan berjumlah sebanyak 1.079 orang yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial Kabupaten Balangan sebanyak 8 orang diberikan kepada Perempuan rawan sosial ekonomi yang mendapatkan pelayanan sebanyak 8 orang atau 0,74 %.
- h. Fakir miskin merupakan orang atau keluarga sangat sengsara yang serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, fakir miskin di Kabupaten Balangan berjumlah 60.656 jiwa atau 20.904 Rumah tangga yang mendapatkan pelayanan dari dinas sosial pada Tahun 2021 berupa sebanyak 5.322 jiwa mendapatkan Sembako, 14.280 jiwa mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan dan 4.327 jiwa mendapatkan Bantuan sembako / BPNT PPKM kepada keluarga Fakir Miskin yang terdampak Pandemi Covid 19 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Dana APBN). Sedangkan dari dana APBD 8 kepala keluarga mendapatkan Bantuan Rehab Rumah yang sifatnya menunjang kehidupan orang atau keluarga agar bisa menjalani kehidupan yang layak, sedangkan sifatnya meningkatkan produktifitas, pemberian Bantuan Usaha Kelompok Bersama (KUBe) sebanyak 5 kelompok atau sebanyak 50 kepala keluarga dari APBD II dan 1 kelompok dari APBN, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Fakir Miskin sebanyak 40 Kepala Keluarga dari APBD dan 3 Kepala Keluarga dari APBN berupa tambahan modal usaha berupa barang dan Santunan kematian yang diberikan kepada fakir miskin

sebanyak 1.180 jiwa berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- dengan demikian Keluarga Fakir Miskin yang mendapatkan Pelayanan dari Dinas Sosial pada Tahun 2021 sebanyak 25.127 jiwa atau 41,43 %.

- i. Komunitas adat terpencil (KAT) merupakan orang atau keluarga menempati suatu wilayah yang sangat terpencil dan sangat sulit untuk mencapai bertempat tinggal antara keluarga satu dengan yang lain cukup jauh bahkan harus menumpuh waktu yang sangat lama, di Kabupaten Balangan warga Komunitas Adat Terpencil terdapat di Kecamatan Halong yaitu Desa Mamigang yang berjumlah sekitar 1.565 jiwa Dinas sosial Kabupaten Balangan memberikan pelayanan yaitu berupa pembinaan keterampilan kepada warga komunitas adat terpencil pada tahun 2021 kepada sebanyak 80 Kepala keluarga atau 5,11 %.

Indikator Angka penyandang kesejahteraan sosial (PMKS) pada tahun 2021 menargetkan sebesar 40 % dengan Realisasi 54,91 % dengan capaian 137,28 % kategori capaian sangat tinggi.

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada sasaran meningkatkan kemandirian dan produktifitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Karena pada tahun 2021 pada dasarnya Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Balangan dibantu juga dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Permasalahan /Hambatan pada pelaksanaan sasaran meningkatkan kemandirian dan produktifitas penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) keterbatasan dari sumber daya manusia yang membidangi kesejahteraan sosial kurang seimbang dengan banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial dimana peran dari Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) organisasi sosial, karang taruna, pendamping sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) sangat diharapkan keaktifanya dalam hal pembinaan dan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Balangan, program dan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Balangan sifatnya hanya memberikan untuk kebutuhan hidup (konsumtif) dan belum mencapai pada taraf mendukung keberdayaan dan kemandirian masyarakat secara utuh dan berkelanjutan.

Solusi/strategi pemecahan masalah untuk mencapai sasaran memberikan pelatihan – pelatihan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) karang taruna, Organisasi Sosial, pendamping sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan agar lebih mantap dalam melaksanakan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, pelayanan yang lebih merata dan



memprioritaskan program kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan produktifitas supaya PPKS bisa mandiri, daripada yang bersifat konsumtif tidak akan berkembang. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/instansi lain terkait pelaksanaan penanganan PPKS guna mencapai sasaran meningkatkan kemandirian dan produktifitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek Investasi PMDA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja yang dapat terserap pada perusahaan tersebut.

Tabel 2. 59
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	58	380	1.654	3.174	3.442
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	5	9	8	89	93
3	Rasio daya serap tenaga kerja	11,60 : 1	42,22 : 1	206,75 : 1	35,66 : 1	37,01 : 1

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Balangan, 2021

Pada tahun 2021 Jumlah perusahaan PMDN yang tercatat di Kabupaten Balangan yang termasuk dalam Wajib Lapor ketenagakerjaan adalah sebanyak 93 Perusahaan. Pada 93 Perusahaan tersebut terserap tenaga kerja sebanyak 3.442 orang. Dari Hal ini diketahui rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2021 adalah sebesar 37,01 : 1.

Dengan tingkat rasio daya serap tenaga kerja tersebut, maka rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Balangan meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2020 sebesar 35,01 : 1 menjadi 37,01 : 1 pada tahun 2021. Sedangkan beberapa capaian indikator urusan tenaga kerja dapat dilihat pada table 2.60. berikut.

Tabel 2. 60
Capaian Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021



No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tenaga Kerja					
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	10	4	4	9	7
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	10	4	4	4	5
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	1,881	1,690	2,989	453	164
1.4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	3,095	3,005	2,931	5,898	2931
1.5	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	15	15	18	7	8
1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	160	592	544	192	192
1.7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	420	300	60	128	160
1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	120		350	32	
1.9	Rasio lulusan S1/S2/S3	2136/277	1942/247	3566/818	705/81	2331/260
		7,71 : 1	7,86 : 1	4,36 : 1	8,7 : 1	8,97 : 1

Sumber : Disnakertrans – BLK Kabupaten Balangan, 2021

Angka sengketa pengusaha-pekerja untuk tahun 2021 berjumlah 7 kasus/sengketa, dengan rincian sebagai berikut : 3 Kasus dari PT. Saptaindra Sejati Site Sera, 4 Kasus dari Yayasan Sapta Bangun Persada. Sengketa terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan karyawan, karyawan merasa jenuh dan meminta pensiun serta indisipliner karyawan. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) berjumlah 5 kasus yang berhasil di mediasi oleh mediator dengan perincian sebagai berikut : 1 Kasus dari PT. Saptaindra Sejati Site Sera dan 4 Kasus dari Yayasan Sapta Bangun Persada.

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek, berdasarkan hasil laporan perusahaan di Kabupaten Balangan melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan secara online pada www.wajiblapor.kemnaker.go.id terdapat 2.931 orang karyawan perusahaan yang, didaftarkan oleh perusahaan

pada BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2021, pegawai non ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan juga didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2020 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ada sebanyak 2.092 orang pegawai Non ASN yang dilaporkan oleh BPJS Ketenagakerjaan terdaftar pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga jumlah kepesertaan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2021 sebanyak 5.023 peserta.

Besaran pemeriksaan perusahaan pada tahun 2021, terkendala masih wabah virus Covid-19. Anggaran yang dialokasikan untuk pemeriksaan dan monitoring ke perusahaan berkurang karena kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan wabah virus Covid-19. Kebijakan perusahaan untuk tidak menerima kunjungan dari luar lingkungan perusahaan juga menjadi hambatan pelaksanaan kegiatan ini. Sehingga pemeriksaan perusahaan pada tahun 2021 dilaksanakan berkerjasama dengan Pengawas Ketenagakerjaan. Terdapat 15 (Lima Belas) perusahaan di Kabupaten Balangan yang bisa dimonitor oleh Pengawas Ketenagakerjaan, yaitu : PT. Rika Jaya Mandiri , PT Energi Visi Borneo, CV. Tri Jaya Utama, PT. Cahaya Alam Sardang, PT.Indomarco Prismatama Indomaret Gunung Pandau, PT Sentral Sari Prima Sentosa,CV.Samudera Jaya Konsultan, CV.Syehkar Jaya mandiri. Perusahaan tersebut telah melaksanakan kewajiban berupa menyampaikan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan secara online. Pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan untuk karyawan telah dipenuhi.

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi berjumlah 192 orang, dan tenaga kerja yang mendapatkan berbasis kemasyarakatan berjumlah 160 orang.



B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2. 61
Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Balangan Tahun 2017 – 2021

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	81,20%	80,80%	80,20%	94,88%	94,92%
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	12%	12%	16%	16%	16%
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	18,80%	19,10%	19,80%	5,12%	5,08%
2.4	Rasio KDRT	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	71,31%	68,33%	57,12%	44,85%	65,55%
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100%	100%	100%	100%	100%
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%
2.13	Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	0.86	0,97	0,99	0,96	0,99

Sumber : DinsosP3APMD Kabupaten Balangan, 2021

Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta

Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Balangan pada tahun 2021 belum mencapai 30% yaitu hanya 16% (4 orang), namun telah meningkat dibandingkan tahun 2018 (pemilu sebelumnya).

Adapun partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kabupaten Balangan tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 hanya sebesar 5,12% yang kemudian menurun lagi menjadi 5,08% ditahun 2021, jumlah tersebut diambil berdasarkan dari data perusahaan pada aplikasi wajib lapor pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu pintu transmigrasi dan tenaga kerja yang mana terdapat perbedaan jumlah dan perusahaan yang melapor pada tahun 2020 dan 2021 yang mengakibatkan perbedaan pada jumlah pegawai yang bekerja di lembaga swasta.

Kekerasan terhadap perempuan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Begitupun kekerasan terhadap anak menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 setiap perbuatan terhadap anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum,

Faktor utama penyebab merebaknya serta tak terkendalinya kekerasan yang dialami perempuan dan anak, dikarenakan selama ini terkesan pemerintah maupun masyarakat sipil melihat dan menangani ini, sebagai dua masalah yang terpisah, yaitu kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak, padahal ini merupakan permasalahan yang integral dan saling mempengaruhi. Dimana dapat dipastikan, jika terjadi kekerasan menimpa perempuan, kemungkinan besar di dalamnya juga terjadi kekerasan terhadap anak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya : Adanya komitmen dari pimpinan untuk menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai organisasi terdepan yang mendukung penghapusan kekerasan

terhadap perempuan dan anak, Adanya kerjasama lintas sektor, sehingga jika terjadi permasalahan dapat segera tertangani dengan baik, Adanya kesadaran pada masyarakat untuk melindungi perempuan dan anak.

Sedangkan Permasalahan/hambatan yang ditemui adalah masih adanya rasa enggan/malu melaporkan atas kekerasan yang dialami kepada pihak yang berwenang, karena beranggapan itu adalah aib. Sehingga Solusi/strategi pemecahan masalah yang mungkin dapat dilakukan berupa Perlunya peningkatan kerjasama lintas sektor dan Perlunya tenaga yang berkompeten dalam menangani korban tindak kekerasan.

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2021 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu yaitu terdapat 19 kasus yang terdiri dari 12 kasus anak dan 7 kasus perempuan. Kebanyakan kasus anak didominasi dengan kekerasan seksual yaitu sebanyak 9 kasus dari 12 kasus. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi dengan kekerasan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT) yaitu 6 kasus dari 7 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan untuk cakupan penanganan korban yaitu dari Pengaduan /rujukan, visum/USG (Kesehatan), Pendampingan dan konseling Psikologis maupun mediasi. Pada beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan rata-rata berakhir dengan mediasi

Persoalan dalam penanganan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu hanya dilakukan oleh sumber daya yang ada. Sedangkan untuk penanganan korban yang mengalami trauma berat diperlukan psikolog. Pada saat ini Kabupaten Balangan belum memiliki tenaga ahli psikolog, sehingga selama ini untuk penanganan korban kekerasan harus dibawa ke psikolog di Kabupaten tetangga (HSU).

Tabel 2. 62
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Balangan

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	IPG	92,59%	92,61%	92,31%	92,32%	92,12%	92,22%
2	IDG	65,50%	65,53%	65,79%	65,97%	69,55%	70,14%
3	Persentase anggaran responsive gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD kabupaten	-	-	4,8%	7,25%	12,35%	18,01%
4	Persentase perkawinan usia anak	-	-	0,7%	1%	1,48%	1,01%

Sumber : DinsosP3APMD Kabupaten Balangan, 2021

IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

Capaian indeks pembangunan gender kabupaten Balangan pada tahun 2021, menggunakan realisasi capaian IPG tahun 2020, target pada tahun 2021 adalah sebesar 92,71 dengan memakai realisasi capaian tahun 2020 indeks pembangunan gender kabupaten Balangan pada tahun 2021, sebesar 92,22 yang berarti kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Balangan masih

terdapat kesenjangan, sehingga diperlukan kiat-kiat ataupun tindakan yang nyata untuk memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan dikarenakan adanya legitimasi konstruksi budaya di masyarakat yang cenderung patriaki, dimana ada pandangan bahwa laki-laki lebih dalam segala hal dibandingkan perempuan. Kesenjangan juga dipengaruhi oleh ketidaktepatan interpretasi ajaran agama dan adanya kebijakan politik, yang merugikan gender tertentu.

IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Target pembangunan dalam hal kesetaraan gender adalah dengan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender disemua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender disemua tingkatan. IDG ini digunakan untuk mengukur persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan yang diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Indeks pemberdayaan gender kabupaten Balangan pada tahun 2021, menggunakan realisasi capaian IDG tahun 2020, target pada tahun 2021 adalah sebesar 70,77 dengan memakai realisasi tahun 2020 diperoleh capaian untuk tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 70,14. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi dan politik semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender. Dengan demikian, peranan perempuan semakin strategis dibandingkan tahun sebelumnya. Program-program pemerintah dalam hal peningkatan kapabilitas gender perlu terus didorong guna mengurangi jarak (gap) kapabilitas antara laki-laki dan perempuan. Harapannya, pembangunan yang dilaksanakan beserta hasil-hasilnya dapat diselenggarakan secara lebih setara, contohnya berdasarkan hasil pemilu 2019-2024, persentase anggota parlemen perempuan di Provinsi Kalimantan selatan hanya 16,36%, bahkan untuk kabupaten Balangan hanya sebesar 16% keterwakilan perempuan di parlemen.

Perencanaan penganggaran yang responsive gender merupakan upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan sebagaimana telah tersirat dalam RPJMN serta dalam upaya pencapaian kesejahteraan gender yang tercantum dalam salah satu butir SDG's. Anggaran Responsif Gender (ARG) mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD kabupaten pada tahun 2021 adalah sebesar 18,01% dengan capaian 100% dan dikategorikan sangat tinggi. Hal ini mendapat dukungan dari 29 SKPD dan hanya 1 SKPD yang tidak melaksanakan PPRG dengan jumlah program yang responsive gender sebanyak 82 program dan 97 kegiatan. Persentase ARG didapatkan dari anggaran yang responsive gender sebesar Rp 94.411.035.006 dibagi dengan total belanja barang dan jasa ditambah belanja modal APBD Kab. Balangan sebesar Rp 523.329.214.514,-.

Target pembangunan dalam hal kesetaraan gender adalah dengan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender disemua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender disemua tingkatan.

Beberapa Faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah Adanya komitmen dari pimpinan untuk mengedepankan dan memperkuat peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Balangan dalam meningkatkan indeks pembangunan, pemberdayaan gender dan ARG, Adanya kerjasama yang baik antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Balangan dengan Instansi/SKPD terkait, Adanya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan.

Permasalahan/hambatan yang dihadapi seperti Masih adanya budaya patriaki yang dipegang teguh oleh masyarakat, sehingga menghambat/menciptakan kesenjangan gender di tengah masyarakat, Kerjasama lintas sektor yang belum optimal, Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yang responsive gender, Lemahnya kapasitas kelembagaan

PUG di SKPD Kabupaten dan Belum optimalnya penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender

Solusi/strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan yaitu Meningkatkan kerjasama antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan dengan instansi terkait, Menggiatkan sosialisasi ke tengah masyarakat guna membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, Mengoptimalkan peran dan fungsi Pokja PUG dan Focal Point PUG SKPD.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi

Persentase perkawinan usia anak di Kabupaten Balangan pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, dimana persentase perkawinan usia anak pada tahun 2020 adalah sebesar 1,48 % sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 1,01%. Dari 891 orang yang melaksanakan perkawinan, terdapat 18 orang usia anak berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Perkawinan usia anak tertinggi berada di Kecamatan Lampihong sebanyak 7 (tujuh) orang. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak dengan upaya meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan serta mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak.

C. Urusan Pangan

Menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman. Sementara itu, Ketahanan Pangan menurut UU



tersebut didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ruang lingkup ketahanan pangan meliputi akses, ketersediaan, pemanfaatan dan stabilitas.

Tabel 2.63
Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan
Tahun 2017-2021

No	Komoditi	Ketersediaan Produksi (Ton)					Kebutuhan Tahun (Ton)					Surplus/ Defisit (Ton)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Beras	135.297	117.345	96.558	103.633	100.088	16.947	13.980	14.450	14.643	14.740	118.350	103.365	82.108	88.990	85.348
2	Gula Pasir*	1.500	1.238	1.253	1.248	1.256	1.469	1.176	1.216	1.232	1.240	31	62	37	16	16
3	Minyak oreng*	1.268	1.256	1.255	1.315	1.273	1.243	1.202	1.242	1.259	1.267	25	54	13	56	6
4	Bawang Merah*	305	452	453	471	460	267	417	431	437	440	38	35	22	34	20
6	Cabai Merah/rawit	182	14.321	15.125	15.432	14.752	156	13.980	14.450	14.643	14.740	26	341	675	789	12
8	Daging Sapi	207	276	207	248	225	133	228	236	239	240	74	48	(29)	9	(15)
9	Daging Ayam	1.088	1.121	1.088	1.410	1.785	916	903	934	946	952	172	218	154	464	833
10	Telur Ayam Ras	800	1.032	1.268	1.281	1.189	865	898	929	941	947	(65)	134	339	340	235
11	Jagung	20.739	54.068	94.683	16.374	38.660	175,75	162,87	194,25	896,33	159	20.563,25	53.905,13	94.488,75	15.477,67	38.501
12	Kacang Kedelai	404	7.809,45	325,54	306,70	-	439,37	712,25	712,25	479	321	(35,37)	7.097,2	(386,71)	(172,3)	(321)
13	Kacang Hijau	33	33,48	37,30	93	-	213,41	369,76	12,75		40	(180,41)	(336,28)	24,55		(40)
14	Kacang Tanah	392	392,11	293,90	199,07	41,02	464,48	497,26	129,5		212	(72,48)	(105,15)	164,4		(170,98)
15	Ubi Kayu	3.403	3.403	5.963	2.396	490	539,80	513,68	1.359,75		373	2.863,2	2.889,32	4.603,25		117
16	Ubi Jalar	915	915	915	275	-	62,77	63,75	777		185	852,23	851,25	138		(185)

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan, 2022

Capaian ketersediaan pangan Kabupaten Balangan pada tahun 2017 - 2021 cukup baik. Hampir semua komoditi mengalami surplus, yang berarti ketersediaan produksinya melebihi kebutuhan per tahun di Kabupaten Balangan. Komoditi yang mengalami surplus terbesar adalah Beras dan Jagung. Hanya satu komoditi yang mengalami defisit yaitu Kacang Kedelai. Untuk komoditi Daging Sapi yang pada tahun 2019 mengalami kekurangan pada tahun 2021 sudah mencukupi kebutuhan di Kabupaten Balangan.

D. Urusan Bidang Pertanahan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Tanah
2. Kegiatan Inventarisasi & Penatagunaan Tanah dan Penegasan Batas Tanah Milik Daerah:
 - a. Memfasilitasi sertifikasi lahan milik Pemkab. Balangan sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan. Persentase luasan lahan yang bersertifikat dibandingkan dengan luasan lahan yang seharusnya bersertifikat dalam daerah di Kabupaten adalah sebesar 7%, atau seluas 69.339.970 m² dari 985.503.630 m².
 - b. Pemasangan patok dan plang nama dan juga dilaksanakan pemasangan pagar batas tanah di beberapa lahan/tanah milik Pemerintah Kabupaten Balangan terutama yang telah selesai sertifikatnya dan hasil pengadaan tanah tahun sebelumnya dalam rangka pengamanan aset tanah milik daerah.

3. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Konflik Pertanahan

Memfasilitasi penyelesaian permasalahan aset-aset tanah, khususnya tanah sekolah (SDN & SMP) dan layanan kesehatan (Puskesmas & Pustu) dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi administrasi surat menyurat tanah serta tinjauan fisik bidang tanah masing-masing aset.

- Jumlah objek/bidang tanah diinventarisasi serta tinjauan lapangan sebanyak : 264 bidang tanah
- Dapat dilanjutkan ke sertifikasi tanah : 26 bidang tanah
- Terdapat permasalahan : 238 bidang tanah
- Uraian permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten terkait penanganan permasalahan pertanahan diantaranya adalah tidak adanya bukti dukung terkait surat menyurat asli asal usul perolehan tanah, tanda batas pasti atas luasan tanah yang tercatat, dan tidak adanya tanda kepemilikan/plang nama aset daerah atas tanah yang tercatat sebagai aset daerah sehingga menimbulkan pemasalahan dengan warga masyarakat, dan masih tidak validnya informasi yang tersaji dalam buku Inventaris Barang khususnya Tanah.



E. Urusan Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan ditunjukkan dengan beberapa indicator sebagai berikut.

Tabel 2.64
Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	45,56	53,33	47,39	40,83	53,33	50,95
2	Hasil Pengukuran Indeks Pencemaran Udara	86,29	91,64	93,67	93,33	91,17	91,09
3	Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan	46,32	45,39	51,84	52,76	56,45	51,60
4	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	-	13	1	13	19	19
5	Timbunan sampah yang tertangani	85,41	90,16	111,67	173,53	175,46	5.162,93
6	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	8%	10%	10%	10%	2,65%	12,07%
7	Persentase cakupan area pelayanan	26,26%	27,63%	33%	-	65%	75,18%
8	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	17	8	28	1	2	4
9	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten	1	1	1	1	1	1
10	Persentase sejumlah sampah yang tertangani	26,26%	27,63%	33%	50,82%	71,74%	75,18%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, 2022

Indeks kualitas air di Kabupaten Balangan pada tahun 2021 adalah 50,95, turun dari 53,33 di tahun 2020 dan 40,83 di tahun 2019, indikasi ini menggambarkan ada penurunan kualitas air di tahun 2021 setelah sebelumnya menunjukkan peningkatan kualitas air di tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan kualitas udara menunjukkan trend menurun, pada tahun 2021 tercatat sebesar 91,09 menurun dari tahun 2020 sebesar 91,17. Dari data kualitas udara yang ada menunjukkan kontinuitas penurunan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2019 kualitas udara tercatat 93,33 lebih tinggi dari kualitas udara pada tahun 2020.

Peningkatan angka terjadi pada persentase jumlah sampah yang tertangani yang cukup signifikan meningkat dari 71,74 % di tahun 2020 menjadi 75,18 % di tahun 2021. Peningkatan ini terjadi salah satunya karena masifnya pembuangan sampah yang berasal dari desa-desa di seluruh kabupaten Balangan ke TPA Batu Merah. Masifnya pembuangan sampah ini sayangnya tidak diikuti gerakan 3R sebagai upaya yang meliputi kegiatan mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*) dan mendaur ulang sampah (*recycle*). Persoalan ini bila dibiarkan akan membuat tempat penampungan sampah di TPA Batu Merah akan cepat penuh sebelum waktunya, sehingga menimbulkan ancaman TPA batu Merah yang tak lagi bisa beroperasi karena kelebihan kapasitas. Tanpa menafikan kesadaran masyarakat yang tinggi akan pembuangan sampah pada tempatnya, persoalan masifnya pembuangan sampah dari desa-desa di kabupaten Balangan yang akan menyebabkan *lifetime* (umur operasi) TPA Batu Merah yang lebih pendek daripada seharusnya harus segera dicarikan solusinya, karena dengan penuhnya TPA Batu Merah akan membuat Kabupaten Balangan membangun TPA yang baru dan itu memerlukan anggaran yang tidak sedikit yang cukup menguras anggaran APBD kabupaten



F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.65
Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	Tahun										
		2017		2018		2019		2020		2021		
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	87.749	0,98	87.912	0,96	89.820	0,98	91.997	0,98	91.842	0,98	
		89.591		91.117		92.085		93.659		93.707		
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	1.242	0,55	1.272	0,57	1.340	0,61	1.326	0,59	1.385	0,611	
		2.273		2.240		2.209		2.253		2.265		
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	343	0,21	458	0,28	542	0,33	595	0,36	1300	0,40	
		1.650		1.639		1.650		1.648		3.288		
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada		Ada		Ada		ada		Ada		
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah		Sudah		Sudah		sudah		Sudah		
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97,94%		96,48%		97,54%		98,23%		98,01%		
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	42,46%		48,05%		53,32%		55,16%		58,16%		

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, 2021

Secara umum capaian indikator administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Balangan pada tahun 2017—2021 mengalami kondisi fluktuatif pada beberapa indikator, diantaranya Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk dan cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini dikarenakan perekaman KTP bersifat dinamis diantaranya adanya penduduk wajib KTP pemula (baru memasuki usia 17 tahun), penduduk tersebut berada di luar daerah, tempat tinggal penduduk sangat jauh dari tempat perekaman KTP dan, sebagian penduduk masih memiliki anggapan bahwa KTP bukan dokumen yang penting. Kendala yang dihadapi menjadi upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk membuat inovasi, diantaranya jemput bola perekaman dokumen kependudukan ke wilayah yang sulit di jangkau. Indikator yang mengalami peningkatan diantaranya pada indikator Rasio bayi berakte kelahiran dan rasio pasangan yang memiliki akta nikah.

Peningkatan indikator rasio bayi yang memiliki akta kelahiran didorong oleh factor masyarakat yang perlahan sudah menyadari pentingnya pencatatan sipil bagi anggota keluarganya. Upaya optimalisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan agar rasio bayi berakte kelahiran terus meningkat, bisa dilakukan di masa yang akan datang antara lain meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan bayi yang baru lahir ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secepat mungkin dan menjalin kerjasama dengan tempat persalinan (rumah sakit, Puskesmas, bidan) agar bayi yang baru lahir langsung didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rasio pasangan berakte nikah adalah menggambarkan jumlah penduduk non muslim berstatus kawin memiliki akta kawin dengan jumlah penduduk penduduk non muslim berstatus kawin. Rasio pasangan berakte nikah dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan, meskipun pada cakupannya masih tergolong rendah. Rendahnya Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Balangan menjadi tugas berat yang harus dituntaskan secara bersama-sama antar sektor. Beberapa penyebab rendahnya Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Balangan yaitu rendahnya kesadaran penduduk tentang pentingnya kepemilikan akta kawin bagi penduduk yang telah tinggal bersama antara lelaki dewasa dengan perempuan dewasa, masih banyaknya penduduk non muslim yang kawin hanya melaporkan kepada ketua adat tanpa melaporkan kepada pemuka agama dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Database kependudukan skala provinsi sudah tersedia di Kabupaten Balangan. KTP Nasional berbasis NIK sudah diterapkan sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terus mengalami peningkatan namun tidak mencapai 100%. Salah satu penyebab belum mencapai 100% adalah adanya penambahan wajib KTP pemula (penduduk baru memasuki usia 17 tahun) hampir setiap harinya. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan terus melanjutkan kegiatan pelayanan perekaman KTP di sekolah-sekolah.

Cakupan penerbitan akta kelahiran dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan meskipun masih jauh dari 100%. Rendahnya Cakupan penerbitan akta kelahiran ini disebabkan adanya dua macam proses penerbitan, yaitu secara manual dan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Penerbitan akta kelahiran melalui SIAK dimulai tahun 2011



sehingga akta yang diterbitkan sebelum tahun tersebut atau secara manual masih banyak yang belum dimasukkan ke dalam database SIAK. Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memulai untuk mengumpulkan fotokopi akta kelahiran para siswa sekolah SD, SMP, SMA atau sederajat untuk dimasukkan ke dalam database kependudukan. Hal ini diharapkan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada SIAK agar mendekati jumlah sebenarnya penduduk yang telah memiliki akta kelahiran.

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola, memanfaatkan serta mempertahankan jati diri dan kemajuan yang dicapainya.

Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk menjawab isu isu strategis yang dihadapi oleh desa. Terhadap isu isu strategis di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Tabel 2.66
Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan
Tahun 2020-2021

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target	Target	Capaian	Capaian	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)
			2020	2021	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Desa Membangun (%)	0	0.6810	0,690	0.6395	0,6674 (96,72%)	96,72%

Sumber : DinsosP3APMD Kabupaten Balangan, 2021

Realisasi indikator Indeks Desa Membangun tahun 2021 sebagaimana tabel diatas adalah sebesar 96,72%. Pencapaian ini dikategorikan sangat tinggi tingkat keberhasilannya. Keberhasilan IDM di Kabupaten Balangan terlihat dari kenaikan nilai IDM dari Tahun 2020 0,6395 dengan status IDM Berkembang di Tahun 2021 menjadi 0,6674 dengan status IDM Berkembang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja indikator ini adalah:

- a. Ada beberapa program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang mendukung capaian tersebut yaitu Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- b. Adanya dukungan Pemerintah Pusat yang sangat peduli dan konsentrasi melalui kebijakan pengucuran dana desa secara umum, baik regulasi maupun kebijakan lainnya.
- c. Adanya kebijakan penempatan tenaga pendamping desa yang berasal dari dana dekonsentrasi seperti Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD), dan Pendamping Lokal Desa.
- d. Adanya dukungan dan semangat yang tinggi dari jajaran Pemerintah Desa dalam menggerakkan pembangunan di Desa dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan nilai IDM dilihat dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yakni diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

- a. Peningkatan pelayanan social dasar seperti meningkatnya kinerja kader posyandu dalam memberikan layanan yang berdampak pada meningkatnya presentasi warga memperoleh layanan kesehatan serta BPJS.
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan di desa sehingga terjangkau oleh masyarakat.
- c. Meningkatnya PAUD sebagai lembaga pendidikan usia dini didesa.
- d. Meningkatnya sarana air bersih dan sanitasi.
- e. Tersedianya akses informasi berupa layanan internet didesa.

2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)

- a. Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan yaitu BUMDES.

- b. Keragaman produksi masyarakat seperti UP2K, UMKM, UPPKS yang dilaksanakan oleh PKK Desa, Dinas Perindustrian koperasi UMKM, dinas perdagangan serta perusahaan.
3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan yang berimbas pada penurunan bencana dan penanganan bencana.

Realisasi indikator kinerja utama Tahun 2020 (0,6395) dan Tahun 2021 (0,6674) terjadi peningkatan capaian indikator kinerja dikarenakan pertimbangan berdasarkan hasil perhitungan IDM sebelumnya potensi desa yang akan naik statusnya sudah difokuskan dan diperhitungkan dari hasil IDM.

Target akhir RPJMD pada tahun 2021 IDM Kabupaten Balangan 0,690. Untuk mencapai target tersebut perlu dilakukan terobosan atau upaya sebagai berikut :

- b. Melakukan koordinasi lintas sektor yang lebih komprehensif dan integral terutama SKPD yang mensupport pencapaian kinerja indeks desa membangun seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- c. Melakukan bimbingan teknis / sosialisasi pendataan status IDM dengan konsep ketepatan penggalan data dan mekanisme pendataan yang benar dan akuntabel.

Berikut data lengkap Klasifikasi status Desa Kabupaten Balangan dari tahun 2017-2021 :

Tabel 2.67
Klasifikasi Status Desa Kabupaten Balangan

Tahun: 2017

Kode Kecamatan	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah
631101	JUAI	0	0	3	15	3	21
631102	HALONG	0	0	1	11	12	24
631103	AWAYAN	0	0	2	20	1	23
631104	BATU MANDI	0	0	8	10	0	18
631105	LAMPIHONG	0	0	1	23	3	27
631106	PARINGIN	0	0	2	11	1	14
631107	PARINGIN SELATAN	0	0	1	9	5	15
631108	TEBING TINGGI	0	0	0	10,00	2	12
	Jumlah	0	0	18	109	27	154



Tahun: 2018

Kode Kecamatan	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah
631101	JUAI	0	0	6	13	1	20
631102	HALONG	0	0	7	12	5	24
631103	AWAYAN	0	0	11	12	0	23
631104	BATU MANDI	0	3	12	3	0	18
631105	LAMPIHONG	0	0	4	22	1	27
631106	PARINGIN	0	0	3	11	0	14
631107	PARINGIN SELATAN	0	0	3	12	0	15
631108	TEBING TINGGI	0	0,00	5	7,00	0	12
	Jumlah	0	3	51	92	7	153

Tahun 2019

Kode Kecamatan	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah
631101	JUAI	0	0	13	7	0	20
631102	HALONG	0	3	14	7	0	24
631103	AWAYAN	0	1	22	0	0	23
631104	BATU MANDI	0	3	13	2	0	18
631105	LAMPIHONG	0	0	24	3	0	27
631106	PARINGIN	0	0	14	0	0	14
631107	PARINGIN SELATAN	0	2	8	5	0	15
631108	TEBING TINGGI	0	0	8	4	0	12
	Jumlah	0	9	116	28	0	153

Tahun: 2020

Kode Kecamatan	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah
631101	JUAI	0	0	18	2	1	21
631102	HALONG	0	4	14	6	0	24
631103	AWAYAN	0	1	22	0	0	23
631104	BATU MANDI	0	4	13	1	0	18
631105	LAMPIHONG	0	0	26	1	0	27



631106	PARINGIN	0	0	14	0	0	14
631107	PARINGIN SELATAN	0	3	11	1	0	15
631108	TEBING TINGGI	0	0	9	3	0	12
	Jumlah	0	12	127	14	1	154

Tahun: 2021

Kode Kecamatan	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah
631101	JUAI	0	0	20	0	1	21
631102	HALONG	0	4	20	0	0	24
631103	AWAYAN	0	6	17	0	0	23
631104	BATU MANDI	0	7	11	0	0	18
631105	LAMPIHONG	0	5	22	0	0	27
631106	PARINGIN	0	1	13	0	0	14
631107	PARINGIN SELATAN	0	3	12	0	0	15
631108	TEBING TINGGI	0	0	11	1	0	12
	Jumlah	0	26	126	1	1	154

Tabel diatas juga menunjukkan data bahwa upaya pengentasan desa tertinggal dan sangat tertinggal juga dapat dikatakan sangat berhasil pencapaiannya sampai dengan tahun 2021, hal ini bisa dilihat dari data jumlah desa tertinggal pada tahun 2021 hanya tersisa sebanyak 1 desa yaitu Desa Kambiyain Kec. Tebing Tinggi. Jumlah ini menurun signifikan dari keadaan tahun 2017 dimana jumlah desa tertinggal sebanyak 109 desa. Sedangkan desa dengan klasifikasi sangat tertinggal juga sangat menurun jumlahnya dari 27 desa pada tahun 2017 tersisa 1 desa sangat tertinggal pada tahun 2021 yakni Desa Wonorejo. Masih adanya desa dengan status sangat tertinggal merupakan keadaan yang juga mendapat perhatian yang serius dari seluruh jajaran Dinas Sosial, P3A dan PMD. Dan saat ini Desa Wonorejo masih dalam proses penggabungan desa dengan Desa Sumber Rejeki Kecamatan Juai.



H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.68
Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021



No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,42	1,36	1,29	1,23	1,17	1,40
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,336	2,667	2,240	2,35	2,35	2,35
8.6	Ratio Akseptor KB	-	70%	70%	80%	80%	80%
8.7	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49		77,25%	79,21%	80,74%	81,21%	81,73%
8.8	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	-	-	23	23,37	24,71	23,9
8.9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,012%	0,023 %	0,013 %	0,010 %	0,008 %	2,88%
8.10	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	3,38%	6,2%	8,80%	8,60%	6,41%	5,97%
8.11	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7,80%	6,7%	10,27%	11,41 %	7,60%	8,81%
8.12	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		77,25%	79,21%	80,74%	81,21%	81,73%
8.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	88,22%	86,64%	84,55%	84,12%	58,02%	85,39%
8.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	57,73%	40,68%	56,18%	55,93%	51,12%	80,13%
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	61,46%	62,44%	62,13%	61,58%	36,58%	81,53%
8.16	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	-	25%	25%	38%	62,50%	5
8.17	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	26%	24%	24%	24%	28%	100%
8.18	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	47,9%	43,89%	41,88%	47,94%	60,32%	84,94%
8.19	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.20	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	60%	80%	100%	100%	100%	100%
8.21	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.22	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%



8.23	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	98.77%	99.13%	98.86%	99.17%	95.22%	95%
8.24	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	46,62%	48,11%	48,78%	51%	47.26%	45,89%

Sumber : DPPKB Kabupaten Balangan, 2021

Tabel 2.69.
Capaian Bidang Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	ASFR (Angka Kelahiran Remaja)	23%	23,9%	96,08%
2	Angka Prevalence Kontrasepsi Modern (MCPR)	75%	81,59%	108,79%

1. Angka Kelahiran Remaja

Angka Kelahiran Remaja (ASFR) adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Pola ASFR membentuk huruf U terbalik. ASFR digunakan untuk dasar untuk proyeksi penduduk, mengetahui jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin dimasa yang akan datang. Pengetahuan tentang ASFR berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Fertilitas remaja merupakan isu penting dari segi kesehatan dan social karena berhubungan dengan tingkat kesakitan serta kematian ibu dan anak. Ibu dan anak yang berumur remaja, terutama di bawah umur 18 tahun, lebih berpeluang untuk mengalami masalah pada bayinya atau bahkan mengalami kematian yang berkaitan dengan persalinan dibandingkan dengan wanita yang lebih tua. Selain itu, melahirkan pada umur muda mengurangi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau mendapat pekerjaan.

Secara sosial ekonomi, perkawinan umur muda di bawah 18 tahun menjadi salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita. Pada banyak kasus, kawin umur muda berkaitan dengan terputusnya kelanjutan sekolah remaja, yang akan berakibat pada tingkat pendidikan wanita menjadi rendah. Pendidikan yang rendah akan merugikan posisi ekonomi wanita dan rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita. Proporsi pernikahan remaja di bawah 19 tahun semakin berkurang

pada generasi yang lebih muda, pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan pada tingkat kesejahteraan terkaya. Kondisi ini merupakan salah satu dampak dari semakin meningkatnya pendidikan wanita dan semakin terbuka kesempatan kerja yang dapat dimasuki oleh tenaga kerja wanita.

ASFR tahun 2021 di Kabupaten Balangan sebesar 23,90% dari target 23% atau dengan capaian kinerja 96,8%. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menurunkan ASFR di Kabupaten Balangan antara lain promosi dan KIE dalam rangka pendewasaan usia perkawinan melalui berbagai saluran media terutama untuk usia 15-19 tahun, meningkatkan cakupan promosi dan konseling kesehatan reproduksi terhadap remaja pada masa pandemi, promosi pencegahan kehamilan risiko tinggi untuk empat terlalu khususnya terlalu muda dan untuk mencegah Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dan remaja melalui berbagai kegiatan sosialisasi maupun peningkatan kompetensi kader kelompok kegiatan remaja. Selain itu sebagai bentuk apresiasi untuk remaja Balangan yang berpartisipasi menyebarkan virus-virus Remaja Generasi Berencana, yang muda yang keren dan berencana, mampu menjadi remaja yang tangguh dan berkualitas, pada tahun 2021 telah dilaksanakan Grand Final Duta Genre tahun 2021 tingkat Kabupaten Balangan di Gedung Budaya. Dengan tema generasi berencana untuk masa depan cerdas dan berdaya saing, kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan remaja dari Kecamatan Paringin, Juai, Lampihong, Awayan dan Baturmendi.

Walaupun ASFR di Kabupaten Balangan mencapai target yang diinginkan namun masih tidak terlalu signifikan diatas target hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pernikahan usia muda berhubungan secara signifikan dengan rendahnya status sosial, ekonomi, pendidikan, dan wilayah sehingga hal tersebut menjadi solusi praktis kondisi keluarga, masih adanya masyarakat yang memegang teguh adat istiadat, budaya setempat, dan agama tentang pernikahan usia muda/anak, pembinaan ketahanan remaja belum menjadi kegiatan prioritas di pemerintah daerah sehingga yang berdampak pada rendahnya tingkat keberlangsungan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan BKR, tidak tersedianya tenaga pendidik sebaya dan konselor sebaya, kurang bervariasinya materi dan media tentang ketahanan remaja, kurang optimalnya pemberian KIE dan penyuluhan bagi Remaja dan PUS muda oleh tenaga lapangan karena kondisi Pandemi COVID-19.

Jika dibandingkan dengan target ASFR 15 – 19 tahun pada BKKBN Propinsi Kalimantan selatan untuk tahun 2021 sebesar 34 per 1000 perempuan, angka ASFR ASFR 15 – 19 tahun Balangan tahun 2021 jauh lebih rendah. hal ini karena jumlah penduduk perempuan usia 15 – 19 tahun yang lebih sedikit dibandingkan dengan Kabupaten Lain. Sedangkan untuk mencapai target Nasional, yaitu 18 per 1000 perempuan usia 15 – 19 tahun memerlukan banyak dukungan baik dari Pemerintah maupun stakeholder terkait dengan berbagai program yang berkaitan dengan menurunkan angka ASFR 15 – 19 tahun.

2. *Prevalensi kontrasepsi modern (MCPR)*

Angka Prevalence Kontrasepsi Modern (MCPR) adalah proporsi pasangan usia subur (15-49 tahun) yang sedang menggunakan salah satu obat/alat kontrasepsi modern berupa MOW, MOP, IUD, Implant, Suntik, Pil dan Kondom dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur dalam periode tertentu. Perhitungan MCPR menggunakan data Statistik Rutin Januari 2021 sampai dengan Nopember 2021.

Realisasi pemakaian kontrasepsi modern Kabupaten Balangan tahun 2021 sebesar 81,59 %, sementara target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebesar 75 %. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa apabila dibandingkan target, maka realisasi mCPR Kabupaten Balangan adalah 81,59 atau dengan capaian 108,79 %. Capaian ini sudah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2021.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan MCPR pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan kerjasama lintas sector terutama dengan organisasi IBI dimana Bidan Pengelola Klinik KB merupakan bagian dari anggota nya. Penyuluh KB di lapangan sangat terkait erat dalam pemenuhan alat/obat kontrasepsi untuk masyarakat.
- b. Penguatan kerjasama dengan RSUD Kabupaten Balangan sebagai penyedia pelayanan KB kepada PUS yang membutuhkan Medis Operasi Wanita dan Medis Operasi Pria.
- c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) bagi Pasangan Usia Subur di 13 fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Balangan.
- d. Penyediaan dukungan biaya distribusi alokon dari gudang kabupaten ke 13 faskes melalui dana BOKB.
- e. Penguatan penggerakan pelayanan KB MKJP melalui penyediaan dukungan dana penggerakan yang di dalamnya sudah termasuk komponen jasa medis pelayanan KB.

- f. Memberikan dukungan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pemberi layanan KB MKJP di faskes yang sudah ditetapkan pada pandemic Covid-19.
- g. Pembinaan peserta KB untuk menurunkan putus pakai penggunaan kontrasepsi (*Drop Out/DO*)
- h. Memantau ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dan mencegah terjadinya stock out di fasilitas kesehatan melalui aplikasi Sistem Informasi Rantai Pasok Alokasi (SIRIKA)

Walaupun berdasarkan hasil capaian MCPR sudah memenuhi target, namun masih terdapat factor hambatan dalam pencapaian MCPR sebagai berikut:

- a. Kondisi Pandemic Covid-19 yang menyebabkan pembatasan jumlah dan jam pelayanan di klinik KB dan pada beberapa wilayah kecamatan mengharuskan pelayanan KB MKJP dengan jemput bola ke desa-desa.
- b. Semua kecamatan sudah mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan dana penggerakan KB MKJP, namun tidak semua kecamatan memiliki upaya yang sama dalam meningkatkan jumlah akseptor KB MKJP di wilayahnya.

Capaian MCPR tahun 2021 sebesar 108,97 % dan Capaian terhadap RPJMD Provinsi sebesar 122,25 % sedangkan Capaian terhadap RPJMD Nasional sebesar 131,26 %. Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah dengan :

- a. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan cakupan pelayanan KB
- b. Berkoordinasi dengan Organisasi POGI, IBI dan IDI dalam memberikan pelayanan KB kepada masyarakat termasuk KB pascapersalinan
- c. Melakukan pelayanan KB dengan memanfaatkan momentum di kabupaten dan kecamatan bekerjasama dengan stakeholders dan mitra kerja terkait.
- d. Melakukan penggerakan pelayanan KB MKJP dengan menggunakan dana BOKB untuk semua kecamatan di Kabupaten Balangan

I. Urusan Perhubungan

Pada urusan perhubungan, hal yang menjadi kendala di Kabupaten Balangan adalah belum adanya jaringan transportasi, trayek angkutan umum dan angkutan umum itu sendiri. Kondisi ini mendorong bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi sehingga menyebabkan angka kecelakaan lalu-lintas meningkat dan kepadatan lalu-lintas yang tinggi pada ruas tertentu terutama pada jam sibuk. Jaringan transportasi merupakan infrastruktur penting yang diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu wilayah. Infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah dan mendorong perkembangan suatu wilayah. Transportasi merupakan fasilitas yang banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat memainkan peran penting dalam kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat. Transportasi mempengaruhi aktivitas sehari-hari dari masyarakat karena mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendukung hampir semua aktivitas seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, kelancaran bekerja dan lainnya. Transportasi darat merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih luas yaitu sistem transportasi. Jika kondisi di ini tidak diantisipasi sejak dini akan menjadikan perkembangan sarana dan prasarana transportasi wilayah berkembang secara alami tanpa konsep yang jelas.

Kemajuan suatu wilayah sangat ditentukan keberadaan sistem, sarana dan prasarana transportasi di wilayah tersebut. Dalam kaitannya dengan kondisi Kabupaten Balangan dapat dicermati bahwa secara umum kondisi transportasi Kabupaten Balangan kurang mampu merespon dinamika perkembangan wilayah sehingga pada tahap tertentu kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan wilayah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 bahwa untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan dengan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan. Pembenahan sektor transportasi perlu dilakukan, salah satunya ialah perlu pembangunan sistem transportasi Angkutan Massal guna memperbaiki layanan angkutan di Kabupaten Balangan saat ini.

Kabupaten Balangan merupakan wilayah yang strategis dalam sektor ekonomi karena berada di perlintasan antar Kabupaten dan antar Provinsi. Hal ini memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam area sekelilingnya. Sebagai kota yang mempunyai peran besar dalam menopang perekonomian tingkat regional, ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pergerakan

penduduk merupakan hal yang penting untuk memperlancar kegiatan ekonomi di Wilayah Kabupaten Balangan.

Adapun perkembangan capaian indikator urusan perhubungan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70
Capaian Indikator Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah uji kir angkutan umum	672	704	1.040	1.210	1.423	2.886
2	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	0.37	0,127	0,120	0,118	0,29
3	PemasanganRambu-rambu	19.56%	35.53%	42.03%	42.84%	42.84%	42.84%
4	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	199.680	164.383	137.748	130.872	29.669	21.470

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan, 2021

Hal-hal lain yg menyangkut urusan perhubungan bisa dilihat dari analisa sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2021 jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya beberapa unit pengujian kendaraan bermotor di kabupaten tetangga yang ditutup, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tidak dapat melaksanakan pelayanan pengujian karena tidak terakreditasi dan Unit Pengujian Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami banjir sehingga harus melakukan numpang uji di Kabupaten Balangan.
- b) Layanan angkutan pelajar pada tahun 2021 dapat dilaksanakan dimana angkutan pelajar gratis yang melayani desa yang menjadi lintasan trayek sebanyak 21 desa sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 21 Desa adalah desa dengan trayek angkutan Paringin – Juai – Halong.
- c) Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Jumlah sebesar 98,94% merupakan total jumlah kepemilikan KIR angkutan pribadi (plat hitam), dan angkutan umum (plat kuning).
- d) Pada tahun 2021 tidak ada pemasangan fasilitas keselamatan jalan dikarenakan Terdapat 2 (dua) pekerjaan fisik yang tidak dapat terealisasi disebabkan terbatasnya waktu pengadaan barang, pekerjaan fisik tersebut



- yaitu : Pengadaan dan pemasangan lampu peringatan (*Warning Light*) sebanyak 12 buah dan Pengadaan dan Pemasangan PJU Tenaga Surya sebanyak 12 buah sehingga capaiannya masih sama dengan tahun 2020.
- e) Akan tetapi untuk tetap memberikan pelayanan guna keselamatan lalu lintas, pada APBD Perubahan Dinas Perhubungan melaksanakan Pembelian Lampu *Warning Light Ultra Bright* 30cm sebanyak 32 buah dan Pembelian Lampu PJU LED sebanyak 36 buah dalam rangka upgrade lampu warning dan PJU. Untuk Lampu PJU menggunakan teknologi Lampu Hemat Energi (LHE) dengan jenis lampu LED dan system penyalan autodimmer yaitu jam 18.00 s/d jam 22.00 lampu menyala 100%, jam 22.00 s/d jam 03.00 lampu menyala 60% dan jam 03.00 s/d jam 6 lampu menyala 100%. Upgrade Lampu PJU dilakukan pada PJU di Jalan A.Yani dari Simpang 3 Haur Batu s/d Simpang 3 Ban Ganal Paringin. Untuk Upgrade Lampu Warning Light dilaksanakan pada lokasi : Simpang 3 Mantimin Batumandi, Simpang 4 Muara Pitap, Simpang 4 Bundaran Paringin, Simpang 3 Haur Batu, Simpang 3 Pintu Gerbang Rumah Dinas Garuda Maharam, Simpang 4 Gunung Pandau, Simpang 3 Binjai Punggal Halong, dan Simpang 3 Koramil Halong.
- f) Pada tahun 2021 jumlah orang/barang yang melalui terminal menurun, hal ini disebabkan karena masih adanya pandemi wabah Covid-19 dimana Pemerintah memberlakukan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Akibatnya banyak orang yang diharuskan bekerja dari rumah/*Work From Home* (WFH), belajar dari rumah dengan metode daring, dan banyak yang memilih menghindari bepergian.

J. **Urusan Komunikasi dan Informatika**

Tabel 2.71
Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Kecamatan	61.54 %	69.34 %	68.94 %	75.83%	53,26 %	45,58%
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	75%	80%	85%	90%	60,70 %	92,36%
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	12%	28.89%	31.779%	83,35%	99,36%



No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	20.16%	16.03%	68.94%	75.834%	13,24%	15,74%
5	Jumlah Rumah tangga menggunakan TV	-	-	-	-	61,29%	93,91%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan, 2021

Persentase penduduk yang menggunakan Hp di kabupaten Balangan mengalami penurunan pada tahun 2020, yaitu 53,26% menjadi 45,58% ini disebabkan kenaikan angka kelahiran pada tahun 2021 sehingga banyak anak-anak usia Balita yang belum menggunakan HP. Sedangkan cakupan layanan telekomunikasi naik menjadi 92,36% dikarenakan adanya pembangunan jaringan menara komunikasi sebagai solusi daerah/desa yang tidak terlayani telekomunikasinya atau disebut desa *Blankspot*. Begitu juga proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet meningkat menjadi 99,36% disebabkan kebutuhan akan akses internet untuk menunjang Pembelajaran *Daring* karena kondisi Covid 19 . Sedangkan proporsi rumah tangga yang memiliki computer pribadi juga naik menjadi 15,74% juga adalah imbas dari system pembelajaran *Daring*. Untuk jumlah rumah tangga menggunakan TV meningkat menjadi 93,91% disebabkan TV menjadi salah satu kebutuhan hiburan dalam kondisi Pandemi seperti sekarang ini. Perubahan data yang tersebut didapatkan melalui sensus yang dilaksanakan oleh Bidang Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 berdasarkan rekomendasi dari BPS Kabupaten Balangan.

K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Saat ini koperasi masih menjadi sebuah lembaga keuangan masyarakat yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat terutama bagi anggotanya. Bagi pelaku koperasi, keberadaan koperasi sangat dirasakan manfaatnya dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga para anggota koperasi itu sendiri. Meskipun demikian, perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Balangan berada dalam zona yang kurang menggembirakan. Tidak terdapat peningkatan yang signifikan atas keberadaan maupun keaktifan koperasi di Kabupaten Balangan. Jumlah koperasi aktif di lima tahun terakhir masih berada di antara 67 sd 69 unit dengan persentasi koperasi aktif 62,73%. Hal tersebut dikarenakan kurangnya motivasi masyarakat untuk mendirikan koperasi baru. Adanya asumsi di masyarakat yang menyatakan bahwa proses pendirian koperasi

dinilai cukup rumit, serta keberadaan koperasi yang dianggap belum mampu menawarkan nilai lebih secara ekonomi kepada masyarakat. Disamping itu, pemahaman masyarakat untuk berkoperasi juga masih harus ditingkatkan sehingga dapat mengurangi hambatan untuk berkembangnya sebuah Koperasi.

Disektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), di Kabupaten Balangan pada tahun 2021 terdapat 8.209 pelaku usaha yang semuanya adalah pelaku Usaha Mikro. Hal ini didasarkan pada hasil pendataan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan dimana kategori Usaha Mikro adalah memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sedangkan hambatan yang umumnya dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro adalah akses permodalan yang terbatas serta jangkauan pemasaran yang belum maksimal.

Pada tahun 2021, jumlah Usaha Mikro di Balangan adalah 8.209 pelaku usaha. Dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah UMKM adalah 11.217 pelaku. Dengan demikian ada terdapat penurunan jumlah pelaku usaha sebanyak 3.008 pelaku atau 26,82%. Ini disebabkan karena adanya pemutakhiran data Usaha dengan metode pendaftaran mandiri yang mengharuskan pelaku Usaha untuk pro aktif mendaftarkan usahanya melalui Aparatur Desa. Metode pemutakhiran dan pendataan ini cukup berhasil untuk menghilangkan adanya pelaku usaha dadakan yang didaftarkan sehubungan dengan adanya program bantuan pemerintah untuk UMKM.

Perkembangan koperasi dan usaha mikro kecil di Kabupaten Balangan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.72
Capaian Indikator Koperasi dan UKM
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
11.1	Jumlah koperasi aktif (unit)	67	67	69	69	69
11.2	Jumlah koperasi (unit)	108	108	110	110	110
11.3	Persentase Koperasi aktif	62,03%	62,03%	62,73%	62,73%	62,73%
11.4	Jumlah Usaha Mikro (unit)	4.058	4.248	4.838	11.217	8.209
11.5	Jumlah UMKM (unit)	4.058	4.581	5.124	11.335	8.209
11.6	Persentase usaha mikro dan kecil	100%	92,73%	94,41%	98,95%	100%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Balangan, 2022

L. Urusan Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal dan investasi memperlihatkan peran yang penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2021 melalui dapat dilihat dari jumlah investor berskala nasional (PMDN) pada tahun 2021 sebanyak 37 pelaku usaha (sumber NSWI per Januari 2021) dengan nilai rencana investasi sebesar Rp. 21,722,200,000. Tahun 2021 ini mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020, tahun 2020 jumlah investor berskala nasional (PMDN) sebanyak 89. Penurunan ini disebabkan karena adanya Pandemi covid 19 menyebabkan banyak usaha yang tidak bisa berperforma secara maksimal, sehingga penambahan investasi juga tidak maksimal, banyak para pelaku usaha masih enggan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Hal ini dikarenakan para pelaku usaha tidak ingin diketahui besaran investasi usahanya dan khawatir jika dihubungkan dengan besaran pajak yang akan dikenakan kepada mereka, belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kewajiban penyampaian LKPM dan sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang lalai menyampaikan kewajibannya, PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan



pemberdayaan koperasi dan UMKM mengklasifikasi kriteria UMKM; a) permodalan USAHA MIKRO paling banyak 1 milyar rupiah dengan hasil penjualan paling banyak 2 milyar, b) permodalan USAHA KECIL antara 1 sampai 5 milyar rupiah dengan hasil penjualan 2 sampai 15 milyar, dan c) permodalan USAHA MENENGAH antara 5 sampai 10 milyar rupiah dengan hasil penjualan 15 sampai 50 milyar. LKPM tidak wajib dilaporkan oleh USAHA MIKRO, sehingga banyak USAHA MIKRO di Kabupaten Balangan yang tidak menyumbang besaran realisasi penanaman modal, beberapa akun pelaku usaha pada sistem perizinan berusaha belum migrasi ke OSS RBA. Sebagian pelaku usaha lupa password dan username akun OSSnya sehingga hal ini menghambat penyampaian LKPM, beberapa akun pelaku usaha pada sistem perizinan berusaha belum migrasi ke OSS RBA. Sebagian pelaku usaha lupa password dan username akun OSSnya sehingga hal ini menghambat penyampaian LKPM, pada saat kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaku usaha, beberapa kendala yang ditemui antara lain; a) tidak adanya alamat kantor yang jelas, b) kesulitan dalam menemui pimpinan perusahaan/pemilik usaha.

Tabel 2.73
Capaian Indikator Penanaman Modal
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	5	9	111	89	37
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	23,593,444,000	27,397,000,000	93,125,000,000	1,651,394,241,459	21,722,200,000
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	1.16 : 1	42.22 : 1	17.07 : 1	35.66 : 1	37,01 : 1
12.4	Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	9.396.100.000	42,882,712,314	27,988,279,555	216,466,328,218	115,122,788,614
12.5	Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (persentase)	-	356.39%	-34.73%	673.41%	- 46,82%

Sumber: DPMPTS Kabupaten Balangan, 2022

Tabel 2.74
Jumlah Investor PMDN/PMA
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2017	Ijin Prinsip	6	6	12
2018	Ijin Prinsip	4	5	9
2019	NIB	186	0	186
2020	NIB	89	0	89
2021	NIB	37	5	42

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Balangan, 2022

Tabel 2.75
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2017	5	23,593,444,000	5	9,396,100,000
2018	9	27,397,000,000	7	42,882,712,314
2019	41	57,580,000,000	24	27,988,279,555
2020	67	120,378,000,000	29	216,466,328,218
2021	630	226,317,465,000	79	115,122,788,614

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Balangan, 2022

Untuk rasio tenaga kerja, pada tahun 2021 sebesar 37,01 : 1 artinya setiap 1 perusahaan menyerap tenaga kerja sebanyak 37 orang. Tahun 2021 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020, pada tahun 2020 rasio tenaga kerja hanya sebesar 35,66 : 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Meningkatnya kesempatan bagi para pencari kerja, ini dapat dilihat dari jumlah lowongan kerja yang tersedia baik melalui kegiatan Bursa Kerja Online ataupun lowongan yang dilaporkan perusahaan pemberi kerja serta lowongan CPNS/ Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Balangan Tahun 2021 dan meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keterampilan sehingga mampu untuk bersaing di dunia kerja ataupun berusaha mandiri dengan keterampilan yang telah dimiliki. Nilai realisasi investasi PMDN pada tahun 2021 sebesar Rp. 115,122,788,614,-, jika dibandingkan dengan tahun 2020 Rp. 216.466.328.218,- sehingga tahun 2021 ini mengalami penurunan sebesar 46,82%. Dari data pada tabel tersebut di atas, nilai realisasi sangat dinamis dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2018, terjadi peningkatan nilai investasi sebesar 356,39% dibandingkan



pada tahun sebelumnya. hal sebaliknya terjadi pada tahun 2019 dimana terjadi penurunan sebesar 34,73% dari tahun 2018. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan realisasi investasi yang sangat signifikan, yaitu 216,466,00 milyar atau terdapat kenaikan sebanyak 673,41% dari tahun 2019. Peningkatan ini terjadi karena beberapa perusahaan yang pada tahun 2019 masih pada tahap kontruksi dan di tahun 2020 sudah memasuki tahap produksi sehingga memerlukan lebih banyak tenaga kerja. Selain itu, beberapa perusahaan tambang batubara mengadakan pembelian lahan untuk kegiatan produksi baru sehingga sangat berpengaruh pada peningkatan nilai investasi di Kabupaten Balangan. Pada Tahun 2021, kedua faktor ini tidak ada sehingga nilai realisasi investasi turun menjadi Rp. 115,122,788,614 dengan menyerap sebanyak 269 tenaga kerja.

M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.76
Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun					
		016 2	017 2	018 2	019 2	020 2	021 2
13. Kepemudaan dan Olah Raga							
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100%	99,15%	99,15%	99,15%	96,62%	75%
13.2	Persentase wirausaha muda	100%	100%	50%	70%	96,80%	70%
13.3	Cakupan pembinaan olahraga				8	7	60%
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi				7	8	12
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda			65	45	63	76%
13.6	Jumlah atlet berprestasi	2	2	69	91	19	17
13.7	Jumlah prestasi olahraga	8	12	3	10	10	13

Sumber : Dispora Kabupaten Balangan, 2022

Tabel 2.77
Capaian Indikator Kinerja Utama
Bidang Pariwisata dan Olahraga Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA

1	Persentase daya saing kepemudaan (Ormas, Olahraga, dan Wirausaha)	24%	17%	70,83%

Indikator persentase daya saing kepemudaan merupakan gabungan indikator dari dua bidang yang ada yaitu Bidang Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Bidang Peningkatan Daya Saing Keolahragaan. Kinerja persentase daya saing kepemudaan (Ormas, Olahraga, dan Wirausaha) sebesar 17% dari target 24% dengan capaian kinerja 70,83% dengan kategori kinerja sedang. Capaian kinerja tersebut didapat dari perhitungan kinerja persentase wirausaha muda dengan realisasi kinerja 7 % dari target 10% dengan capaian kerja 70% dan persentase pemuda dalam organisasi kepemudaan dengan realisasi kinerja 15 % dari target 20 % dengan capaian kinerja 75 %, persentasi olah raga yang diraih dengan realisasi 28 % dari target 30 % dengan capaian kinerja 95%.

Masih sedangnya kategori capaian kinerja persentase daya saing kepemudaan karena organisasi kepemudaan sebagai wadah untuk berkumpul dalam menyalurkan hobby, pendapat dan aspirasi mereka serta kepekaan mereka terhadap masyarakat masih belum maksimal menjadikan daya tarik bagi generasi muda sekarang yang masih cenderung bermain dengan aplikasi permainan pada smarphone mereka. Hal sama juga terlihat pada daya tarik wirausaha bagi generasi masih belum optimal hal ini karena masih kurangnya modal dan peluang pasar yang merupakan alasan mereka dalam terjun ke dunia wirausaha, walaupun dalam setiap tahunnya selalu disertakan dalam pelatihan.

Terkait hal tersebut maka perlu adanya terobosan untuk lebih menarik generasi muda dalam mengikutserakan mereka pada organisasi yang tentunya sangat berguna bagi mereka serta perlu adanya tambahan modal bagi mereka dan adanya upaya untuk membuka peluang pasar sehingga dapat sejajar dengan daerah lain.

Masih belum optimalnya capaian kinerja persentase organisasi pemuda aktif di Kabupaten Balangan karena organisasi kepemudaan sebagai wadah untuk berkumpul dalam menyalurkan hobby, pendapat dan aspirasi mereka serta kepekaan mereka terhadap masyarakat masih belum maksimal menjadikan daya tarik bagi generasi muda sekarang yang masih cenderung bermain dengan aplikasi permainan pada smarphone mereka. Daftar organisasi pemuda aktif di Kabupaten Balangan tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.78
Daftar organisasi pemuda aktif di Kabupaten Balangan tahun 2021

NO	NAMA ORGANISASI	ALAMAT	URAIAN	KETERANGAN
1	KNPI Kabupaten	Balangan	Aktif	SK
2	KNPI Kec. Paringin	Kec. Paringin	Aktif	SK
3	KNPI Kec. Paringin Selatan	Kec. Paringin Selatan	Aktif	SK
4	KNPI Kec. Juai	Kec. Juai	Aktif	SK
5	KNPI Kec. Halong	Kec. Halong	Aktif	SK
6	KNPI Kec. Lampihong	Kec. Lampihong	Aktif	SK
7	KNPI Kec. Batumandi	Kec. Batumandi	Aktif	SK
8	KNPI Kec. Awayan	Kec. Awayan	Aktif	SK
9	KNPI Kec. Tebing Tinggi	Kec. Tebing Tinggi	Aktif	SK
10	PPMI	Balangan	Aktif	SK
11	PMII	Balangan	Aktif	SK
12	GP Anshor PPNU	Balangan	Aktif	SK
13	GP Anshor IPNU	Balangan	Aktif	SK
14	GP Anshor BANSER	Balangan	Aktif	SK
15	PEMUDA MUHADAMADIYAH (IPMU)	Balangan	Aktif	SK
16	Satpa Muda Pancasila	Balangan	Non Aktif	SK
17	Srikandi PP	Balangan	Non Aktif	SK
18	PPM	Balangan	Non Aktif	SK
19	Taruna Indonesia Raya	Balangan	Non Aktif	SK
20	AMPG	Balangan	Aktif	SK
21	AMPI	Balangan	Aktif	SK
22	GMPI	Balangan	Non Aktif	SK
23	GPK	Balangan	Non Aktif	SK
24	AMK	Balangan	Non Aktif	SK
25	Nasyiatul Aisiayah	Balangan	Non Aktif	SK
26	IPP Al Wasiah	Balangan	Non Aktif	SK
27	BKPPMRI Balangan	Balangan	Aktif	SK
28	BKPPMRI Paringin Kota	Paringin Kota	Aktif	SK
29	BKPPMRI Paringin Selatan	Paringin Selatan	Aktif	SK
30	BKPPMRI Juai	Juai	Aktif	SK
31	BKPPMRI Halong	Halong	Aktif	SK
32	BKPPMRI Lampihong	Lampihong	Aktif	SK
33	BKPPMRI Batumandi	Batumandi	Aktif	SK
34	BKPPMRI Awayan	Awayan	Aktif	SK
35	BKPPMRI Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	Aktif	SK
36	PPI	Balangan	Aktif	SK

Hal sama juga terlihat pada persentase wirausaha muda di Kabupaten Balangan yang belum optimal. Walaupun dalam setiap tahunnya selalu disertakan dalam pelatihan namun masih kurangnya modal dan peluang pasar yang merupakan alasan mereka tidak terjun ke dunia wirausaha.



Pembinaan olahraga dan pembinaan atlet muda di Kabupaten Balangan didasarkan untuk lebih mempersiapkan bibit-bibit atlet yang berprestasi agar nantinya melahirkan atlet yang berpeluang untuk mendapatkan medali di berbagai kejuaraan baik daerah maupu nasional. Selain itu untuk kejuaraan provinsi (Kejurprov) dan Porprov pada beberapa cabang olah raga dilaksanakan dengan persyaratan pada pembatasan umur, sehingga pembinan atlet muda perlu dilaksanakan. Apalagi setiap tahun adanya Pekan Olah Raga Pelajar, maka atlet muda yang siap tanding mutlak diperlukan. Belum optimalnya pembinaan olahraga dan pembinaan atlet muda di Kabupaten Balangan tahun 2021 karena masih terdapat berberapa kendala terutama masa pandemi covid-19 sehingga pada beberapa atlet muda tidak bisa mengikuti latihan dengan maksimal sehingga berdampak terhadap kebugaran dan kesiapan fisik mereka.

Untuk lebih meningkatkan prestasi dan pembinaan atlet yang sesuai dengan prosedur latihan olahraga, maka ada beberapa pelatih yang dikirim dalam bimbingan teknis pelatih yang kemudia pelatih tersebut mendapatkan sertifikat sebagai lisensinya sebagai pelatih olah raga. Berikut tabel pelatih yang sudah mendapatkan lisensi pada cabang olah raga.

Tabel 2.79

Pelatih Yang Bersertifikat

No	Nama Pelatih	Cabang Olah Raga
1	Nur Asiah	Pencak Silat
2	Ahmad Rifki	Karate
3	Rizky Ariandi	Pelatih fisik
4	Ahmad Juliansyah	Pencak Silat
5	Hidayat S,Sos	Sepak Bola
6	Ahmad Mujahit	Dayung
7	Sambrun	Dayung
8	Saililah, S.Pd	Sepak Bola
9	Hamdani	Basket
10	Syahrudi Rahman	Tenis lapanga
11	Adi Saputra	Bola Voli
12	M. Edwar Firdaus	Bola Voli

Di Kabupaten Balangan jumlah atlet yang berprestasi pada beberapa kejuaraan baik daerah maupun nasional sebanyak 17 atlet dengan 17 cabang olahraga. Cabang olah raga yang berprestasi dan jumlah atlet yang berprestasi pada beberapa kejuaraan baik daerah maupun nasional tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.80
Cabang dan Jumlah Atlet Yang Berpretasi

No	NAMA KEJUARAAN	CABANG OLAH RAGA	MEDALI	JUMLAH MEDALI	KETERANGAN
1	PON PAPUA	Gulat	Emas	1	1 Atlet
2	PON PAPUA	Dayung	Perunggu	1	2 Atlet
3	PEPARNAS XVI PAPUA	Renang	Emas	1	1 atlet
4	PEPARNAS XVI PAPUA	Bulu Tangkis	Emas	1	2 Atlet
5	PEPARNAS XVI PAPUA	Sepak Bola	Perak	1	11 Atlet
6	PEPARNAS XVI PAPUA	Menembak	Perak	1	1 atlet
7	PEPARNAS XVI PAPUA	Menembak	Perunggu	1	1 atlet
8	POPDA	Atletik	Emas	1	1 atlet
9	POPDA	Atletik	Perak	2	1 atlet
10	POPDA	Panahan	Emas	2	2 Atlet
11	POPDA	Panahan	Perak	1	1 Atlet
12	POPDA	Panahan	Perunggu	2	2 Atlet
13	POPDA	Voli Pasir	Perunggu	1	2 Atlet
14	POPDA	Taekwondo	Perunggu	2	2 Atlet
15	POPDA	Karate	Perunggu	1	1 Atlet
16	POPDA	Tinju	Perunggu	3	3 Atlet
17	POPDA	Judo	Perunggu	2	2 Atlet

N. **Urusan Statistik**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data dan informasi juga dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan antara lain untuk pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang statistik, bahwa statistik terbagi menjadi statistik dasar, sektoral, dan khusus, pada lingkup pemerintahan hanya mencakup statistik dasar dan sektoral. Statistik dasar merupakan statistik yang merupakan ranah Badan Pusat Statistik. Hasil dari

statistik dasar ini merupakan data yang sangat penting bagi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, sehingga untuk mendapatkan beberapa data, pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan BPS. Produk statistic yang merupakan hasil kerjasama dengan BPS adalah IPM, IPG, Indeks NTP, Indeks Gini, Inflasi, dan ICOR. Sedangkan statistik sektoral juga telah dilakukan oleh beberapa instansi di Pemerintah Daerah dalam rangka memperoleh data baik untuk keperluan perencanaan pembangunan maupun untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik sektoral ini antara lain termuat dalam buku Indeks Williamson, buku penduduk pertengahan tahun, dan buku sistem informasi pembangunan daerah.

Diakui bahwa tuntutan data dan informasi yang dibutuhkan apat dipenuhi seluruhnya, namun secara bertahap tata kelola dan pemenuhan kebutuhan data lebih baik harus diupayakan. Oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, sebagai upaya dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan data dan informasi yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2.81

Capaian Indikator Urisan Statistik Tahun 2020 dan 2021

No.	Bidang urusan/indicator	2020	2021
14	Statistik		
14.1	Tersedianya system data dan statistic yang terintegrasi	Ada	Ada
14.2	Buku “Balangan Dalam Angka”	Ada	Ada
14.3	Buku PDRB	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan, 2021

O. Urusan Persandian

Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan



persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten.

Pengamanan informasi terutama pada era digital perlu mendapat perhatian lebih. Era keterbukaan serta saling terkoneksi system jaringan di Kabupaten Balangan, karena itu menjadi rentan terhadap potensi serangan siber ini dan perlu meningkatkan upaya pengamanan melalui pengelolaan dan pengembangan persandian daerah.

Government – Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Indonesia, disingkat Gov-CSIRT Indonesia merupakan CSIRT sektor Pemerintah Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dalam Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 570 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018.

Tabel 2.82
Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan, 2021

P. **Urusan Kebudayaan**

Tabel 2.83
Capaian Bidang Kebudayaan

NO	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya		52%	51,61%	99,25%

Di Kabupaten Balangan untuk pengembangan seni dan budaya tahun 2021 walaupun dibawah target namun sudah hampr mencapai target yang diinginkan dengan capaian 99,25% dan kategori kinerja sangat tinggi. Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain dengan melaksanakan even seni dan budaya yang bersifat langsung/tatap muka yaitu workshop mamanda, workshop tari tradisional, bengkel seni rupa, jelajah cagar budaya bagi siswa siswi SMP, penambahan juru pelihara cagar budaya niandan



pada tahun ini juga dilaksanakannya Event Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan yaitu Aruh Sastra Ke 18 yang dilaksanakan di Gedung Budaya Garuda Maharam, serta even seni dan budaya lainnya.

Tabel 2.84
Capaian Indikator Kebudayaan Kabupaten Balangan
Tahun 2017-2021

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
16.	Kebudayaan					
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	17	8	17	1	22
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	7	8	8	10	11
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	-	-	-	34
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	4	5	5	8	9

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, 2021

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Setiap daerah harus memiliki unggulan pengembangan seni dan budaya lokal termasuk juga di Kabupaten Balangan. Seni dan budaya di Kabupaten Balangan antara lain tari tradisional, tari pesisir, tari topeng, musik tradisional Dayak, teater, cabaret, memanda, kuda gepang, kuda lumping, karawitan, wayang orang, wayang kulit, wayang gong, kuntau, music panting, sinoman hadrah, pahat patung, seni Lukis, puisi, basyair, seni kriya, habsy, sisingaan, madihin dan musikalisasi puisi. Dari berbagai seni dan budaya yang ada di Kabupaten Balangan tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan festival seni dan budaya sebanyak 22 penyelenggaraan antara lain workshop mamanda, workshop tari tradisional, bengkel seni rupa, jelajah cagar budaya bagi siswa siswi SMP dan pada tahun ini juga dilaksanakannya Event Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan yaitu Aruh Sastra Ke 18 yang dilaksanakan di Gedung Budaya Garuda Maharam dan lainnya.

22 penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Balangan melalui 50 lembaga kesenian yang ada diseluruh kecamatan di Kabupaten Balangan diharapkan dapat menambah kecintaan masyarakat terhadap seni budaya daerah, sehingga dapat bisa terus mengembangkan seni dan budaya, khususnya budaya

lokal dan memadukan potensi yang dimiliki agar memiliki ciri khas dan akhirnya dapat mengangkat perekonomian masyarakat.

2. Benda Situs Dan Kawasan Budaya Yang Dilestarikan

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya didarat/atau diair yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Pelaestarian cagar budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat, meningkatkan harakat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan bangsa dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Suatu benda dapat dikatakan cagar budaya jika sudah melalui proses penetapan. Tanpa proses penetapan suatu warisan budaya yang memiliki nilai penting tidak dapat dikatakan sebagai cagar budaya. Penetapan berdasarkan UU RI tahun 2010 adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya. Tim ahli cagar budaya berdasarkan UU RI no 11 tahun 2010 adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.

Tabel 2.85
Cagar Budaya Atau Diduga Cagar Budaya
Di Kabupaten Balangan



NO	NAMA	ALAMAT	KECAMATAN
1	MAKAM RAKSASINA SINGA JAYA	PARINGIN KOTA	PARINGIN
2	KAWASAN SUMUR MINYAK	PARINGIN TIMUR	PARINGIN
3	MESJID HUJAN MAS	DESA HUJAN MAS	PARINGIN
4	RUMAH ADAT BANJAR BUBUNGAN TINGGI	DESA TARANGAN	PARSEL
5	RUMAH BATU	DESA MUARA NINIAN	JUAI
6	MAKAM DATU KANDANG HAJI	DESA TELUK BAYUR	JUAI
7	BENTENG TUNDAKAN	DESA TUNDAKAN	AWAYAN
8	MAKAM TEMENGGUNG JALIL	DESA TUNDAKAN	AWAYAN
9	MERIAM LILA	DESA TUNDAKAN	AWAYAN
10	RUMAH KUNA PERDAGANGAN KARET MASA BELANDA	DESA SIMPANG TIGA	LAMPIHONG
11	JEMBATAN BESI BELANDA	DESA HILIR MESJID	LAMPIHONG
12	MAKAM DATU MARTIKA	DESA TAMPANG	LAMPIHONG
13	MAKAM KH. ABDUL GHANI	DESA JIMAMUN	LAMPIHONG
14	RUMAH ADAT BANJAR	DESA RIWA	BATUMANDI
15	RUMAH ADAT BANJAR (PANDAM)	DESA TELUK MESJID	BATUMANDI
16	GOA DEBU	DESA SUNGSUM	TEBING TINGGI
15	GOA SIDABONG	DESA KAPUL	HALONG

Dari 15 situs cagar budaya atau yang diduga cagar budaya yang ada di Kabupaten Balangan hingga 2021 ada 11 situs cagar budaya yang sudah dilestarikan, sebanyak 9 cagar budaya yang dikelola oleh Kabupaten Balangan yaitu makam raksasina singa jaya di Desa Teluk Keramat, rumah batu di Desa Muara Ninian, makam datu kendang haji di Desa Teluk Bayur, benteng tundakan di Desa Tundakan, makam Temenggung Jalil di Desa Tundakan, rumah kuna perdagangan karet masa belanda di Desa Simpang Tiga, makam Datu Martika di Desa Tampang, rumah adat banjar di Desa Riwa dan goa debu di Desa Sungsum yang di jaga oleh 9 juru pelihara. Selain 9 cagar budaya yang dikelola kabupaten ada 2 cagar budaya yang dikelola oleh Propinsi Kalimantan selatan yaitu masjid syuhada di Desa Hujan Mas dan bubungan tinggi di Desa Tarangan yang dijaga oleh 2 juru pelihara.

Terkait hal tersebut diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun ketahun dapat meningkatkan jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Balangan sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang dan dapat menambah pendapatan Kabupaten Balangan melalui kegiatan wisata, serta dapat dapat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Balangan.

3. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Persoalan kebudayaan adalah persoalan melestarikan dan melakukan revitalisasi budaya daerah untuk kemudian mengembangkan seiring dengan perkembangan zaman sehingga dapat bersaing dengan perkembangan kebudayaan

global. Oleh karena itu kita perlu mendokumentasikan agar tidak kehilangan jejak dan tidak diambil pihak lain (luar). Selain diinventarisasi karya budaya juga perlu direvitalisasi.

Terkait hal tersebut untuk jumlah karya budaya yang diinventarisasi di Kabupaten Balangan antara lain cagar budaya atau yang diduga cagar budaya sebanyak 15 jenis yang dikelola oleh juru pelihara kabupaten dan propinsi. Sedangkan adat tradisi masyarakat Balangan yang terinventarisasi sebanyak 19 jenis antara lain aruh adat nimbak, ma'iwu, aruh adat bawanang, itatamba banua, minyaulahan, nimbuk/membatur, ngatet nahi, buanang, aruh adat baharin, jajampian, momen/kematian, manugal, bepalas/baancak, menyalamat, menatu wini, aruh adat bawanang, bahayaga, balimit, baburdah, bamaulid, bayasinan, menyalamat, mearuah, mehaul, bemandi-mandi, beusung penganting, bejalan liuk, begunung api, basunat binian, mengayu, bamumula, bearak pengantin kepala andaro, bepantul, ondel-ondel Balangan, manugal dan mengatam.

Dari 34 karya budaya yang diinventarisasi di Kabupaten Balangan hingga tahun 2021 tidak ada yang yang direvitalisasi, padahal dari banyaknya karya budaya yang ada di Kabupaten Balangan perlu kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian nilai budaya masyarakat.

Selain karya budaya yang diinventarisasi juga ada banyak lembaga atau balai adat di Kabupaten Balangan yang sudah diinventarisasi, yaitu sebanyak 50 lembaga adat. 30 lembaga adat di Kecamatan Halong yaitu di Desa Mamigang, Kapul, Uren, Marajai dan Desa Binuang Santang dan 20 lembaga adat di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu Desa Mayanau, Langkap, Dayak Pitap, Kambiayin dan Desa Ajung.

4. Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu

Cagar budaya yang ada di kabupaten Balangan perlu dikelola secara terpadu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Cagar budaya yang dikelola secara terpadu di kabupaten balangan sebanyak 11 cagar budaya yang dikelola oleh juru pelihara kabupaten sebanyak 9 orang dan juru pelihara propinsi sebanyak 2 orang. Terkelolanya cagar budaya secara terpadu maka diharapkan dapat melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat,



meningkatkan harakat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan bangsa dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Q. **Urusan Perpustakaan**

Tabel 2.86
Capaian Indikator Perpustakaan
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
17. Perpustakaan						
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	44.890	45.911	48.505	16.751	23,47%
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	26.067 Eks	29.429 Eks	30.617 Eks	38.328 Eks	36,84%
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	10.000	10.000	10.000	10.000	1,13 per 1.000 penduduk
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	3.740,40	3.825,90	4.042,10	1.396,00	11.733
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	9.416 Judul	10.433 Judul	10.476 Judul	23.109 Judul	11.691 judul
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	4	3	3	2	0

Sumber : Dinas Perpustakaan Kabupaten Balangan, 2021

Prioritas pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menitikberatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai ke arah tersebut memerlukan pembangunan manusia yang berkarakter lewat penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreatifitas. Kemampuan literasi bukan sebatas bisa baca-tulis. Literasi adalah kecakapan. Setidaknya, ada empat tingkatan literasi yang dijadikan parameter kemajuan. Pertama, kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan ataupun informasi yang bermutu. Kedua, kemampuan memaknai yang tersirat dan tersurat. Ketiga, kemampuan menghasilkan ide-ide, gagasan, inovasi, ataupun kreativitas baru.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan menekankan pentingnya pemberdayaan perpustakaan dalam rangka mencerdaskan masyarakat. Terkait hal tersebut maka Pemerintah daerah melalui Dinas

Pepustakaan dan Kearsipan terus mengoptimalkan perpustakaan untuk mencerdaskan masyarakat Kabupaten Balangan antara lain menoptimalkan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, menyediakan berbagai koleksi judul buku, dan lainnya.

Berdasarkan tabel diatas yang dimaksud dengan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun adalah jumlah kunjungan perpustakaan selama 1 tahun di bagi jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani. Terkait hal tersebut untuk jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2021 di kabupaten Balangan hanya sebesar 23,47% yang didapatkan dari jumlah kunjungan perpustakaan selama 1 tahun sebanyak 11.733 orang dibagi dengan populasi masyarakat Kabupaten Balangan tahun 2021 yang harus dilayani sebanyak 50.000 orang.

Rendah dan terjadinya penurunan jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 16.751 orang dipengaruhi oleh pandemi covid-19 sehingga ada pembatasan aktifitas ditempat umum termasuk kunjungan ke perpustakaan, baik perpustakaan daerah, perpustakaan di kecamatan dan perpustakaan di desa. Selain itu karena tidak sepenuhnya mobil perpustakaan keliling beroperasi untuk melayani kesekolah-sekolah yang ada di 8 kecamatan karena pada masa pandemic covid-19 anak sekolah belajar secara daring. Selain dipengaruhi pandemi covid-19 tentu juga dipengaruhi oleh lokasi perpustakaan daerah yang tidak strategis karena jauh dari pusat kota, padahal berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) perpustakaan untuk propinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan menyatakan bahwa lokasi perpustakaan berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Yang tidak kalah penting karena sedikitnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan padahal koleksi buku yang beragam dan sesuai perkembangan jaman terutama kaum milenial sangatlah penting untuk memicu sehingga datang berkunjung ke perpustakaan baik perpustakaan daerah maupun perpustakaan desa yang tentunya akan berdampak terhadap Indeks Literasi Kabupaten Balangan.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan di Kabupaten Balangan masih sedikit yaitu hanya sebanyak 36,84%, yang didapatkan dari perhitungan jumlah koleksi judul buku perpustakaan sebanyak 11.691 judul dibagi dengan jumlah koleksi buku 31.731 buah buku. Masih sedikitnya koleksi buku yang ada di perpustakaan daerah dan perpustakaan desa serta tidak signifikannya penambahan koleksi buku tentu sangat mempengaruhi rendahnya pengunjung perpustakaan tahun 2021 yang hanya 11.733 kunjungan atau 23,47% dari jumlah

orang dalam populasi yang dilayani di Kabupaten Balangan, padahal berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Perpustakaan dan Kepustakaan, Perpustakaan Nasional Tahun 2021 menyatakan bahwa penambahan koleksi buku sekurang-kurangnya 2% dari jumlah judul per tahun atau minimal 100 judul per tahun dan berdasarkan UNESCO bahwa setiap tahun orang membaca minimal 3 buku baru.

Pada dasarnya perpustakaan itu memiliki peran dan posisi yang strategis di dalam kehidupan seluruh masyarakat, baik didesa maupun kota-kota kecil dan besar, namun dalam prakteknya belum semua orang menyadari pentingnya perpustakaan karena mereka masih menganggap hanyalah sebuah tumpukan buku. Sedikitnya penambahan koleksi buku tahun 2021 di perpustakaan daerah karena keterbatasan anggaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga penambahan koleksi buku hanya dari sumbangan individu dan dari bantuan hibah. Selain itu juga anggaran dana desa tidak digunakan untuk penambahan buku di perpustakaan desa padahal minimal buku yang ada di perpustakaan desa berjumlah 1.000 judul buku.

Selain hal yang disebutkan diatas tidak adanya pustakawan, tenaga teknis, dan penilaian yang memiliki sertifikat di perpustakaan daerah tentu sangat mempengaruhi pengelolaan pelayanan perpustakaan secara optimal sesuai standar karena perpustakaan yang menerapkan prinsip manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penataan staf, pengarahan, pengawasan, pelaporan dan penganggaran. Terkait hal tersebut berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Perpustakaan dan Kepustakaan, Perpustakaan Nasional Tahun 2021 seharusnya untuk perbandingan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan adalah dengan rasio 3:4, yaitu 3 (tiga) tenaga pustakawan, 4 (empat) tenaga teknis yang bersertifikat.

R. Urusan Kearsipan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menekankan pentingnya arsip sebagai bukti pertanggungjawaban kepada generasi penerus. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan yang bertujuan untuk kemudahan pencarian data, mengantisipasi kehilangan dokumen/file, mendukung keberhasilan organisasi dan apabila diperlukan data lama dapat dicari atau digunakan kembali.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Balangan mempunyai kompetensi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan. Terkait hal tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadikan IPK sebagai indikator tujuan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Capaian IPK Kabupaten Balangan berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/399/RB.06/2022 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 adalah kategori CC atau dengan nilai 51,92. Dengan capaian hanya 51,92 dari yang ditargetkan 83,49 maka capaian kinerja hanya 62.19%.

Rendahnya capaian kinerja IPK tersebut tentu sangat mempengaruhi capaian kinerja dari tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Capaian kinerja IRB Kabupaten Balangan tahun 2021 hanya mendapat predikat CC dengan nilai 54,63. Rendahnya kinerja IPK dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis, arsip aktif, dan arsip inaktif serta belum optimalnya SDM kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Terkait hal tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan perlu mengoptimalkan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah (pencipta arsip) berkaitan dengan ketaatan terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, mengoptimalkan bagaimana pencipta arsip melaksanakan pengelolaan arsip di lingkungan masing-masing secara prosedural dan sistemik serta perlu mengoptimalkan pilar pengelolaan arsip dinamis yang harus dilakukan Perangkat Daerah yaitu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, JRA, sistem klasifikasi keamanan, juga perlunya arsip dikumpulkan dan disampaikan salinan otintek naskah arsip terjaga ke ANRI. Seperti disebut diatas penyebab pengelolaan arsip yang kurang baik berkaitan dengan adanya kualitas SDM, minimnya sarana dan prasarana sehingga untuk hal tersebut perlu dioptimalisasi.

Tabel 2.87
Capaian Indikator Kearsipan
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021

No.	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	31,71	48,78	65,85	80,44	53,33



2	Peningkatan SDM pengelolaan arsip	-	-	-	-	1

Sumber : Dinas Kearsipan Kabupaten Balangan, 2021

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, pengertian arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diterima oleh Lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut peraturan arsip nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga negara, pemerintahan daerah, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Pemerintah Daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan pembinaan untuk mengelola arsip secara baku yang artinya agar mengelola arsip sesuai dengan aturan yang berlaku ke SKPD secara bertahap dari tahun ke tahun. Sampai tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan pembinaan sebanyak 16 SKPD atau 50,33% dari 30 SKPD yang ada di Kabupaten Balangan. Pada tahun 2021 ada 5 SKPD atau 16,67% yang di bina yaitu Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain melaksanakan bimbingan teknis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan kondisi situasi arsip, pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah dan lainnya.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan senantiasa dilaksanakan rutin pada setiap tahunnya karena belum semua SKPD dan Desa di Kabupaten Balangan menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Dalam rangka pengelolaan arsip secara baku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan hingga tahun 2021 antara lain melaksanakan Bimbingan teknis kearsipan.



2.1.3.2 Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Pariwisata

Kunjungan wisata adalah sebagai perjalanan atau bepergian untuk kesenangan mengunjungi berbagai tempat yang menarik, atau kunjungan singkat, atau kunjungan lewat suatu tempat. Target persentase peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Balangan untuk tahun 2021 sebesar 10% atau seharusnya terjadi penambahan kunjungan wisata sebanyak 2.215 orang dari tahun 2020. Perhitungan persentase peningkatan kunjungan wisata didapatkan dari jumlah kunjungan wisata tahun 2021 dikurang jumlah kunjungan wisata tahun 2020 dibagi kunjungan wisata tahun 2020.

Kunjungan wisata di Kabupaten Balangan selama tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 32.407 orang dari 22.153 orang ditahun 2020 atau terjadi persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 46%. Peningkatan kunjungan wisata tahun 2021 dikarenakan faktor berkurangnya pandemic covid-19 dan berkurangnya penyekatan daerah menyebabkan masyarakat mulai melakukan aktivitas untuk mengunjungi objek wisata termasuk diantaranya objek wisata di Kabupaten Balangan, selain itu juga tentu dipengaruhi gencarnya promosi wisata yang dilakukan melalui pamflet, spanduk, website dan media sosial seperti youtube dan facebook.

Selain faktor disebut diatas juga dipengaruhi oleh adanya pelaksanaan pagelaran yang dilakukan di luar daerah Balangan seperti ikut serta dalam festival pasar terapung, travel fair, travel mart dan ikut serta dalam pameran anggrek Indonesia bersama dengan yayasan anggrek Indonesia Kabupaten Balangan. Sedangkan pertgelaran di dalam daerah dilaksanakan pagelaran Nanag Galuh Balangan dan putra-putri pariwisata Balangan, sehingga dengan adanya kegiatan ini akan semakin membantu promosi pariwisata Balangan dimana remaja Balangan ditanamkan rasa cinta terhadap keindahan alam di Balangan dan juga dijadikan sebagai Duta Pariwisata Kabupaten Balangan. Selain faktor tersebut juga tentu dengan memberikan fasilitas pariwisata yang memadai di beberapa objek wisata dan pembinaan terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di Kabupaten Balangan.

Tabel 2.88
Capaian Indikator Pariwisata
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021

No.		Tahun



	Bidang Urusan/ Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.1	Jumlah Kunjungan wisata (jiwa)	7.329	9.375	11.960	20.139	32.407
1.2	Lama kunjungan Wisata	1 s.d 2 hari	1 s.d 2 hari	4 s.d 5 hari	1 s.d 2 hari	1 hari
1.3	PAD Sektor Pariwisata	1,01%	1,4%	1,20%	0,97%	1,52%

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Balangan, 2021

Kunjungan wisata di Kabupaten Balangan tahun 2021 sebanyak 32.407 orang dari yang ditargetkan sebanyak 24.370 orang atau sebesar 133% dengan rata-rata lama kunjungan wisata selama 1 hari. Untuk meningkatkan kunjungan wisata dan lama wisata pemerintah daerah melakukan berbagai upaya antara lain beberapa lokasi/objek wisata terus dibenahi baik yang mudah dijangkau seperti yang di seputaran kota Paringin, maupun yang lokasinya jauh dari kota Paringin sebagai ibukota Kabupaten Balangan seperti di Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi. Dibeberapa objek wisata mulai dibangun beberapa sarana seperti gazebo dan sarana lainnya seperti MCK agar wisatawan betah di lokasi wisata untuk menikmati indahnya alam di Kabupaten Balangan.

Seperti telah disebutkan diatas rata-rata lama kunjungan wisata di Kabupaten Balangan selama 1 hari. Kunjungan wisatawan selama 1 hari antara lain kunjungan di seputaran Kota Paringin seperti di Taman Hijau, Taman Palidangan dan Water park, demikian juga dengan wisata religi dan budaya. Sedangkan untuk wisata alam pengunjung wisata ada yang melakukan kunjungan selama 2 hari (menginap), ini disebabkan lokasi yang jauh dan perjalanan yang cukup melelahkan (tapi penuh tantangan yang disukai oleh kaum muda yang hoby petualang). Objek wisata alam tersebut misalnya adalah Puncak Berangin, Puncak Gunung Hawk dan Air Terjun Tayak.

Terjadinya peningkatan kunjungan wisata ditahun 2021 tentu mempengaruhi PAD sektor pariwisata di Kabupaten Balangan. PAD di sektor pariwisata diambil dari pajak tahunan untuk sewa hotel dan penginapan serta pajak makan minum dari rumah makan yang ada di Kabupaten Balangan. Terjadi peningkatan kunjungan wisata tentu juga berdampak terhadap peningkatan jumlah warung makan dan restoran di Kabupaten Balangan selama tahun 2021.

Tahun 2020 PAD sektor pariwisata sebesar 0,97 % dan tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu menjadi 1,52%. PAD sektor pariwisata tersebut didapat dari pajak untuk penginapan (akomodasi) tahun 2021 sebesar Rp



11.138.000,-, pajak rumah makan/restoran sebesar 161.757.538,- dan total pajak daerah tahun 2021 adalah Rp 11.388.175.550,50.

Tabel 2.89
Tempat Makan Kabupaten Balangan
Tahun 2021

No.	Nama Tempat Makan	Lokasi
1.	Warung Makan Habibi	Kecamatan Paringin Selatan
2.	Warung Makan Padang Roda Baru	Jln.A.Yani Batu Piring
3.	Warung Makan Itik Panggang Tanpa Tulang	Jln.A.Yani BatuPiring
4.	Rumah Makan Padang Ampera	Jln.A.Yani Paringin
5.	Warung Makan Upik	Jln.A.Yani Belakang Pasar Paringin
6.	Depot Yasin	Paringin Kota
7.	Warung Makan Tulungagung	Batu Piring
8.	Depot Bakso Solo	Jln.A.Yani Batu Piring
9.	Depot Pikaco	Jln.A.Yani Batu Piring
10.	Soto Soroboyo	Depan Mesjid Al Akbar
11.	Bebek dan Ayam Kremes	Jln.A.Yani Batu Piring
12.	Depot Itik Panggang Mama Reyhan Amuntai	Jln.A.Yani Paringin
13.	Wong Solo	Jln.A.Yani Batu Piring
14.	Rumah Makan Kalijo	Jln.A.Yani Batu Piring
15.	Rumah Makan Iga Bakar Kaganangan	Jln.A.Yani Batu Piring
16.	Warung Makan Bebek Kremes Akbar	Jln.A.Yani Batu Piring Km.5
17.	Warung Makan Eva	Jln,A.Yani Batu Piring
18.	Warung Makan Amanda	Rica Paringin
19.	Rocket Chicken	Terminal Paringin
20.	Rocket Chicken	Jln.A.Yani Batu Piring
21.	Bakso Malang	Rica Paringin
22.	Warung Makan Salsabila	Muara Pitap Paringin Selatan
23.	Rumah Makan Mama Cindy	Gunung Pandau Paringin Timur
24.	Warung Makan Mama Habibi	Jln.A.Yani Km 3,5

B. Urusan Pertanian

Pada tabel 2.90 menjelaskan capaian kinerja sasaran pada target RKPD Kabupaten Balangan.

Tabel 2.90
Capaian Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dan Nilai Tukar Petani (NTP)
Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	12.50	12.75	13.00	13.39	13,79	11.79	11.71	11.71	12.14	11,97



2	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani	98.00	98.00	98.50	98.65	99	96.69	95.40	95.31	105.37	110,87
No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)									
			2017	2018	2019	2020	2021					
1	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	94.32	91.84	90.08	90.66	86,80					
2	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani	98.66	97.35	96.76	106.81	111,92					

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2022

Capaian indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2021 sebesar 11.97 dengan capaian kinerja sebesar 86,80. Sedangkan Tahun 2020 sebesar 12.14 dengan dengan capaian sebesar 90.66, dari data capaian kinerja tersebut turun sebesar 3,86. Capaian indikator nilai tukar petani (NTP) pada Tahun 2021 sebesar 110,87 dengan capaian kinerja sebesar 111,92. Sedangkan Tahun 2020 NTP sebesar 105,37, dengan capaian kinerja sebesar 106,81 dari data capaian kinerja tersebut naik sebesar 5,12. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, Kabupaten Balangan merupakan kabupaten yang memiliki kekayaan mineral berupa batubara, dan ini berimbas pada kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada PDRB mencapai sekian 60,69 %. Adapun sektor lain yang dominan sekaligus merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah sektor pertanian, mulai dari pertanian tanaman pangan, perkebunan hingga kehutanan, sektor ini secara total memiliki kontribusi sebesar 11.97 %.

Selanjutnya sumberdaya manusia di sektor pertanian adalah salah satu isu utama dalam pembangunan sektor pertanian di suatu daerah. Jumlah petani di suatu daerah sangat tergantung pada struktur ekonomi di daerah tersebut. Apabila suatu daerah dominan di sektor pertanian, maka jumlah petani di daerah tersebut cenderung lebih banyak. Tabel 2.91 memperlihatkan jumlah petani di Kabupaten Balangan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 jumlah petani di Kabupaten Balangan sebanyak 26.774 orang yang tersebar di 8 kecamatan. Petani terbanyak ada di Kecamatan Juai yang berjumlah sebanyak 4.387 orang sedangkan yang paling sedikit ada di kecamatan Paringin yaitu sebanyak 1.999 orang.

Tabel 2.91
Jumlah Petani di Kabupaten Balangan Menurut Kecamatan 2021

Kecamatan	Jumlah Petani (Orang)
Awayan	3.319
Batu mandi	3.918



Halong	4.325
Juai	4.387
Lampihong	4.001
Paringin	1.999
Paringin Selatan	2.807
Tebing Tinggi	2.018
Jumlah	26.774

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan SIMLUHTAN, 2022

Sebagian besar petani berusia > 55 tahun. Di Kabupaten Balangan, proporsi petani yang berusia > 55 tahun jumlahnya paling banyak yaitu 44,14 %, lalu diikuti oleh petani yang berusia < 34 tahun yaitu 25,95% dan > 65 tahun sebesar 19,99 %. Hampir sama dengan Provinsi Kalimantan Selatan, proporsi petani yang berusia < 25 tahun lebih tinggi daripada petani yang berusia 25-64 dan 35-54 tahun. Berdasarkan klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya menurut Undang-undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia 15-64 tahun, dan berdasarkan batas kerja, angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yaitu berusia 15-64 Tahun. Sehingga diketahui bahwa kelompok usia petani di Balangan dari 15-55 tahun adalah petani usia produktif.

B.1. Tanaman Pangan

Jenis tanaman pangan yang diproduksi di Kabupaten Balangan adalah padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Tabel 2.85. berikut menunjukkan luas panen masing-masing komoditi tanaman pangan tersebut dari tahun 2016 hingga 2021. Dari tabel ini terlihat bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan luas panen pada hampir semua jenis tanaman pangan kecuali padi gogo yang mengalami sedikit peningkatan luas panen seluas 3 Ha.

Tabel 2.92
Luas Panen Tanaman Pangan di Kabupaten Balangan 2016-2021 (Ha)

No.	Jenis Tanaman Pangan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi Sawah	35.184	36.413	39.726	35.746	43.256	33.872
2	Padi Gogo	5.158	5.158	10.158	11.593	5.200	5.203
3	Jagung	2.252	5.276	13.635	18.917	2.896	5.867
4	Kedelai	5.392	356	6.875	278	270	0
5	Kacang Tanah	325	325	325	325	165	34
6	Kacang Hijau	33	36	36	36	100	0
7	Ubi Kayu	250	250	250	250	176	36



8	Ubi Jalar	100	100	100	100	30	0

Sumber: DKPPP Kabupaten Balangan, 2022

Tabel 2.93 berikut menunjukkan produksi masing-masing komoditi tanaman pangan di Kabupaten Balangan dari tahun 2016 hingga 2020. Dari tabel ini terlihat bahwa : produksi padi sawah dan kacang hijau meningkat selama periode tersebut, sedangkan produksi padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar menurun sedangkan pada tahun 2021 produksi jagung meningkat, dan untuk produksi padi sawah, padi gogo, kacang tanah, ubi kayu menurun.

Tabel 2.93
Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Balangan
Tahun 2017-2021 (Ton)

No.	Jenis Tanaman Pangan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi Sawah	201.798	206.557,8	155.903,71	196.240,77	189.010,53
2	Padi Gogo	15.094,2	33.342,59	41.498,65	15.626,10	15.609,00
3	Jagung	23.535	61.357,5	107.447,9	18.581,93	43.871,82
4	Kedelai	427,2	8.250	352,8	324	0
5	Kacang Tanah	412,75	412,75	309,37	209,55	43,18
6	Kacang Hijau	36	36	40,11	100,00	0
7	Ubi Kayu	3.550	3.550	6.220	2.499,2	511,20
8	Ubi Jalar	1.040	1.040	3.086,57	312,00	0

Sumber: DKPPP Kabupaten Balangan, 2022

Tabel 2.94 berikut menunjukkan produktivitas masing-masing komoditi tanaman pangan di Kabupaten Balangan dari tahun 2016 hingga 2021. Dari tabel ini terlihat bahwa produktivitas padi sawah dan jagung meningkat selama periode tersebut, sedangkan produktivitas padi gogo, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar menurun. Dengan demikian, dari tiga tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan efisiensi produksi jagung dan padi sawah karena mampu menghasilkan lebih banyak dengan lahan yang semakin sedikit/tetap. Di samping itu, luas panen, produksi dan produktivitas padi gogo, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan selama periode tersebut. Penurunan luas panen harus menjadi perhatian karena bisa jadi disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian yang semakin tinggi di Kabupaten Balangan.



Tabel 2.94
Produktivitas Tanaman Pangan di Kabupaten Balangan
Tahun 2017-2021 (Ton/Ha)

No.	Jenis Tanaman Pangan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi Sawah	5,5	5,2	4,4	4,5	5,5
2	Padi Gogo	2,9	3,2	3,6	3,0	3,0
3	Jagung	4,5	4,5	5,7	6,4	7,4
4	Kedelai	1,2	1,2	1,3	1,2	0
5	Kacang Tanah	1,3	1,3	1,0	1,2	1,2
6	Kacang Hijau	1,0	1,0	1,1	1,0	0
7	Ubi Kayu	14,2	14,2	24,9	14,2	1,42
8	Ubi Jalar	10,4	10,4	30,9	10,4	0

Sumber : DKPPP Kabupaten Balanga, 2022

Data luas panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan di setiap kecamatan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.95 Luas panen padi sawah terbesar terdapat pada Kecamatan Awayan, Lampihong dan Juai. Komoditas padi gogo, luas panen terbesar pada Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi. Untuk komoditas jagung, luas panen terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Untuk komoditas Kacang tanah, luas panen terbesar ada di kecamatan Lampihong dan Paringin.

Tabel 2.95
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Sawah
Di Setiap Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Padi Sawah			Padi Gogo			Jagung		
		Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	Awayan	6.570	35.088,51	53,40	537	1.611,00	30,00	0	0	0
2	Batu mandi	5.879	34.442,84	58,58	20	60,00	30,00	0	0	0
3	Halong	3.111	18.581,46	59,72	2.442	7.326,00	30,00	5.206	39.443,55	75,76
4	Juai	6.258	35.603,32	56,89	748	2.244,00	30,00	48	336,12	70,02
5	Lampihong	6.274	35.129,16	55,99	281	843,00	30,00	30	180,75	60,25
6	Paringin	2.503	12.983,15	51,87	50	150,00	30,00	0	0	0
7	Paringin Selatan	1.920	10.203,28	53,14	20	60,00	30,00	3	21,00	70,00
8	Tebing Tinggi	1.357	6.978,81	51,42	1.105	3.315,00	30,00	580	3.890,4	67,07
Jumlah		33.872	189.010,53	55,80	5.203	15.609,00	30,00	5.867	43.871,82	74,78

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan

Tabel 2.96
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kacang-kacangan dan Umbi-umbian
Di Setiap Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Kacang Tanah	Ubi Kayu



		Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	Awayan	0	0	0	6	85,2	142
2	Batu mandi	0	0	0	5	71,0	142
3	Halong	4	5,08	12,70	2	28,4	142
4	Juai	0	0	0	3	42,6	142
5	Lampihong	10	12,7	12,70	8	113,6	142
6	Paringin	10	12,7	12,70	2	28,4	142
7	Paringin Selatan	5	6,35	12,70	6	85,2	142
8	Tebing Tinggi	5	6,35	12,70	4	56,8	142
Jumlah		34	43,18	12,70	0	511,2	142

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2022

B.2. Hortikultura

Hortikultura terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Jenis sayuran yang diproduksi di Kabupaten Balangan adalah bawang merah, bayam, buncis, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, jamur, tomat, terong, ketimun dan kangkung. Tabel 2.90 berikut menunjukkan luas panen komoditi sayuran tersebut dari tahun 2018 hingga 2021. Dari tabel ini terlihat bahwa luas panen semua jenis sayuran mengalami fluktuasi, ada yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun namun ada juga yang meningkat. Luas panen yang terus meningkat yaitu bawang merah, bayam, buncis, jamur, kacang panjang, kangkung, ketimun, terong dan tomat. Luas panen yang mengalami penurunan yaitu cabai besar dan cabai rawit.

Tabel 2.97
Luas Panen Sayuran di Kabupaten Balangan
Tahun 2018-2020 (Ha)

No.	Jenis Sayuran	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Bawang Merah	4	0,5	2	11
2	Bayam	30	23	14	25
3	Buncis	16	19,5	20	26
4	Cabai Besar	74	84,5	83	70,5
5	Cabai Rawit	130	159	146	145,5
6	Jamur	3	0	0	0,035
7	Kacang Panjang	57	68	55	66
8	Kangkung	34	20,5	21,5	29,5
9	Ketimun	50	49,5	41,5	104
10	Lobak/Labu Siam	3	25,75	0	-
11	Petsai/sawi	1,5	9	0	
12	Terong	66	56,5	51	62
13	Tomat	42	51	49	82,5

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2022



Tabel 2.98 berikut menunjukkan produksi masing-masing komoditi sayuran di Kabupaten Balangan dari tahun 2018 hingga 2021. Dari tabel ini terlihat bahwa produksi bawang merah, bayam dan Kacang Panjang meningkat selama periode tersebut, sedangkan produksi buncis, cabai besar, cabai rawit, jamur, kangkung, ketimun, tomat dan terong menurun. Produksi yang mengalami fluktuasi yaitu buncis, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, terong dan tomat.

Tabel 2.98
Produksi Sayuran di Kabupaten Balangan
Tahun 2018-2021 (Kwintal)

No.	Jenis Sayuran	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Bawang Merah	15	50	100	207
2	Bayam	1.506	1.220	115	130
3	Buncis	1.120	1.365	1.620	1.243
4	Cabai Besar	4.990	6.200	5.255	3.282
5	Cabai Rawit	8.810	10.450,5	8.273	7.128
6	Jamur	150	0	0	0,15
7	Kacang Panjang	3.420	3.650,5	2.216	2.945,5
8	Kangkung	3.810	1.910	332	159
9	Ketimun	6.410	5.915,5	4.570	2.700
10	Lobak/Labu Siam	90	10.601	0	
11	Petsai/sawi	60	360	0	
12	Terong	4.660	4.320	3.940	3.262
13	Tomat	6.490	7.510	7.002	4.920

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2022

Tabel 2.99 berikut menunjukkan produktivitas masing-masing komoditi sayuran di Kabupaten Balangan dari tahun 2018 hingga 2021. Dari tabel ini terlihat bahwa produktivitas kacang panjang meningkat selama periode tersebut, sedangkan produktivitas bawang merah, bayam, buncis, cabai besar, cabai rawit, kangkung, ketimun, terong dan tomat menurun. Produktivitas yang mengalami fluktuasi yaitu bawang merah, bayam, buncis, cabai besar, cabai rawit, terong dan tomat. Dengan demikian, dari tiga tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi efisiensi produksi adalah kacang panjang karena luas panen, produksi dan produktivitasnya meningkat.

Tabel 2.99
Produktivitas Sayuran di Kabupaten Balangan



Tahun 2018-2021 (Kwintal/Ha)

No.	Jenis Sayuran	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Bawang Merah	3,75	100,00	50	20
2	Bayam	50,20	53,04	8,21	5,2
3	Buncis	70,00	70,00	81	50
4	Cabai Besar	67,43	73,37	63,31	50
5	Cabai Rawit	67,77	65,73	56,66	50
6	Jamur	50,00	0	0	-
7	Kacang Panjang	60,00	53,68	40,29	50
8	Kangkung	112,06	93,17	15,44	5,4
9	Ketimun	128,20	119,51	110,12	50
10	Lobak/Labu Siam	30,00	411,69	0	0
11	Petsai/sawi	40,00	40,00	0	0
12	Terong	70,61	76,46	77,25	52
13	Tomat	154,52	147,25	142,89	60

Sumber: DKPPP Kabupaten Balangan, 2022

Sementara itu, jenis buah-buahan yang diproduksi di Kabupaten Balangan adalah alpukat, belimbing, duku, durian, jambu biji, jambu air, jeruk siam, jeruk besar, mangga, manggis, nangka, nanas, pepaya, pisang, rambutan, salak, sawo, sirsak, sukun, melinjo, petai, jengkol dan semangka. Tabel 2.100 berikut menunjukkan luas panen dan produktivitas komoditi buah-buahan tersebut pada tahun 2021. Dari tabel ini terlihat bahwa luas panen terbesar adalah buah nangka/cepedak sebesar 2.769 Ha. Produksi terbesar yaitu buah nangka/cepedak, pisang, dan durian masing-masing 180.581 kwintal, 81.054 kwintal dan 9.144 kwintal. Produktivitas terbesar yaitu buah pisang, jambu biji, dan jambu air yaitu masing-masing sebesar 370 kwintal/ha, 275 kwintal/ha dan 160 kwintal/ha.

Tabel 2.100
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah-buahan
di Kabupaten Balangan 2021

No	JenisBuahBuahan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kuintal)	Produktivitas (Kwintal/Ha)
1	Alpukat	0,005	7	14
2	Belimbing	2	40	22
3	Duku/Langsar	13	85	5,85
4	Durian	287	9.144	32
5	Jambu Biji	8	2.217	275
6	Jambu Air	4	643	160
7	Jeruk Siam/Keprok	43	2.447	55
8	Jeruk Besar	1	35	52
9	Mangga	65	4051	63



10	Manggis	1	20	32
11	Nangka/Cempedak	2.769	180.581	65
12	Nenas	6	235	40
13	Pepaya	3	2739	79
14	Pisang	192	81.054	370
15	Rambutan	61	2145	9
16	Salak	57	6250	100
17	Sawo	77	1182	15
18	Sirsak	9	811	69
19	Sukun	15	552	38
20	Melinjo	6	216	36
21	Petai	9	478	53
22	Jengkol	53	2428	47
23	Semangka	10	710	71

Sumber: DKPPP Kabupaten Balangan, 2022

Jenis tanaman obat-obatan yang diproduksi di Kabupaten Balangan adalah jahe, laos/lengkuas, kencur dan kunyit. Tabel 2.101. Berikut menunjukkan luas panen, Produksi dan Produktivitas tanaman obat tersebut dari tahun 2018 hingga 2021. Dari tabel ini terlihat bahwa luas panen jahe dan laos/lengkuas selama periode tersebut meningkat, sedangkan produksi kencur dan kunyit selama periode tersebut menurun. Produksi Jahe dan Laos/lengkuas meningkat di tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020. Sedangkan produksi kencur dan kunyit menurun di tahun 2021. Tabel ini juga memperlihatkan bahwa produktivitas jahe, laos/lengkuas, kencur dan kunyit meningkat selama periode tersebut. Kecamatan Batumandi merupakan tempat dimana tanaman obat-obatan banyak dibudidayakan.

Tabel 2.101
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Obat
di Kabupaten Balangan 2018-2021

No.	Jenis Tanaman Obat	Luas Panen (Ha)				Produksi (Kwintal)				Produktivitas (Kwintal/Ha)			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Jahe	18,65	3,013	48,016	6	64.95	9,039	147,5	175	3,48	3,00	3,07	25
2	Laos/Lengkuas	5,726	3,807	14,72	3,5	32.178	60,021	43,0	66	5,62	15,77	2,92	20
3	Kencur	242	1,61	4,46	2,5	724	3,22	133,86	54,5	2,99	2,00	3	30
4	Kunyit	222	2,603	4,7	1,5	664	75,309	124,85	30	2,99	28,93	2,65	20

Sumber: DKPPP Kabupaten Balangan, 2022

Tabel 2.102 menunjukan data luas panen, produksi dan produktivitas tanaman obat-obatan di setiap kecamatan tahun 2021. Luas panen tanaman obat-obatan baik jahe, laos/lengkuas, kencur dan kunyit yang terbesar di Kecamatan Batumandi dan Halong.



Tabel 2.102
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Semua Tanaman Obat-Obatan
Di Setiap Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jahe			Laos / Lengkuas			Kencur			Kunyit		
		Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	Awayan	0,150	4,5	3				0,070	2,1	3	0,250	7,5	3
2	Batu mandi	0,975	39	4	0,810	24,3	3	0,520	20,8	4	0,315	12,6	4
3	Halong	0,700	21	3	0,600	12	2	0,300	9	3	0,100	3	3
4	Juai	0,500	15	3	0,0100	2	2	0,200	4	2	0,100	2	2
5	Lampihong	0,075	2,25	2	0,012	0,36	3	0,020	0,6	3	0,020	0,06	3
6	Paringin	0,015	0,45	3	0,010	0,30	3	0,020	0,30	1,5			
7	Paringin Selatan												
8	Tebing Tinggi												
Jumlah		2,415	82,2	18	1,442	38,96	13	1,13	36,8	16,5	0,785	25,16	15

Sumber: DKPPP Kabupaten Balangan, 2022

B.3. Peternakan

Hewan yang termasuk kategori ternak besar adalah sapi dan kerbau. Sementara itu, hewan yang termasuk kategori ternak kecil adalah kambing dan babi. Tabel 2.103 berikut menunjukkan banyaknya ternak besar dan ternak kecil di Kabupaten Balangan dari tahun 2016 hingga 2021. Dari tabel ini terlihat bahwa jumlah ternak di Kabupaten Balangan yang meningkat adalah Kerbau dan Babi. Peningkatan jumlah hewan ternak ternyata tidak sejalan dengan peningkatan jumlah daging yang dihasilkan. Hal ini disebabkan jumlah daging bukan dari ternak yang dipelihara di Kabupaten Balangan. Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Balangan belum berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya ternak besar dan kecil dijual keluar Kabupaten Balangan. Jumlah sapi dan kambing selama periode 2016-2019 mengalami sedikit peningkatan, pada tahun 2020-2021 jumlah ternak sapi menurun, jumlah populasi ternak menurun karena pemotongan ternak sapi cukup tinggi terutama pada hari besar ummat Islam. Kebutuhan hari raya qurban dan maulid Nabi sekitar 482 ekor, sedangkan untuk tahun 2021 di kabupaten Balangan untuk ternak sapi gagal pengadaan sehingga ternak sapi di kabupaten Balangan menurun dari tahun 2020 yaitu dari 1.953 ekor menjadi 1.507 ekor. Selain itu pasokan sapi menurun karena pembatasan impor sapi yang dilakukan pemerintah sehingga pasokan atau suplai sapi juga menurun ke kabupaten Balangan. Sementara itu konsumsi masyarakat terhadap daging sapi justru meningkat setiap tahun dan kebutuhan masih tetap tinggi sehingga sapi lokal banyak yang dijual dan



dipotong. Sedangkan jumlah ternak kambing menurun dan produksi dagingnya juga menurun. Jumlah daging pada Tabel di bawah ini adalah jumlah daging sapi dan kambing yang dijual di pasar pasar kabupaten Balangan.

Tabel 2.103
Banyaknya Hewan Ternak Besar dan Kecil
di Kabupaten Balangan, 2016-2021 (ekor)

Tahun	Ternak Besar (Ekor)		Ternak Kecil (Ekor)	
	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi
2021	1.507	18	632	228
2020	1.953	7	674	58
2019	2.110	6	620	54
2018	2.051	3	584	59
2017	2.084	4	552	66
2016	2.043	5	509	170

Sumber: DKPPP Kabupaten Balangan, 2022

Tabel 2.104
Banyaknya Produksi Daging Ternak
di Kabupaten Balangan, 2016-2021

No.	Tahun	Daging (Kg)	
		Sapi	Kambing
1	2016	222.133	11.157
2	2017	235.894	11.329
3	2018	153.331	9.292
4	2019	115.544	4.553
5	2020	105.278	4.553
6	2021	155.078	3.130

Sumber: DKPPP Kabupaten Balangan, 2022

Selain hewan ternak sebagaimana dijelaskan di atas, peternak di Kabupaten Balangan juga mengusahakan ayam buras, ayam ras pedaging dan itik. Tabel 2.105 berikut menunjukkan banyaknya unggas di Kabupaten Balangan dari tahun 2016 hingga 2021. Selama periode tersebut jumlah ayam ras pedaging mengalami peningkatan, jumlah itik meningkat sampai tahun 2019 namun menurun di tahun 2020-2021. Jumlah ayam buras terus mengalami penurunan.

Tabel 2.105
Banyaknya Unggas di Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021 (Ekor)

Tahun	Jenis Unggas (Ekor)		
	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Itik
2021	25.474	1.869.000	13.140
2020	40.826	1.820.793	107.576
2019	42.300	1.771.275	197.410



2020	40.826	1.820.793	107.576
2017	67.152	1.071.000	28.449
2016	63.050	1.031.800	28.099

Sumber: DKPPP Kabupaten Balangan, 2022

Tabel 2.106 berikut menunjukkan produksi daging Ayam Buras, Ayam Ras Pedaging dan Itik di Kabupaten Balangan dari tahun 2016 hingga 2021. Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa produksi daging Ayam Ras Pedaging mengalami Peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Produksi daging itik pada tahun 2021 menurun dibandingkan dari tahun 2020. Untuk ayam ras pedaging terjadi kenaikan dari 573.042 Kg ditahun 2016 menjadi 1.697.664 Kg ditahun 2021. Demikian juga halnya dengan Daging itik dari 56.973 Kg ditahun 2016 menjadi 170.506 Kg ditahun 2019 dan menurun terus menurun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 menjadi 82.294 kg.

Tabel 2.106
Produksi Daging Ayam Buras, Ayam Ras Pedaging
dan Itik di Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 (Kg)

Tahun	Produksi Daging (Kg)		
	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Itik
2021	41.958	1.697.664	82.294
2020	59.610	1.629.484	123.776
2019	100.267	1.509.584	170.506
2018		888.048	62.165
2017		660.800	63.525
2016		573.042	56.973

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2022

B.3. Perkebunan

Tanaman perkebunan rakyat yang ada di Kabupaten Balangan antara lain karet, kelapa, kopi, cengkeh, kakao dan aren. Tabel 2.107 berikut menunjukkan luas areal tanaman perkebunan tersebut dari tahun 2015 hingga 2021. Dari tabel ini terlihat bahwa hampir semua luas areal tanaman perkebunan mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Hanya kelapa sawit, lada dan kapuk yang luas areal tanamannya meningkat.

Tabel 2.107
Luas Areal Tanaman Perkebunan di Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021 (Ha)

No.	Jenis Tanaman	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Karet	37.555	37.919	38.035	37.915	37.454	37.887



2	Kelapa	825	827	855	589	591	591
3	Kelapa Sawit	356	469	578	1.055	1.055	1.085
4	Kopi	630	631	631	207	526	526
5	Lada	10	9	9	17	25	25
6	Sagu	434	445	437	365	365	365
7	Kemiri	204	219	204	118	118	118
8	Pinang	41	40	60	54	54	54
9	Kapuk	19	19	19	25	25	25
10	Aren	727	733	745	559	559	559
11	Purun	46	45	39	27	27	27

Sumber: DKPPP Kabupaten Balangan, 2022

Tabel 2.108 berikut menunjukkan produksi masing-masing tanaman perkebunan di Kabupaten Balangan dari tahun 2015 hingga 2021. Dari tabel ini terlihat bahwa pada tahun 2015 hingga 2019 produksi tanaman karet, kelapa sawit, lada meningkat, sedangkan produksi kelapa, kopi, sagu, kemiri, dan aren dan purun menurun. Namun pada tahun 2021 produksi karet, sagu, kemiri, dan aren menurun sedangkan produksi kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, Pinang dan purun meningkat dibandingkan pada tahun 2020.

Tabel 2.108
Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Balangan,
2015-2021 (Ton)

No.	Jenis Tanaman	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Karet	24.711	24.959	26.742	28.232	31.994	30.959	29.091
2	Kelapa	255	244	299	447	150	263	301
3	Kelapa Sawit	63	70	350	447	1.359	311	520
4	Kopi	51	60	61	61	19	28	36
5	Lada	2	2	2	3	4	2,2	3,7
6	Sagu	76	108	109	112	102	59	55
7	Kemiri	72	81	88	81	68	39	31
8	Pinang	6	5	6	8	8	4	9
9	Kapuk	4	3	4	5	5	5	5
10	Aren	457	422	548	558	538	294	218
11	Purun	4	2	3	2	0,6	1	1

Sumber: DKPPP Kabupaten Balangan, 2022

Tabel 2.109 berikut menunjukkan produktivitas masing-masing tanaman perkebunan di Kabupaten Balangan dari tahun 2015 hingga 2021. Dari tabel ini terlihat bahwa pada tahun 2015-2020 produktivitas tanaman karet, kelapa sawit, kopi, lada, sagu, kemiri, pinang dan aren menurun selama periode tersebut,

sedangkan produktivitas tanaman kelapa, kapuk dan purun meningkat Namun pada tahun 2021 produktivitas karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, sagu, kemiri, pinang, dan aren meningkat.

Tabel 2.109
Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Jenis Tanaman	Tahun						2021
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Karet	0,67	0,66	0,71	0,74	0,84	0,83	1,102
2	Kelapa	0,31	0,30	0,36	0,52	0,25	0,45	0,746
3	Kelapa Sawit	0,22	0,20	0,75	0,77	1,29	0,29	2,63
4	Kopi	0,08	0,10	0,10	0,10	0,09	0,05	0,15
5	Lada	0,20	0,20	0,22	0,33	0,24	0,09	0,41
6	Sagu	0,18	0,25	0,24	0,26	0,28	0,16	0,347
7	Kemiri	0,35	0,40	0,40	0,40	0,58	0,33	0,389
8	Pinang	0,15	0,12	0,15	0,13	0,15	0,07	0,22
9	Kapuk	0,21	0,16	0,21	0,26	0,20	0,2	0,25
10	Aren	0,63	0,58	0,75	0,75	0,96	0,53	0,62
11	Purun	0,09	0,04	0,07	0,05	0,02	0,04	0,057

Sumber: DKPPP Kabupaten Balangan, 2022

C. **Urusan Perdagangan**

Perekonomian Kabupaten Balangan menunjukkan pertumbuhan yang meningkat selama tahun 2017-2019, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020, dan dapat kembali meningkat pada tahun 2021. Peningkatan dan penurunan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, serta pertumbuhan ekonomi. Nilai PDRB Kabupaten Balangan (atas dasar harga berlaku) yang selama periode 2017 - 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan peningkatan produksi barang dan jasa. Adapun kontraksi (penurunan) pada tahun 2020 terjadi terutama akibat adanya pandemi COVID-19. Berbagai aktivitas pembatasan kegiatan baik skala nasional maupun internasional pada musim pandemi tahun 2020 menjadikan kondisi perekonomian Balangan



mengalami kontraksi pada tahun ini. Namun nilai tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun 2021. Berdasarkan PDRB ADHB, komponen Ekspor Impor selama 2 tahun berturut-turut, yaitu 2019 dan 2020, mengalami pertumbuhan negative setelah beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami perbaikan hingga tahun 2018. Namun, kedua komponen tersebut kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan baik secara volume maupun nilai, terutama nilai batubara yang meningkat cukup signifikan di tahun 2021. Di sisi lain, impor menjadi pengurang dalam komponen PDRB pengeluaran dan ini juga menjadi penyebab perlambatan ekonomi di Balangan. Nilai PDRB Balangan (atas dasar harga berlaku) selama periode tahun 2017 – 2021 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020, nilai PDRB Balangan atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, sebagai dampak dari pandemi yang terjadi pada tahun tersebut. Dari seluruh komponen di tahun 2021, hanya Komponen Konsumsi pemerintah yang mengalami penurunan nilai tambah, sedangkan komponen yang lainnya seluruhnya mengalami peningkatan. Dengan demikian, kenaikan hampir seluruh komponen tersebut mampu menaikkan nilai PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku secara total.

Nilai net ekspor, merupakan selisih dari nilai ekspor barang dan jasa dengan nilai impor barang dan jasa. Bila surplus/positif, berarti daerah tersebut lebih banyak ekspor ke luar. Dan begitupula sebaliknya bila negative, artinya dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya daerah tersebut banyak membutuhkan barang dan jasa dari daerah lain (impor). Dalam kurun waktu 2017 – 2021 net ekspor barang dan jasa Kabupaten Balangan berfluktuasi. Net ekspor Kabupaten Balangan yang terjadi antara tahun 2017 sampai dengan 2021 tercatat masing-masing sebesar 4,83 triliun rupiah (2017); 5,00 triliun rupiah (2018); 4,80 triliun rupiah (2019); 4,54 triliun rupiah (2020) dan 5,45 triliun rupiah (2021).

Tabel 2.110
Capaian Indikator Perdagangan
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021

No.	Bidang Indikator Urusan/	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
5.1	Ekspor Barang dan Jasa (Milyar rupiah)	17,545.76	22,069.75	20,076.52	15,699.34	22,794.19
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	4	4	4	4	4

5.3	Net Ekspor barang dan Jasa (Milyar rupiah)	4,832.88	5,003.15	4,803.16	4,538.29	5,449.15

Sumber: Dinas Perdagangan, 2021

Sedangkan cakupan bina kelompok usaha informal Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 4 (empat) kelompok pedagang/usaha informal, yaitu:

1. Persatuan Pedagang Pasar Modern Adaro;
2. Persatuan Pedagang Pasar Paringin;
3. Persatuan Pedagang Pasar Batumandi; dan,
4. Persatuan Pedagang Pasar Halong.

Meskipun hanya 4 (empat) kelompok, namun pembinaan ini sangat penting sehingga meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan perekonomian terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi, keberadaan sektor informal diharapkan tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum lainnya seperti berjualan yang menutup akses masyarakat terhadap fasilitas trotoar serta terawasi dalam hal pelayanan terhadap konsumen.

D. Urusan Perindustrian

Pengembangan kegiatan industri sangat bermanfaat di dalam proses pembangunan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan perputaran arus modal. Sektor industri selama 5 tahun terakhir yaitu periode 2017 – 2021 rata-rata memberi kontribusi sebesar 1,99%. Padahal sektor Industri juga menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat mengganti peran sektor Pertambangan di masa mendatang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan peran sektor industri sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang merupakan Rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan Industri Kabupaten Balangan. Dalam RPIK dijelaskan bahwa Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Balangan adalah tumbuh dan berkembangnya industri yang berbasis sumber daya Lokal dan menguatnya daya saing industri melalui penerapan teknologi dan inovasi. Dalam RPIK sendiri dibuat sasaran pembangunan industri salah satunya adalah peran sektor industri terhadap PDRB ditahun 2021 sebesar 4,76 % dengan pertambahan atau 16,16,46 % tanpa Pertambangan. Namun sampai saat ini sasaraannya belum memenuhi target. Permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri antara lain disebabkan

karena belum adanya pengembangan industri hulu dan industri antara berbasis SDA, kualitas SDM Industri yang dimiliki terutama penguasaan teknologi belum optimal, dan belum tersedianya sarana-dan prasarana industri (Kawasan Industri) yang dapat menarik minat investor.

Adapun data perkembangan perindustrian di Kabupaten Balangan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.111
Capaian Indikator Perindustrian
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	90	94	96	97	98
6.2	Jumlah usaha industri kecil dan rumah tangga (unit)	1.920	2.046	2.239	2.312	2.349
6.3	Pertumbuhan Industri (%)	19,85	6,6	9,4	3,3	1,6
6.4	Kontribusi sektor industri PDRB harga berlaku (%)	1,99	1,93	1,94	1,98	2,1

Sumber: BPS 2020 dan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Walaupun berdasarkan data cakupan bina kelompok pengrajin hanya memperlihatkan tren yang stabil tanpa ada peningkatan yang signifikan namun realisasi dilapangan membuktikan bahwa para pengrajin tetap bertahan dan mengalami kenaikan omset pemesanan. Peningkatan tersebut karena meningkatnya minat dan ketertarikan masyarakat atas hasil karya dari para pengrajin selain itu para pengrajin sendiri selalu optimis untuk terus mengaktifkan dan meningkatkan kreatifitas hasil usaha mereka berupa hasil hutan seperti Bambu, Bamban, Purun serta hasil hutan lainnya untuk dijadikan kerajinan yang bernilai ekonomis. Begitu pula dengan jumlah usaha industri yang terus meningkat setiap tahunnya, meskipun hanya sebatas usaha kecil dan rumah tangga. Pada tahun 2021 jumlah IKM sebesar 2.349 unit dengan pertumbuhan industri dari tahun 2020 yaitu 1,6 %

Kehidupan global saat ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas, inovasi, pemanfaatan teknologi dan informasi. Perubahan tersebut telah mendisrupsi berbagai sendi kehidupan global, termasuk persaingan dalam bidang ekonomi. Proses inovasipun menjadi sangat cepat bahkan cenderung revolusioner karena dukungan perkembangan teknologi. Maka strategi untuk



memenangkan persaingan global, ditandai dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Potensi ekonomi lokal yang mampu menjawab fenomena tersebut dan memperlihatkan perkembangan pesat di Kabupaten Balangan adalah industri kain sasingan, industri kerajinan anyaman serta industri pangan. Produk-produk yang dihasilkan merupakan hasil karya cipta yang mengangkat lokalitas, keunikan dan memiliki nilai jual. Kesiapan untuk berkompetisi di pasar global masih diperlukan, salah satu yang utama adalah meningkatkan daya saing produk dengan kemampuan berinovasi dalam segala proses dari hulu hingga ke hilirnya. Perkembangan usaha Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Balangan diharapkan mampu meningkatkan perannya dan memberikan kontribusi yang besar dan signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Pendekatan sistem klaster sangat tepat diterapkan pada program pengembangan IKM di Balangan karena pendekatan ini memiliki kekuatan yang terbentuk dari kelompok usaha yang berkaitan, baik secara geografis berada di wilayah yang berdekatan, terhubung dan saling melengkapi dalam proses produksi. Pendekatan klaster ini dapat mendorong IKM di Balangan memiliki orientasi pasar global sehingga keinginan untuk meraih daya saing semakin kuat.

Diharapkan dengan adanya pembinaan, pemberdayaan dan penguatan modal pada pelaku industri kecil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga dapat menurunkan indeks gini ratio di Kabupaten Balangan. Kendala yang dihadapi para pelaku IKM di Kabupaten Balangan adalah tidak terlepas dari permodalan, bahan baku, pengemasan dan pemasaran. Dukungan dan peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan tersebut salah satu upaya yang telah dilakukan ialah dengan memfasilitasi para IKM untuk memasukkan produk-produk mereka ke Ritel Modern.

E. **Urusan Transmigrasi**

Tabel 2.112
Capaian Indikator Transmigrasi
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Transmigrasi					



1	Persentase Transmigrasi Swakarsa	16.5	16.5	16.5	17,54	3,7

Sumber : Disnakertrans – BLK Kabupaten Balangan, 2022

Jumlah KK Transmigrasi Swakarsa pada tahun 2017 sampai dengan 2020 adalah 10 KK, namun pada tahun 2021 jumlah KK Transmigrasi swakarsa berkurang menjadi tinggal 2 KK dikarenakan adanya warga transmigrasi yang meninggalkan lokasi dikarenakan keterbatasan lapangan pekerjaan disebabkan lahan usaha mereka terendam banjir, hal tersebut juga mengurangi total jumlah KK yang ada di UPT Lajar Papuyuan Matang Hanau sehingga tinggal menjadi 54 KK.

Penyebab Jumlah KK transmigrasi swakarsa tidak mengalami penambahan, dikarenakan terkendala regulasi Antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, dikarenakan untuk mendatangkan transmigrasi baru harus membangun permukiman transmigrasi baru, tentu dana yang diperlukan sangatlah besar dikarenakan harus menyediakan sarana dan prasarana berupa fasilitas pendukung jaminan hidup warga transmigrasi, hal tersebut akan membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga perlu bantuan selain dari dana pemerintah daerah yakni dana dari pemerintah pusat, hal tersebut sementara tidak didapatkan dikarenakan ada beberapa sebab yakni :

- a) Dikarenakan adanya pemangkasan dana Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI maka yang diprioritaskan untuk mendapatkan kucuran dana pusat, Kawasan Transmigrasi yang termasuk didalam skala prioritas nasional, sedangkan untuk kabupaten balangan kawasan transmigrasi hanya memasuki skala prioritas kementerian.
- b) Belum adanya perencanaan RSKP dikawasan transmigrasi dikarenakan adanya kendala tertentu.
- c) Masih melakukan pengumpulan data serta mengali informasi dari warga local mengenai program transmigrasi
- d) Masih melakukan indentifikasi ketersediaan lahan yang ada dikawasan transmigrasi guna melaksanakan kegiatan ketransmigrasian seperti pembentukan SP Pugar dan SP Tempatan

F. **Urusan Perikanan**

Rumah tangga perikanan tangkap/budidaya adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan/budidaya ikan dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual. Berikut gambaran Jumlah Rumah Tangga Perikanan di Kabupaten Balangan.

Tabel 2.113

Jumlah Rumah Tangga Perikanan di Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021

No	Kecamatan	Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Budi day a	Tan g Kap	Budi Day a	Tan g kap	Budi Day a	Tan g kap	Budi Day a	Tan g Kap	Budi Day a	Tan g kap
1	Paringin Selatan	454	591	504	591	454	591	504	591	509	594
2	Paringin	398	587	442	587	398	587	442	587	445	589
3	Lampihong	565	913	628	913	698	913	758	913	765	917
4	Batumandi	463	527	514	527	571	527	591	527	594	528
5	Awayan	441	369	490	369	544	369	604	369	607	371
6	Tebing Tinggi	197	228	219	228	243	228	243	228	248	228
7	Juai	239	434	266	434	296	434	286	434	289	435
8	Halong	446	366	495	366	550	366	560	366	570	366
Jumlah		3.203	4.015	3.558	4.015	3.953	4.015	4.113	4.015	4.027	4.028

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Balangan, 2022

Di bidang perikanan, Kabupaten Balangan hanya mengandalkan budidaya dan penangkapan di perairan umum karena lokasinya tidak bersinggungan dengan laut dan secara kewenangan kabupaten tak lagi mengelola wilayah laut menurut UU No. 23 Tahun 2014. Budidaya perikanan budidaya darat berupa kolam, keramba dan bioflok. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya di Kabupaten Balangan dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, jumlah rumah tangga perikanan budidaya mencapai 3.203 orang dan pada tahun 2021 jumlahnya menurun menjadi 4.015 orang dari tahun 2020 jumlahnya 4.113 orang. Jika dirinci menurut kecamatan, maka rumah tangga perikanan budidaya di Kecamatan Lampihong adalah yang paling banyak jumlahnya. Rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Balangan dari tahun 2017 hingga 2020 jumlahnya tidak mengalami peningkatan, yaitu 4.015 orang dan pada tahun 2021 jumlahnya meningkat menjadi 4.028 orang. Jika dirinci menurut kecamatan, maka rumah tangga perikanan tangkap terbanyak juga ada di Kecamatan Lampihong.

Sementara itu, produksi perikanan di Kabupaten Balangan dari tahun 2017 – 2021 berfluktuatif (lihat Tabel 2.114). Pada tahun 2017, produksi perikanan di Kabupaten Balangan mencapai 1.626 ton, lalu pada tahun 2018 meningkat sedikit menjadi 1.628 ton. Tahun 2019 meningkat menjadi 1.645 ton, pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.836 ton dan pada tahun 2021 sedikit



menurun menjadi 1.813 ton. Kecamatan Paringin Selatan menghasilkan ikan paling banyak pada tahun 2021, sedangkan Juai adalah yang paling sedikit.

Jumlah produksi perikanan paling banyak dihasilkan oleh perikanan tangkap, dengan perkembangan yang cukup linier, dengan kontribusi terbesar berasal dari ikan gabus dan sepat siam. Sementara perikanan budidaya paling banyak dihasilkan oleh ikan nila dan mas, dengan sistem pembudidayaan yang paling besar dengan kolam (71.050 m2) dan keramba (5.562 m2).

Jika dirinci produksi menurut tempat pemeliharaan/penangkapan, maka sebagian besar ikan yang dihasilkan di Kabupaten Balangan berasal dari keramba. Produksi ikan di keramba tahun 2021 mencapai 324 ton, dari kolam jumlah produksi mencapai 307 ton dan dari bioflok hanya 297 ton (Tabel 2.114). Jenis ikan yang dipelihara dari lokasi budidaya kolam yaitu ikan nila, mas, patin, lele dan gurame. Untuk keramba yang komoditas ikan yang dihasilkan yaitu nila, mas, gurame jelawat dan bawal tawar. Sedangkan bioflok untuk jenis ikan lele, nila, patin dan papuyu/betok.

Tabel 2.114
Produksi Perikanan (ton) menurut Tempat Pemeliharaan di
Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021

N o	Kecamata n	Tahun															Jumlah
		2017			2018			2019			2020			2021			
		Kl m	Kr b	Bio f	Kl m	Kr b	Bio f	Kl m	Kr b	Bio f	Klm	Krb	Bio f	Kl m	Krb	Biof	
1	Juai	16	6	-	17	6	-	18	6	-	25	9	-	28	29	-	160
2	Lampihon g	20	28 6	-	20	33 2	-	21	33 6	-	27	452	-	55	58	-	1.607
3	Paringin	6	10	12	6	10	16	7	11	17	10	65	9	49	52	48	328
4	Paringin Selatan	22	29	25	22	32	30	24	34	32	44	49	9	46	49	98	545
5	TebingTin ggi	20	-	-	22	-	-	23	-	-	28	-	-	31	32	-	156
6	Awayan	10	10		17	10	-	18	11	-	28	14	-	34	36	-	188
7	Batuman di	15	-	15	15	-	15	19	-	16	22	-	9	40	42	65	273
8	Halong	51	-	-	58	-	-	61	-	-	84	-	-	24	26	86	390
Jumlah		16 1	34 1	52	17 9	39 1	60	19 1	39 8	65	267	589	27	30 7	324	297	3.647
Total Budidaya		554			630			654			883			928			3.386
Total Penangkapan		1.072			998			991			952			885			5.077
Total Produksi		1.626			1.628			1.645			1.836			1.813			8.463

Keterangan: Klm: Kolam, Krb: Keramba, Biof: Bioflok
Sumber: DKPPP Kab. Balangan, 2022

Produksi ikan dari penangkapan di perairan umum jumlahnya lebih besar daripada yang dari budidaya. Produksi penangkapan pada tahun 2017 mencapai 1.072 ton dan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 terus mengalami penurunan produksi yaitu 998 ton, 991 ton dan 952 ton. Hal ini terjadi karena terjadi penyempitan wilayah tangkapan akibat pembukaan lahan. Disamping itu, penangkapan ikan bukan menjadi mata pencaharian utama bagi RTP tangkap, namun hanya sambilan. Lokasi tangkap nelayan yaitu di perairan rawa dan sungai di Kabupaten Balangan.

Adapun alat tangkap yang digunakan dalam penangkapan ikan yaitu pancing berjoran, jaring insang, anco, jala tebar dan bubu. Beberapa nelayan penangkap ada yang memiliki lebih dari 1 (satu) alat tangkap, menyesuaikan dengan target tangkapan. Jumlah nelayan dengan alat tangkap yang beroperasi di perairan umum Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel 2.115 Jenis ikan yang ditangkap adalah ikan gabus, sepat siam, betok, seluang, sepat rawa, baung dan nilam.

Tabel 2.115
Jumlah Nelayan (orang) berdasarkan Alat Tangkap yang Beroperasi di Perairan
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021

No	Jenis Alat Tangkap	Jenis Perairan	
		Rawa	Sungai
1	Pancing Berjoran	1.130	1.220
2	Jaring Insang	185	370
3	Anco	378	0
4	Jala Tebar	357	340
5	Bubu	72	0
Jumlah		2.122	1.930

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Balangan, 2022

Luas areal budidaya perikanan di Kabupaten Balangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik kolam, karamba maupun bak bioflok. Penambahan areal yang cukup signifikan yaitu jenis kolam. Di akhir tahun 2021 kolam mencapai 71.050 m². Sebelumnya total luas kolam ikan yang ada di tahun pada tahun 2020 sebesar 57.800 m² kemudian 2019 hanya sebesar 55.700 m², dan pada tahun 2018 dan 2017 berukuran 13.500 m² dan 13.300 m² (Tabel 2.116).

Tabel 2.116
Luas Areal Budidaya Perikanan (m²) di
Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021



N o	Kecamat an	Tahun																	
		2016		2017			2018			2019			2020			2021			
		Kl m	Kr b	Kl m	Kr b	Bi of	Klm	Krb	Bi of	Klm	Krb	Bi of	Klm	Krb	Biof	Klm	Krb	Biof	
1	Lampih ong	4 0 0	3.8 58	6 0 0	4. 0 2 6	-	600	4.11 6	-	1.600	4.11 6	-	1,600	4,413	-	1.600	4.413	-	
2	Batuman di	9 0 0	-	4. 3 0 0	-	2 4	4.30 0	-	2 4	24.30 0	-	2 4	24,30 0	-	32	24.30 0	-	32	
3	Awayan	1. 3 0 0	11 1	1. 3 0 0	1 1	-	1.30 0	111	-	11.30 0	111	-	12,80 0	111	36	12.80 0	111	36	
4	Tebing Tinggi	9 0 0	-	9 0 0	-	-	900	-	-	900	-	-	900	-	-	900	-	-	
5	Paringin	5 0 0	48 6	8 0 0	6 0 6	3 3	800	636	5 1	1.800	720	5 1	1,800	720	51	1.800	720	51	
6	Paringin Selatan	6 0 0	24 3	6 0 0	3 3 9	2 4	600	339	1 4 4	1.600	381	1 6 8	1,800	381	168	1.800	381	168	
7	Juai	1. 8 0 0	96	1. 8 0 0	1 6 8	-	2.00 0	198	-	1.200	198	-	1,200	198	-	1.200	198	-	
8	Halong	2. 8 0 0	36	3. 0 0 0	3 6	-	3.00 0	36	-	13.00 0	36	-	13,40 0	36	48	13.40 0	36	48	
Jumlah		9. 2 0 0	4.8 30	1 3. 3 0 0	5. 2 8 6	8 1	13.5 00	5.43 6	2 1 9	55.70 0	5.56 2	2 4 3	57,80 0	5,859	335	57.80 0	5.859	335	

Keterangan: Klm: Kolam, Krb: Keramba, Biof: Bioflok
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Balangan, 2022

Untuk menunjang ketersediaan benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan memiliki ada 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis yakni :

- a) UPTD Balai Benih Hamparaya
- b) UPTD Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau
- c) Pos Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan di Lampihong

UPTD Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau di Kecamatan Batumandi berdiri diatas lahan seluas ± 3,45 hektar (2,5 Ha + 0,95 Ha). Saat ini BBI Gunung Manau mengembangkan komoditas Nila, Patin Siam, Mas, Lele Sangkuriang, Papuyu dan Baung. Pada tahun 2016 produksi sebesar 1.017.520 ekor benih, melebihi target sebanyak 1.000.000 ekor benih. Sejak 2017 hingga 2020, produksi yang dihasilkan tidak bisa memenuhi target. Pada tahun 2021 produksi benih ikan mengalami peningkatan sebesar 2.251.342 ekor benih, melebihi target sebanyak



1.600.000 benih. Perkembangan produksi benih ikan di BBI Gunung Manau serta kontribusi PAD tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.117.

Tabel 2.117
Produksi Benih Ikan Tahunan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL)
Gunung Manau Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021

N O	KOMODITAS	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	NILA	86.600	91.000	235.421	77.840	221847	639.991
2	PATIN SIAM	747.590	82.225	169.000	87.580	357485	258.013
3	LELE SANGKURIAN G	81.430	115.425	105.405	108.400	636965	124.196
4	PAPUYU	80.650	40.200	16.560	43.580	98359	11.100
5	BAUNG	21.250	-	2.640	1.000	33170	1.218.042
JUMLAH		1.017.520	328.850	529.026	359.600	1.347.826	2.251.342
TARGET		1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
PERSENTASE		101,7 %	27,4 %	37,70%	19,9 %	84,24%	

Sumber: DKPPP Kabupaten Balangan, 2022

Selain penangkapan dan budidaya, sektor perikanan di Kabupaten Balangan juga didukung dengan keberadaan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (POKLAHSAR). Saat ini ada 23 kelompok pengolah dan 7 kelompok pemasar di Kabupaten Balangan. Bidang usaha pengolahan ikan yang dihasilkan yaitu bakso ikan, abon ikan, kerupuk ikan, roti isi abon ikan, nugget ikan, empek-empek, amplang patin, resoles ikan, stik ikan, crispy kulit pisang ikan patin, kerupuk waluh ikan patin, dan kerupuk udang (Tabel 2.118). Sedangkan pemasar yaitu pedagang ikan yang menampung hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya.

Tabel 2.118
Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
(POKLAHSAR) Di Kabupaten Balangan Tahun 2021

No.	Nama Kelompok	Bidang Usaha	Kelompok Usaha	Jumlah Anggota	SK Badan Hukum
I.	Kecamatan Lampihong				
1	Ulam Sari	Abon dan Kepupuk Ikan	Pengolah	10 Orang	ADA
2	Karya Usaha Bersama	Abon dan Kepupuk Ikan	Pengolah	10 Orang	ADA
3	Tirta Jaya	Kerupuk Ikan	Pengolah	10 Orang	ADA
4	Berkah	Olahan Ikan	Pengolah	10 Orang	ADA
5	Cita Rasa	Amplang Ikan	Pengolah	10 Orang	TIDAK
6	Berkah Bersama	Amplang Ikan	Pengolah	11 Orang	TIDAK
7	Hidayah	Kerupuk Udang	Pengolah	10 Orang	TIDAK
II.	Kecamatan Paringin Selatan				
1	Teratai	Bakso Ikan	Pengolah	8 Orang	ADA
2	Mawar	Nugget Ikan	Pengolah	9 Orang	ADA
3	Sejahtera I	Ikan olahan	Pengolah	11 Orang	TIDAK



No.	Nama Kelompok	Bidang Usaha	Kelompok Usaha	Jumlah Anggota	SK Badan Hukum
4	Sejahtera II	Abon olahan	Pengolah	11 Orang	TIDAK
III.	Kecamatan Paringin				
1	Cipta Rasa	Bakso Ikan, Nugget Ikan,Mpek-mpek	Pengolah	10 Orang	ADA
2	An-Nisa	Ikan olahan	Pengolah	11 Orang	ADA
3	Melati	Pedagang Ikan	Pemasar	10 Orang	TIDAK
4	Hasil Usaha Bersama	Pedagang Ikan	Pemasar	10 Orang	TIDAK
5	Hasil Rezeki Bersama	Pedagang Ikan	Pemasar	10 Orang	TIDAK
6	Matahari Bersinar	Abon Ikan dan Sambal Sepat	Pengolah	10 Orang	TIDAK
IV.	Kecamatan Batumandi				
1	UKM Keluarga Sejahtera	Stik Ikan	Pengolah	11 Orang	ADA
2	Mawar	Olahan Ikan	Pengolah	11 Orang	TIDAK
3	Jelawat	Pedagang Ikan	Pemasar	10 Orang	ADA
4	Haruan	Pedagang Ikan	Pemasar	10 Orang	ADA
V.	Kecamatan Juai				
1	Tirta sari	Bakso Ikan	Pengolah	15 Orang	ADA
2	Kantil	Abon Ikan	Pengolah	10 Orang	TIDAK
3	Berlian	Pentol Ikan	Pengolah	17 Orang	ADA
4	Pelangi I	Crispy Kulit Pisang Ikan Patin, Kerupuk Waluh Ikan Patin	Pengolah	15 Orang	TIDAK
5	Pelangi II	Abon Ikan	Pengolah	15 Orang	TIDAK
VI.	Kecamatan Awayan				
1	Sepakat	Nugget Ikan	Pengolah	15 Orang	ADA
2	Cahaya Indah	Kerupuk, Resolis Ikan	Pengolah	10 Orang	TIDAK
3	Sumber Rezeki	Pedagang Ikan	Pemasar	10 Orang	ADA
4	Budi Mulya	Pedagang Ikan	Pemasar	7 Orang	ADA

Sumber: DKPPP Kabupaten Balangan, 2022

2.1.3.3 Penunjang Urusan

A. Perencanaan Pembangunan

Tabel 2.119
Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Perencanaan Pembangunan							
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada



1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Balangan, 2022

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Perencanaan Pembangunan Daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Pada orientasi proses, perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas bawah dan bawah-atas. Pada orientasi substansi, penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

B. Keuangan

Tabel 2.120
Capaian Indikator Keuangan
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2. Keuangan							
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SILPA	3,93%	16,74%	7,28%	10.74%	21,40 %	9,95%
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	3,93%	16,74%	7,28%	10.74%	21,40 %	9,95%
2.4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	21,18%	20,38%	22,57%	20,18%	20,22 %	20,73%
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	13,10%	13,61%	12,42%	14,26%	20,87 %	13,71%



	Persentase belanja kesehatan (10%) tanpa memperhitungkan alokasi belanja Gaji	9,07%	9,72%	9,74%	10,39%	14,97 %	9,60%
2.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (BL : BTL)	53% : 47%	55% : 45%	56% : 44%	56% : 44%	49,44 % : 50,56 %	52,54% : 47,46%
2.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (Belanja bagi hasil ke pemerintah desa : Total APBD)	0,06%	0,06%	0,08%	0,08%	0,09%	0,17%
	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (Belanja bagi hasil ke pemerintah desa : Total PAD + Retribusi) Minimal 10% dari yang telah dianggarkan	10,00%	10,00%	10,00%	10,02%	10,01 %	10,01%
2.9	Penetapan APBD (Murni/Perubahan)	29 Desemb er 2015 /18 Oktober 2016	30 Desemb er 2016 /13 Septem ber 2017	27 Desemb er 2017 /16 Oktobe r 2018	28 Desemb er 2018 /10 Septem ber 2019	17 Desemb er 2019 /25 Septe mber 2020	23 Desemb er 2020 /30 Agustus 2021

Sumber : BPKDAD Balangan, 2022

Audit eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas mandiri. Berdasarkan table diatas Opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Balangan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 adalah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP adalah opini terbaik setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Opini ini berarti laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintahan Kabupaten Balangan sudah sesuai dengan pedoman atau standar akuntansi keuangan yaitu laporan keuangan lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, standard umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja dan laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten.

Harapannya WTP ini akan selalu dipertahankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan ini sudah dibuktikan dari upaya Pemerintah Kabupaten

Balangan untuk mempertahankan Opini BPK dengan WTP 9 (sembilan) tahun berturut-turut. Dalam rangka menjaga sustainable Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar lebih baik dan optimal ke depan maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan lagi berbagai upaya berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan sensus aset untuk mengetahui aset yang dimiliki pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan penggunaannya sehingga aset bisa dijadikan nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD).
- 2) Melakukan koordinasi/kerjasama dengan BPN untuk mempercepat proses penerbitan legalitas penguasaan atas tanah yang dimiliki pemerintah daerah.
- 3) Mempercepat proses legalitas standar operasional prosedur pengelolaan aset, sehingga bisa diinformasikan secara luas ke seluruh SKPD pengelola aset.
- 4) SILPA dapat diartikan dengan sisa lebih pembiayaan tahun berjalan atau sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. SILPA diberikan batasan sebagai selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan 0 (nol). Persentase SILPA tahun 2021 dimaknai dua hal, pertama bahwa daya serap pelaksanaan APBD kurang maksimal atau lebih sering kita kenal dengan kinerja birokrasi kurang maksimal, kedua perencanaan APBD disusun dengan estimasi yang kurang matang sehingga antara target pendapatan dan belanja tidak balance.

Berdasarkan tabel diatas persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Balangan dari tahun 2016 sampai 2021 bersifat fluktuatif, tahun 2021 terjadi penurunan SILPA yang signifikan dibandingkan tahun 2020 dari persentase SILPA tahun 2020 sebesar 21,40% menjadi sebesar 9,95,40% di tahun 2021. Menurunnya persentase SILPA tahun 2021 terhadap tahun 2020 dikarenakan semakin mulai stabil dan maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap SKPD di kabupaten Balangan.

Berdasarkan tabel diatas persentase program dan kegiatan yang tidak terlaksana adalah 0%. Persentase 0% menggambarkan bahwa program dan kegiatan yang ada di Renja tahun 2021 untuk masing-masing SKPD sudah dilaksanakan sesuai dengan Renja tahun 2021 untuk masing-masing SKPD.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 mengamanatkan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20%. Alokasi anggaran fungsi

pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu bentuknya adalah dengan mengalokasikan anggaran dari tahun 2016 -2021 diatas 20%, bahkan berdasarkan data terjadi peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021, dari 20,22% menjadi 22,73%.

Badan kesehatan dunia (WHO) telah memasang patokan bahwa alokasi anggaran kesehatan setiap Negara 15% dari total APBN sedangkan Undang-Undang Kesehatan pada pasal 171 ayat 1 berbunyi pengalokasian anggaran kesehatan untuk kabupaten/kota minimal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji sebesar 10%. Alokasi anggaran kesehatan mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu bentuknya adalah dengan komitmen untuk alokasi anggaran kesehatan tanpa memperhitungkan alokasi belanja gaji sudah diatas 10% dan hal ini sudah berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan tabel diatas, Belanja Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Kabupaten Balangan tahun 2021 sebesar 10,1%. Belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa sudah melewati batas minimal 10% dari yang sudah dianggarkan. Besaran belanja langsung merupakan gambaran dari komitmen pemerintah terhadap pembangunan masyarakat. Proporsi ideal belanja langsung dan tidak langsung minimal 60%:40%. Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung Kabupaten Balangan di tahun 2021 sebesar 52,54% : 47,46% yang artinya proporsi cukup ideal.

Berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005 penetapan APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, artinya penetapan APBD tahun 2021 paling lambat 1 desember 2020. Berdasarkan tabel diatas penetapan APBD murni Kabupaten Balangan tertanggal 23 Desember 2020. Tanggal penetapan APBD murni tersebut menggambarkan keterlambatan penetapannya selama 23 hari.

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.121
Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021



No.	Bidang Urusan / Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	31.98 JP	48.44 JP	20 JP	20 JP	32,79 JP	31,23 JP
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	21.70%	36.00%	30.50%	35.59%	21,97%	76,25 %
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	46.79%	48.32%	44.01	47.77%	39,83%	35,70 %
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	24	38	38	39	31	24
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	120	168	165	165	150	133
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2.274	2.058	1.994	1.822	1.752	2014

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan, 2022

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 beserta perubahannya telah mengamanatkan bahwa setiap PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran (JP) setiap tahun. Amanat tersebut secara kuantitatif dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Khusus pada tahun 2021, rata-rata lama pegawai memperoleh pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan sebanyak 31,23 JP. Angka rata-rata dimaksud menunjukkan bahwa JP minimal pengembangan kompetensi pegawai yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah sesuai amanat peraturan perundangan telah dapat dipenuhi. Akan tetapi, pemenuhan hak tersebut secara kualitatif masih harus mendapatkan perhatian serius dari pimpinan dan pemangku kepentingan. Pengembangan yang dilaksanakan harus dapat dipastikan terlaksana secara merata dan proporsional bagi setiap pegawai.

Di samping pemenuhan JP minimal, terjadi peningkatan sangat signifikan pada indikator persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Definisi operasional indikator tersebut mengacu pada diklat wajib yang harus diikuti oleh calon atau pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Capaian indikator dimaksud pada tahun 2021 adalah 76,25% (tidak termasuk Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan). Adapun capaian

indikator Pejabat Struktural yang telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan pada tahun 2021 sebesar 35,70%. Di mana dari 563 orang Pejabat Struktural pada berbagai level pada Pemerintah Kabupaten Balangan, 201 orang diantaranya telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV. Capaian dimaksud mengalami kecenderungan (*trend*) penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan berbagai alasan, antara lain, pandemi Covid-19 dan kebijakan *refocusing* anggaran untuk menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi.

Tren jumlah dan keterisian formasi jabatan pimpinan tinggi (JPT), administrator, dan pengawas mengalami penurunan pada tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Balangan melakukan perampangan jumlah SKPD, sebagai konsekuensi pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021. Praktis jumlah SKPD pada Pemerintah Kabupaten Balangan hanya berjumlah 30 (tiga puluh) satuan kerja (sudah termasuk 8 kecamatan). Tren dimaksud berbanding terbalik dengan Jabatan Fungsional yang cenderung mengalami peningkatan signifikan dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi, salah satunya penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagai implikasi terbit dan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021.

Pimpinan Daerah telah berkomitmen bahwa pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, khususnya jabatan struktural, dilakukan berdasarkan prinsip sistem merit yang menonjolkan aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang adil tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Balangan melalui satuan kerja terkait melakukan *assessment* untuk pengisian JPT yang bekerja sama dengan lembaga profesional ataupun perguruan tinggi. Hasilnya akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memperoleh rekomendasi. Sedangkan untuk jabatan-jabatan di bawah level JPT, seperti Administrator dan Pengawas, fungsi dan peran Tim Penilai Kinerja Kabupaten Balangan akan dioptimalkan. Apabila suatu saat dimungkinkan secara anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan lainnya tersedia, maka akan dilakukan pula *assessment* untuk pengisian jabatan-jabatan tersebut.

D. Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.122
Capaian Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
4. Penelitian dan pengembangan						
4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100%	100%	100%	70%	100%
4.2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	100%	100%	100%	100%	100%
4.3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Balangan, 2022

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan, sebagaimana dibunyikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 386 ayat 1 “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah dapat melakukan inovasi”. Daerah harus mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, dan daya saing daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan diturunkan ke dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah.

Sama pentingnya dengan inovasi, kegiatan penelitian dan pengembangan diharapkan selalu dijadikan dasar landasan dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Diperlukan upaya penelitian dan pengembangan terhadap berbagai isu aktual dan strategis sebagai upaya pemecahan persoalan-persoalan serta tantangan pembangunan daerah. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Balangan perlu memfasilitasi kegiatan kelitbangan dan mendorong akselerasi inovasi daerah.

Berdasarkan tabel persentase pemanfaatan hasil kelitbangan tahun 2021 dengan capaian sebesar 100%, maksud dari capaian tersebut adalah hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sebanyak 8 kajian dari 8 kajian yang ditargetkan dalam Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan tahun 2021.

Adapun delapan hasil kajian kelitbangan yang ditindaklanjuti tersebut adalah sebagai berikut

1. Kajian Bidang Usaha Milik Desa
2. Penyusunan Siteplan Pariwisata Desa
3. Kajian Analisis Kebutuhan Daerah Kabupaten Balangan
4. Kajian Kelayakan Bidang Usaha PT. Asabaru Daya Cipta Lestari
5. Studi Kelayakan pengembangan satelit balai benih ikan
6. Studi Kelayakan/ FS Pengembangan Rumah Sakit Balangan
7. Studi Kelayakan/ FS Istana Anak Yatim .
8. Penyusunan Masterplan Tata Kota Paringin

Hasil kelitbangan tersebut diatas adalah berupa rekomendasi dan dokumen perencanaan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh SKPD teknis dalam bentuk perencanaan pada level teknis dan program kegiatan SKPD di tahun selanjutnya.

Berdasarkan tabel persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Balangan untuk tahun 2021 sebesar 100% atau sebanyak 22 SKPD dari 22 jumlah SKPD di Kabupaten Balangan. Terkait hal tersebut Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Bappedalitbang Kabupaten Balangan mendorong dan memfasilitasi seluruh SKPD, BLUD/UPT puskesmas, Kecamatan, dan Desa untuk terus melanjutkan implementasi/ pelaksanaan inovasi, mengembangkan, mendiseminasikan inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan. Upaya fasilitasi penerapan inovasi bertujuan untuk meningkatkan capaian indeks inovasi daerah sebagai bentuk diseminasi dalam mendorong budaya inovasi di setiap perangkat daerah dilakukan melalui :

1. Membangun jejaring dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal
2. Melakukan sosialisasi/ ekspose awal pemenuhan indeks inovasi daerah tahun berjalan
3. Menyelenggarakan lomba inovasi Balangan setiap tahun (kategori inovasi SKPD, BLUD/ UPT, Kecamatan dan Desa)
4. Pelatihan dan Pendampingan penyusunan indeks inovasi daerah
5. Melakukan seleksi by sistem dan penilaian terhadap finalis
6. Pelaporan/ penginputan indeks Inovasi Daerah pada aplikasi indeks inovasi Kemendagri dan melalui ajang Innovative Government Award (IGA)

7. Menyusun regulasi daerah yang ditetapkan ke dalam bentuk Peraturan Bupati (Peraturan Bupati dan surat keputusan Bupati Balangan)
8. Pengesahan hasil penilaian Lomba Inovasi Balangan
9. Pemberian Penghargaan Lomba Inovasi Balangan bagi peserta dan pemenang

Berdasarkan tabel persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah tahun 2021 untuk Kabupaten Balangan sebesar 100%. Maksud dari capaian disini adalah dari 25 inovasi yang diikutsertakan dalam ajang *Innovation Government Award* (IGA), terbagi menjadi 15 inovasi pelayanan publik; 9 inovasi tata kelola pemerintahan dan 1 inovasi daerah lainnya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 25 kebijakan inovasi tersebut hingga saat ini masih dan terus diimplementasikan oleh SKPD, BLUD/UPT Puskesmas, dan beberapa inovasi telah dikembangkan (*update* dan *upgrade*) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini. Kebijakan inovasi yang diterapkan sudah memenuhi 20 kriteria dan parameter penilaian Indeks Inovasi Daerah dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada tahun 2021 Kabupaten Balangan mendapatkan predikat daerah **inovatif** dengan skor nilai 42. Penurunan predikat dan nilai indeks inovasi daerah dari tahun sebelumnya (2020) disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah kualitas proposal dan keterisian parameter/ indikator penilaian indeks inovasi daerah serta adanya perubahan parameter/ indikator IGA 2021. Namun permasalahan inovasi di Kabupaten Balangan terdiri dari :

1. Belum optimalnya metode penjangkaran inovasi secara terpadu yang didukung oleh pemangku kebijakan dan stakeholder.
2. Belum optimalnya jejaring inovasi melalui peran admin inovasi dan pelaku/pencipta karya inovasi di masing – masing OPD.
3. Belum adanya event pendorong munculnya inovasi-inovasi dalam bentuk kegiatan lomba inovasi di daerah.
4. Kurangnya pengetahuan dalam pengisian proposal dan indikator inovasi daerah.

Sehingga kedepannya perlu lebih didorong lagi indeks inovasi Kabupaten Balangan melalui berbagai upaya diantaranya adalah



- a. Mendorong ide-ide kreatif pada pemerintahan yakni mendorong munculnya inovasi-inovasi pada SKPD yang dikenal dengan “one innovation one agency” melalui kebijakan kepala daerah
- b. Pembentukan Tim Pengelola Klinik Inovasi Daerah (KLINIK INOBA) terdiri dari Bappedalitbang, Diskominfo dan Bagian Organisasi Setda, Bagian Pemerintahan, Bagian Humas Prokopim, Bagian Hukum, BKPSDM, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan kerjasama Desa (DINSOSPPPAPMD)
- c. Perlu diperhatikan dalam penginputan dan kelengkapan data dukung, berupa: perda/perkada, video inovasi, manfaat inovasi, survei kepuasan, layanan pengaduan dan sebagainya
- d. Pemerintah daerah agar lebih aktif melakukan sosialisasi indeks inovasi daerah
- e. Perlu diperhatikan anggaran pembinaan inovasi daerah, seperti untuk pelaksanaan pelatihan inovasi, disseminasi, replikasi dan lomba inovasi daerah.

E. Pengawasan

Urusan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkueren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.123
Capaian Indikator Pengawasan
Kabupaten Balangan Tahun 2016 - 2021

NO	Bidang Urusan/Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5. Pengawasan							
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	85%	92,54%	84,41%	87,82%	90%	91%
5.2	Persentase pelanggaran pegawai	-	-	0,06%	0,19%	0,03%	0,17%
5.3	Jumlah temuan BPK	30	49	49	75	47	53

Sumber : Inspektorat Kabupaten Balangan, 2022

Urusan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung urusan pemerintah konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pejabat daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.

Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen untuk menindak lanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan diterima. Berdasarkan tabel diatas untuk persentase tindak lanjut temuan terus meningkat dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti berdasarkan berta acara rekonsiliasi dengan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan tahun 2018 dari jumlah rekomendasi sebanyak 571 terdapat 482 rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti, tahun 2019 dari jumlah rekomendasi sebanyak 624 terdapat 548 rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti, pada tahun 2020 dari jumlah rekomendasi sebanyak 703 terdapat 627 rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti. Pada tahun 2021 memiliki capaian sebesar 91 % dari target 95% realisasi 87% atau dalam kategori Tinggi. Berdasarkan hasil rekonsiliasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan semester II yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2021 terdapat jumlah temuan sebanyak 342, jumlah rekomendasi sebanyak 756 dengan status pemantauan tindak lanjut dengan kategori sesuai atau selesai sebanyak 656, belum sesuai sebanyak 88 rekomendasi, belum ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi dan tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Kepegawaian pada pasal 3 bahwa setiap ASN wajib masuk kerja dan mentaati jam kerja. Berdasarkan tabel diatas untuk persentase pelanggaran pegawai bersipat fluktuatif. Persentase pelanggaran pegawai tahun 2020 sebesar 0,03%, maksud dari capaian tersebut adalah dari 2.949 jumlah seluruh ASN di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Balangan terdapat 1 orang ASN yang mendapatkan sanksi kepegawaian dengan jenis pelanggaran disiplin yaitu pelanggaran terhadap kewajiban tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja, dan memperoleh keputusan disiplin ringan. Sedangkan pada tahun 2021 persentase pelanggaran pegawai sebesar 0,17%, dimana terdapat pelanggaran disiplin yang dilaporkan dan ditindaklanjuti berjumlah 5 kasus dari

2.934 jumlah ASN. Jika berdasarkan indikator terkait kedisiplinan ASN maka persentase ASN disiplin sebesar 99,85% pada tahun 2021.

Pada tahun 2020 dari hasil pemeriksaan BPKRI pada hari senin sampai dengan jumat tanggal 20-22 desember tahun 2021 bertempat di kantor BPKRI perwakilan Kalsel dilaksanakan rekonsiliasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dimana terdapat 20 temuan dengan 53 rekomendasi.

F. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahun 2021 data kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan terkait dengan menerbitkan dokumen-dokumen legislasi DPRD, telah dibahas sebanyak 26 Raperda dari 28 raperda yang diusulkan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi pangan rumah tangga di Kabupaten Balangan antara tahun 2016 hingga 2020 secara konsisten mengalami kenaikan dari angka 42,65% pada tahun 2016, kemudian naik menjadi 50,38% pada tahun 2017, naik menjadi 54,13% pada tahun 2018 dan sampai akhirnya naik hingga 55,26% pada tahun 2019 dan naik di tahun 2020 sebesar 55,27%. Namun pada tahun 2021 konsumsi pangan menurun menjadi 52,88%.

Masyarakat Kabupaten Balangan menjadikan makanan dan minuman jadi sebagai jenis konsumsi yang paling diminati, dengan tingkat pengeluaran sebesar 18,08% di tahun 2021. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding konsumsi utama masyarakat pada umumnya seperti padi-padian dan jenis pangan lain seperti umbi-



umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran dan lain sebagainya yang angkanya di bawah 7%. Hal ini menunjukkan masyarakat Balangan cenderung memilih cara praktis dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Hal ini dapat disebabkan jumlah jam kerja masyarakat semakin tinggi, meningkatnya produksi dan ketersediaan makanan dan minuman jadi di tengah masyarakat kabupaten Balangan saat ini, serta gaya hidup masyarakat yang sudah mulai berubah.

Faktor gaya hidup juga berpengaruh pada peningkatan konsumsi tembakau dan sirih yang juga cenderung naik secara konsisten dari 4,63% pada tahun 2015 hingga 6,42% pada tahun 2021. Angka tersebut tergolong tinggi dibanding jenis pangan lain seperti padi, umbi-umbian, daging, sayur-sayuran, kacang-kacangan, telur, susu dan buah-buahan.

Tabel 2.124
Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga
Kabupaten Balangan 2015-2021

No	Kelompok Barang	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi (Ribu Rp)	X	X	X	57,198	547,068	627,078	638,764
B	Distribusi Pengeluaran Konsumsi (%)	46.76	42.65	50.38	54,13	55,2	55,27	52,88
1	Padi-padian	6.96	5.97	5.73	6.08	6.34	6,35	3,1
2	Umbi-umbian	0.12	0.14	0.19	0.17	0.18	5,95	1,65
3	Ikan / udang / cumi / kerrang	5.42	4.91	5.35	5.55	5.66	0,18	1,54
4	Daging	1.43	1.16	1.76	1.53	1.74	0,27	1,42
5	Telur dan Susu	2.98	2.45	2.89	2.68	3.2	5,66	1,95
6	Sayur-sayuran	2.3	2.28	2.64	2.7	2.89	5,78	1,89
7	Kacang-kacangan	0.69	0.48	0.56	0.73	0.83	1,74	0,96
8	Buah-buahan	2.43	2.17	1.93	3.16	3.09	1,73	1,10
9	Minyak dan Lemak	1.52	1.21	1.19	1.44	1.54	3,2	1,5
10	Bahan Minuman	1.65	1.66	1.76	1.68	1.95	2,81	1,55
11	Bumbu-bumbuan	1.13	0.9	0.79	1.07	0.96	2,89	19,8
12	Konsumsi Lainnya	1.38	1.38	1.37	1.46	1.5	3,40	18,08
13	Makanan dan Minuman Jadi	14.12	13.27	19.13	21.17	19.8	0,84	5,56
14	Tembakau dan sirih	4.63	4.67	5.09	4.73	5.56	0,83	6,42
Jumlah		46.76	42.65	50.38	54.15	55.24	55,27	52,88

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, 2022

B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga

Perumahan dan fasilitas rumah tangga menjadi konsumsi non pangan tertinggi pada tahun 2015-2021 dengan kisaran angka rata-rata 24,66%. Peringkat kedua konsumsi non pangan tertinggi pada konsumsi aneka barang dan jasa yang



angka rata-ratanya 9,84%. Secara umum konsumsi masyarakat di Kabupaten Balangan masih di area kebutuhan mendasar manusia pada umumnya yakni sandang, pangan dan papan.

Tabel 2.125
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga
Kabupaten Balangan 2015 – 2021

No	Kelompok	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Rata-rata Pengeluaran (Ribu Rp)	x	x	X	483,884	442,870	559,112	569,272
B	Distribusi Pengeluaran (%)	53.21	57.36	49.62	45.87	44.73	44,73	47,12
1	Perumahan & Fasilitas Rumah tangga	21.55	3.65	19.4	21.35	22.08	22.08	24,66
2	Aneka Barang dan Jasa	8.96	19.05	9.82	9.32	8.89	8,89	9,84
3	Pakaian, Alas kaki dan Tutup Kepala	2.3	9.9	3.16	3.07	3.03	3,03	3,03
4	Barang Tahan Lama	16.14	18.48	12.98	7.38	5.06	5,06	4,54
5	Pajak, Pungutan dan Asuransi	2.16	5.1	2.7	4.11	3.82	3,82	4,57
6	Keperluan Pesta dan Upacara / Kenduri	2.1	1.18	1.56	0.64	1.85	1,85	0,48
Jumlah		53.21	57.36	49.62	45.87	44.73	44,73	47,12

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, 2022

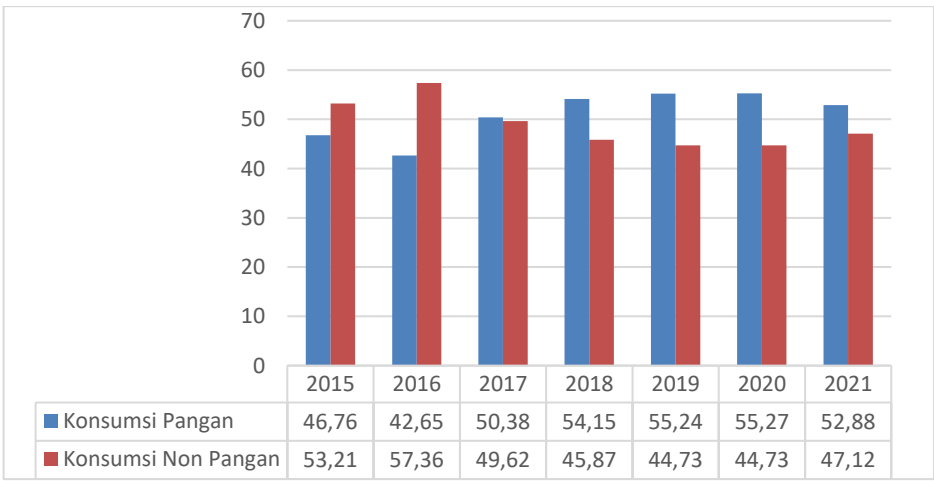
Secara umum, pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat Kabupaten Balangan persentasenya cukup fluktuatif. Pada tahun 2015 dan 2016, konsumsi non pangan di Kabupaten Balangan angkanya lebih tinggi dibandingkan konsumsi pangan. Artinya, pada tahun-tahun tersebut, masyarakat di Kabupaten Balangan tercukupi kebutuhan fisiologisnya sehingga mampu memberi porsi lebih pada konsumsi non pangannya. Namun, pada tahun 2017 angka konsumsi non pangan menurun dari 57,36% menjadi 49,62%, kemudian semakin turun ke angka 45,87% pada tahun 2018 dan 44,73% pada tahun 2019 dan 2020. Artinya masyarakat cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan fisiologi (pangan) yang lebih bersifat primer dibanding non pangan yang bersifat sekunder. Namun pada tahun 2021 konsumsi non pangan meningkat menjadi 47,12. Peningkatan konsumsi non

pangan didominasi oleh konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 24,66%.

C. Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat

Secara umum, pengeluaran konsumsi non-pangan masyarakat Kabupaten Balangan persentasenya cukup fluktuatif. Pada tahun 2015 dan 2016, konsumsi non-pangan di Kabupaten Balangan angkanya lebih tinggi dibandingkan konsumsi pangan. Artinya, pada tahun-tahun tersebut, masyarakat di Kabupaten Balangan tercukupi kebutuhan fisiologisnya sehingga mampu memberi porsi lebih pada konsumsi non-pangan. Namun, pada tahun 2017 angka konsumsi non-pangan menurun dari 57,36% menjadi 49,62%, kemudian semakin turun ke angka 45,87% pada tahun 2018 dan 44,73% pada tahun 2019 dan tahun 2020. Artinya pada tahun 2017 - 2020 masyarakat cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan fisiologi (pangan) yang lebih bersifat primer dibanding non pangan yang bersifat sekunder. Namun pada tahun 2021 konsumsi non pangan meningkat menjadi 47,12%.

Gambar 2.24
Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat
Di Kabupaten Balangan 2015 – 2021



Sumber : BPS Kabupaten Balangan, 2020

D. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani merupakan nilai tukar (*term of trade*) antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan factor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam %. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani (It) dan

barang dan jasa yang dikonsumsi petani (Ib). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan penambahan pendapatan petani sangat erat. Karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani.

Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:

- $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas/breakeven. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan
- $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Berdasarkan BPS Kabupaten Balangan, maka NTP Kalimantan Selatan dianggap mampu mewakili keadaan di kabupaten tempat komoditi sektor pertanian berasal. Nilainya dari tahun 2016 sampai dengan Januari 2021, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.126
Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Selatan,
Januari - Desember dan rata-rata Tahun 2016 - 2021 (2018=100)

Bulan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	99,04	98,24	97,03	95,22	102,61	105,89
Februari	98,82	98,56	97,52	95,79	101,99	106,21
Maret	97,67	97,38	96,31	95,05	101,10	107,97



April	97,54	96,73	94,83	94,61	98,64	107,87
Mei	97,22	96,67	94,31	95,88	98,39	107,32
Juni	97,04	96,06	94,66	95,47	98,44	106,71
Juli	96,69	95,47	94,02	95,07	98,87	106,54
Agustus	96,22	95,89	94,40	94,94	99,64	106,35
September	96,86	96,09	95,46	95,00	100,91	107,89
Oktober	97,52	96,56	95,50	94,49	102,31	107,93
November	97,76	96,26	95,33	95,50	103,53	109,52
Desember	97,84	96,35	95,43	96,72	105,37	110,80
Rata – rata	97,52	96,69	95,40	95,31	105,37	107,59

Sumber : BPS Kalsel, data diolah

Tabel 2.127
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2016 s.d. 2021
Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Yang Diterima Petani (It)			120,40	124,84	111.09	115,08
2	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)			126,21	130,98	105.43	106,96
3	Rasio	97,52	96,69	95,40	95,31	105.37	107,59

Pada Tahun 2021, rata-rata NTP Kalimantan Selatan tercatat sebesar 107,59 atau naik 10,06 % jika dibandingkan NTP pada Tahun 2020 yang mencapai 105,37 %. Selanjutnya pada Desember 2021, NTP Kalimantan Selatan tercatat sebesar 110,80 atau naik 4,43 % jika dibandingkan NTP pada Desember 2020 yang mencapai 105,37 %. Kenaikan NTP ini disebabkan indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 3,99 %, sementara indeks harga yang dibayar petani (Ib) hanya naik sebesar 1,53 %.

Berdasarkan data satu tahun terakhir terjadi peningkatan nilai NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.

Sedangkan jika berdasar target NTP pada RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2021 sebesar 100,99 %, dibandingkan perolehan nilai NTP Kalimantan Selatan sebesar 107,59 % yang diasumsikan dapat mewakili nilai NTP Kabupaten Balangan, maka capaian kinerja RKPD 2021 adalah 106,53 %.

2.1.4.2 Iklim Berinvestasi

A. Kemudahan Perizinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk. Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam bidang pelayanan perizinan tersebut, maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Balangan. Dalam perkembangannya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*online single submission*-OSS). Sistem ini memungkinkan investor dan calon investor mengurus izin usaha secara online tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga UKM. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut maka jenis pelayanan perizinan yang dikelola oleh DPMPT tahun 2019 dipilah menjadi pelayanan perizinan dengan OSS dan pelayanan perizinan non OSS, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.128.

Tabel 2.128
Produk Layanan OSS DPMPTSP Beserta Lama Waktu Pelayanan
Kabupaten Balangan

No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
1	Izin Usaha Perkebunan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-



No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
2	Izin Usaha Tanaman Pangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
3	Izin Usaha Hortikultura	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
4	Izin Usaha Peternakan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
5	Pendaftaran usaha Perkebunan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
6	Pendaftaran usaha Tanaman Pangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
7	Pendaftaran usaha Budi Daya Hortikultura	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
8	Pendaftaran usaha Peternakan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
9	Izin Usaha Industri	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
10	Izin Usaha Kawasan Industri	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
11	Izin Perluasan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
12	Izin UsahaJasa Penunjang Tenaga Listrik	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
13	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
14	Izin Operasi	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
15	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
16	Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
17	Izin Penyelenggaraan Saeana Perkeretaapian Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
18	Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
19	Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Orang	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
20	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
21	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
22	Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau Lintas Antar Propinsi dan atau Antar Negara	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
23	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
24	Persetujuan Hasil Analisis Dampak lalu Lintas	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
25	Pengoperasian Angkutan Barang Khusus	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
26	Izin Pelabuhan Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
27	Izin Usaha Angkutan Laut	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
28	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
29	Izin Usaha Angkutan Laut di Perairan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
30	Persetuan Kegiatan Kerja Keruk	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
31	Penetapan Terminal Khusus yang terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-



No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
32	Izin mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
33	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
34	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
35	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
36	Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
37	Izn Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
38	Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
39	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
40	Izin Toko Alat Kesehatan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
41	Izin Mendirikan Rumah Sakit	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
42	Izin Operasional Rumah Sakit	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
43	Izin Operasional Klinik	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
44	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
45	Izin Apotek	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
46	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
47	Izin Toko Obat	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
48	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah tangga	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
49	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
50	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
51	Ijin Lembaga Pelatihan Kerja	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
52	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
53	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
54	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hutan Produksi	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
55	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
56	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
57	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-



No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
58	Izin Pembuangan Air Limbah	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
59	Surat Izin Usaha Perikanan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
60	Izin Pelaksanaan Reklamasi	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
61	Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
62	Surat Izin Penangkapan ikan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
63	Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
64	Tanda Daftar Bagi Pembudi daya ikan Kecil	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
65	Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
66	Tanda Daftar Usaha Penggaraman Bagi Petambak garam kecil	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
67	Buku Kapal Perikanan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
68	Ijin Usaha Jasa Kontruksi	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
69	Surat Ijin Peil Banjir	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
70	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
71	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
72	Pengesahan Pertelaan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
73	Sertifikat HMRS an Developer	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
74	Sertifikat Hak Milik HMRS atas Nama Pembeli	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
75	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
76	Izin Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
77	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
78	Izin Pembukaan Kantor cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
79	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
80	Surat Ijin Perdagangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
81	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
82	Tanda Daftar Gudang	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-

Sumber : DPMPST Kabupaten Balangan, 2021

2.1.4.3 Sumber Daya Manusia

A. Rasio Ketergantungan

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan terus mengalami penambahan. Jika pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Balangan berjumlah 124.913 jiwa, di tahun 2021 jumlahnya naik menjadi 132.213 jiwa. Kenaikan tertinggi terjadi di



tahun 2017 dengan penambahan penduduk sebanyak 2.599 jiwa, atau 2,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya menekan laju pertumbuhan penduduk harus terus dilakukan karena ledakan penduduk dapat berdampak buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Selain itu, yang tidak kalah penting, adalah menjaga rasio ketergantungan penduduk. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif. Usia penduduk tidak produktif berkisar antara 0-14 tahun, dan berusia 65 tahun ke atas. Keduanya disebut juga dengan penduduk bukan angkatan kerja. Sedangkan penduduk usia produktif berkisar antara 15-64 tahun dan biasa disebut juga dengan penduduk angkatan kerja.

Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Balangan sebesar 46,51 % pada tahun 2021, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak kurang lebih 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 46,51 ini tersusun oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 36.787 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 5.185. Rasio ketergantungan ini termasuk kategori tinggi terutama penduduk muda, namun ini merupakan bonus demografi sebagai peluang yang dimiliki Kabupaten Balangan di masa yang akan datang.

Banyaknya usia produktif ini membawa konsekuensi dalam upaya penyediaan lapangan kerja, menumbuhkan jiwa wirausaha maupun fasilitasi pengembangan usaha. Disisi lain menjadi kewajiban pula bagi Pemerintah Kabupaten Balangan menyediakan fasilitas ramah lansia misalnya penyediaan posyandu lansia.

Tabel 2.129
Rasio Ketergantungan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

Tahun	Penduduk kelompok Umur			Rasio Ketergantungan (%)
	Penduduk Usia < 15 th	Penduduk Usia > 15 th & < 65 th	Penduduk Usia > 65 th	
2016	33,413	87,589	3,911	42.61
2017	32,910	90,000	4,338	41.39
2018	34,124	90,954	4,878	42.88
2019	34,331	92,033	4,870	42.59
2020	33,707	93,692	4,704	41.00
2021	36,787	90,241	5,185	46.51

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, 2022

B. Rasio Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Penduduk di Kabupaten Balangan sebagian besar mencari nafkah dengan mata pencapaian sebagai wirausahawan, baik yang berusaha sendiri, dibantu buruh tetap, dan dibantu buruh tidak tetap. Namun mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 jumlahnya berkisar 56,3%, menjadi 54,94% pada tahun 2021.

Selain berwirausaha, penduduk Kabupaten Balangan juga ada yang bekerja sebagai buruh/pegawai/karyawan dan pekerja bebas serta pekerja keluarga. Jumlah penduduk yang bekerja pada kelompok ini pada tahun 2021 sebanyak 45,06%, atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 43,71%.

Tabel 2.130
Rasio Penduduk Menurut Mata Pencapaian (%)

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Berusaha sendiri	30.56%	37.20%	31.45%
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	19.77%	17.16%	22%
3	Berusaha dibantu buruh tetap	2.15%	1.94%	1.49%
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	21.73%	25.79%	24.36%
5	Pekerja bebas	4.15%	2.07%	1.66%
6	Pekerja keluarga	21.64%	15.85%	19.04%
	Total	100%	100%	100%

Sumber : BPS Kab. Balangan, 2022

2.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, capaian indikator TPB di Kabupaten Balangan masih memerlukan upaya dalam pencapaiannya. TPB merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) yang merupakan penjabaran dari diratifikasinya berbagai substansi Sustainable Development Goals (SDGs). Berdasarkan hasil analisis indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Balangan, dari 220 indikator dapat dibagi menjadi empat pilar, yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam TPB memiliki capaian yang berbeda-beda seperti pada Tabel 2.131.



Tabel 2.31 Menunjukkan capaian indikator masing-masing TPB di Kabupaten Balangan berdasarkan pilar dan tujuan. Indikator TPB yang mencapai target sejumlah 84 indikator, belum mencapai target 42 indikator, tidak ada data sebanyak 91 indikator, dan tidak ada di wilayah kajian sebanyak 3 indikator.

Tabel 2.131 Capaian indikator masing-masing TPB Kabupaten Balangan

No.	Tujuan	Mencapai target	Belum Mencapai target	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian	Total
PILAR SOSIAL						
TPB1	Tanpa Kemiskinan	8	6	10	0	24
TPB2	Tanpa Kelaparan	6	5	0	0	11
TPB3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	15	7	12	0	34
TPB4	Pendidikan Berkualita	2	7	4	0	13
TPB5	Kesetaraan Gender	9	4	1	0	14
PILAR EONOMI						
TPB7	Energi Bersih & Terjangkau	0	0	2	0	2
TPB8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	7	3	9	0	19
TPB9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	7	0	3	3	13
TPB10	Berkurangnya Kesenjangan	5	3	3	0	11
TPB17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	8	1	7	0	16
PILAR LINGKUNGAN						
TPB6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	3	2	13	0	18
TPB11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	4	1	8	0	13
TPB12	Konsumsi &Produksi Berkelanjutan	1	0	4	0	5
TPB13	Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana	1	0	1	0	2
TPB15	Pelestarian & Pemanfaatan	1	1	2	0	4
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA						
TPB16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	7	2	12	0	21

2.3 Pencapaian Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Balangan

2.3.1. Pencapaian Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

Tabel 2.132 memperlihatkan capaian Indikator Tujuan RPJMD tahun 2016-2021 di tahun 2021.

Tabel 2.132
Capaian Indikator Tujuan Dalam RPJMD tahun 2016-2021 di tahun 2021

No.	TUJUAN	Indikator Tujuan	Target Tahun 2021 (akhir RPJMD)	Capaian Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021
1	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68.51	69,11	100,88
2	Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.51	3,26	50,08
3	Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat	Indeks Kualitas Infrastruktur (%)	69.02	67,69	98,07
4	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan	Nilai Tukar Petani	100	106,35	106,35
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,12	67,35	100,34
5	Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat	Angka Kemiskinan (%)	4,01	6,07	48,63
		Indeks Gini Ratio	0.231	0,277	80,09
		Budaya Balangan yang lestari (%)	100	88,89	88,89
6	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	84,33	105,41
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B=64,3	66,67	97,47
		Indeks Desa Membangun (%)	0.7151	0.6674	93,33
7	Terciptanya suasana masyarakat yang kondusif	Angka penyelesaian Pelanggaran Trantibmas (%)	100	23	177
		Angka konflik sosial bernuansa SARA (%)	0	0	100

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Balangan, 2022

Terdapat 13 indikator tujuan yang mengukur keberhasilan Pemerintah dalam pembangunan di Kabupaten Balangan. Indikator tujuan yang belum mencapai target sebesar 80% adalah Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2021 walaupun meningkat dari tahun

2020, namun masih rendah, yaitu 3,26 dari target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,51 yang ditargetkan ditahun 2021. Kondisi ini tidak terlepas dari:

- Dampak Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya banyak aspek kegiatan perekonomian di seluruh dunia.
- Terjadinya penurunan produksi dari beberapa lapangan usaha lain, seperti industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan lain-lain.

Indikator Kedua yang juga belum mencapai target RPJMD adalah Tingkat Kemiskinan. Target tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Balangan sebesar 4,01, sementara tahun 2021 tingkat kemiskinan meningkat sebesar 6,07 atau capaiannya sebesar 48,63%, sehingga perlu sinergi semua pihak untuk mencapai tingkat kemiskinan yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan.

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.4.1. Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021

Evaluasi adalah sebuah penilaian yang obyektif dan sistematis terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau evaluasi ex-post atau pasca pelaksanaan dimaksudkan untuk melihat pencapaian kegiatan atau program (*output/outcome/impact*) mampu mengatasi masalah pembangunan serta menilai efisiensi, efektivitas dan manfaat. Dengan evaluasi, akan didapatkan review perkembangan setiap indikator kinerja. Kemudian dengan data yang ada, dapat dilakukan identifikasi masalah baik dalam perencanaan maupun implementasinya serta berbagai kemungkinan solusi.

Demikian juga proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, harus memperhatikan evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan periode sebelumnya, seperti evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang paling tidak harus dilaksanakan 1 kali dalam 5 (lima) tahun serta evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan setiap tahun.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek



Daya Saing Daerah. Ini menyangkut realisasi capaian target kinerja tahun lalu terhadap RPJMD.

Hasil evaluasi, dalam perumusannya masih mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 Hasil evaluasi mengarah pada upaya pemecahan masalah-masalah yang komprehensif, dalam menjawab persoalan isu-isu strategis dan permasalahan daerah di Kabupaten Balangan Evaluasi ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD. Gambaran tentang hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.133.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Balangan Tahun 2016-2021 sampai Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12,00	7,69	64,08
		2	Angka Harapan Lama Sekolah	13,70	12,47	91,02
2	Meningkatnya kualitas kesehatan	3	Usia Harapan Hidup	69,64	67,85	97,43
		4	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	118,00	304	-57,63
		5	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	12,00	11	108,33
3	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	6	Angka Pengangguran Terbuka	2,10	2,44	83,81
4	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	7	persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	13,79	16,20	117,48
		8	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	6,37	7,05	110,68



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
5	Meningkatnya Nilai Investasi	9	Jumlah Nilai Investasi PMDN	49,61	44,57	89,84
6	Meningkatnya Usaha Mikro (UM)	10	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro(UM)	11,50	60,21	523,57
7	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	11	Tingkat Ketersediaan Pangan Utama (PPH)	85,30	83,22	97,56
8	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	12	Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	40,00	65,24	163,10
9	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Irigasi	13	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	54,00	57,84	107,11
10	Meningkatnya kualitas infrastruktur air minum, sanitasi dan perumahan	14	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat	100,00	81,72	100
		15	Persentase Akses Masyarakat Terhadap Sanitasi Dasar	100,00	92,61	92,61
		16	Persentase Jaringan Drainase dalam Keadaan Baik	89,16	88,79	99,59
		17	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	3,6	3,6	100
11	Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi internet	18	Persentase Cakupan Desa Terpencil yang Terlayani Infrastruktur Telekomunikasi	100,00	84	84
12	Meningkatnya Pendapatan Petani	19	Nilai Tukar Petani	100,00	106,35	106,35
13	Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,12	67,35	100,34
14	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	21	Penurunan Angka Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS)	40,00	54,91	137,28
15	Meningkatnya Kemampuan Tanggap Darurat Bencana	22	Indeks Resiko Bencana	100,00	133,77	133,77
16	Meningkatnya Pelestarian Budaya	23	Persentase Budaya Balangan yang Terlestarikan	100	88,89	88,89
17	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	24	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	84,33	105,41



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2021					
				Target		Realisasi		Capaian	
1	2	3		4		5		6	
18	Terwujudnya Pemerintahan Bersih	25	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	8	WTPP DRB per	8	100	
19	Meningkatnya kinerja dan akuntabiitas daerah	26	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	B	64,3	B	66,67	100,06	
		27	Tingkat Maturitas SPIP Pemda	3	3,00	3 =	3,023	100,77	
20	Meningkatnya Penyelenggaraan Kinerja Daerah	28	Nilai EKPPD Kabupaten Balangan	3,1000		3,5620		114,90	
21	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	29	Indeks Desa Membangun	0,690		0,6674		96,72	
22	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masarakat	30	Angka Pelanggaran Trantibmas.	178		23		187,08	
		31	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0		0		100,00	
Rata-rata Capaian								114,44	

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah dilakukan penilaian rata- rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap 13 Sasaran Daerah dengan 29 Indikator yang ditetapkan dalam RKPD Perubahan Kabupaten Balangan Tahun 2021 sesuai sasaran strategis pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Angka-angka realisasi masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.134
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Balangan Tahun 2021-2026 pada Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	5	6	7
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	1 Indeks Infrastruktur Publik	33,99	38,05	111,94



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	5	6	7
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	2 Indeks Infrastruktur Permukiman	30,12	28,14	93,43
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	3 Indeks Kualitas Air	50,10	50,95	101,70
		4 Indeks Kualitas Udara	90,94	91,09	100,16
		5 Indeks Kualitas Lahan	52,30	51,60	98,66
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	6 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	12,64	16,20	128,16
		7 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	6,10	6,85	112,30
		8 Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,40	1,52	380
		9 Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	227,29	115,122	50,65
5	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	10 Angka Pengangguran Terbuka	2,46	2,44	100,81
6	Meningkatnya Indeks Pendidikan	11 Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,82	7,69	98,34
		12 Angka Harapan Lama Sekolah	12,59	12,47	99,05
7	Meningkatnya Indeks Kesehatan	13 Usia Harapan Hidup	67,92	67,85	99,90
		14 Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran)	221	309	60,18
		15 Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran)	15	13,2	112
		16 Prevalensi Stunting	21	17,9	114,76
		17 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)	23	23,9	96,09



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	5	6	7
8	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	18 Nilai SAKIP	68,40 (B)	66,67	100,95
		19 Opini BPK	WTP	WTP	100
		20 Nilai EKPPD	3,5750	3,5620	99,64
		21 Indeks Pelayanan Publik	3,01 (-B)	3,56 (B)	118
		22 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,55	81,05	98,18
9	Menurunnya Angka Kemiskinan	23 Angka Kemiskinan	5,4-5,2	6,07	87,59
		24 Angka PPKS yang tertangani	46,95	54,91	116,95
10	Terjaganya Kehidupan Sosial yang Kondusif	25 Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0	0	100
11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	26 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100
		27 Indeks Resiko Bencana	139,89	133,77	95,63
12	Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	28 Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	52	52,17	100,33
13	Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan	29 Indeks Desa Membangun	0,6495	0,6674	102,76
Rata-rata capaian					109,59

Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis adalah sebesar 109,59%. Terdapat 17 Indikator Kinerja sasaran yang tercapai lebih dari 100% dari 29 Indikator sasaran yang ditetapkan. Namun terdapat 2 indikator yang capaiannya masih rendah yaitu :

- 1. Pertumbuhan nilai investasi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian adalah :

- a. Pandemi covid-19 menyebabkan banyak usaha yang tidak bisa berperforma secara maksimal, sehingga penambahan investasi juga tidak maksimal.
 - b. Banyak pelaku usaha yang masih enggan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Hal ini dikarenakan para pelaku usaha tidak ingin diketahui besaran investasi usahanya dan khawatir jika dihubungkan dengan besaran pajak.
 - c. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewajiban penyampaian LKPM dan sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang lalai menyampaikan kewajibannya
 - d. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Mengklasifikasi Kriteria UMKM sebagai berikut :
 1. Permodalan usaha mikro paling banyak 1 milyar rupiah dan hasil penjualan paling banyak 2 milyar.
 2. Permodalan usaha kecil antara 1 sampai 5 milyar dan hasil penjualan 2 sampai 15 milyar.
 3. Permodalan usaha menengah antara 5 sampai 10 milyar rupiah hasil penjualan 15 sampai 50 milyar.
 - e. LKPM tidak wajib dilaporkan oleh usaha kategori mikro sehingga banyak usaha di Kabupaten Balangan yang tidak menyumbang besaran realisasi penanaman modal.
 - f. Beberapa pelaku usaha belum migrasi ke OSS RBA dan lupa password dan username akun OSSnya sehingga hal ini menghambat penyampaian LKPM.
 - g. Pada saat kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaku usaha, beberapa kendala yang ditemui antara lain : a) tidak adanya alamat kantor yang jelas, b) kesulitan dalam menemui pimpinan perusahaan/pemilik usaha.
2. Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran).
- AKI di tahun 2021 sebesar 309/100.000 KH dengan capaian kinerja 60,18% dan dikategorikan kinerja kurang berhasil. Kematian ibu tahun 2021 di Kabupaten Balangan jika di absolutkan berjumlah 7 orang yang di sebabkan oleh Ibu Hamil PEB 2 orang di rumah sakit, Hipertensi 2 orang, Perdarahan 1

orang, lain-lain 2 orang (Dugaan TBC dan Preeklamsi) di rumah. Kematian ibu berjumlah 7 orang tersebut 4 kematian di rumah sakit dan 3 orang di rumah. AKI di tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020.

Rendahnya pencapaian indikator AKI disebabkan faktor-faktor berikut:

1. Cakupan deteksi resiko ibu hamil tahun 2021 sebanyak 833 orang, terdiri dari cakupan resiko masyarakat 377 atau 14% dan cakupan resiko nakes 496 atau 14%, ini menandakan bahwa pemberdayaan masyarakat masih belum optimal untuk mendeteksi faktor resiko kehamilan yang terjadi pada dirinya dan keluarga serta masyarakat.
2. *Skrining* deteksi resiko komplikasi dari bidan masih kurang, jumlah dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (SPOG) hanya ada sebanyak 2 orang untuk menangani apabila ada ibu hamil, bersalin dan nifas yang berisiko tinggi.
3. Masih kurangnya Puskesmas yang mampu PONE rumah tunggu kelahiran terutama untuk daerah terpencil (untuk daerah terpencil seperti Uren tidak di temukan Rumah Tunggu Kelahiran sesuai kriteria) yang aksesnya jauh dari RSUD.
4. Masih banyaknya ibu hamil yang anemia yaitu 464 orang dan ibu hamil KEK 323 orang ibu hamil merupakan kehamilan yang beresiko terjadinya perdarahan saat persalinan dan kekurangan gizi kronis.
5. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh Paraji tahun 2021 berjumlah 16 orang karena masih kuatnya sosial budaya masyarakat dapat memicu kematian ibu antara lain komplikasi persalinan seperti pendarahan.
6. Beberapa tahun ini tidak ada peningkatan kapasitas bidan.
7. Situasi pandemik juga berpengaruh dalam kematian ibu, disituasi pandemik dan ketika pasien dinyatakan positif berhati-hati dalam penanganan dan keterbatasan sarana dan sumberdaya manusia di rumah sakit, pasien yang dinyatakan positif di tempatkan di UGD dan di ruang isolasi, sehingga pengawasan atau observasi untuk pasien tersebut terbatas.
8. Pada tahun 2021 ada pemangkasan anggaran APBD sehingga ada beberapa kegiatan tidak terlaksana yang menunjang penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) misalnya pelatihan APN, Pertemuan Bidan Koordinator, Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Bayi, Pembelian Stik HB.



Tingkat capaian kinerja dan anggaran RKPD berdasarkan hasil evaluasi renja perangkat daerah triwulan IV tahun 2021 adalah :

Tabel 2.135
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD

No	Uraian	Rata-rata tingkat capaian (%)	Predikat Kinerja
1	Kinerja	91,59	Sangat Tinggi
2	Anggaran	81,64	Tinggi

Berdasarkan tabel di atas rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 91,59% dengan predikat sangat tinggi dan rata-rata capaian anggaran sebesar 81,64% dengan predikat kinerja tinggi.

2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.5.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2023 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Permasalahan Bidang Infrastruktur :
 - a. Penataan Kota masih dalam tahap perencanaan
 - b. Pemenuhan prasarana perlengkapan jalan masih belum memenuhi target
 - c. Pemenuhan sarana prasarana terminal yang memadai masih belum optimal
 - d. Cakupan internet masih terfokus pada pemenuhan layanan administrasi Perkantoran
 - e. Masih rendahnya ketersediaan RTH public
 - f. Pengurangan dan penanganan sampah masih belum optimal
2. Permasalahan Bidang Ekonomi
 - a. Belum optimalnya produksi tanaman pangan dan hortikultura
 - b. Rendahnya produksi daging

- c. Belum optimalnya pengembangan potensi perikanan
 - d. Masih banyaknya tanaman perkebunan (karet) yang rusak
 - e. Rendahnya nilai realisasi investasi
 - f. Masih banyaknya sarana dan prasarana perdagangan yang perlu Pembenahan
 - g. Rendahnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah
3. Permasalahan Bidang Pembangunan Manusia
- a. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih kurang
 - b. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar sehingga capaian SPM kesehatan masih rendah
 - c. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan
 - d. Masih rendahnya cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
 - e. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai berdampak pada angka partisipasi sekolah dan angka partisipasi murni juga angka putus sekolah
 - f. Belum adanya pemetaan kebutuhan guru sehingga kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan belum merata
 - g. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang yaitu kualifikasi pendidikan S1/DIV
 - h. Masih belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan
 - i. Belum optimalnya pendidikan kesetaraandalam melayani masyarakat yang tidak mampu mengakses pendidikan formal
 - j. Minimnya penyelenggaraan festival kesenian
 - k. Belum optimalnya perawatan dan pemeliharaan cagar budaya
 - l. Kurang optimalnya pengembangan seni dan budaya Balangan
 - m. Belum Optimalnya minat membaca masyarakat
4. Permasalahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- a. Tingginya angka PPKS
 - b. Belum terpenuhinya jumlah pendamping sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang masih belum seimbang dibandingkan dengan jumlah PPKS



- c. Tenaga pendamping desa yang masih belum seimbang dengan jumlah desa
 - d. Belum Optimalnya Mitigasi Bencana di Masyarakat
 - e. Belum Optimalnya Status Desa dengan Kategori Maju
 - f. Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan
5. Permasalahan Bidang Pemerintahan Aparatur
- a. Manajemen perubahan belum optimal
 - b. Penguatan peraturan perundang-undangan belum optimal
 - c. Penataan penguatan organisasi/kelembagaan belum optimal
 - d. Penguatan tatalaksana belum optimal
 - e. Penataan sistem manajemen SDM-ASN belum optimal
 - f. Penguatan akuntabilitas masih belum optimal
 - g. Penguatan pengawasan belum optimal
 - h. Pelayanan publik belum optimal
 - i. Masih banyaknya organisasi masyarakat yang tidak aktif

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah terdiri arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Kebijakan ekonomi daerah digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen saling mempengaruhi.

Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya

3.1 Kebijakan Ekonomi Daerah

a. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Kalimantan Selatan

Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan I-2022 dibanding triwulan I-2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,49 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,16 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,52 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,74 persen. Sebaliknya, lapangan usaha yang mengalami kontraksi, yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,18 persen dan Pertambangan dan Penggalan sebesar -0,03 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 masih didominasi oleh Pertambangan dan Penggalan sebesar 19,61 persen; Industri Pengolahan sebesar 14,84 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,71 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,84 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Selatan mencapai 57,00 persen.

Ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 3,49 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PMTB tumbuh sebesar 5,39 persen. Dikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) masing-masing tumbuh sebesar 0,81 persen dan 0,64 persen. Sedangkan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan ekspor berkontraksi sebesar 1,23 persen dan 0,93 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang tercatat berkontraksi sebesar 7,52 persen.

Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan I-2022 dibanding triwulan IV-2021 berkontraksi sebesar 5,41 persen (q-to-q). Terkait dengan perdagangan luar negeri, pada triwulan I-2022 pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melarang ekspor batu bara selama satu bulan yaitu pada 1 Januari sampai 31 Januari 2022. Di samping itu, Kalimantan Selatan mengalami puncak penyebaran covid varian Omicron pada pertengahan Februari 2021. Hal ini menyebabkan berbagai pembatasan mobilitas dengan diterapkannya kebijakan PPKM hingga level 3.

Berbagai kebijakan di atas berpengaruh pada pertumbuhan komponen pengeluaran. Pada triwulan I-2022, semua komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan yang negatif dibandingkan triwulan IV-2021. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tumbuh negatif sebesar 0,11 persen, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) tumbuh negatif sebesar 0,35 persen, Komponen PK-P sebesar berkontraksi 41,01 persen dan PMTB mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,23 persen. Komponen Ekspor dan Impor Barang dan Jasa juga berkontraksi masing-masing sebesar 23,31 persen dan 30,98 persen. Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I- 2022 masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup hampir separuh PDRB Kalimantan Selatan yaitu sebesar 44,82 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 24,42 persen; Komponen PK-P sebesar 8,42 persen dan Net Ekspor 19,52 persen.

Gambar. 3.1

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan
Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw I-2022 terhadap Triw IV-2021 (q-to-q)	Triw I-2022 terhadap Triw I-2021 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2022 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-6,88	0,92	0,11
B. Pertambangan dan Penggalian	-11,68	-0,03	-0,01
C. Industri Pengolahan	-10,11	2,77	0,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-9,39	8,33	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-5,18	5,27	0,02
F. Konstruksi	-7,86	5,29	0,40
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,20	8,74	0,81
H. Transportasi dan Pergudangan	4,28	10,16	0,62
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,24	9,52	0,20
J. Informasi dan Komunikasi	2,04	7,87	0,36
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,36	5,60	0,19
L. Real Estat	0,76	5,22	0,13
M,N. Jasa Perusahaan	0,31	5,65	0,04
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,61	-0,18	-0,01
P. Jasa Pendidikan	-0,81	1,84	0,09
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-5,98	6,67	0,14
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,11	2,91	0,03
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-5,41	3,49	3,49

Sumber data: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, diolah.

3 Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Balangan

Sektor pertambangan masih menjadi sektor andalan Kabupaten Balangan meskipun pada tahun 2020 pertumbuhannya berkontraksi sebesar -3,77%. Pertumbuhan negatif ini menyebabkan menyusutnya nilai distribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian dalam PDRB ADHB pada tahun 2020 menjadi 58,91% dari sebelumnya 60,58% pada tahun 2019. Perbaikan harga batubara di pasar internasional pada triwulan II 2021 dapat mengangkat kondisi perekonomian Kabupaten Balangan. Tetapi tekanan pelemahan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 juga diperkirakan terjadi pada triwulan III 2021.

Melambungnya harga batubara pada triwulan II 2021 mendorong peningkatan kinerja ekspor batubara Provinsi Kalimantan Selatan periode Januari-Mei 2021 dibandingkan Januari-Mei 2020 sebesar 5,12%. Pada periode April ke Mei 2021 nilai ekspor Kalimantan Selatan meningkat 44,15% menjadi US\$524,60 juta. Sedangkan nilai ekspor karet dan barang dari karet meningkat 47,27% pada

periode Januari-Mei 2021 dibanding Januari-Mei 2020 tetapi nilai ekspor bulan Mei menurun 32,56% dibanding April 2021.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2021 diperkirakan masih mengalami tekanan terutama dari pelemahan daya beli masyarakat. Namun jika kenaikan harga batubara masih terjadi hingga triwulan IV 2021 atau setidaknya tidak mengalami penurunan dibanding tingkat harga triwulan II 2021, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan dapat terjadi di angka positif meskipun masih rendah.

4 Perkembangan Inflasi Daerah

Pada Mei 2022 terjadi inflasi sebesar 0,65 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,16. Dari 3 kota IHK di Kalimantan Selatan, semuanya mengalami inflasi. Inflasi terjadi di Kota Banjarmasin sebesar 0,53 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,00; Kotabaru sebesar 1,23 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 114,86; dan Kota Tanjung sebesar 1,17 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,87.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran secara signifikan, yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,53 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,97 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,56 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,10 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,10 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,57 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman dan restoran sebesar 0,01 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,82 persen.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kalimantan Selatan, antara lain ikan gabus, bawang merah, baju muslim wanita, ikan patin, ikan papuyu, telur ayam ras, daging ayam ras, ikan asin telang, kacang panjang dan tiket bioskop. Jika dihitung berdasarkan tahun kalender, pada Mei 2022 Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 3,35 persen sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2022 terhadap Mei 2021) sebesar 4,77 persen.

Gambar. 3.2

IHK dan Tingkat Inflasi Mei 2022, Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) di Kalimantan Selatan

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2021	IHK April 2022	IHK Mei 2022	Tingkat Inflasi Mei 2022 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi Mei 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	108,01	112,43	113,16	0,65	3,35	4,77	0,65
Makanan, Minuman, dan Tembakau	113,73	119,66	121,49	1,53	4,84	6,82	0,45
Pakaian dan Alas Kaki	113,84	118,64	120,98	1,97	4,74	6,27	0,12
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	100,20	102,67	102,51	-0,16	0,97	2,30	-0,03
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	107,30	112,47	113,10	0,56	3,08	5,41	0,03
Kesehatan	117,19	118,58	118,70	0,10	0,49	1,29	0,00
Transportasi	105,38	113,15	112,88	-0,23	6,67	7,11	-0,03
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,92	98,96	99,06	0,10	0,05	0,15	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	106,39	116,33	119,32	2,57	6,05	12,15	0,04
Pendidikan	101,31	104,11	104,11	0,00	0,88	2,76	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	106,75	109,61	109,62	0,01	1,69	2,69	0,00
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	117,91	122,62	123,62	0,82	4,09	4,84	0,05

Sumber data: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, diolah.

5 Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja di Kalimantan Selatan kondisi Februari 2022 sebanyak 3,06 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 2,13 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 0,93 juta orang. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2022 terdiri dari 2,04 juta orang penduduk yang bekerja dan 0,09 juta orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Selatan naik sebesar 0,56 persen poin, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka turun sebesar 0,12 persen poin.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Februari 2021. TPAK pada Februari 2022 sebesar 69,08 persen, naik 0,56 persen poin dibanding Februari 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2022, TPAK laki-laki sebesar 85,04 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 54,00 persen. Dibandingkan Februari 2021, TPAK lakilaki naik 1,24 persen poin dan perempuan mengalami penurunan 0,11 persen poin. Angka pengangguran dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja. TPT Kalimantan Selatan keadaan Februari 2022 sebesar 4,20 persen. Indikator ini mengalami penurunan sebesar 0,13

poin dibandingkan keadaan Februari 2021 (4,33 persen). Tetapi jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2020, TPT Kalimantan Selatan pada Februari 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,53 persen poin karena TPT Kalimantan Selatan Februari 2020 sebesar 3,67 persen.

6 Nilai Tukar Petani

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 11 Kabupaten di Kalimantan Selatan pada Mei 2022, NTP Kalimantan Selatan turun 3,70 persen dibandingkan NTP April 2022, yaitu dari 109,93 menjadi 105,86. Penurunan NTP pada Mei 2022 disebabkan oleh turunnya indeks harga hasil produksi pertanian sedangkan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal mengalami kenaikan.

Penurunan NTP Mei 2022 dipengaruhi oleh turunnya NTP di tiga subsektor pertanian, yaitu Subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,69 persen, Subsektor Tanaman Hortikultura sebesar 2,37 persen, dan Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 7,35 persen. Sementara itu, NTP pada Subsektor Perternakan mengalami kenaikan sebesar 0,71 persen, dan Subsektor Perikanan sebesar 0,49 persen.

Berdasarkan beberapa data tersebut di atas, maka secara umum kebijakan ekonomi Kabupaten Balangan yang fokus kepada upaya peningkatan kontribusi PDRB dari sektor pertanian, perdagangan dan sektor tersier lainnya sudah tepat dan dipertahankan dengan target pertumbuhan ekonomi dan besaran kontribusi per sektor dapat tercapai. Di sisi lain penanganan pandemi covid 19 juga dapat dilakukan secara optimal dan penanganan secara ekonomi sebagai dampak terhadap covid juga bisa terlaksana secara efektif dan efisien.

3.2 Kebijakan Keuangan Daerah

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,16%, dibandingkan tahun 2021 dari Rp.1.085,293 Milyar menjadi Rp.1.098,008 Miliar. Tahun 2023 diasumsikan pendapatan daerah akan menjadi sebesar Rp. 1.120,899 Miliar atau naik sebesar 2,04% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan pendapatan daerah di asumsikan dari perhitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar transfer Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang akan di masukkan dalam penetapan Dana Transfer Umum Bagi Hasil kepada Daerah Penghasil.

Tahun 2022 dan tahun 2023 diharapkan pandemi Covid-19 sudah dapat terkendali dan mengarah kepada fase endemik, yang diharapkan perekonomian berangsur pulih sehingga diproyeksikan pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif yakni sebesar 1,16% tahun 2022 dan 2,04% tahun 2023. Komponen terbesar pembentuk pendapatan daerah di Kabupaten Balangan adalah bersumber dari dana transfer yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, rata-rata proporsi dana transfer diproyeksikan sebesar 92,08%, proporsi pendapatan asli daerah sebesar 7,36% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,55%. Rincian realisasi dan proyeksi/target pendapatan Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Balangan Tahun 2020-2023 (dalam ribu)

Uraian	Realiasi 2021	Taregt 2022	Target 2023	Bertambah/ Berkurang	%
PENDAPATAN DAERAH	1.085.377.648	1.189.233.322	1.268.242.953	79.009.631	6,64
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.505.127	86.827.482	80.225.858	(6.601.624)	(7,60)
Pajak Daerah	11.417.072	11.765.023	12.194.000	428.977	3,65
Pajak Hotel	11.138	13.500	13.500	-	-
Pajak Hotel	-	13.500	13.500	-	-
Pajak Hotel	-	13.500	13.500	-	-
Pajak Losmen	11.138	-	-	-	-
Pajak Losmen	11.138	-	-	-	-
Pajak Restoran	4.741.558	4.635.684	4.700.000	64.316	1,39
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	161.758	135.684	200.000	64.316	47,40
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	161.758	135.684	200.000	64.316	47,40



Uraian	Realiasi 2021	Taregt 2022	Target 2023	Bertambah/ Berkurang	%
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.579.800	4.500.000	4.500.000	-	-
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.579.800	4.500.000	4.500.000	-	-
Pajak Hiburan	1.035	4.000	4.000	-	-
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	-	1.000	1.000	-	-
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	-	1.000	1.000	-	-
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.035	3.000	3.000	-	-
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.035	3.000	3.000	-	-
Pajak Reklame	80.660	50.339	75.000	24.661	48,99
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron / Megatron	80.660	50.339	75.000	24.661	48,99
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron / Megatron	80.660	50.339	75.000	24.661	48,99
Pajak Penerangan Jalan	3.642.369	3.480.000	3.600.000	120.000	3,45
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3.642.369	3.480.000	3.600.000	120.000	3,45
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3.642.369	3.480.000	3.600.000	120.000	3,45
Pajak Parkir	14.410	20.500	20.500	-	-
Pajak Parkir	14.410	20.500	20.500	-	-
Pajak Parkir	14.410	20.500	20.500	-	-
Pajak Air Tanah	4.310	6.000	6.000	-	-
Pajak Air Tanah	4.310	6.000	6.000	-	-
Pajak Air Tanah	4.310	6.000	6.000	-	-
Pajak Sarang Burung Walet	-	20.000	25.000	5.000	25,00
Pajak Sarang Burung Walet	-	20.000	25.000	5.000	25,00
Pajak Sarang Burung Walet	-	20.000	25.000	5.000	25,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	859.467	1.600.000	1.600.000	-	-
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	859.467	1.600.000	1.600.000	-	-
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	859.467	1.600.000	1.600.000	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	657.250	635.000	650.000	15.000	2,36
PBBP2	657.250	635.000	650.000	15.000	2,36
PBBP2	657.250	635.000	650.000	15.000	2,36
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.404.873	1.300.000	1.500.000	200.000	15,38
BPHTB-Pemindahan Hak	1.404.873	1.000.000	1.300.000	300.000	30,00
BPHTB-Pemindahan Hak	1.404.873	1.000.000	1.300.000	300.000	30,00
BPHTB-Pemberian Hak Baru	-	300.000	200.000	(100.000)	(33,33)



Uraian	Realiasi 2021	Taregt 2022	Target 2023	Bertambah/ Berkurang	%
BPHTB-Pemberian Hak Baru	-	300.000	200.000	(100.000)	(33,33)
Retribusi Daerah	1.890.124	1.853.889	1.800.929	(52.960)	(2,86)
Retribusi Jasa Umum	905.527	949.010	824.210	(124.800)	(13,15)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	236.690	150.000	150.000	-	-
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	236.690	150.000	150.000	-	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	246.892	384.760	378.960	(5.800)	(1,51)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	246.892	384.760	378.960	(5.800)	(1,51)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	63.200	70.000	70.000	-	-
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	63.200	70.000	70.000	-	-
Retribusi Pelayanan Pasar	64.000	60.750	60.750	-	-
Retribusi Pelataran	39.300	1.000	1.000	-	-
Retribusi Los	24.700	59.750	59.750	-	-
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	222.653	120.000	120.000	-	-
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	222.653	120.000	120.000	-	-
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	9.356	120.000	4.500	(115.500)	(96,25)
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	9.356	120.000	4.500	(115.500)	(96,25)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	62.737	43.500	40.000	(3.500)	(8,05)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	62.737	43.500	40.000	(3.500)	(8,05)
Retribusi Jasa Usaha	766.940	749.379	739.219	(10.160)	(1,36)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	456.829	419.969	400.169	(19.800)	(4,71)
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	35.752	199.369	179.569	(19.800)	(9,93)
Retribusi Penyewaan Tanah	-	6.000	6.000	-	-
Retribusi Penyewaan Bangunan	-	41.600	41.600	-	-
Retribusi Pemakaian Laboratorium	73.281	90.000	90.000	-	-
Retribusi Pemakaian Ruangan	339.246	76.000	76.000	-	-
Retribusi Pemakaian Alat	8.550	7.000	7.000	-	-
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	193.900	183.410	192.050	8.640	4,71
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	129.460	183.410	192.050	8.640	4,71
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	64.440	-	-	-	-



Uraian	Realiasi 2021	Taregt 2022	Target 2023	Bertambah/ Berkurang	%
Retribusi Terminal	61.350	46.000	47.000	1.000	2,17
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	53.550	40.000	40.000	-	-
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	7.800	6.000	7.000	1.000	16,67
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	54.861	100.000	100.000	-	-
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	54.861	100.000	100.000	-	-
Retribusi Perizinan Tertentu	217.657	155.500	237.500	82.000	52,73
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	217.657	155.500	37.500	(118.000)	(75,88)
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	217.657	155.500	37.500	(118.000)	(75,88)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	-	-	200.000	200.000	-
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	-	-	200.000	200.000	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.391.951	10.847.692	15.237.460	4.389.768	40,47
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.391.951	10.847.692	15.237.460	4.389.768	40,47
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.391.951	10.847.692	15.237.460	4.389.768	40,47
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.391.951	10.847.692	15.237.460	4.389.768	40,47
Lain-lain PAD yang Sah	104.805.981	62.360.878	50.993.469	(11.367.409)	(18,23)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	84.080	-	-	-	-
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	84.080	-	-	-	-
Hasil Penjualan Alat Angkutan	84.080	-	-	-	-
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	23.300	15.000	10.000	(5.000)	(33,33)
Hasil Sewa BMD	23.300	15.000	10.000	(5.000)	(33,33)
Hasil Sewa BMD	23.300	15.000	10.000	(5.000)	(33,33)



Uraian	Realiasi 2021	Taregt 2022	Target 2023	Bertambah/ Berkurang	%
Jasa Giro	6.118.995	4.850.000	4.850.000	-	-
Jasa Giro pada Kas Daerah	6.039.509	4.800.000	4.800.000	-	-
Jasa Giro pada Kas Daerah	6.039.509	4.800.000	4.800.000	-	-
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	79.486	50.000	50.000	-	-
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	79.486	50.000	50.000	-	-
Pendapatan Bunga	116.356	4.000.000	4.000.000	-	-
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	116.356	4.000.000	4.000.000	-	-
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	116.356	4.000.000	4.000.000	-	-
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	665.070	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	665.070	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	665.070	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	367.702	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	367.702	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	367.702	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	55.121	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak Restoran	13.460	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.096	-	-	-	-
Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	11.364	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak Parkir	7	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak Parkir	7	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	3	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	3	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	41.651	-	-	-	-
Pendapatan Denda PBBP2	41.651	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	30	4.500	-	(4.500)	(100,00)
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	30	4.500	-	(4.500)	(100,00)



Uraian	Realiasi 2021	Taregt 2022	Target 2023	Bertambah/ Berkurang	%
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	4.500	-	(4.500)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian	2.223.254	-	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	152.709	-	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	152.709	-	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	143.800	-	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	143.800	-	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	3.590	-	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	3.590	-	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	475.579	-	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	475.579	-	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	878.484	-	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	878.484	-	-	-	-
Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka – LRA	569.092	-	-	-	-
Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka – LRA	569.092	-	-	-	-
Pendapatan BLUD	89.661.740	40.000.000	35.000.000	(5.000.000)	(12,50)
Pendapatan BLUD	89.661.740	40.000.000	35.000.000	(5.000.000)	(12,50)



Uraian	Realiasi 2021	Taregt 2022	Target 2023	Bertambah/ Berkurang	%
Pendapatan BLUD	89.661.740	40.000.000	35.000.000	(5.000.000)	(12,50)
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.490.332	6.745.689	7.133.469	387.780	5,75
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.490.332	6.745.689	7.133.469	387.780	5,75
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.490.332	6.745.689	7.133.469	387.780	5,75
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	-	6.745.689	7.133.469	387.780	5,75
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	-	6.745.689	7.133.469	387.780	5,75
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	-	6.745.689	7.133.469	387.780	5,75
PENDAPATAN TRANSFER	928.215.278	1.091.405.84 0	1.181.840.38 5	90.434.545	8,29
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	869.042.359	1.014.707.47 3	1.100.870.38 5	86.162.912	8,49
Dana Perimbangan	717.757.009	892.594.095	992.090.136	99.496.041	11,15
Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	257.465.533	398.704.760	572.964.788	174.260.02 9	43,71
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	42.271.901	18.650.525	18.650.525	-	-
DBH PPh Pasal 21	8.432.381	8.265.869	8.265.869	-	-
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	183.123	2.959.682	2.959.682	-	-
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1	-	-	-	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	113.048	124.689	124.689	-	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	239.811	768.245	384.123	(384.123)	(50,00)
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	204.569.499	365.355.849	540.000.000	174.644.15 1	47,80
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	127.000	1.588.989	1.588.989	-	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	-	148.155	148.155	-	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasai (DR)	171.149	-	-	-	-
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.357.619	842.756	842.756	-	-
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	346.527.140	346.527.140	346.527.140	-	-
DAU	346.527.140	346.527.140	346.527.140	-	-
Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.985.284	57.597.485	-	(57.597.485)	(100,00)



Uraian	Realiasi 2021	Taregt 2022	Target 2023	Bertambah/ Berkurang	%
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.133.629	57.597.485	-	(57.597.485)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.858.382	-	-	-	-
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.578.855	-	-	-	-
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	635.710	-	-	-	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	6.533.920	-	-	-	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.435.228	-	-	-	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	7.232.403	-	-	-	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	967.572	-	-	-	-
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	569.586	-	-	-	-
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	12.337.447	-	-	-	-
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.471.959	-	-	-	-
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.751.145	-	-	-	-
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.479.450	-	-	-	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	59.779.052	89.764.710	72.598.207	(17.166.503)	(19,12)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	-	89.764.710	16.655.057	(73.109.653)	(81,45)
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	-	-	-	-
DAK Non Fisik-TPG PNSD	48.394.510	-	47.021.000	47.021.000	-
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	324.000	-	1.450.000	1.450.000	-
DAK Non Fisik-TKG PNSD	938.690	-	2.200.000	2.200.000	-
DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.986.800	-	4.041.250	4.041.250	-
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.513.300	-	1.230.900	1.230.900	-
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.975.641	-	-	-	-
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	878.938	-	-	-	-
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	335.173	-	-	-	-
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	432.000	-	-	-	-
Dana Insentif Daerah (DID)	34.187.576	13.333.129	-	(13.333.129)	(100,00)



Uraian	Realiasi 2021	Taregt 2022	Target 2023	Bertambah/ Berkurang	%
DID	34.187.576	13.333.129	-	(13.333.129)	(100,00)
DID	34.187.576	13.333.129	-	(13.333.129)	(100,00)
Dana Desa	117.097.774	108.780.249	108.780.249	-	-
Dana Desa	117.097.774	108.780.249	108.780.249	-	-
Dana Desa	117.097.774	108.780.249	108.780.249	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.172.919	76.698.367	80.970.000	4.271.633	5,57
Pendapatan Bagi Hasil	59.172.919	76.698.367	80.970.000	4.271.633	5,57
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59.172.919	76.698.367	80.970.000	4.271.633	5,57
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.016.268	9.225.911	8.700.000	(525.911)	(5,70)
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.333.030	10.051.037	9.500.000	(551.037)	(5,48)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.611.101	48.780.048	55.200.000	6.419.952	13,16
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	326.679	70.000	70.000	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.885.841	8.571.371	7.500.000	(1.071.371)	(12,50)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.657.243	11.000.000	6.176.710	(4.823.290)	(43,85)
Pendapatan Hibah	6.776.710	11.000.000	6.176.710	(4.823.290)	(43,85)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	500.000	-	-	-	-
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	500.000	-	-	-	-
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	500.000	-	-	-	-
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.276.710	11.000.000	6.176.710	(4.823.290)	(43,85)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.276.710	11.000.000	6.176.710	(4.823.290)	(43,85)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.276.710	11.000.000	6.176.710	(4.823.290)	(43,85)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.880.532	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan	19.880.532	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Dana BOS	15.236.151	-	-	-	-
Pendapatan Hibah Dana BOS	15.236.151	-	-	-	-
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	4.644.381	-	-	-	-
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	4.644.381	-	-	-	-

Sumber : BPKPAD Kabupaten Balangan (diolah)

b. Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Balangan dalam rancangan belanja daerah tahun 2023 akan mengalami penurunan, sebesar (-0,29%) dibandingkan tahun 2022. Proporsi belanja tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan pada komponen belanja operasi yaitu sebesar -7,19% dan belanja tak terduga sebesar -8%. Dalam belanja operasi distribusi didalamnya ada kenaikan pada belanja pegawai yang merupakan akibat dari rekrutmen PPPK yang ditahun 2022 dan 2023 nanti. Penurunan belanja tak terduga terkait dengan asumsi masuk kondisi fase endemik dari wabah Covid 19 pada tahun 2023, sehingga alokasi belanja tak terduga lebih diarahkan kepada darurat kebencanaan dan sosial serta untuk mengakomodir santunan kematian. Sedangkan Belanja Modal di sumsiakan akan meningkat sebesar 20,39%. Rincian realisasi dan proyeksi/target belanja daerah Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja
Kabupaten Balangan Tahun 2020-2023 (dalam ribu)

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	TARGET 2022	TARGET 2023
BELANJA OPERASI	837.610,46	741.000,17	826.504,64	961.169.227
Belanja Pegawai	379.657,16	356.909,21	408.470,65	465.735.878
Belanja Barang	372.416,85	362.967,88	384.444,92	470.193.192
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	81.202,55	16.122,46	29.589,03	20.967.332
Belanja Bantuan Sosial	4.333,90	5.000,63	4.000,04	4.272.825
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
BELANJA MODAL	273.404,52	163.777,65	208.648,60	191.506.084
Tanah	902,60	912,37	3.500,00	-
Peralatan dan Mesin	51.241,77	32.249,66	20.183,99	20.395.138
Gedung dan Bangunan	79.756,92	35.624,82	24.918,53	23.733.283
Jalan, Irigasi dan Jaringan	140.356,05	94.916,08	159.862,27	146.655.941
Aset Tetap Lainnya	40,00	74,71	183,81	241.101
Aset Lainnya	1.107,19	-	-	480.620
BELANJA TAK TERDUGA	40.850,53	8.386,64	13.500,00	14.500.000
Belanja Tak Terduga	40.850,53	8.386,64	13.500,00	14.500.000



JUMLAH BELANJA	1.151.865,52	913.164,46	1.048.653,24	1.167.175.313
TRANSFER/ BAGI HASIL	1.333,84	1.167,94	1.349,99	1.359.544
Bagi Hasil Pajak	1.167,94	1.167,94	1.349,99	1.359.544
Bagi Hasil Retribusi	165,90	-	-	-
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	195.338,66	181.531,46	182.637,44	203.429.441
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	195.338,66	181.531,46	182.637,44	203.429.441
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
JUMLAH TRANSFER	196.672,50	182.699,40	183.987,42	204.788.986.734
SURPLUS/ DEFISIT (33 - 72)	(177.367,02)	(10.570,29)	(134.632,31)	(103.721.347.318)

Sumber : BPKPAD Kabupaten Balangan (diolah)

c. Pembiayaan Daerah

Realisasi dan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan kondisi yang defisit tentunya diperlukan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, dalam proyeksi pembiayaan untuk tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 pembiayaan daerah Kabupaten Balangan bersumber dari dari penerimaan kembali penyertaan modal pemerintah daerah. Rincian realisasi dan proyeksi/target pembiayaan Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan
Kabupaten Balangan Tahun 2020-2023 (dalam ribu)

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	TARGET 2022	TARGET 2023
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	317.260,76	141.217,76	144.632,31	133.721,34
Penggunaan SiLPA	317.246,51	141.207,16	144.632,31	133.721,34
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	-	-	-	-



Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah (Koperasi)	14,25	10,60	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
Penerimaan dari Sisa UYHD Tahun Lalu	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Pihak Ketiga	-	-	-	-
Penerimaan atas Investasi Permanen	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	10.000,00	30.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	10.000,00	30.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
Pengembalian Dana DPPID	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	317.260,76	141.217,76	134.632,31	103.721,34
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	139.893,73	130.647,47	-	0,00

Sumber : BPPAKD Kabupaten Balangan (diolah)

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan tahun 2023 disusun berdasarkan pedoman :

1. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun 2005 – 2025;
2. Rancangan RKP TAHUN 2023 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengacu pada RPJMN tahun 2019 – 2024;
3. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023;
4. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun 2005 – 2025;
5. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026;
6. Identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional;
7. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- (1). Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
- (2). Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD;
- (3). Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan
- (4). Korelasinya terhadap isu strategis daerah

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, saat ini rencana pembangunan daerah Kabupaten Balangan telah memasuki tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2023 berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang sedang berproses dalam Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Adapun visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan adalah :

"MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA"

Perngertian dari visi tersebut sebagai berikut:

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, sena masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah Hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera,

agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintahan daerah, rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023, secara umum berpedoman pada sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran ini juga mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pelaksanaannya desentralisasi penataan daerah ditujukan pada upaya untuk :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;



- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah;
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.



Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN			SASARAN		INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan	1	Indeks infrastruktur wilayah	1	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik	1	Indeks infrastruktur publik
				2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	2	Indeks infrastruktur permukiman
		2	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	3	Meningkatnya indeks kualitas Air, Udara dan Lahan	3	Indeks Kualitas Air
						4	Indeks Kualitas Udara
						5	Indeks Kualitas Lahan
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	3	Pertumbuhan Ekonomi	4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	6	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan
						7	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa
						8	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
						9	Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)
				5	Menurunnya angka pengangguran terbuka	10	Angka Pengangguran Terbuka



TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN			SASARAN		INDIKATOR SASARAN
3	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	4	Angka Rata-rata lama Sekolah	6	Meningkatnya Indeks Pendidikan	11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
		5	Angka Harapan Lama Sekolah			12	Angka Harapan Lama Sekolah
		6	Usia Harapan Hidup	7	Meningkatnya Indeks Kesehatan	13	Usia Harapan Hidup
						14	Angka Kematian Ibu (AKI)/per 100.000 kelahiran
						15	Angka Kematian Bayi (AKB)/per 1000 kelahiran
						16	Prevalensi Stunting
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	7	Indeks Reformasi Birokrasi	8	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	17	Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)
						18	NILAI SAKIP
						19	Opini BPK
						20	Nilai EKPPD
						21	Nilai Indeks Pelayanan Publik
5	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta	8	Angka Kemiskinan	9	Menurunnya Angka Kemiskinan	22	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
						23	Angka Kemiskinan
						24	Angka PPKS yang tertangani



TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN			SASARAN		INDIKATOR SASARAN
	pemerintahan yang harmonis dan kondusif	9	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	10	Terjaganya kehidupan sosial yang kondusif	25	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA
		10	Indeks Ketentaraman dan Ketertiban Umum	11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	26	Indeks Ketentaraman dan Ketertiban Umum
		11	Indeks Resiko Bencana			27	Indeks Resiko Bencana
		12	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	12	Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	28	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya
8	Meningkatnya nilai Indeks Desa membangun	13	Indeks Desa Membangun	13	Meningkatnya status Desa Kabupaten Balangan	29	Indeks Desa Membangun

Sumber : RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.2.1. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RKP TAHUN 2023

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: *“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar antara lain : air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Secara rinci 8 (delapan) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan sasaran system jaminan social, Modernisasi Pertanian dan Pemerataan Pembangunan yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem 1,5-2,0% (2023)→0-1% (2024)
 - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 91%
 - c. Nilai Tukar Petani /Nelayan 103-105/105-107

2. Fokus Peningkatan kualitas SDM (kesehatan dan pendidikan) dengan sasaran system kesehatan dan Pendidikan (system Pendidikan dan Pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 17,5% → 14%(2024)
 - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk
 - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 71%
 - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43 %
 - e. Persentase Sumber Daya Manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 17,48%
 - f. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 9,24 tahun
 - g. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) 31,89 Persen
3. Fokus Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job* dengan sasaran penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43 %
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 48%
 - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional 50.000 orang
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 60,71%
4. Fokus Mendorong pemulihan dunia usaha dengan sasaran revitalisasi parawisata dan pengembangan UMKM yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Wirausaha 3,50%
 - b. Pertumbuhan PDB Pertanian 3,9-4,2 %
 - c. Nilai Devisa Pariwisata US\$ 1,76-6,08 Miliar o Kontribusi PDB Pariwisata 4,3%
 - d. Nilai tambah ekonomi kreatif Rp.1.279 triliun
5. Fokus Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dengan sasaran industrialisasi, riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Industri Pengolahan 5,4-5,9 %
 - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan 20,6 %

- c. Produk Inovasi dan Produk Prioritas Riset Nasional yang Dihasilkan 10
- d. Peringkat Global Innovation Index 75-80 o Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 5,55-6,08%
- e. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas 18,80%
6. Fokus Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim dengan sasaran ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 %
 - b. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT-kumulatif 1.778,2 GW
 - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan 61 perusahaan
 - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau 6%
7. Fokus Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar antara lain : air bersih dan sanitasi dengan sasaran Penyediaan air bersih dan sanitasi, Infrastruktur Digital dan Infrastruktur Konektivitas , yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Volume tampungan air per kapita 54,50m³/det
 - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman)
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 97,5%
 - d. Masyarakat Pengguna Internet 80,7%
 - e. Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik-kumulatif 50%
8. Fokus Pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan sasaran fasilitas dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Inisiasi Pembangunan KIPP-IKN Tahap 1A
 - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara 5.600 Ha*

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,9 %
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02 %
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0 %
4. Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378

5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,29 – 73,35
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5 %
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103-105
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 105-107

4.2.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.2.3 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 2023 yaitu **“Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan”**. Berdasarkan tema RKPD tersebut ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing, dengan upaya yang dilaksanakan sebagai berikut :
 - b. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
 - c. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
 - d. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
 - e. Pengendalian Prevalensi Stunting
 - f. Penurunan Angka Pernikahan Anak
 - g. Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan
 - h. Peningkatan Prestasi Olahraga
2. Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian Dan Pariwisata, dengan upaya yang dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM dan pertanian berkelanjutan
 - b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
 - c. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark
 - d. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha berbasis digital
 - e. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah
3. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah, dengan upaya yang dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
 - b. Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi
 - c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Perdesaan

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik , dengan upaya yang dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penguatan Reformasi Birokrasi
 - b. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
 - c. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
 - d. Pengembangan Satu Data Kalsel
5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana , dengan upaya yang dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
 - b. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana
6. Mewujudkan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara Dan Sebagai Pendukung Food Estate , dengan upaya yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Peran Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN
 - b. Peningkatan Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN

4.2.4 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

4.2.4.1 Isu strategis daerah

Dalam menentukan isu strategis pembangunan daerah, terdapat beberapa komponen yang diperhatikan untuk mendapatkan inti permasalahan yang harus menjadi prioritas pembangunan di daerah. Berdasarkan analisis terhadap evaluasi capaian pembangunan yang telah dilakukan serta mempertimbangan program pembangunan jangka menengah dan jangka panjang serta konstelasi/dinamika regional dan nasional, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Balangan dan dijadikan isu strategis yang menjadi fokus penanganan pada kegiatan pembangunan di Tahun 2023. Beberapa isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah :
 - a. Infrastruktur Publik
 - b. Infrastruktur Permukiman
2. Transformasi struktural dalam perekonomian :

-
- a. Peningkatan Investasi
 - b. Peningkatan peran sektor pertanian dan Ketahanan pangan
 - c. Peningkatan daya saing UMKM
 - d. Kinerja Pariwisata serta ekonomi kreatif
3. Lingkungan Hidup :
- a. Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- a. Peningkatan Kualitas Pendidikan
 - Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
 - Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan
 - Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi
 - Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal /kesetaraan
 - b. Peningkatan Derajat Kesehatan
 - Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan
 - Peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan
 - Peningkatan akses bagi masyarakat bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu melalui peningkatan jaminan kesehatan
 - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rumah sakit daerah (Peningkatan standar pelayanan minimal untuk masyarakat)
 - Peningkatan upaya promosi kesehatan tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
5. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan
- Optimalisasi 8 Area Perubahan meliputi :
- a. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*)
 - b. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran
 - c. Pelaksanaan Sinkronisasi Penyusunan SAKIP dan LPPD
 - d. Peningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku
 - e. Peningkatkan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)
 - f. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik

- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik
 - h. Pelaksanaan Survei dan Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala
6. Peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan
- a. Peningkatan pelayanan sosial kepada PPKS
 - Peningkatan Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan
 - Penanganan dan perlindungan anak yatim
 - Peningkatan Persentase cakupan ppks yang mendapatkan pelayanan sosial
 - b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
 - Peningkatan Persentase Organisasi Masyarakat dibina yang aktif
 - Penguatan Kelembagaan PUG
 - Penerapan Kebijakan Kabupaten Layak Anak
 - Peningkatan peran lembaga
 - Perlindungan perempuan dan anak
 - c. Peningkatan Keamanan dan ketertiban umum
 - Peningkatkan Peningkatan Persentase Daerah Rawan Gangguan Ketentraman yang terpetakan
 - Penurunan Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 - d. Optimalisasi Cagar Budaya dan Seni Budaya
 - Revitalisasi, pengembangan dan Pembinaan kebudayaan dan adat istiadat, kesenian lokal
 - Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala
 - Pelestarian cagar budaya

4.2.4.2 Tema Dan Prioritas RKPD Tahun 2023

Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Balangan, RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, permasalahan di Kabupaten Balangan, serta isu-isu strategis, kerangka ekonomi

daerah dan pendanaan maka tema pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah “**Peningkatan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Potensi Daerah Untuk Memajukan Perekonomian Berkelanjutan**”.

Berdasarkan tema tersebut, maka dibuat 6 (enam) Prioritas dan Sasaran Pembangunan pada Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Jembatan Duplikat dan Jalan Kembar Kota Paringin
 - b. Peningkatan dan perbaikan ruas jalan dan jembatan lingkup Kabupaten
 - c. Peningkatan akses air bersih dan Sanitasi
 - d. Rehabilitasi Saluran Irigasi
 - e. Revitalisasi Taman Sanggam (lanjutan)
 - f. Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat (Pemasangan traffic light dan PJU)
 - g. Peningkatan ketersediaan rumah layak huni
 - h. Pembangunan asrama putera istana anak yatim
 - i. Pemenuhan DED Penataan Kota Paringin
2. Prioritas 2 : Pemulihan Ekonomi dalam penanganan dampak pandemi corona virus disease 2019 dan Transformasi Struktural Dalam Perekonomian, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Penyaluran sarana produksi pertanian, pupuk dan obat-obatan
 - b. Pembangunan kampung perikanan/ restocking budidaya ikan
 - c. Penyediaan cadangan pangan masyarakat
 - d. Pembangunan UPPB dan Peremajaan tanaman perkebunan (karet)
 - e. Rehabilitasi kolam BBI Gunung Manau
 - f. Swasembada daging
 - g. Meningkatkan daya saing UMKM (Pelatihan pemasaran, pengemasan; Fasilitas kemitraan; Pengawasan koperasi, Pelatihan desain sasisangan, pelatihan kualitas untuk ekspor; Fasilitas jaminan halal)
 - h. Meningkatkan sarana prasarana perdagangan (Revitalisasi pasar)
 - i. Mall Pelayanan Publik, Kemudahan berinvestasi
 - j. Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Desa; Pelatihan operator alat berat
 - k. Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Batarius
 - l. Pengembangan Obyek Wisata Maranting
 - m. Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Tayak

3. Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Pengembangan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - b. Pembangunan TPS3R dan Pengelolaan Sampah
4. Prioritas 4 : Peningkatan Kualiatas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. bantuan beasiswa kepada murid tidak mampu dan berprestasi
 - b. Insentif untuk Guru dan tenaga Kependidikan
 - c. Pembangunan kelas untuk paket A/B/C
 - d. Insentif Pondok Pesantren
 - e. Pelatihan muatan lokal guru SD dan SMP
 - f. Kerjasama dengan BPJS untuk jaminan Kesehatan seluruh penduduk Balangan
 - g. Peningkatan SDM Kesehatan
 - Penambahan tenaga Kesehatan khususnya bidan (daerah terpencil)
 - Penambahan dokter anestesi di RSUD
 - Peningkatan kompetensi bidan
 - h. Penambahan sarana dan prasarana (penambahan poskesdes dan rehab poskesdes)
 - i. Penanganan stunting (PMT untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), ibu hamil anemia, Balita kurus, dan kelas parenting)
 - j. Peningkatan upaya promosi kesehatan tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
 - k. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Balangan
5. Prioritas 5 : Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (Pusat Pemantauan Pencegahan) atau MCP KPK sebagai upaya mewujudkan daerah zero dari tindak pidana korupsi.
 - b. Optimalisasi Pelayanan Publik
 - c. Meningkatkan Penggunaan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pemerintahan
6. Prioritas 6 : Peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan, dengan sasaran sebagai berikut :



- a. Pemberian bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Fakir Miskin, Orang Jompo, Disabilitas, orang terlantar dsb)
- b. Peningkatan Pembinaan Organisasi Masyarakat yang aktif
- c. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
- d. Penerapan Kebijakan Kabupaten Layak Anak
- e. Penurunan Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- f. Bantuan untuk Rumah Ibadah
- g. Revitalisasi, pengembangan dan Pembinaan kebudayaan dan adat istiadat, kesenian lokal
- h. Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala
- i. Pelestarian cagar budaya



Tabel 4.2

Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023

No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OPTIMALISASI PEMBANGUNA N INFRASTRUKTU R WILAYAH	1	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	73,67%	100.935.436.000	DINAS PERHUBUNGA N
		2	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	86%	6.182.015.600	DINAS PERHUBUNGA N
		3	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	56%	721.999.000	DINAS PUPR DAN PERKIM
		4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap	28,31%	9.963.584.000	DINAS PUPR DAN PERKIM
		5	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses	80%	2.500.765.668	DINAS KOMINFOSAN



No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			APLIKASI INFORMATIKA	dan kualitas konten informasi publik Pemerintah			
		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak		4.981.792.000	DINAS PUPR DAN PERKIM
		7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95%	2.365.215.250	DINAS PUPR DAN PERKIM
		8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani	84,78%	1.973.104.500	DINAS PUPR DAN PERKIM
		9	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	87%	2.725.001.200	DINAS PUPR DAN PERKIM



No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
2	TRANSFORMASI STRUKTURAL DALAM PEREKONOMIA N	10	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	810	-	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		11	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Budidaya Ikan (Ton)	675	944.492.100	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		12	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)	46,25	154.216.000	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)	14%	2.019.757.141	DINAS KETAPANG PERTANIAN



No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			SARANA PERTANIAN				DAN PERIKANAN
		14	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	0,2	195.068.000	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		15	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Hewan Menular	550 Ekor	475.205.000	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		16	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan		219.316.900	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN



No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		17	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani		1.811.429.000	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		18	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	10	313.750.250	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	87,3	805.211.000	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		20	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	0,05	201.250.000	DINAS KETAPANG PERTANIAN



No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
							DAN PERIKANAN
		21	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu Dan Keamanan Pangan	0,9	66.430.000	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
		22	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	4%	77.144.000	DINAS KUKMPP
		23	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Yang Memperoleh Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	10,18%	43.394.000	DINAS KUKMPP
		24	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Labanya Meningkat	29%	289.291.000	DINAS KUKMPP



No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Uru t	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		25	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Skala Usahanya Bertambah	0,32%	192.861.000	DINAS KUKMPP
		26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Ikm Yang Menerapkan Teknologi Industri	10%	197.682.000	DINAS KUKMPP
		27	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Produk Industri Yang Bersertifikat Halal	8,71%	57.858.000	DINAS KUKMPP
		28	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Profil Ikm Yang Berkembang	0,58%	526.028.000	DINAS KUKMPP
		29	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sapras	60%	904.187.000	DINAS KUKMPP



No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Uru t	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		30	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Setelah Promosi	29,05%	161.969.000	DINAS KUKMPP
		31	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Jumlah Produk Yang Dipasarkan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	27%	24.108.000	DINAS KUKMPP
		32	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	7,60%	118.609.000	DINAS KUKMPP
		33	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (%)	12%	54.965.000	DINAS KUKMPP
		34	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata	2 Hari	1.215.302.000	DISPORAPAR



No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		35	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persenatse Produk Kreasi Unggulan	%		DISPORAPAR
		36	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota	100%	82.438.000	DPMPTSP TRANSNAKER
		37	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	Rupiah	58.576.000	DPMPTSP TRANSNAKER
		38	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	78.403.000	DPMPTSP TRANSNAKER
		39	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Sesuai Sop	%	112.816.000	DPMPTSP TRANSNAKER
		40	INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Dan Informasi Perizinan Dan Penanaman Modal	100%	118.065.000	DPMPTSP TRANSNAKER



No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		41	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	%	2.898.074.000	DPMPTSP TRANSNAKER
		42	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Dan Luar Negeri	%	471.681.000	DPMPTSP TRANSNAKER
3	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	43	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	99%	6.578.618.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		44	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	215.510.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		45	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	986.620.000	DINAS PERTANAHAN DAN



No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				LINGKUNGAN HIDUP
		46	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dalam Kondisi Yang Terpelihara Baik	100%	3.028.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		47	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100%	73.960.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		48	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan.	100%	87.061.300	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
4	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	49	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Paritispasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar	86,45%	27.141.943.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		50	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Yang Sesuai Peraturan	100%	118.690.000	
		51	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Peningkatan Angka Jumlah Guru Pns Yang S1 (Paud, Sd Dan Smp)	75,36 % 80,39 % 97,04 %	709.270.000	
		52	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatkan Persentase Lembaga Paud Dan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Yang Mandiri	100%	61.230.000	



No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Uru t	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		53	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (Aki)	176/100.000 KH	60.121.036.106	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		54	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar	100%	6.831.000.000	
		55	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah Produksi Rumah Tangga Yang Mempunyai Sertifikat Keamanan Pangan (Analisa Sendiri)	23 Sertifikat	100.000.000	
		56	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Yang Melaksanakan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs)	55%	335.680.000	



No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		57	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	19	383.029.900	
5	OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	58	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan di bidang Pengadministrasi Umum yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	100%	59.204.361.889	SEKRETARIAT DAERAH
				Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100%		
		59	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	78	493.770.000	INSPEKTORAT
		60	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Persentase Perencanaan,Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah yg baik dan tepat waktu	98,60%	1,417,363,850	BAPPEDA LITBANG



No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			PEMBANGUNAN DAERAH				
		61	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD) dgn nilai baik	92,60%	1,732,772,700	BAPPEDA LITBANG
		62	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	1.339.720.650	BPKPAD
		63	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah		1.473.355.000	
		64	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	- WBK :3 - WBBM : 3	433.440.000	INSPEKTORAT
				Level Maturitas SPIP	3 (3,05) level		
				Indeks Integritas	79 indeks		



No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Level kapabilitas APIP	3 level		
		65	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	100%	16.379.925.700	SEKRETARIAT DAERAH
				Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100%		
6	PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA SERTA PEMERINTAHAN	66	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	81%	411.658.000	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES
		67	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase cakupan PPKS (lansia,Disabilitas,Anak Terlantar ,Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100%	484.792.000	
		68	PROGRAM PERLINDUNGAN	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	69%	5.680.450.600	



No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Uru t	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			DAN JAMINAN SOSIAL				
		69	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100%	688.190.800	KESBANGPOL
		70	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase Ormas yang aktif	100%	286.405.750	
		71	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	53,33%	4.064.825.000	SATPOL PP



No .	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Uru t	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	50%		
				Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%		
		72	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	100%	2.514.219.400	BPBD
		73	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah lembaga adat tingkat Pengembangan Kebudayaan	23,53%	14.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		74	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	62,50%	1.026.337.000	



No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		75	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan kegiatan pembinaan sejarah Lokal kab/kota	50%	369.032.000	
		76	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	73,33%	590.131.000	
		77	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	176/100.00 0 KH	60.121.036.106	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	17		
				Angka Kematian Bayi (AKB)	13		
				Angka Kesakitan	28%		
		78	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	85%	4.444.440.000	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES
		79	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya	55%	300.000.000	DINSOS PEMBERPUAN & PEMDES



No.	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Urut	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang			
		80	PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	100%	2.514.219.400	BPBD
		81	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar	86,45%	27.141.943.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		82	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum yang sesuai peraturan	100%	118.690.000	
		83	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase peningkatan angka jumlah guru PNS yang S1 (PAUD, SD dan SMP)	75,36 % 80,39 % 97,04 %	709.270.000	



No .	Prioritas- Prioritas RKPD	No. Uru t	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2023	Asusmsi Pagu Program (Rupiah)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		84	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatkan Persentase Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang mandiri	100%	61.230.000	



4.2.5 Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2023 dengan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 dan RKP tahun 2023

Dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka telah dirumuskan Prioritas dan Sasaran pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2023. Prioritas dan Sasaran tersebut dilandaskan pada permasalahan yang ada di Kabupaten Balangan yang berusaha untuk diselesaikan.

Pemerintah Kabupaten Balangan selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional dan program prioritas Provinsi Kalimantan Selatan guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Balangan sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan Provinsi dan Daerah.

Prioritas dan Sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2023 tersebut juga tidak lepas dari Prioritas Nasional yang pada tahun 2023 ini dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional serta 6 (enam) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan serta Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

No.	Prioritas Nasional	No.	Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan	No.	Prioritas Kabupaten Balangan
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.	1.	Optimalisasi Sektor Industri, Umkm, Pertanian Dan Pariwisata	1.	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian



No.	Prioritas Nasional	No.	Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan	No.	Prioritas Kabupaten Balangan
2.	mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.	2.	Mewujudkan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara Dan Sebagai Pendukung Food Estate		
3.	meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing	3.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing	2.	Peningkatan Kualiatas Sumber Daya Manusia
4.	revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan				
5	memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar	4.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah	3	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah
6	membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	5.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana	4.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
7	memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik	6.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	5.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan
				6.	Peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan

Sumber : Data diolah (RKP Tahun 2023; Ranwal RKPD Kalsel; Ranwal RKPD Balangan 2023

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023

Program dan kegiatan prioritas yaitu program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Rencana program prioritas daerah Kabupaten Balangan tahun 2023 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun 2021, perkiraan kedudukan tahun 2022 dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 .

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, *top down*, dan *bottom up* untuk menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang saat ini dan mempertimbangkan aspek-aspek teknokratik (Teknokratik, Holistik, Integrasi dan Spasial) dan politis. Bappeda telah melakukan proses sinkronisasi dan verifikasi dengan hasil musrenbang kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD, dan Renstra SKPD yang pada dasarnya adalah merupakan rencana program dan kegiatan prioritas dimana pengalokasiannya mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta telah mengacu pada dokumen perencanaan yang ada yaitu RPJMD Kabupaten Balangan, Prioritas RKP Pusat dan Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun bagi masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran Perangkat Daerah;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;

4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pagu indikatif setiap program dan kegiatan pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator yang penetapannya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
2. Menentukan keluaran/output setiap sub kegiatan dan kegiatan .
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output sub kegiatan dan kegiatan untuk setiap program.
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output sub kegiatan dan kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
5. Menghitung alokasi berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya dan dijelaskan pada tabel Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan yang terdapat pada lampiran I RKPD ini. Uraian secara umum Program Prioritas per Urusan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 5.1. Matrik Rencana Program Prioritas Per Urusan
Kabupaten Balangan Tahun 2023**

No (1)	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (3)	Lokasi (4)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)	Sumber Dana (7)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan				36.186.320.400	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				34.186.320.400	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				34.186.320.400	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan pelayanan publik urusan pemerintah daerah		100 %	6.155.187.400	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat paritispasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar		86,45 %	27.141.943.000	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum yang sesuai peraturan		100 %	118.690.000	APBD
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase peningkatan angka jumlah guru PNS yang s1 (PAUD, SD dan SMP)		75,36 % 80,39 % 97,04 %	709.270.000	APBD
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatkan Persentase Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang mandiri		100 %	61.230.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				2.000.000.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				2.000.000.000	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah lembaga adat tingkat Pengembangan Kebudayaan		23,53 %	14.500.000	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		62,5 %	1.026.337.000	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan kegiatan pembinaan sejarah Lokal kab/kota		50 %	369.032.000	APBD
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik		73,33 %	590.131.000	APBD
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				162.110.383.456	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				160.789.137.556	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				160.789.137.556	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES		72 Angka / Nilai	93.401.421.450	APBD
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)		176/100.000 KH	60.121.036.106	APBD
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita		17		
		Angka Kematian Bayi (AKB)		13		
		Angka Kesakitan		28%		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar		100%	6.831.000.000	APBD
		Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Sesuai Standar		100%		
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	JUMLAH PRODUKSI RUMAH TANGGA YANG MEMPUNYAI SERTIFIKAT KEAMANAN PANGAN (analisa sendiri)		23 Sertifikat	100.000.000	APBD
		Persentase Fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan		100%		



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase sarana produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan		7 Desa (100%)		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	PERSENTASE KELUARGA YANG MELAKSANAKAN PRILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)		55%	335.680.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				2.004.997.530	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				1.321.245.900	APBD
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1,06	371.292.000	APBD
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Cakupan Peserta KB Aktif		76,50	566.924.000	APBD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)		19,00	383.029.900	APBD
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman				192.450.088.169	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				183.612.822.169	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				183.612.822.169	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD		66 Angka	16.500.300.169	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap		28,31 %	9.963.584.000	APBD
		Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun		13,03 %		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak			4.981.792.000	APBD
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik			23.205.160.000	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah bangunan yang ditata		6 Unit	26.849.692.000	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap		73,67 %	100.935.436.000	APBD
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik		82,08 %		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM Jasa Konstruksi dan BUJK yang dibina		50 %	454.859.000	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang		56 %	721.999.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				6.211.944.450	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				8.837.266.000	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		100 %	1.773.945.050	APBD
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani		84,78 %	1.973.104.500	APBD
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		95 %	2.365.215.250	APBD
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU		87 %	2.725.001.200	APBD
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				7.966.106.896	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				7.966.106.896	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Keterti Ban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				7.966.106.896	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100 %	4.981.000.000	APBD
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan		100 %	2.514.219.400	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana		100 %	470.887.496	APBD
5	Satuan Polisi Pamong Praja				10.626.989.489	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				10.626.989.489	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Keterti Ban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				10.626.989.489	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		100 %	6.562.164.489	APBD
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi		53,33 %	4.064.825.000	APBD
		Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada		50 %		
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		100 %		
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				6.555.251.147	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				3.241.513.100	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Keterti Ban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				3.241.513.100	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja		65, 20 Nilai	3.313.738.047	APBD
	Unsur Pemerintahan Umum				3.241.513.100	APBD
	Kesatuan Bangsa Dan Politik				3.241.513.100	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat		100 %	142.835.700	APBD
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol yang aktif		100 %	2.007.124.250	APBD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase Ormas yang aktif		100 %	286.405.750	APBD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif		100 %	116.956.600	APBD
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti		100 %	688.190.800	APBD
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				25.322.607.607	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				17.691.405.407	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				17.691.405.407	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		76,49 %	10.727.170.307	APBD
		Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik		100 %		
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial		81 %	411.658.000	APBD
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase cakupan PPKS (lansia,Disabilitas,Anak Terlantar ,Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial		100 %	484.792.000	APBD
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial		69 %	5.680.450.600	APBD



RKPD Kabupaten Balangan
Tahun 2023

No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100 %	360.235.500	APBD
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase makam yang terawat		100 %	27.099.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				703.504.300	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				1.146.286.000	APBD
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten		21,05	648.434.000	APBD
		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)		73,02		
		IPG (Indeks Pembangunan gender)		92,77		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif		100	50.406.000	APBD
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun		16,56	135.589.800	APBD
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak		100	74.672.200	APBD
	Program Pemenuhan Hak Anak	IPA (Indeks Perlindungan Anak		68,25	140.389.000	APBD
	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif		100	96.795.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				6.984.003.600	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				6.484.916.200	APBD
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan		1 Kerjasama	2.239.563.600	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu		85 %	4.444.440.000	APBD
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang		55 %	300.000.000	APBD
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi				12.636.745.047	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				8.701.823.047	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				8.701.823.047	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		Nilai	8.251.525.047	APBD
		Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik		Persen		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota		100 %	82.438.000	APBD
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi		Rupiah	58.576.000	APBD
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP		%	112.816.000	APBD
		Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP		%		
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		%	78.403.000	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal		100 %	118.065.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				3.671.461.000	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				3.671.461.000	APBD
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja		30 %	84.988.000	APBD
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi		%	2.898.074.000	APBD
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri		%	471.681.000	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih		%	216.718.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Pilihan				263.461.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi				263.461.000	APBD
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi		%	123.232.000	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi		19,05 %	140.229.000	APBD
9	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup				19.738.480.394	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				79.760.460	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				268.250.000	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi		100 %	12.200.000	APBD
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		100 %	35.003.000	APBD
	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee		100 %	3.600.000	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		100 %	200.460.000	APBD
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH		100 %	16.987.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				19.470.230.394	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				19.470.230.394	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	8.289.576.094	APBD
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup		100 %	215.510.000	APBD
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		100 %	986.620.000	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi yang terpelihara baik		100 %	3.028.000.000	APBD
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		100 %	73.960.000	APBD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.		100 %	87.061.300	APBD
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Tahapan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.		100 %	25.000.000	APBD
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		100 %	25.645.000	APBD
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		100 %	119.340.000	APBD
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup		100 %	40.900.000	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan		99 %	6.578.618.000	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				4.123.166.490	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				4.123.166.490	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				4.123.166.490	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP) DISDUKCAPIL		72,40 (BB)	3.328.558.890	APBD
	PROGRAM PENDAFATRAH PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk			262.421.850	APBD
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil		%	259.415.000	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan		%	263.781.900	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan profil kependudukan		%	8.988.850	APBD
11	Dinas Perhubungan				13.310.864.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				13.310.864.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				13.310.864.000	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		68,5 Nilai	4.308.969.390	APBD
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan		86 %	6.182.015.600	APBD
		Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan		57,45 %		
		Presentase Sarana Prasarana terminal yang memadai		36,67 %		
		Presentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai		66,67 %		



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek		100 %		
		Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)		0,35 Nilai		
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika				11.761.158.800	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				11.514.658.800	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika				11.514.658.800	APBD
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja		100 %	5.072.836.480	APBD
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		18 %	3.941.056.652	APBD
		Presentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		20 %		
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemeruintah		80 %	2.500.765.668	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				220.100.000	APBD
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		70 %	220.100.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				26.400.000	APBD
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah		100 %	26.400.000	APBD
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan				8.810.967.387	APBD



RKPD Kabupaten Balangan
Tahun 2023

No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				6.529.306.387	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				6.529.306.387	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (%)		100 %	5.926.616.387	APBD
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS		4 %	77.144.000	APBD
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		10,18 %	43.394.000	APBD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG LABANYA MENINGKAT		29 %	289.291.000	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG SKALA USAHANYA BERTAMBAH		0,32 %	192.861.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Pilihan				781.568.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				781.568.000	APBD
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Ikm Yang Menerapkan Teknologi Industri		10 %	197.682.000	APBD
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Produk Industri Yang Bersertifikat Halal		8,71 %	57.858.000	APBD
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Profil Ikm Yang Berkembang		0,58 %	526.028.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Pilihan				1.500.093.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				1.500.093.000	APBD
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (%)		12 %	54.965.000	APBD
	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENINGKATAN SAPRAS		60 %	904.187.000	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)		7,6 %	118.609.000	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha setelah promosi		29,05 %	161.969.000	APBD
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Jumlah produk yang dipasarkan melalui Kerjasama dengan Pihak Ketiga		27 %	24.108.000	APBD
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		78 %	236.255.000	APBD
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah		22 %		
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata				14.588.349.095	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				13.102.671.095	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudmn Dan Olahraga				13.102.671.095	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik; Tingkat Disiplin Aparatur; Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Nilai SAKIP SKPD		100 %	9.992.713.095	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase wirausaha muda		20 %	917.748.000	APBD
		Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan		40 %		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase prestasi olahraga yang diraih		50 %	2.074.997.000	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentasi partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan		60 %	117.213.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Pilihan				1.485.678.000	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				1.485.678.000	APBD
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	RATA-RATA LAMA KUNJUNGAN WISATA		2 Hari	1.215.302.000	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	A. PERSENTASE PENINGKATAN SDM SEKTOR PARIWISATA		%	270.376.000	APBD
		B. PERSENATSE PRODUK KREASI UNGGULAN		%		
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan				8.354.679.339	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				7.813.484.789	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				7.813.484.789	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja		1	6.836.601.289	APBD
	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		0,13	976.883.500	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				541.194.550	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				541.194.550	APBD
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Cakupan Peningkatan Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Yang Dilestariakan		0,2	79.570.100	APBD
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan	Persentase Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Daerah		0,1	295.528.150	APBD
	Program Pengelolaan Arsip	Terwujudnya Revitalisasi Arsip Dan Aktualisasi Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal		0,1	128.065.500	APBD
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Prosentasi Pelayanan Perijinan Dan Penggunaan Arsip		0,2	38.030.800	APBD
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan				30.928.824.690	APBD



RKPD Kabupaten Balangan
Tahun 2023

No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Urusan Pemerintahan Pilihan				28.300.705.340	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				28.300.705.340	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		73 (BB)	23.579.929.299	APBD
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)		14 %	2.019.757.141	APBD
		Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)		17 %		
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura		17 %		
		Persentase Peningkatan SDM Terampil Pengolah Produk Unggulan TPH		52 %		
		Persentase Peningkatan Produksi Daging		3,5 %		
		Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Hasil IB		6 %		
		Persentase Peningkatan sarana Pertanian		25 %		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian		0,2	195.068.000	APBD
		Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan				
	PROGRAM PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Hewan Menular		550 Ekor	475.205.000	APBD
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan			219.316.900	APBD
		Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura				
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani			1.811.429.000	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentasi Peningkatan Petani peserta Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Bokar yang memperoleh Sertifikat				
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				1.386.641.250	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				1.386.641.250	APBD
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat		10	313.750.250	APBD
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		87,3	805.211.000	APBD
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan		0,05	201.250.000	APBD
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu Dan Keamanan Pangan		0,9	66.430.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Pilihan				1.241.478.100	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan				1.241.478.100	APBD
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		810	-	APBD
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya Ikan (Ton)		675	944.492.100	APBD
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Luas Kawasan Perikanan Lestari (Ha)		290	142.770.000	APBD
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)		46,25	154.216.000	APBD
17	Sekretariat Daerah				59.204.361.889	APBD
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				59.204.361.889	APBD
	Sekretariat Daerah				59.204.361.889	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan di bidang Pengadministrasi Umum yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)		100 %	59.204.361.889	APBD
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)		100 %		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)		100 %	16.379.925.700	APBD
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)		100 %		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD		100 %	2.691.055.900	APBD
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi		100 %		
18	Sekretariat Dprd				42.688.283.591	APBD
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				42.688.283.591	APBD
	Sekretariat Dprd				42.688.283.591	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Nilai IKM terhadap administrasi umum dan penyediaan sarpras DPRD		70 Nilai	26.004.932.691	APBD
		Nilai SAKIP Setwan		70 Nilai		
		Prosentase pemenuhan administrasi laporan keuangan		100 %		
		Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian		100 %		



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Prosentase Pemenuhan Administrasi Sarana dan Prasarana		100 %		
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD		84 Nilai	16.683.350.900	APBD
		PRESENTASE RAPERDA YANG TELAH DIBAHAS OLEH DPRD DAN DISAMPAIKAN KE BAGIAN HUKUM		100 %		
		PRESENTASE KEGIATAN DPRD YANG TERPUBLIKASI DAN TERAKSES OLEH PUBLIK		100 %		
		PRESENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		100 %		
		PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH		100 %		
		PRESENTASE ASPIRASI MASYARAKAT YANG DAPAT DI AKOMODIR(DI BAHAS) OLEH DPRD		100 %		
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah				12.808.930.175	APBD
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				11.685.170.625	APBD
	Perencanaan				11.685.170.625	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		67 Nilai	8,535,034,075	APBD
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah yg baik dan tepat waktu		98,6 %	1,417,363,850	APBD
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD) dgn nilai baik		92,6 %	1,732,772,700	APBD
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				1.123.759.550	APBD
	Penelitian Dan Pengembangan				1.123.759.550	APBD



RKPD Kabupaten Balangan
Tahun 2023

No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Nilai Predikat Indeks Inovasi Daerah		55 Penelitian	1.123.759.550	APBD
		Persentase penelitian dan pengembangan daerah yg dimanfaatkan		100 %		
20	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah				16.938.831.819	APBD
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				16.938.831.819	APBD
	Keuangan				16.938.831.819	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akip Badan Keuangan Daerah		BB	12.276.589.413	APBD
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		WTP	1.339.720.650	APBD
	Program Penataan Dan Pengelolaan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah		40	1.083.222.400	APBD
	Program Peningkatan Dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Penerimaan Pbb p-2 Dan Bphtb, % Penerimaan Pad Selain Pbb -p2 Dan Bphtb, Dan Persentase Pendapatan Non Pad		1	765.944.356	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah			1.473.355.000	
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				12.256.146.382	APBD
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				10.665.919.382	APBD
	Kepegawaian				10.665.919.382	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan/ketersediaan penunjang pelaksanaan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan		100 %	5.958.287.820	APBD



RKPD Kabupaten Balangan
Tahun 2023

No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase tata kelola dan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur berlaku		100 %	4.707.631.562	APBD
	Pendidikan Dan Pelatihan				1.590.227.000	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur		69 %	1.590.227.000	APBD
22	Inspektorat				8.293.040.490	APBD
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				8.293.040.490	APBD
	Inspektorat Daerah				8.293.040.490	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Inspektorat		72 (BB) indeks	7.365.830.490	APBD
		Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik		100 %		
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM		- WBK :3 - WBBM : 3	433.440.000	APBD
		Level Maturitas SPIP		3 (3,05) level		
		Indeks Integritas		79 indeks		
		Level kapabilitas APIP		3 level		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan		78	493.770.000	APBD
23	Kecamatan Lampihong				4.105.243.376,00	APBD
	Unsur Kewilayahan				4.105.243.376,00	APBD
	Kecamatan				4.105.243.376,00	APBD



RKPD Kabupaten Balangan
Tahun 2023

No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		100 %	3.447.384.876,00	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan		100 %	61.158.200,00	APBD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa		100 %	316.454.000,00	APBD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sector		100 %	36.052.600,00	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa tertib administrasi umum		100 %	159.199.200,00	APBD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa		100 %	84.994.500,00	APBD
24	Kecamatan Batumandi				3.332.059.219	APBD
	Unsur Kewilayahan				3.332.059.219	APBD
	Kecamatan				3.332.059.219	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		100 %	2.734.909.219	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan		100 %	13.500.000,00	APBD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa		100 %	284.750.000,00	APBD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sector		100 %	9.250.000,00	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa tertib administrasi umum		100 %	223.800.000,00	APBD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa		100 %	65.850.000,00	APBD
25	Kecamatan Awayan				4.030.814.867	APBD
	Unsur Kewilayahan				4.030.814.867	APBD
	Kecamatan				4.030.814.867	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor		100 %	3.275.877.067	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan		100 %	71.029.000,00	APBD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa		100 %	267.740.000,00	APBD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sector		100 %	33.890.000,00	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa tertib administrasi umum		100 %	283.928.800,00	APBD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa		100 %	98.350.000,00	APBD
26	Kecamatan Halong				3.040.010.000	APBD
	Unsur Kewilayahan				3.040.010.000	APBD
	Kecamatan				3.040.010.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		100 %	3.025.952.043,00	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan		100 %	104.358.000,00	APBD



RKPD Kabupaten Balangan
Tahun 2023

No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa		100 %	315.000.000,00	APBD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sector		100 %	5.865.000,00	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa tertib administrasi umum		100 %	180.155.000,00	APBD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa		100 %	64.864.800,00	APBD
27	Kecamatan Juai				3.448.614.152,00	APBD
	Unsur Kewilayahan				3.448.614.152,00	APBD
	Kecamatan				3.448.614.152,00	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		67,00 Nilai	2.640.509.252,00	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan		100 %	79.165.300,00	APBD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa		100 %	317.741.400,00	APBD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sector		100 %	50.800.000,00	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa tertib administrasi umum		100 %	270.761.000,00	APBD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa		100 %	89.637.200,00	
28	Kecamatan Paringin				7.634.151.931	APBD
	Unsur Kewilayahan				7.634.151.931	APBD
	Kecamatan				7.634.151.931	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		100 %	4.536.539.131	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN); Persentase desa yang ikut dalam lomba desa dan jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu		100 %	72.604.800	APBD
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	2.575.008.000	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		100 %	25.000.000	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Pemerintahan Umum Dan Sosial Kemasyarakatan		100 %	300.000.000	APBD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir, Persentase jumlah desa yang menyampikan laporan tepat waktu		100 %	125.000.000	APBD
29	Kecamatan Tebing Tinggi				2.842.323.132	APBD
	Unsur Kewilayahan				2.842.323.132	APBD
	Kecamatan				2.842.323.132	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		B Nilai	2.274.038.132	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan		100 %	85.535.000,00	APBD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa		100 %	181.700.000,00	APBD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sector		100 %	10.000.000,00	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa tertib administrasi umum		100 %	204.060.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa		100 %	86.990.000	
30	Kecamatan Paringin Selatan				5.064.379.034	APBD
	Unsur Kewilayahan				5.064.379.034	APBD
	Kecamatan				5.064.379.034	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		100 %	3.383.940.534	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan		100 %	43.120.000,00	APBD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa		100 %	1.436.321.000,00	APBD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sector		100 %	25.320.000,00	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa tertib administrasi umum		100 %	129.350.000,00	APBD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa		100 %	46.327.500,00	

5.2 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd)

Berangkat dari tema RKPD tahun 2023 yaitu “Peningkatan Infrastruktur, Sumberdaya Manusia dan Potensi Daerah untuk Memajukan Perekonomian Berkelanjutan”, maka beberapa hal yang menjadi garis besar dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Balangan tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Pada bidang pendidikan, peningkatan kualitas infrastruktur terutama jalan untuk menuju sekolah-sekolah dan kualitas pendidikan terutama di daerah terpencil harus terus ditingkatkan, di lain sisi tenaga-tenaga pengajar terutama yang masih berstatus honorer wajib diperhatikan.
2. Pada bidang kesehatan, DPRD Balangan mendukung adanya upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Demikian juga dengan pembangunan poskesdes di desa-desa agar Kualitas layanan kesehatan di desa-desa terus dapat ditingkatkan.
3. Pada bidang ekonomi kerakyatan, maka permasalahan pertanian terutama hasil produksi padi, karet, dan ternak serta perikanan menjadi fokus untuk ditangani. Di sisi lain, produksi pertanian ini harus juga mampu membawa pengaruh positif terhadap petani yang dicirikan meningkatnya nilai tukar petani Balangan. DPRD Balangan juga berharap akan lebih banyak kegiatan dan anggaran yang bisa dialokasikan untuk menumbuhkan usaha-usaha kecil dan mikro yang merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan Balangan.
4. Pada bidang peningkatan infrastruktur, DPRD Balangan berharap lebih diprioritaskan kepada infrastruktur publik atau layanan umum yang dibutuhkan masyarakat, seperti pembangunan sarana olahraga, perbaikan jalan, perbaikan pasar, dan fasilitas umum lainnya.
5. Pada bidang peningkatan kinerja aparatur, yang secara umum diwakili oleh predikat BPK dan Predikat LAKIP, DPRD Balangan berharap Tahun 2021 ini Balangan tetap mendapatkan WTP (wajar tanpa pengecualian) dan Predikat Lakip B yang diperoleh Balangan di tahun 2020 dapat ditingkatkan menjadi BB di tahun mendatang.

Terkait Indeks Desa Membangun yang menjadi parameter keberhasilan pembangunan desa, DPRD Balangan berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk bisa bekerjasama dalam meningkatkan kualitas desa, dimana kondisi sekarang masih banyak desa di Balangan yang masuk dalam kategori desa tertinggal.



5.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan untuk tahun 2022 adalah sebagaimana tabel 5.2

Tabel 5.2. Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	TA. 2022
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.136.627.110.984,49
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	81.060.409.287,12
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	12.052.425.000,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.762.318.950,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.072.762.500,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.172.902.837,12
4.2.	Dana Transfer	1.035.177.168.586,73
4.2.1.	<i>Transfer Pemerintah Pusat</i>	
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	271.298.473.600,00
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum	398.732.417.140,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Khusus Fisik	74.236.905.600,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	66.967.084.366,91
4.2.2.1	Dana Insentif Daerah (DID)	35.555.079.040,00
4.2.2.2	Dana Desa	123.202.239.750,00
4.2.2.	<i>Transfer Antar Daerah</i>	
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	65.184.969.089,82
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.389.533.110,64
4.3.6.	Pendapatan Hibah (Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis/Lumpsum Payment)	6.180.000.000,00



*RKPD Kabupaten Balangan
Tahun 2023*

4.3.1.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Pendapatan Hibah Dana BOS)	14.209.533.110,64
	JUMLAH PENDAPATAN	1.136.627.110.984,49
5.	BELANJA DAERAH	1.216.191.008.753,40
5.1.	BELANJA OPERASI	772.059.222.239,40
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	410.215.162.000,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	333.577.188.342,40
5.1.05	BELANJA HIBAH	21.270.751.500,00
5.1.06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	6.996.120.397,00
5.2.	BELANJA MODAL	250.633.398.045,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.552.289.133,52
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.279.298.489,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.918.947.733,50
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159.612.807.943,38
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.270.054.745,60
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.500.000.000,00
5.3.01	BELANJA TIDAK TERDUGA (untuk kondisi normal Kecuali 2020 dan 2021)	5.500.000.000,00
5.3.	BELANJA TRANSFER	187.998.388.469,00
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA dan PEMERINTAH DESA	1.381.474.395,00
5.1.7.a	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA (ADD APBN)	119.613.825.000,00
5.1.7.a	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA (ADD APBD)	67.003.089.074,00
	JUMLAH BELANJA	1.216.191.008.753,40
	SURPLUS/(DEFISIT)	-79.563.897.768,91
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	79.563.897.768,91
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	79.563.897.768,91



*RKPD Kabupaten Balangan
Tahun 2023*

6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	79.563.897.768,91
6.1.7.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00
6.1.8.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Pemerintah Dearah	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	79.563.897.768,91
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	79.563.897.768,91
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam melihat kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi serta efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada RPJMD. Dengan demikian, penetapan indikator kinerja diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah sehingga harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.



6.1 Indikator Kinerja Makro Daerah

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja makro pembangunan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 dapat diuraikan dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Balangan 2023

No.	INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun	Target Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2026
1	2	3	4	5	6
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,71	70,16 - 70,49	71,50
2	Angka Kemiskinan	Angka	5,05	5,3 - 5,0	4,50
3	Angka Pengangguran Terbuka (%)	Persen	2.43	2.4	2.30
4	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persen	2,5 - 3	3,30 - 3,50	4,5 - 5
5	Pendapatan Perkapita (PDRB) (%)	Persen	1,5 – 2	1,5 – 2	4,5
6	Indeks Gini	Indeks	0,290	0,26	0,275
7	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,12	68,02	69,38

Sumber : RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026



6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

Penyajian indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 ditetapkan sebanyak 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan Rencanaa Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan pada tahun 2022. Adapun yang menjadi target kinerja utama pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Balangan 2023

Inikator Sasaran		Target Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
1	2	3	4	5
1	Indeks Infrastruktur Publik	55,03	41,58	70,51
2	Indeks infrastruktur permukiman	30,87	31,42	33,11
3	Indeks Kualitas Air	50.20	50.3	50.60
4	Indeks Kualitas Udara	91.05	91.16	91.49
5	Indeks Kualitas Lahan	53.99	55.67	60.74
6	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	12,89	13.14	13,89
7	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa (%)	6,30	6.40	6,70
8	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	0,42	0.44	0,50
9	Nilai Realisasi Investasi PMDN (milyar rupiah)	238,65 M	250,59 M	1.546 M
10	Angka Pengangguran Terbuka (%)	2.43	2.40	2.30
11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.09	8.36	9.17
12	Angka Harapan Lama Sekolah	12.72	12.85	13.24
13	Usia Harapan Hidup	68.12	68.32	68.92
14	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)	177	176	130
15	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran)	15	13	11



Indikator Sasaran		Target Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
1	2	3	4	5
16	Prevalensi stunting (%)	18.4	17	14
17	Angka kelahiran remaja umur usia 15 - 19 tahun (ASFR)	21	20,58	19.32
18	NILAI SAKIP	72,40 (BB)	72,40 (BB)	78,20 (BB)
19	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
20	Nilai EKPPD	3,587	3,5900	3,6
21	Indeks Pelayanan Publik	3.40 (B-)	3.51 (B)	4.91 (A)
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,6	83,7	85
23	Angka Kemiskinan	5,3 - 5,0	5,2 - 5,0	4,9 - 4,7
24	Angka PPKS yang tertangani (%)	52,95	58,95	76,95
25	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0	0	0
26	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100
27	Indeks Resiko Bencana	139.89	139.89	139.89
28	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	58	68	100
29	Indeks Desa Membangun	0,6595	0.6695	0,6995

Sumber : RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

6.3. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Selain, Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga digunakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah ini akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan daerah. Adapun Indikator Kinerja Penyelenggaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 6.3.

Indikator Kinerja Penyelenggaran Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2023

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
A				ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
	A.1			Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
		1		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
			1	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	-2,47	2,5 - 3	3,30 - 3,50	4,5 - 5	PEMKAB. BALANGAN
			2	Indeks Gini	0,298	0,290	0,287	0,275	PEMKAB. BALANGAN
			3	Angka Kemiskinan	5,32	5,05	5,2	4,50	PEMKAB. BALANGAN
			4	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	68,82	69,71	70,16 - 70,49	71,50	PEMKAB. BALANGAN
			5	NILAI SAKIP	66,04 (B)	70,40 (BB)	72,40 (BB)	78,20 (BB)	PEMKAB. BALANGAN
			6	Nilai IKM (%)	82,35	83,25	83,7	85	PEMKAB. BALANGAN
			7	Indeks RB	53,80	57,80	59,8	65,80	PEMKAB. BALANGAN
			8	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	PEMKAB. BALANGAN
			9	Nilai EKPPD Kabupaten Balangan	3,562	3,585	3,5900	3,6	PEMKAB. BALANGAN
	A.2			Fokus Kesejahteraan Sosial Masyarakat					
		1		Pendidikan					
			1	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,46	12,72	12.85	13,24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
			2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,55	8,09	8.36	9,17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2		Kesehatan					
			1	Usia Harapan Hidup (UHH)	67,72	68,12	68.32	68,92	DINKES, DALDUK & KB
			2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100,000 kelahiran hidup	89	177	176	130	DINKES, DALDUK & KB
			3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7	15	14	11	DINKES, DALDUK & KB
			4	Prevalensi stunting	25,7	18,4	17	14	DINKES, DALDUK & KB
		3		Ketenagakerjaan					
			1	Angka Pengangguran Terbuka	2,46	2,43	2.43	2,3	INAS NAMDAL, PTSP, NAKERTRANS
			2	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja (%)	8,73	30	30	30	INAS NAMDAL, PTSP, NAKERTRANS
			3	Persentase tenaga kerja yang kompeten/ besertifikat kompetensi (%)	6,95	4	4	4	INAS NAMDAL, PTSP, NAKERTRANS
			4	Persentase Penempatan Tenaga Kerja didalam dan luar negeri (%)	64,26	65	65	65	INAS NAMDAL, PTSP, NAKERTRANS
			5	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi (%)	100	90	90	90	INAS NAMDAL, PTSP, NAKERTRANS
		4		Keuangan Daerah					
			1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	6	6	6	8	BPKAD
			2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD



No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
				2020	2022	2023		
1	2			3	4	5	6	7
		3	Indeks pengelolaan keuangan	86	87	87	90	BPKAD
		4	Indeks pengelolaan asset (%)	38	40	42	52	BPKAD
		5	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Perimbangan	8	8	8	10	BPKAD
B			ASPEK PELAYANAN UMUM					
	B.1		Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar					
		1	Pendidikan					
		1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam PAUD	66,55	70,75	72,85	79,15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	90,09	93,69	95,49	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 12-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	72,86	76,26	77,96	83,06	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraan	80,36	83,76	85,46	90,56	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		5	Persentase Guru Sertifikasi (%)	83,26	85	86	89	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV (%):					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			- TK/PAUD	74,36	75,36	75.86	77,36	
			- SD	79,39	80,39	80.89	82,39	
			- SMP	96,04	97,04	97.54	100	



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
		2		Kesehatan					
			1	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1	2	2	1	DINKES, DALDUK & KB
			2	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (per 1000)	0,99	1,18	1.18	1,18	DINKES, DALDUK & KB
			3	Persentase keluarga yang melaksanakan PHBS (%)	43	55	60	75	DINKES, DALDUK & KB
			4	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan (%)	83	87	89	95	DINKES, DALDUK & KB
			5	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar (%)	75	83,33	83.33	100	DINKES, DALDUK & KB
			6	Persentase pemenuhan sarana prasarana kesehatan sesuai standar (%)	30,64	35	37	43	DINKES, DALDUK & KB
			7	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	100	100	100	100	DINKES, DALDUK & KB
			8	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan (%)	100	100	100	100	DINKES, DALDUK & KB
			9	Presentase Pelayanan Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Bayi Baru Lahir(%)	100	100	100	100	DINKES, DALDUK & KB
			10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100	100	DINKES, DALDUK & KB
			11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	DINKES, DALDUK & KB



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
			12	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	DINKES, DALDUK & KB
			13	Persentase warga negara usia 60 th keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	DINKES, DALDUK & KB
			14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	DINKES, DALDUK & KB
			15	Persentase penderita DM Yang mendaptkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	DINKES, DALDUK & KB
			16	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100	100	DINKES, DALDUK & KB
			17	Persentase Orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100	100	DINKES, DALDUK & KB
			18	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100	100	DINKES, DALDUK & KB
		3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
			1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	48,3	66,07	73.67	88,47	DINAS PUPR, PERKIM
			2	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	76,9	80,06	82.08	90,17	DINAS PUPR, PERKIM



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
			3	Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi baik (%)	21,53	24,2	28.31	44,39	DINAS PUPR, PERKIM
			4	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun (%)	11,29	12,41	13.03	14,9	DINAS PUPR, PERKIM
			5	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak (%)	78,65	82,27	83.27	86,27	DINAS PUPR, PERKIM
			6	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestic (%)	91,88	92,75	93.76	96,76	DINAS PUPR, PERKIM
			7	Jumlah Bangunan yang ditata (buah)		1	1	5	DINAS PUPR, PERKIM
			8	Persentase bangunan/gedung dalam kondisi baik (%)	89,27	89,49	89.6	89,93	DINAS PUPR, PERKIM
			9	Persentase SDM Jasa Konstruksi dan BUIK yang dibina (%)	34,6	50	60	95	DINAS PUPR, PERKIM
			10	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang (%)	10	42	56	100	DINAS PUPR, PERKIM
			11	Persentase tersedianya informasi rencana tata ruang wilayah (%)	20	42	56	100	DINAS PUPR, PERKIM
			12	Persentase tersedianya luasan RTH (%)	3,91	4,00	4,05	4,05	DINAS PUPR, PERKIM
		4		Permukiman dan Perumahan Rakyat					
			1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	100	DINAS PUPR, PERKIM



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
			2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90,28	95	95	97	DINAS PUPR, PERKIM
			3	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	84	85	87	93	DINAS PUPR, PERKIM
			4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani (%)	71,4	78,49	84.78%	100	DINAS PUPR, PERKIM
		5		Ketenteraman Umum, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat					
			1	Angka kejadian gangguan ketentraman sosial	4	3	3	2	BAKESBANGPOL
			2	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0	0	0	0	BAKESBANGPOL
			3	Indeks Resiko Bencana	0,000669	0,000695	139.89	0,000747	DINAS DAMKAR & DALBENDA
			4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	DINAS DAMKAR & DALBENDA
			5	Indeks Ketentaraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	100	DINAS SATPOL-PP
			6	Angka pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat	29	28	27	24	DINAS SATPOL-PP
		6		Sosial					
			1	Angka PPKS yang tertangani (%)	40,95	52,95	58.95	76,95	DINSOS, PEMBERPUAN & PEMDES
			2	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	10	12	13	16	DINSOS, PEMBERPUAN & PEMDES



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
B.2				Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar					
7				Tenaga Kerja					
			1	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja(%)	8,73	30	30	30	DINAS NAMDAL, PTSP, NAKERTRANS
			2	Persentase tenaga kerja yang kompeten/ bersertifikat kompetensi (%)	6,95	4	4	4	DINAS NAMDAL, PTSP, NAKERTRANS
			3	Persentase Penempatan Tenaga Kerja didalam dan luar negeri (%)	64,26	65	65	65	DINAS NAMDAL, PTSP, NAKERTRANS
			4	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi (%)	100	90	90	90	DINAS NAMDAL, PTSP, NAKERTRANS
8				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
			1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,22	92,74	92.77	92,86	DINSOS, PEMBERPUAN & PEMDES
			2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,14	72	73.02	76	DINSOS, PEMBERPUAN & PEMDES
			3	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	15,9	14	13.9	13,6	DINSOS, PEMBERPUAN & PEMDES
			4	Rasio Kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)	2,1	1,9	1.8	1,5	DINSOS, PEMBERPUAN & PEMDES
			5	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	12,35	21	21.05	21,2	DINSOS, PEMBERPUAN & PEMDES
			6	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang	18,36	17,26	16.56	13,86	DINSOS, PEMBERPUAN & PEMDES



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
				umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun (%)					
			7	Indeks Kualitas keluarga	52,67	64	66	72	DINSOS, PEMBERPUAN & PEMDES
			8	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD (%) / Hasil Rakortekbang	12.35	22	21,05		
		9		Pangan					
			1	Persentase cadangan pangan masyarakat (%)	10,00	10,00	10	10,00	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
			2	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah (%)	87,4	87,3	87,5	87,8	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
			3	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	5,00	5,00	5	5,00	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
			4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	90	90	90	90	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		10		Lingkungan Hidup					
			1	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	100	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			2	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	100	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			3	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi yang terpelihara baik(%)	100	100	100	100	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
			4	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (%)	100	100	100	100	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			5	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan. (%)	100	100	100	100	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			6	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH. (%)	100	100	100	100	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			7	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (%)	100	100	100	100	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			8	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (%)	100	100	100	100	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			9	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	100	100	100	100	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			10	Persentase Pengelolaan Persampahan (%)	72,55	99	99	100	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Hasil Rakortekbang)	66,81	67,57	68,02		
		11		Pertanahan					
			1	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi (%)	100	100	100	100	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
				2020	2022	2023		
1	2			3	4	5	6	7
		2	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (%)	100	100	100	100	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		3	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100	100	100	100	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		4	Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah(%)	100	100	100	100	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		5	Persentase Penatagunaan Tanah(%)	100	100	100	100	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	12		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
		1	Cakupan kepemilikan dokumen penduduk (%)	69	92	94	97	DINAS DUKCATPIL
	13		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
		1	Persentase Desa Dengan Klasifikasi Minimal Maju	127	136	137	140	DINSOS, PEMBERPUAN & PEMDES
		2	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	0,2	0,52	0.65	1,00	DINSOS, PEMBERPUAN & PEMDES
		3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	36,92	37,05	37.12	37,31	DINSOS, PEMBERPUAN & PEMDES
		4	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal (%)		64,28	64,29	64,32	DINSOS, PEMBERPUAN & PEMDES
		5	Jumlah Desa Mandiri (Hasil Rakortekbang)		1			
		6	Jumlah Desa Berkembang (Hasil Rakortekbang)	127	136			



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
			7	Jumlah Desa Tertinggal (Hasil Rakortekbang)	14	5			
			8	Jumlah BUMDes Berkembang (Hasil Rakortekbang)	28	45			
		14		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
			1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,17	1,09	1.08	1,05	DINKES, DALDUK & KB
			2	Angka kelahiran remaja umur usia 15 - 19 tahun (ASFR)	24,71	21	20.58	19,32	DINKES, DALDUK & KB
			3	Cakupan Peserta KB Aktif (CPR)	81,21	81,27	81.29	81,33	DINKES, DALDUK & KB
			4	Indeks Pembangunan Keluarga (Hasil Rakortekbang)		60,32	62,44		
			5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Hasil Rakortekbang)	24,71	21	19		
			6	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Hasil Rakortekbang)	2,35	2,25	2,24		
			7	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) (Hasil Rakortekbang)	80,75	72,38	72,38		
			8	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (Hasil Rakortekbang)	8,00	4,95	4,90		
		15		Perhubungan					
			1	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan (%)	78	82	86	100	DINAS PERHUBUNGAN



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
			2	Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan(%)	19,48	39,48	57.95	100	DINAS PERHUBUNGAN
			3	Presentase Sarana Prasarana terminal yang memadai (%)	20	26,67	36.67	100	DINAS PERHUBUNGAN
			4	Presentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai(%)	33,33	55,56	66.67	100	DINAS PERHUBUNGAN
			5	Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek(%)	15,8	66,7	100	100	DINAS PERHUBUNGAN
			6	Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	0,29	0,32	0.35	0,47	DINAS PERHUBUNGAN
		16		Komunikasi dan Informatika					
			1	Prosentase informasi telah disampaikan kepada masyarakat (%)	75	80	85	100	DINAS KOMINFO
			2	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	5	5	100	25	DINAS KOMINFO
			3	Persentase Publikasi di Media Massa	75	80	85	100	DINAS KOMINFO
			4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	62	10	40%	25	DINAS KOMINFO
			5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0	18	18	23	DINAS KOMINFO
		17		Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah					
			1	Persentase Koperasi Berkualitas	2,72	3	4	7	DINAS KOPERIND DAN PERDAGANGAN



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
			2	Persentase Koperasi Yang Memperoleh Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	8,18	10,18	10.18	10,18	DINAS KOPERIND DAN PERDAGANGAN
			3	Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	26,64	28	29	32	DINAS KOPERIND DAN PERDAGANGAN
			4	Persentase Usaha Mikro yang skala usahanya bertambah	0,43	0,3	0.32	0,38	DINAS KOPERIND DAN PERDAGANGAN
		18		Penanaman Modal					
			1	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	100%	2	2	12	DINAS NAMDAL, PTSP, NAKERTRANS
			2	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	100%	1	1	6	DINAS NAMDAL, PTSP, NAKERTRANS
			3	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi (Milyar Rupiah)	100%	200	210	1300	DINAS NAMDAL, PTSP, NAKERTRANS
			4	Persentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	100	100	100	100	DINAS NAMDAL, PTSP, NAKERTRANS
			5	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP(%)	100	100	100	100	DINAS NAMDAL, PTSP, NAKERTRANS
			6	Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP (%)	100	100	100	100	DINAS NAMDAL, PTSP, NAKERTRANS
			7	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal (%)	100	100	100	100	DINAS NAMDAL, PTSP, NAKERTRANS
		19		Kepemudaan dan Olahraga					
			1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan & Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%)		0,045	0,046	0,049	DINAS PORA DAN PARIWISATA



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
			2	Peningkatan Prestasi Olahraga	10	10	11	14	DINAS PORA DAN PARIWISATA
			3	Jumlah Atlit Berprestasi	19	22	23	26	DINAS PORA DAN PARIWISATA
		20		Statistik					
			1	Persentase elemen data dan informasi statistik yang terpublikasikan dan terupdate	50	0	75	100	DINAS KOMINFO
			2	Persentase OPD yang memiliki sistem aplikasi	0	25	50	100	DINAS KOMINFO
			3	Persentase desa telah mengakses sistem informasi data	0	25	50	100	DINAS KOMINFO
		21		Persandian					
			1	Terfasilitasinya pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	10	20	40	100	DINAS KOMINFO
		22		Kebudayaan					
			1	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	48	58	68	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			2	Persentase cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	53,33	66,67	73.33	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		23		Perpustakaan					
			1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	50	60	70	420	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			2	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,052	0,053	0.053	0,053	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		24		Kearsipan					
			1	Indek pengawasan kearsipan	83,47	83,51	83.53	83,59	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
B.3				Fokus Pelayanan Urusan Pilihan					
1				Kelautan dan Perikanan					
			1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	952.09	800.00	810.00	850.00	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
			2	Jumlah Produksi Budidaya Ikan (ton)	884.92	650.00	675.00	975.00	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
			3	Luas Kawasan Perikanan Lestari (Ha)	250.00	270.00	290.00	370.00	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
			4	Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapita/thn)	46.00	46.00	46.25	48.00	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2				Pariwisata					
			1	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	100	10.00	20.00	100.00	DINAS PORA DAN PARIWISATA
			2	Rata-rata lama kunjungan wisata	0	1 hari	1 hari	2 hari	DINAS PORA DAN PARIWISATA
			3	Persentase Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	25.00	10.00	10.00	100.00	DINAS PORA DAN PARIWISATA
3				Pertanian					
			1	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)	1000 Kg/Ha	0.25%	0,50%	1,50%	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
			2	Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)	3 Ton/Ha	2,67%	2,68%	2,72%	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
			3	Persentase Produktifitas Hortikultura (Ton/Ha)	53.469 Kwintal/Ha	0,12%	0,13%	0,17%	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
			4	Persentase Peningkatan SDM Terampil Pengolah Produk Unggulan TPH	140 Orang	50%	51,00%	55%	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
			5	Persentase Peningkatan Produksi Daging	1,933.289Kg	3,50%	3,50%	21%	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN



No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
				2020	2022	2023		
1	2			3	4	5	6	7
		6	Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Hasil IB	140 ekor	6%	6%	36%	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		7	Persentase Peningkatan sarana Pertanian		5%	5%	30%	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		8	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	124 unit	36%	42,50%	68,50%	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		9	Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan	18 Buah	6%	6%		DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		10	Persentase Penurunan Kejadian Hewan Menular	938 Ekor	0,20%	0,20%	1,20%	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		11	JumlahKegiatan dan Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan	11 Kegiatan	16 Kegiatan	24 Kegiatan	132 Kegiatan	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		12	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan	1000 Ha	3%	8%	30%	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		13	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	4000 Ha	5%	6%	10%	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		14	Persentase SDM Terampil tanaman pangan dan Hortikultura Di tiap Kecamatan	100 Orang	10%	12%	20%	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		15	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani dan Pengembangan Korporasi Petani	27 (2.29%)	3,60%	5%	13,10%	DINAS KETAPANG, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	5		Perdagangan					
		1	Persentase Peningkatan Supras	50.00	40.00	44.44	100.00	DINAS KOPERIND DAN PERDAGANGAN
		2	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha setelah promosi(%)	15.00	15.00	26.00	68.00	DINAS KOPERIND DAN PERDAGANGAN



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
			3	Persentase Peningkatan Jumlah produk yang dipasarkan melalui MOU dengan retail	20.00	20.00	25.00	35.00	DINAS KOPERIND DAN PERDAGANGAN
			4	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	74.00	76.00	77.00	81.00	DINAS KOPERIND DAN PERDAGANGAN
			5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	17.00	27.00	20.00	30.00	DINAS KOPERIND DAN PERDAGANGAN
			6	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	8.08	8.00	7.80	6.80	DINAS KOPERIND DAN PERDAGANGAN
			7	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (%)	4.80	7.00	9.00	26.00	DINAS KOPERIND DAN PERDAGANGAN
		6		Perindustrian					
			1	Persentase IKM Yang Menerapkan Teknologi Industri (%)	4.10	10.00	10.00	80.00	DINAS KOPERIND DAN PERDAGANGAN
			2	Persentase Produk Industri Yang Bersertifikat Halal (%)	5.83	6.79	7.75	12.61	DINAS KOPERIND DAN PERDAGANGAN
			3	Profil IKM Yang Berkembang (%)	0.00	0.19	0.38	3.58	DINAS KOPERIND DAN PERDAGANGAN
		7		Transmigrasi					
			1	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi (%)	18.82	19.12	18.91	19.55	DINAS NAMDAL, PTSP, NAKERTRANS
			2	Persentase Jumlah warga transmigrasi di Kabupaten Balangan (%)	60.00	70.00	70.00	70.00	DINAS NAMDAL, PTSP, NAKERTRANS



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
B.4				Fokus Pelayanan Urusan Penunjang					
1				Perencanaan					
			1	Indeks perencanaan pembangunan daerah	-	95	95,5	98	BAPPEDALITBANG
			2	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional, propinsi, kabupaten)	-	98.2 %	98.4 %	99.2 %	BAPPEDALITBANG
			3	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang infrastruktur & kewilayahan	-	91.8 %	92.6 %	96.8 %	BAPPEDALITBANG
			4	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang infrastruktur & kewilayahan	-	91.8 %	92.6 %	96.8 %	BAPPEDALITBANG
			5	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-	91.8 %	92.6 %	96.8 %	BAPPEDALITBANG
			6	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-	91.8 %	92.6 %	96.8 %	BAPPEDALITBANG
2				Keuangan Daerah					



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
			1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	6	6	6	8	BPKPAD
			2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPAD
			3	Indeks pengelolaan keuangan	86	87	87	90	BPKPAD
			4	Indeks pengelolaan asset (%)	38	38,91	40	52	BPKPAD
			5	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Perimbangan	8	8	8	10	BPKPAD
			6	Persentase APBD disampaikan tepat waktu (%)	100	100	100	100	BPKPAD
			7	Persentase penerimaan PBB-P2 dan BPHTB (%)	–	100	100	100	BPKPAD
			8	Persentase penerimaan PAD selain PBB-P2 dan BPHTB (%)	–	100	100	100	BPKPAD
			9	Persentase pendapatan non PAD (%)	–	100	100	100	BPKPAD
		3		Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					
			1	Indeks merit system	257	260	265	325	BPKAD
			2	Indeks profesionalitas ASN	67.06	69	75	87	BKPSDM
			3	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	-	45	50	75	BKPSDM
			4	Persentase calon ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat diklat manajerial (%)	100	100	100	100	BKPSDM
			5	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi S2/S3 (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	5,8	10	10	25	BKPSDM



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
			6	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	51,13	51,85	52,42	80,65	BKPSDM
			7	Persentase Pemenuhan kepegawaian sesuai formasi (%)	100	100	100	100	BKPSDM
		4		Penelitian dan Pengembangan					
			1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang (%)	70	100	100	100	BAPPEDALITBANG
			2	Indeks Inovasi	1.616	50 (inovatif)	55 (inovatif)	75 (sangat inovatif)	BAPPEDALITBANG
		5		Administrasi Pemerintahan Umum					SEKRETARIAT DAERAH
			1	Nilai capaian pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai amanat Permendagri No. 4 tahun 2010 (%)	100	100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
			2	Nilai EKPPD Kabupaten Balangan	3.562	3.575	3.585	03:06	
			3	Indeks kelembagaan	76.9	77.1	77.3	80.1	SEKRETARIAT DAERAH
			4	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (%)	20	66	74	87	SEKRETARIAT DAERAH
			5	Indeks Pelayanan Publik	-	3,01 (-B)	3,40 (-B)	4,91 (A)	SEKRETARIAT DAERAH
			6	Persentase Raperda yang dibahas DPRD (%)	82	84	84	90	SEKRETARIAT DPRD
		6		Pengawasan					INSPEKTORAT
			1	Indeks Integritas kabupaten (SPI)	77.28	78	78	82	INSPEKTORAT
			2	Maturitas SPIP	100	3 (3,02)	3 (3,02)	3 (3,2)	INSPEKTORAT
			3	Tingkat Kapabilitas APIP	100	3	3	3	INSPEKTORAT



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
			4	Persentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti (%)	90	75	75	85	INSPEKTORAT
			5	Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK / WBBM	0	WBBM : 1	WBK : 1 WBBM : 1	WBK : 3 WBBM : 4	INSPEKTORAT
		7		Kewilayahan					
			1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.72	84.625	85.88	89.81	KECAMATAN
			2	Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif (%)	–	100	100	100	KECAMATAN
			3	Persentase koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum (%)	–	100	100	100	KECAMATAN
			4	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	–	100	100	100	KECAMATAN
			5	Persentase desa dengan pencatatan aset baik (%)	–	100	100	100	KECAMATAN
		8		Pemerintahan Umum					BAKESBANGPOL
			1	Persentase Koordinasi gugus tugas;Persentase Masyarakat yang mengikuti seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan (%)	100	100	100	100	BAKESBANGPOL
			2	Persentase Parpol yang aktif (%)	100	100	100	100	BAKESBANGPOL
			3	Persentase Organisasi Masyarakat dibina yang aktif (%)	100	100	100	100	BAKESBANGPOL
			4	Persentase Koordinasi Penyuluhan narkoba; Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif (%)	100	100	100	100	BAKESBANGPOL



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
			5	Persentase Daerah Rawan Gangguan Ketentraman yang terpetakan; persentase daerah rawan konflik yang diawasi; persentase koordinasi deteksi dini konflik sosialisasi yang dilaksanakan (%)	100	100	100	100	BAKESBANGPOL
C				ASPEK DAYA SAING DAERAH					
	C.1			Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah					
		1		Produktivitas Daerah					
			1	PDRB per kapita (ADHK) (juta)	68,87	74.66	76.52	84.47	PEMKAB. BALANGAN
			2	PDRB per kapita (ADHB) (juta)	80,46	88.2	90.41	99.79	PEMKAB. BALANGAN
		2		Pengeluaran Penduduk					PEMKAB. BALANGAN
			1	Rata-Rata Pengeluaran per kapita	1,186,190	1,245,500	1,276,637	1,409,168	PEMKAB. BALANGAN
		3		Pertanian					
			1	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,98	100,99	101	101,04	PEMKAB. BALANGAN
	C.2			Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur					
			1	Indeks Infrastruktur Wilayah	58,24	64,11	68,68	85,82	PEMKAB. BALANGAN
			2	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)	22.931	23.631	24.331	22.931	
			3	Jumlah rumah tangga yang mendapat aliran listrik (PLN)	28.252	28.752	29.252	31.252	PEMKAB. BALANGAN
			4	Jumlah hotel, penginapan dan losmen	4	4	4	5	PEMKAB. BALANGAN
	C.3			Fokus Iklim Berinvestasi					PEMKAB. BALANGAN



No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
					2020	2022	2023		
1				2	3	4	5	6	7
			1	Lama Proses Perizinan (hari)	5	5	5	5	PEMKAB. BALANGAN

Sumber : RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

BAB VII PENUTUP

7.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, RKPD 2023 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Kabupaten Balangan. Kaidah dan prinsip tersebut adalah :

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
3. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah usulan kegiatan/pekerjaan dari anggota DPRD Kabupaten Balangan berdasarkan hasil reses yang dilaksanakan di daerah pemilihan/daerah konstituen.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
5. Secara teknis, RKPD disusun menggunakan aplikasi Simda Perencanaan yang dikembangkan oleh BPKP yang terintegrasi dengan Simda Keuangan.
6. Dalam rangka penyusunan RKPD berbasis spasial, maka akan diterapkan perencanaan yang berbasis geoportal.
7. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD untuk itu RKPD perlu dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Balangan.
8. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya,

setiap SKPD harus membuat Rencana Kerja (RENJA) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.

9. Seluruh perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.

7.2 Kaidah-Kaidah Pendanaan

Aspek pendanaan dalam RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 ini tidak saja bersumber dari dana pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan swasta, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun dalam skema kemitraan. Dalam rangka upaya peningkatan kemampuan pendanaan daerah dan peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah yang terus menerus dan berkesinambungan. Adapun kaidah-kaidah dalam hal pendanaan antara lain:

1. Peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan daerah dengan penggalan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber penerimaan daerah;
2. Optimalisasi dana perimbangan, dana dekonsentrasi serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat;
3. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektifitas, akuntabel dan transparan berbasis money follow program;
4. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten, antar pemerintah daerah lainnya, serta dengan masyarakat, dunia usaha maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan;
5. Penetapan dan penerapan Harga Satuan Belanja yang sudah digunakan di dalam aplikasi SIPD Kemendagri.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Kabupaten Balangan dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Balangan sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga “Balangan yang Maju dan Sejahtera” dapat terwujud secara efisien dan efektif.

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2023																			
Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
												Nasional	Daerah						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						289,435,035,220						6,375,077,400				
1	1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan pelayanan publik urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	227,927,945,007					100 %	4,192,817,300		
1	1	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Laporan yang dibuat	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	201,933,200					8 Dokumen	146,450,000		
1	1	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	9,267,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	5 Dokumen	9,250,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	192,666,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Laporan	137,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	222,785,494,607					100 %	1,358,926,100		
1	1	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	221,100,919,207	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Orang/bula n	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1,684,575,400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	1,358,926,100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan dan Pencatatan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan	Persen		Persen	100 Persen	1,240,755,000					100 Persen	845,155,800		
1	1	1	1	2.03	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	144,330,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	183,905,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1	2.03	3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	790,980,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Laporan	296,160,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1	2.03	4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				9 Laporan	305,445,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	9 Laporan	365,090,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	248,984,000					100 %	518,250,000		
1	1	1	1	2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				2 Paket	116,640,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Paket	118,250,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				12 Orang	132,344,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Orang	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	1,653,265,200					100 %	1,324,035,400		
1	1	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	66,305,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	20 Paket	66,314,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	151,845,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Paket	173,949,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	8,766,300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Paket	9,391,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	459,403,300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Paket	463,140,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	51,452,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Dokumen	51,480,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	915,492,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Laporan	559,760,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	53,922,000						100 %	0	
1	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	53,922,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	40 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	872,372,400						100 %	0	
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	213,315,400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	659,057,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	871,218,600						100 %	0	
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	270,627,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	300,148,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	77,929,700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	222,513,500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam PAUD	%		%	72,85	60,586,819,213						79,15	1,530,760,100	
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	%		%	95,49							100		
						Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	%		%	77,96							83,06		
1	1	1	2			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraan	%		%	85,46							90,56		

1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	%		%	93.09 %	28,945,833,769						93.09 %	335,710,500	
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 paket 1 paket	776,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 paket 1 paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				2 paket	231,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				176 Satuan Pendidikan	397,900,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	176 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				176 Satuan Pendidikan	145,420,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	176 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	626,336,900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				0 Orang	13,168,350,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				169 Satuan Pendidikan	132,703,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	169 Satuan Pendidikan	335,710,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	13,266,363,869	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				0 Orang	200,360,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	%		%	76.26 %	16,367,996,244						76.26 %	460,000,000	
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 paket	230,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				750 Peserta Didik	6,326,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	750 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				0 Peserta Didik	194,900,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				0 Satuan Pendidikan	101,540,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				26 Peserta Didik	456,070,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	26 Peserta Didik	460,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				0 Orang	5,600,300,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				0 Satuan Pendidikan	69,593,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				100 Satuan Pendidikan	3,388,693,244		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	100 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
													DAK Non Fisik-BOS Reguler						
													DAK Non Fisik-BOS Kinerja						
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat paritipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam PAUD	%		%	68.75 %	12,000,310,200						68.75 %	698,049,600	
1	1	2	2.03	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				0 Paket	42,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				0 Peserta Didik	251,305,600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				600 Orang	5,724,050,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	600 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	1,617,099,600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				249 Satuan Pendidikan	324,105,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	249 Satuan Pendidikan	698,049,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				100 Satuan Pendidikan	4,041,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	100 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
													DAK Non Fisik-BOP PAUD						
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraan	%		%	83.45 %	3,272,679,000						83.45 %	37,000,000	
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				0 Peserta Didik	709,210,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0 Orang	1,268,220,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				245 Satuan Pendidikan	64,349,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	245 Satuan Pendidikan	37,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				100 Satuan Pendidikan	1,230,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	100 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
													DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan						

1	1	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase pengembangan kurikulum	%		%	100 %	115,951,000						100 %	120,000,000	
1	1	3	2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum yang ditetapkan	Kur		Kur	2 Kur	115,951,000						2 Kur	120,000,000	
1	1	3	2.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				6 Dokumen	3,930,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	6 Dokumen	120,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				0 Dokumen	3,930,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	3	2.01	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				0 Buku	28,400,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Buku	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				0 Orang	79,691,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	4		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Sertifikasi	%		%	86%	731,300,000						89%	470,000,000	
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%		%	100 %	731,300,000					100 %	470,000,000	
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			0 Dokumen	444,410,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			0 Laporan	286,890,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Laporan	470,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	5		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%		%	100 %	73,020,000						100 %	61,500,000	
1	1	5	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					73,020,000							0	
1	1	5	2.02	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			1 Dokumen	73,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2,218,200,000						170,720,000	
2	22	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	%		%	60%	196,500,000					80%	0	
2	22	2	2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga adat yang dibina dengan baik	%		%	23.53 %	196,500,000					23.53 %	0	
2	22	2	2.03	1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				0 Objek	196,500,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Objek	0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%		%	62.50%	1,040,777,000					75.00%		
2	22	3			Persentase Kesenian tradisional yang dikembangkan	%		%	75.00%							81.25%	0
2	22	3	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mega event kebudayaan yang dibuat dengan skala besar dan berdampak langsung pada masyarakat	Grup			Grup	5 Grup	1,040,777,000					5 Grup	0
2	22	3	2.01	1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				0 Orang	896,197,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Orang	0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	3	2.01	3 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga	144,580,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Lembaga	0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	4		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan kegiatan pembinaan sejarah Lokal kab/kota	%		%	50 %	361,482,000						66.67%	0
2	22	4	2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Kab/Kota	Kegiatan			Kegiatan	3 Kegiatan	361,482,000					3 Kegiatan	0
2	22	4	2.01	1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				0 Orang	138,250,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Orang	0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	4	2.01	3 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				0 Dokumen	223,232,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Dokumen	0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	%		%	73.33 %	619,441,000					80.00%	170,720,000	
2	22	5	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	%		%	83.33 %	219,331,000					83.33 %	0	
2	22	5	2.01	1 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				0 Objek	26,181,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Objek	0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	5	2.01	2 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	193,150,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Objek	0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	5	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	%		%	73.33 %	400,110,000					73.33 %	170,720,000	
2	22	5	2.02	1 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				11 Objek	234,600,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	11 Objek	0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	5	2.02	2 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				0 Objek	86,530,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Objek	100,720,000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	5	2.02	3 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				0 Objek	78,980,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Objek	70,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							24,478,820							0	
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						24,478,820							0		
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						24,478,820							0		
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	24,478,820		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							127,170,769,979						145,621,049,472		
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES	Nilai/Angka			Nilai/Angka	72 Nilai/Angka	70,590,930,586					72 Nilai/Angka	76,648,062,756		
1	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	persen			persen	100 persen	433,860,600					100 persen	361,966,660		
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	300,035,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	262,939,160	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	133,825,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	99,027,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%			%	100 %	67,373,469,156						100 %	74,094,781,371	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				563 Orang/bulan	67,110,883,656		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	563 Orang/bulan	73,821,972,021	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	262,585,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	272,809,350	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
																	0 Dokumen		
1	2	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	%x			%x	100 %x	488,800,000						100 %x	537,680,000	
1	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	488,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		20 Orang	537,680,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	%		%	100 %	760,596,500						100 %	505,225,210	
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	12,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Paket	13,959,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Paket	119,900,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	38,387,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Paket	36,725,810	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1440 Dokumen	18,899,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1440 Dokumen	20,790,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			150 Laporan	580,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	150 Laporan	313,850,400	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	500,394,380					12 bulan	530,858,515	
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Laporan	87,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	24 Laporan	89,936,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			48 Laporan	214,195,680		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	48 Laporan	235,509,780	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			48 Laporan	198,278,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	48 Laporan	205,412,735	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	1,033,809,950					12 bulan	617,551,000	
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			63 Unit	310,555,750		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	63 Unit	201,278,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			4 Unit	630,826,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Unit	297,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			10 Unit	92,427,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	10 Unit	119,273,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2092 Orang	114,729,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	2092 Orang	125,851,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8402 Orang	151,225,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	8402 Orang	286,925,375	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20121 Orang	75,085,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	20121 Orang	461,384,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				82986 Orang	171,973,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	82986 Orang	471,944,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8323 Orang	163,842,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	8323 Orang	245,484,580	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16346 Orang	95,319,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	16346 Orang	397,113,200	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4200 Orang	90,719,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	4200 Orang	200,083,400	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				187 Orang	93,190,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	187 Orang	182,666,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2236 Orang	232,007,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	2236 Orang	414,880,620	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar				2947 Orang	207,909,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	2947 Orang	146,300,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				12 Dokumen	140,528,250		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	82,866,465	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	729,671,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	0 Dokumen	748,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen					12 Dokumen					
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				27 Dokumen	48,868,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	27 Dokumen	66,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	273,683,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	4 Dokumen	338,844,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				156 Dokumen	317,729,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	156 Dokumen	750,199,780	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				8 Dokumen	1,095,692,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	8 Dokumen	879,715,650	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	155,014,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	10 Dokumen	258,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	33,898,140,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	36,300,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				4780 Orang	60,630,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	4780 Orang	145,359,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	86,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	1 Dokumen	82,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	1,091,344,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	10,780,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	API (Angka Kejadian Malaria)				-1 /1000 penduduk	68,270,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-1 /1000 penduduk	24,299,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang menerapkan aplikasi layanan pengelolaan data dan informasi berbasis elektronik terintegrasi	%		%	100 %	497,900,000						100 %	262,977,000	
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				3 Dokumen	497,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	262,977,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dengan Kategori Akreditasi Utama	Puskesmas		Puskesmas	2 Puskesmas	138,634,800						2 Puskesmas	62,645,000	
						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Pelayanan sesuai Standar	%		%	100 %							100 %		
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				12 Unit	138,634,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	RSUD, Puskesmas dan Jaringannya	12 Unit	62,645,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

[illegible]

1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan	kebijakan		kebijakan	1 kebijakan	185,350,000						1 kebijakan	204,248,000	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokumen	185,350,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4 Dokumen	204,248,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga (RT) yang telah disurvei PHBS (%)	%		%	55 %	148,449,600						55 %	181,500,000	
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				4 Dokumen	148,449,600		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	4 Dokumen	181,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						1,486,803,000							1,523,761,490	
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Angka		Angka	1.06 Angka	505,735,900						1.06 Angka	514,191,590	
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	%		%	40 %	361,353,300						40 %	358,212,030	
2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	158,738,900		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	4 Dokumen	160,004,790	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	2.01	8	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				4 Dokumen	66,126,600		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	4 Dokumen	70,570,390	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	2.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal				8 Satuan Pendidikan	72,395,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	8 Satuan Pendidikan	57,066,460	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	2.01	12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				2 Organisasi	64,092,800		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	2 Organisasi	70,570,390	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2	14	2	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang Melaksanakan Pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk	%	%	100 %	144,382,600						100 %	155,979,560	
2	14	2	2.02	8Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) diSektor Lain yang Dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) diSektor Lain yang Dibentuk			15 Unit	82,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	15 Unit	86,191,600	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	2	2.02	12Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			12 Laporan	62,007,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Laporan	69,787,960	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	3		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif (CPR)	%	%	81.29%	702,118,600					81.30%	670,916,400		
2	14	3	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan KIE KB	Kecamatan	Kecamatan	3 Kecamatan	239,243,200					3 Kecamatan	308,242,000		
2	14	3	2.01	6Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			7 Laporan	76,043,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	7 Laporan	75,922,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	3	2.01	7Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			7 Laporan	163,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	7 Laporan	232,320,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	3	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didaya gunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan plaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	%	100 %	98,394,400					100 %	71,904,800		
2	14	3	2.02	3Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			12 Laporan	52,058,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Laporan	35,324,300	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	3	2.02	4Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			780 Orang	46,336,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	780 Orang	36,580,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

2	14	3	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%		%	100 %	262,168,200						100 %	235,186,600	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			12 Laporan	61,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Laporan	34,045,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			105 Orang	116,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	105 Orang	133,238,600	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			13 Laporan	32,148,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	13 Laporan	32,230,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.03	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan			130 Orang	52,790,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	130 Orang	35,673,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	%	38.5 %	102,312,800						38.5 %	55,583,000	
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB			15 Kampung	102,312,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	15 Kampung	55,583,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	%	%	20.58	278,948,500						20.32	338,653,500	
2	14	4				Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	%	0.70%							0,69%		
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	%	19.96 %	128,932,700						19.96 %	232,188,000	
2	14	4	2.01	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk			165 Kelompok	43,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	165 Kelompok	119,713,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				10 Unit	45,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	10 Unit	65,450,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				20 Orang	39,542,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	20 Orang	47,025,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan keluarga	organisasi		organisasi	1 organisasi	150,015,800						1 organisasi	106,465,500	
2	14	4	2.02	2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				4 Laporan	17,031,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	4 Laporan	13,420,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	2.02	3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2 Organisasi	132,984,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	2 Organisasi	93,045,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						54,602,451,800							47,300,000,000	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES	Nilai/Angka		Nilai/Angka	72 Nilai/Angka	40,000,000,000						72 Nilai/Angka	32,450,000,000	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Angka penggunaan tempat tidur (BOR)	%		%	60 %	40,000,000,000						60 %	32,450,000,000	
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	90 %							90 %		
						Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	: 1000		: 1000	1 : 1000							1 : 1000		
						Tingkat Capaian Akreditasi Rumah sakit	Madya		Madya	1 Madya							1 Madya		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	40,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	RSUD	1 Unit Kerja	32,450,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH		per 1000 KH	13 per 1000 KH	14,602,451,800						13 per 1000 KH	14,850,000,000	
					Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH		per 100.000 KH	176 per 100.000 KH							176 per 100.000 KH		
					Angka Kesakitan	%		%	28 %							28 %		
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%		%	17 %							17 %		
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perseentase Capaian SPM bidang Kesehatan	%		%	10 %	14,602,451,800						10 %	14,850,000,000	
1	2	2	2.02	32Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	14,602,451,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		4 Dokumen	14,850,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						776,658,000							809,364,545	
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						776,658,000							809,364,545	
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						776,658,000							809,364,545	
1	2	2	2.02	33Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	776,658,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	809,364,545	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						672,265,200							797,138,760	
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						672,265,200							797,138,760	
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						672,265,200							797,138,760	
1	2	2	2.02	33Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	672,265,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	797,138,760	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						884,776,100							973,253,710	
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						884,776,100							973,253,710	
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						884,776,100							973,253,710	
1	2	2	2.02	33Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	884,776,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	973,253,710	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					400,860,000							454,483,920		
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					400,860,000							454,483,920		
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					400,860,000							454,483,920		
1	2	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	400,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	454,483,920	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					284,965,200							274,653,627		
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					284,965,200							274,653,627		
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					284,965,200							274,653,627		
1	2	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	284,965,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	274,653,627	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					652,436,400							727,993,820		
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					652,436,400							727,993,820		
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					652,436,400							727,993,820		
1	2	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	652,436,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	727,993,820	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					246,673,200							251,817,720		
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					246,673,200							251,817,720		
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					246,673,200							251,817,720		
1	2	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	246,673,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	251,817,720	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					892,269,400							796,462,260		
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					892,269,400							796,462,260		
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					892,269,400							796,462,260		
1	2	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	892,269,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	796,462,260	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					904,320,000							915,585,954		
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					904,320,000							915,585,954		
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					904,320,000							915,585,954		
1	2	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	904,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	915,585,954	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					119,064,000							161,230,630		
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					119,064,000							161,230,630		
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					119,064,000							161,230,630		
1	2	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	119,064,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	161,230,630	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,003,383,720							1,103,740,440		
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1,003,383,720							1,103,740,440		
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,003,383,720							1,103,740,440		
1	2	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	1,003,383,720		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	1,103,740,440	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							295,798,000							314,484,720	
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						295,798,000							314,484,720		
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						295,798,000							314,484,720		
1	2	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	295,798,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	314,484,720	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							159,814,978,469						203,133,504,386		
1	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip SKPD	Angka		Angka	66 Angka	14,137,107,169						66 Angka	18,150,330,186		
1	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen		persen	100 persen	102,851,800						100 persen	110,000,000		
1	3	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				2 dok	68,601,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dinas PUPRPERKIM	2 dok	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	3	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	34,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dinas PUPRPERKIM	2 Laporan	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	3	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	8,149,319,369						100 persen	8,631,327,506		
1	3	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	8,021,334,453	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dinas PUPRPERKIM	56 Orang/bulan	8,433,002,490	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	3	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	19,174,916		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dinas PUPRPERKIM	12 Dokumen	5,825,016	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	3	1	2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	108,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dinas PUPRPERKIM	3 Laporan	192,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	

1	3	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen		persen	100 persen	1,022,772,000						100 persen	660,000,000	
1	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			500 Paket	87,480,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dinas PUPRPERKIM	500 Paket	275,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			60 Orang	935,292,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dinas PUPRPERKIM	60 Orang	385,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	persen		persen	100 persen	2,549,979,300						100 persen	1,965,700,000	
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	418,053,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dinas PUPRPERKIM	2 Paket	495,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4200 Paket	66,874,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dinas PUPRPERKIM	4200 Paket	165,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	332,631,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dinas PUPRPERKIM	1 Paket	192,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	32,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dinas PUPRPERKIM	12 Dokumen	13,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	1,699,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dinas PUPRPERKIM	12 Laporan	1,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	998,503,900						100 persen	953,302,680	
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	453,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dinas PUPRPERKIM	12 Laporan	654,280,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	545,323,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dinas PUPRPERKIM	12 Laporan	299,022,680	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	1,313,680,800						100 persen	1,430,000,000	
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	627,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dinas PUPRPERKIM	8 Unit	440,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	78,438,500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dinas PUPRPERKIM	5 Unit	385,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	607,872,300	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Dinas PUPRPERKIM	2 Unit	605,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai				13.03%								13.65%	
1	3	2				Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi baik	persen		persen	28.31%								34.55%	
						*Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	persen		persen	13.03 persen	32.262.673.000						13.03 persen	10,959,942,400	
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	26.392.753.000						100 persen	9,722,662,400	
1	3	2	2.01	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				8 Unit	1,665,090,000	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	8 Unit	1,216,050,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	2	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.75 KM	22.043.340.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	0.75 KM	7,824,905,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	2	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				1 Unit	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	1 Unit	237,325,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1	3	2	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	684,323,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	50 Orang	444,382,400	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	5,869,920,000						100 persen	1,237,280,000	
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0.25 KM	2,372,870,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	0.25 KM	238,315,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0.25 KM	1,547,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	0.25 KM	238,315,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.25 KM	1,949,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	0.25 KM	159,775,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	persen		persen	83.27 persen	4,428,870,000						84.27 persen	5,479,971,200	
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	4,428,870,000						100 persen	5,479,971,200	
1	3	3	2.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				5000 Liter/Detik	4,428,870,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	5000 Liter/Detik	5,479,971,200	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik	persen		persen	93.76 persen	1,206,469,200						94.76 persen	1,159,400,000	
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik	persen		persen	100 persen	1,206,469,200						100 persen	1,159,400,000	
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				122 Rumah Tangga	986,670,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	122 Rumah Tangga	939,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	5	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara				1 Unit	219,799,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	1 Unit	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	persen		persen	89.60 persen	9,379,936,400						89.71 persen	25,525,676,000	
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	persen		persen	100 persen	9,379,936,400						100 persen	25,525,676,000	
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	4,625,000,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	1 Dokumen	20,293,884,600	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	8	2.01	5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	228,636,400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	1 Dokumen	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	8	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui				3 Unit	4,526,300,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	3 Unit	5,011,791,400	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah bangunan yang ditata (buah)	buah		buah	1	14,756,534,300						1	29,534,661,200	
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	14,756,534,300						100 persen	29,534,661,200	
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				6 Kawasan	14,756,534,300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	6 Kawasan	29,534,661,200	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

[illegible]

1	3	11	2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	140,069,000						100 persen	219,156,630	
1	3	11	2.02	1 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				2 Laporan	140,069,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	2 Laporan	219,156,630	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	11	2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persen		Persen	100 Persen	3,670,760,000						100 Persen	56,344,860	
1	3	11	2.04	3 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				1 Laporan	3,670,760,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	1 Laporan	56,344,860	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	persen		ersen	56 ersen	1,744,745,900						75 ersen	794,198,900	
1	3	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	752,428,100						100 persen	362,503,900	
1	3	12	2.01	1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	752,428,100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	1 Dokumen	362,503,900	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	449,117,800						100 persen	164,120,000	
1	3	12	2.03	2 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	449,117,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	1 Dokumen	164,120,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	3	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	543,200,000						100 persen	267,575,000	
1	3	12	2.04	4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	543,200,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	1 Dokumen	267,575,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										53.534.873.650										9,720,992,600		
1	1	4	2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persen		persen	100 persen	529,168,000						100 persen	1,951,339,555				
1	1	4	2	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	177,366,000						100 persen	1,139,507,820				
1	1	4	2	2.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			2 Dokumen	177,366,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	2 Dokumen	1,139,507,820	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
1	1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	351,802,000					100 persen	811,831,735				
1	1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi			10 Unit Rumah	188,476,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	10 Unit Rumah	455,888,235	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
1	1	4	2	2.03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			5 Unit Rumah	163,326,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	5 Unit Rumah	355,943,500	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
1	1	4	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani	persen		persen	84.78 persen	688,469,700						91.71 persen	2,170,414,950				
1	1	4	3	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	persen		persen	100 persen	577,081,400						100 persen	814,330,330				
1	1	4	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			1 Dokumen	577,081,400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	1 Dokumen	814,330,330	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
1	1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	persen		persen	100 persen	111,388,300					100 persen	1,356,084,620				
1	1	4	3	2.03	3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			2 Dokumen	111,388,300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wiliayah	Kabupaten Balangan	2 Dokumen	1,356,084,620	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			

1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen		persen	95 persen	3,958,166,000						96 persen	2,601,736,775	
1	4	4	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	3,958,166,000						100 persen	2,601,736,775	
1	4	4	2.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				0 Unit Rumah	3,958,166,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	0 Unit Rumah	2,601,736,775	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
					Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				110 Unit Rumah							110 Unit Rumah		
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	persen		persen	87 persen	48.359.069.950						89 persen	2,997,501,320	
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	persen		persen	100 persen	48.359.069.950						100 persen	2,997,501,320	
1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	31,620,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	1 Dokumen	186,913,320	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				12 Lokasi	48.327.449.950	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kabupaten Balangan	12 Lokasi	2,810,588,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN														
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kelancaran pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	persen		persen	100 persen	6,056,792,433						100 persen	5,631,000,000	
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran, laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	persen		persen	100 persen	145,812,800						100 persen	160,000,000	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	21,332,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	5 Dokumen	5,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	5 Dokumen	6,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 Laporan	118,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	5 Laporan	149,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan yang Berlaku	persen		persen	100 persen	3,818,583,085					100 persen	3,722,000,000	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	3,761,783,085		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya,	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	14 Orang/bulan	3,700,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	1 Laporan	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2 Laporan	46,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	2 Laporan	12,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mendapat Peningkatan Disiplin dan Kapasitas	persen		persen	100 persen	317,378,000					100 persen	190,000,000	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			46 Paket	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	46 Paket	30,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			26 Orang	272,378,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	26 Orang	160,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	5	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	498,092,500						100 persen	263,000,000	
1	5	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	13,275,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	12 Paket	14,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	256,172,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	5 Paket	70,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	44,045,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	12 Paket	22,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	11,995,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	12 Dokumen	12,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	172,604,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	25 Laporan	145,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	213,821,500						100 persen	50,000,000	
1	5	1	2.07	9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	213,821,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	BPBD Kabupaten Balangan	1 Unit	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	persen		persen	100 persen	419,365,260						100 persen	194,000,000	
1	5	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	193,383,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	12 Laporan	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	125,795,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	12 Laporan	124,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	100,186,660		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	12 Laporan	60,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	643,739,288						100 persen	1,052,000,000	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	298,628,488		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	15 Unit	296,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	16,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	12 Unit	16,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	218,180,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	3 Unit	650,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
															Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif				
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	110,930,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai BPBD Kabupaten Balangan	20 Unit	90,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	Persen		Persen	100 Persen	3,765,528,900						100 Persen	2,514,219,401	
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Informas Rawan Bencana Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	313,895,800						100 persen	30,000,001	
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	192,190,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat Kabupaten Balangan	1 Dokumen		BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				400 Orang	121,705,800		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat Kabupaten Balangan	400 Orang	30,000,000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase Penanganan Pra Bencana dan Tnaggap Darurat Bencana	persen		persen	100 persen	2,860,733,100						100 persen	2,043,119,400	
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				5 Unit	145,098,200		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat Kabupaten Balangan	5 Unit	123,000,000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana				1 Dokumen	89,999,800		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat Kabupaten Balangan	1 Dokumen	90,000,000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				100 %	523,585,400		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat Kabupaten Balangan	100 %	118,500,000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				90 Orang	1,688,069,400		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat Kabupaten Balangan	90 Orang	1,671,619,400	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH

1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				100 Orang	413,980,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat Kabupaten Balangan	100 Orang	40,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persen		persen	100 persen	590,900,000						100 persen	441,100,000	
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	91,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat Kabupaten Balangan	1 Dokumen	91,100,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				50 Orang	499,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat Kabupaten Balangan	50 Orang	350,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4			PROGRAM Pencegahan, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana	Persen		Persen	100 Persen	1,130,059,200						100 Persen	470,887,496	
						Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Palayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	persen		persen	100 persen	1,000,121,300						100 persen	450,000,000	
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				15 Laporan	1,000,121,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat Kabupaten Balangan	15 Laporan	450,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tersedianya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	persen		persen	100 persen	129,937,900						100 persen	20,887,496	
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				200 Orang	129,937,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat Kabupaten Balangan	200 Orang	20,887,496	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN										11,555,191,489					11,722,337,438					
1	5			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Nilai		Nilai	72,40 Nilai	6,426,283,789						72,40 Nilai	7,229,029,938			
1	5	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dukomen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persen		Persen	100 Persen	149,024,600						100 Persen	240,070,820			
1	5	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	96,373,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	2 Dokumen	165,830,500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
											Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum									
											Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil									
1	5	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	20,671,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	1 Laporan	22,738,320	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
												Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil								
												Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum								
1	5	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	31,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	1 Laporan	51,502,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
												Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil								
												Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum								
1	5	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	orang bulan		orang bulan	43 orang bulan	4,929,856,889						43 orang bulan	5,422,482,578			
1	5	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	4,929,856,889		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	43 Orang/bula n	5,422,482,578	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
												Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil								
												Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum								
1	5	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	579,764,600						12 bulan	769,326,690			
1	5	1	2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	509,714,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	0 Orang	631,177,690	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				43 Orang			Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil							43 Orang	
												Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum								
1	5	1	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				20 Orang	70,050,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	20 Orang	138,149,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
												Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil								
												Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum								

1	5	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	349,607,700						12 bulan	384,335,470	
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	53,880,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	12 Paket	58,960,660	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
											Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Polhukhankam Dan						
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik						
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	19,547,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	12 Paket	21,510,810	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan						
											Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Transformasi Pelayanan Publik						
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 Dokumen	8,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabiilitas	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	12 Dokumen	9,504,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan						
											Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Transformasi Pelayanan Publik						
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	267,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	12 Laporan	294,360,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
											Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Polhukhankam Dan						
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik						
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pengadaan barang milik Daerah	Persen	Persen	100 Persen	52,098,600					100 Persen	9,312,600		
						Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	bulan	12 bulan						12 bulan			
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5 Unit	52,098,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	5 Unit	9,312,600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
											Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil							
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dan fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah	Persen	Persen	100 Persen	109,813,800					100 Persen	120,801,780		
						Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	bulan	12 bulan						12 bulan			
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	109,813,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	12 Laporan	120,801,780	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
											Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil							
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							

1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dan fasilitasi pemeliharaan barang milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	256,117,600						100 Persen	282,700,000	
						Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan					12 bulan				
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	250,417,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	0 Unit	276,430,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
										Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil									
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	5,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	0 Unit	6,270,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
										Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil									
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Angka Pelanggaran		Angka Pelanggaran	20	5,128,907,700					18	4,493,307,500		
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kegiatan		kegiatan	750 kegiatan	4,702,347,700					750 kegiatan	4,097,923,500		
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				22 Kasus	4,314,894,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Tertanganinya Gangguan Ketentraman dan Keteritban Umum	22 Kasus	3,540,071,590	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
										Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil									
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0 Dokumen	317,453,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Tertanganinya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen	335,201,350	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen			Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1 Dokumen			
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	5	2	2.01	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan				4 Dokumen	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tertanganinya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	222,650,560	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Ditegakkan	Perda		Perda	24 Perda	426,560,000						24 Perda	395,384,000		
						Persentase Penanganan Perda dan Perkada yang di selesaikan serta titik lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan perkada	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen			
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				8 Laporan	56,340,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Penegakan Peraturan Daerah	8 Laporan	61,974,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil							
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
1	5	2	2.02	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				24 Laporan	370,220,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Penegakan Peraturan Daerah	24 Laporan	333,410,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil							
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						6,972,274,665								66,158,750,398	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	Nilai		Nilai	65,20 Nilai	3,882,539,265						65,20 Nilai	3,740,780,048		
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	Persen		Persen	100 Persen	102,501,900						100 Persen	112,752,060		
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	61,690,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat Kabupaten Balangan	2 Dokumen	67,859,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil							
8	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8,933,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat Kabupaten Balangan	2 Dokumen	9,826,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3,384,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat Kabupaten Balangan	2 Dokumen	3,723,060	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	28,494,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat Kabupaten Balangan	2 Laporan	31,343,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Persen		Persen	100 Persen	2,815,606,065						100 Persen	2,507,231,538		

8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					17 Orang/bulan	2,774,122,465		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya,	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupat	17 Orang/bulan	2,465,471,588	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1,739,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupat en Balangan	1 Laporan	1,913,450	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD					18 Laporan	39,744,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupat en Balangan	18 Laporan	39,846,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen			persen	100 persen	61,724,700						100 persen	122,897,170	
8	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					2 Paket	34,524,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2 Paket	37,977,170	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					10 Orang	27,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10 Orang	84,920,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen			persen	100 persen	527,283,200						100 persen	609,933,680	
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	7,368,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Paket	8,107,660	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	205,828,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Paket	226,411,020	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	10,739,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Paket	11,813,300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,057,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Dokumen	3,363,400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				262 Laporan	300,289,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	262 Laporan	360,238,300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	212,871,100						12 bulan	219,321,850	
8	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	56,060,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Laporan	52,470,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	80,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Laporan	89,760,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10,116,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Laporan	11,128,150	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	66,294,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Laporan	65,963,700	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	162,552,300						12 bulan	168,643,750	
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			24 Unit	119,872,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Barang Milik Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24 Unit	127,987,750	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	42,679,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Barang Milik Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2 Unit	40,656,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat	persen		persen	100 persen	133,095,600					100 persen	169,678,500	
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	dokumen		dokumen	1 dokumen	133,095,600					1 dokumen	169,678,500	
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			53 Orang (unsur)	81,616,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kabupaten Balangan	53 Orang (unsur)	87,358,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
8	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			1 Laporan	51,478,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kabupaten Balangan	1 Laporan	82,320,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol Yang Aktif	persen		persen	100 persen	1,789,845,300					100 persen	60,932,003,550	
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	1,789,845,300					1 dokumen	60,932,003,550	

8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2664 Orang	317,532,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat dan Parpol Kabupaten Balangan	2664 Orang	349,285,900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
														Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				214 Orang	656,087,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat dan Parpol Kabupaten Balangan	214 Orang	59,687,774,250	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
														Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				9 Laporan	816,224,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat dan Parpol Kabupaten Balangan	9 Laporan	894,943,400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
														Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	Persen		Persen	100 Persen	358,507,100							100 Persen	391,453,850	
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen		Persen	100 Persen	358,507,100							100 Persen	391,453,850	
8	1	4	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				468 Orang	165,999,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat dan Ormas Kabupaten Balangan	468 Orang	182,599,600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
														Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						

8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				3 Laporan	192,507,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat dan Ormas Kabupaten Balangan	3 Laporan	208,854,250	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif	Persen		Persen	100 Persen	123,836,400						100 Persen	132,348,000	
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	123,836,400						1 Dokumen	132,348,000	
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				35 Orang (unsur)	99,939,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat dan Ormas Keagamaan Kab. Balangan	35 Orang (unsur)	106,061,100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
8	1	5	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	23,897,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Masyarakat dan Ormas Keagamaan Kab. Balangan	1 Laporan	26,286,900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	684,451,000						100 Persen	792,486,450	
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen Rumusan Kebijakan (Rekomendasi) Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	684,451,000						1 Dokumen	792,486,450	
8	1	6	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	59,033,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Aparatur Negara, Organisasi/Lembaga, Masyarakat, Orang Asing	5 Dokumen	84,927,150	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						

8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				32 Orang (unsur)	308,606,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Aparatur Negara, Organisasi/Le mbaga, Masyarakat, Orang Asing	32 Orang (unsur)	337,046,600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				200 Orang (unsur)	104,372,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Aparatur Negara, Organisasi/Le mbaga, Masyarakat, Orang Asing	200 Orang (unsur)	139,733,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				4 Laporan	66,252,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Aparatur Negara, Organisasi/Le mbaga, Masyarakat, Orang Asing	4 Laporan	69,974,100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	146,186,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan	Aparatur Negara, Organisasi/Le mbaga, Masyarakat, Orang Asing	1 Dokumen	160,805,600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							17,419,907,611						486,334,033,380	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Nilai		Nilai	76,49 Nilai	10,815,351,774							76,49 Nilai	12,152,882,013
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	%		%	100 %	160,615,000							100 %	100,515,030
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	75,440,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PNSD	2 Dokumen	64,409,730	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	85,175,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PNSD	2 Laporan	36,105,300	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%		%	100 %	7,753,570,542						100 %	9,870,108,133	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	7,641,650,542	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta	PNSD	60 Orang/bulan	9,783,693,133	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
1	6	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	56,545,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PNSD	2 Laporan	57,750,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	55,375,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PNSD	2 Laporan	28,665,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	135,000,000						100 %	224,301,000	
1	6	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	80,000,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PNSD	100 Paket	111,111,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	55,000,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PNSD	40 Orang	113,190,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	1,497,873,800						100 %	501,976,168	
1	6	1	2.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9,106,300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PNSD	1 Paket	18,165,609	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	61,534,500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PNSD	1 Paket	53,765,250	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	65,574,400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PNSD	1 Paket	40,213,982	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	13,200,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PNSD	3 Dokumen	11,088,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1,348,458,600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PNSD	12 Laporan	378,743,327	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	700,180,732							100 %	1,025,088,488	
					Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan								12 bulan		
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	284,100,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PNSD	12 Laporan	404,712,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	416,080,732	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PNSD	12 Laporan	619,336,988	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	568,111,700						12 bulan	430,893,194	
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	250,036,600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PNSD	2 Unit	215,446,597	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	318,075,100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PNSD	7 Unit	215,446,597	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%		%	81 %	289,405,200						84 %	477,852,375	
1	6	2	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah warga KAT yang mendapatkan Pelayanan sosial	KK		KK	120 KK	9,750,000						120 KK	36,486,450	
1	6	2	2.01	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Keluarga	9,750,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PSKS	30 Keluarga	25,410,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan organisasi sosial yang mendapatkan bantuan	Orang		Orang	7056 Orang	279,655,200						7056 Orang	435,030,750	
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	77,400,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PSKS	40 Orang	60,406,500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	64,650,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PSKS	8 Orang	92,226,750	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6000 Keluarga	109,100,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PSKS	6000 Keluarga	266,631,750	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Lembaga	28,505,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PSKS	9 Lembaga	15,765,750	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	prosentase cakupan ppks (lansiaDisabilitasAnak Terlantar Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	%		%	100 %	328,979,000						100 %	578,557,402	
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang		orang	800 orang	328,979,000						800 orang	578,557,402	
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				350 Orang	59,368,300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	350 Orang	234,955,875	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	45,767,600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	0 Orang	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	48,924,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	35 Orang	189,027,993	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	33,072,900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	10 Orang	2,310,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	77,136,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	0 Orang	38,553,900	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				23 Orang	11,214,900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	23 Orang	113,709,634	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	53,493,700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	150 Orang	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	%		%	69 %	5,454,881,837						71 %	472,772,049,635	
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang dilakukan pemutakhiran terpadu penanggulangan kemiskinan	Ruta		Ruta	12071 Ruta	5,454,881,837						12071 Ruta	472,772,049,635	
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				12000 Keluarga	446,050,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Fakir Miskin	12000 Keluarga	194,201,700	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				12000 Keluarga	4,197,125,737	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Fakir Miskin	12000 Keluarga	472,399,966,847	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	811,706,100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Fakir Miskin	50 Orang	177,881,088	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%		%	100 %	503,939,600						100 %	312,266,955	
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan	orang		orang	500 orang	239,710,800						500 orang	196,766,955	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	239,710,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Korban bencana Alam dan Sosial	500 Orang	196,766,955	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Tagana yang Aktif	Orang		Orang	31 Orang	264,228,800						31 Orang	115,500,000	
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				73 Orang	264,228,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	PSKS	73 Orang	115,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam yang terawat	%		%	100 %	27,350,200						100 %	40,425,000	
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dirawat	Buah		Buah	1 Buah	27,350,200						1 Buah	40,425,000	
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	27,350,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	TMP	1 Makam	40,425,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1,124,913,900							0	
					PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten				21.05%	779,521,200						21.10%	0	
						IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)				73.02.00							74.04.00		
						IPG (Indeks Pembangunan gender)	%		%	92.77							92.08.00		
2	8	2				IPG (Indeks Pembangunan gender)	%		%	92,77 %							92,77 %		
						Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	%		%	21,05 %							21,05 %		
2	8	2	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Lembaga		Lembaga	30 Lembaga	79,521,200						30 Lembaga	0	
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	7,723,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	-	1 Dokumen	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	71,798,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	-	1 Perangkat Daerah	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2	8	2	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah	Lembaga		Lembaga	3 Lembaga	700,000,000						3 Lembaga	0	
2	8	2	2.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Organisasi	700,000,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Lembaga	1 Organisasi	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	8	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	%		%	100 %	21,588,000						100 %	0	
2	8	3	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	21,588,000						2 Lembaga	0	
2	8	3	2.02	1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				0 Orang	21,588,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif		0 Orang	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	%		%	16,56 %	105,536,300						15,76%	0	
2	8	4	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)	Nilai		Nilai	62 Nilai	71,913,100						62 Nilai	0	
2	8	4	2.01	3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	71,913,100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	-	1 Dokumen	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	8	4	2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)	Nilai		Nilai	79 Nilai	33,623,200						79 Nilai	0	
2	8	4	2.03	1 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Layanan	33,623,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	-	1 Layanan	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	%		%	100 %	59,362,400						100 %	0	
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data yang disusun dan divalidasi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	59,362,400						1 Dokumen	0	
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	34,299,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	-	1 Dokumen	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	25,063,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	-	1 Dokumen	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	IPA (Indeks Perlindungan Anak	Indeks		Indeks	68,25 Indeks	86,638,800						68,50 Indeks	0	
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Layak Anak	%		%	4 %	62,546,400						4 %	0	
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				1 Organisasi	62,546,400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	-	1 Organisasi	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	%		%	100 %	24,092,400						100 %	0	
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	11,676,400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	-	1 Dokumen	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	12,416,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	-	1 Dokumen	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	%		%	100 %	72,267,200						100 %	0	
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Buah		Buah	2 Buah	9,896,400						2 Buah	0	
2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	9,896,400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	-	1 Perangkat Daerah	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan bagi anak	Nilai		Nilai	80 Nilai	52,244,400						80 Nilai	0	
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	52,244,400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	-	1 Orang	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga		Lembaga	4 Lembaga	10,126,400						4 Lembaga	0	
2	8	7	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10,126,400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	-	1 Dokumen	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						8,500,701,500							9,686,010,000	
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA ANTAR DESA	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	Kerjasama		Kerjasama	1 Kerjasama	88,559,000						1 Kerjasama	120,000,000	
2	13	3	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa	Kerjasama		Kerjasama	1 Kerjasama	88,559,000						1 Kerjasama	120,000,000	
2	13	3	2.01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	88,559,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Desa	1 Dokumen	120,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	%		%	85 %	4,010,937,600						90 %	2,977,320,000	
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemdes	Desa		Desa	154 Desa	4,010,937,600						154 Desa	2,977,320,000	
2	13	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				0 Dokumen	1,591,128,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pemerintah Desa	0 Dokumen	1,552,320,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				154 Dokumen	27,623,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pemerintah Desa	154 Dokumen	40,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	161,649,600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pemerintah Desa	1 Dokumen	200,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	382,753,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Desa	1 Dokumen	650,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1,541,832,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pemerintah Desa	1 Laporan	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	148,516,400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Desa	1 Laporan	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				0 Dokumen	34,584,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pemerintah Desa	0 Dokumen	250,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2	13	4	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				3 Desa	99,849,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pemerintah Desa	3 Desa	150,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				9 Dokumen	23,000,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Pemerintah Desa	9 Dokumen	120,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	0		0	55% 0	4,401,204,900						60% 0	6,588,690,000	
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	%		%	55 %							55 %		
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Desa		Desa	10 Desa	4,401,204,900						10 Desa	6,588,690,000	
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	439,874,300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Kelembagaan Desa	1 Lembaga	91,440,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	2,372,444,300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Kelembagaan Desa	1 Dokumen	4,957,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	88,449,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Kelembagaan Desa	1 Laporan	139,700,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2	13	5	2.01	9	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				165 Dokumen	1,500,436,500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Kelembagaan Desa	165 Dokumen	1,400,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						1,295,600,900							0	
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan masyarakat	%		%	13 %	451,953,800						14 %	0	
2	9	2	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan infrastruktur lumbung pangan dan rumusan penyediaan infarstruktur sumber daya pendukungketahanan pangan	unit		unit	9 unit	451,953,800						9 unit	0	
2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				1 Unit	126,743,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Kelompok Tani	1 Unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	2	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				0 Unit	325,210,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelompok Tani	0 Unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	%		%	87,5 %	632,877,600						87,6 %	0	
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	Dokumen		Dokumen	25 Dokumen	301,308,500						25 Dokumen	0	
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				13 Laporan	71,307,800			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Kelompok Tani	13 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				2 Laporan	28,046,100			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Kelompok Tani	2 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				12 Dokumen	162,030,300			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Kelompok Tani	12 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				4 Unit	39,924,300			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Kelompok Tani	4 Unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

2	9	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan	TON		TON	70 TON	63,108,600						70 TON	0	
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10.71 Ton	63,108,600			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Kelompok Tani	10.71 Ton	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	3	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Petugas enumerator	Orang		Orang	9 Orang	12,048,600						9 Orang	0	
2	9	3	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				1 Laporan	12,048,600				Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Kelompok Tani	1 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan konsumsi energi dan Protein	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	256,411,900						13 Dokumen	0	
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	105,318,000				Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Kelompok Tani	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	151,093,900				Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Kelompok Tani	1 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	%		%	5 %	178,132,700						5 %	0	
2	9	4	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Pemetaan Rawan Pangan	Kabupaten		Kabupaten	1 Kabupaten	156,903,000						1 Kabupaten	0	
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	156,903,000				Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Kelompok Tani	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah yang Terdata pada Rawan Pangan	Kabupaten		Kabupaten	1 Kabupaten	21,229,700						1 Kabupaten	0	
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	21,229,700				Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Kelompok Tani	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%		%	80 %	32,636,800						80 %	0	
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif	Kali		Kali	24 Kali	32,636,800						24 Kali	0	
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	32,636,800				Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Kelompok Tani	4 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

3	25			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						4,214,088,400							0		
3	25	4		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Ikan (ton)	0		0	10,2 0	3,814,037,500						10,2 0	0		
3	25	4	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelembagaan Kelompok Perikanan yang meningkat kelasnya	Kelompok		Kelompok	11 Kelompok	227,482,500						11 Kelompok	0		
3	25	4	2.02	1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				5 Kelompok	72,559,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	POKDAKAN	5 Kelompok		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	25	4	2.02	4 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				8 Kelompok	154,923,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	POKDAKAN	8 Kelompok		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	25	4	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						3,586,555,000							0		
3	25	4	2.04	2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	786,342,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	POKDAKAN	1 Unit		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	4	2.04	3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	2,749,740,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	POKDAKAN	5 Unit		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	4	2.04	4 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				4 Dokumen	50,473,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	POKDAKAN	4 Dokumen		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	5		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kawasan Perikanan Lestari (Ha)	%		%	4 %	137,346,200						4 %	0		
3	25	5	2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						137,346,200							0		
3	25	5	2.01	1 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				0 Dokumen	137,346,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	POKDAKAN	0 Dokumen		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	

3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	%		%	20 %	262,704,700						23 %	0	
						Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	Persen		Persen	20 Persen							20 Persen		
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						235,855,700							0	
					Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				1 Unit Usaha	235,855,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	POKDAKAN	1 Unit Usaha	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						26,849,000							0	
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				1 Pelaku Usaha	26,849,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		1 Pelaku Usaha	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						49,883,822,824							114,998,800	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						22,027,941,974							114,998,800	
3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						498,881,700							0	
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	362,686,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		3 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8,614,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	8,614,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	9,478,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	9,478,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	9,823,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		1 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	90,187,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		4 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18,666,861,674							0	
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				124 Orang/bulan	18,473,065,674		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		124 Orang/bulan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	193,796,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		12 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						593,069,500							0	
3	27	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	188,929,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		1 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	404,140,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						898,210,800							114,998,800	
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	39,762,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		12 Paket	114,998,800	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	115,327,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		12 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	99,974,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		12 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10,184,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		12 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	632,963,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		12 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						385,498,800							0	
3	27	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	385,498,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		1 Unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						410,400,000							0	
3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		12 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	398,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		12 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

3	27	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						575,019,500								0	
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			12 Unit	548,011,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		12 Unit			0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	27,007,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		1 Unit			0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Kardet)	%		%	14,00%	6,534,359,300					16,00%	0			
					Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)	%		%	17,00%						18,00%				
					Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%		%	17,00%						18,00%				
					Persentase Peningkatan SDM Terampil Pengolah Produk Unggulan TPH	%		%	52%						53%				
					Persentase Peningkatan Produksi Daging	%		%	3,50%						3,50%				
					Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Hasil IB	%		%	6%						6%				
					Persentase Peningkatan sarana Pertanian	%		%	25%						25%				
3	27	2																	
3	27	2	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						4,783,663,800							0		
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			5 Laporan	4,783,663,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		5 Laporan		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	27	2	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						1,289,205,100							0		
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian			5 VUB	645,487,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		5 VUB		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			2 Dokumen	643,717,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		2 Dokumen		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	27	2	2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						461,490,400							0		
3	27	2	2.05	1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar			0 Ekor	175,210,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		0 Ekor		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	27	2	2.05	5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia			30 Ton	286,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		30 Ton		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%		%	20%	16,365,510,300					20%	0			
3	27	3			Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan	%			10%						10%				
3	27	3	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						16,279,070,100							0		
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara			0 Unit	35,873,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		0 Unit		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			0 Unit	24,864,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		0 Unit		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			0 Unit	15,395,321,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		0 Unit		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	

3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	823,011,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		0 Unit		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	3	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota						86,440,200								0	
3	27	3	2.03	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	86,440,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		1 Laporan		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Hewan Menular	%		%	10%	736,008,000						10%		0	
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						349,935,600								0	
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				1 Laporan	178,866,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		1 Laporan		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	4	2.01	3	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	171,069,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		1 Laporan		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						93,969,200								0	
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	93,969,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		1 Laporan		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	4	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan						292,103,200								0	
3	27	4	2.05	1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan				1 Laporan	292,103,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		1 Laporan		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
						Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan	%		%	13%							18%			
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	%		%	7%	757,118,350						8%		0	
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						757,118,350								0	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				0 Ha	757,118,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		0 Ha		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
						Persentase Peningkatan Kelas Kelembagaan Tani	%		%	100,00%							100,00%			
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentasi Peningkatan Petani peserta Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Bokar yang memperoleh Sertifikat	%		%	31,60%	3,462,884,900						42,90%		0	
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						3,462,884,900								0	
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Unit	276,587,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		8 Unit		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Unit	657,378,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		8 Unit		0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				8 Unit	2,528,919,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		8 Unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
						Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)	%		%	14,00%	165,937,200						16,00%	134,105,000	
						Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)	%		%	17,00%							18,00%		
						Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%		%	17,00%							18,00%		
						Persentase Peningkatan SDM Terampil Pengolah Produk Unggulan TPH	%		%	52%							53%		
						Persentase Peningkatan Produksi Daging	%		%	3,50%							3,50%		
						Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Hasil IB	%		%	6%							6%		
						Persentase Peningkatan sarana Pertanian	%		%	25%							25%		
3	27	2																	
3	27	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						165,937,200							134,105,000	
3	27	2	2.03	2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				1 Laporan	165,937,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Laporan	134,105,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
											267,779,000							400,000,000	
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%		%	100 %	45,872,100						100 %	150,000,000	
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten	%		%	100 %	45,872,100						100 %	150,000,000	
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	45,872,100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	10	6			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah dan dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%		%	100 %	10,500,000						100 %	50,000,000	
2	10	6	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 daerah	%		%	100 %	10,500,000						100 %	50,000,000	
2	10	6	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	10,500,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	10	9			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase pengelolaan izin membuka tanah	%		%	100 %	183,004,900						100 %	150,000,000	
2	10	9	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase penerbitan izin membuka tanah	%		%	100 %	183,004,900						100 %	150,000,000	
2	10	9	2.01	2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara				1 Dokumen	183,004,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Pesentase penatagunaan tanah	%		%	100 %	28,402,000						100 %	50,000,000	
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan tanah yang hamparannya dalam 1 daerah kabupaten	%		%	100 %	28,402,000						100 %	50,000,000	
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	28,402,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	1 Laporan	50,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						19,872,586,382							22,360,000,000	
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	9,307,481,182						100 %	8,850,000,000	
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai		Nilai	70 Nilai	95,788,000						70 Nilai	170,000,000	
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	59,368,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	36,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1 Laporan	70,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	6,422,162,282						100 %	6,120,000,000	
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	6,375,022,282		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan	45 Orang/bulan	6,000,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	26,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1 Laporan	70,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD				4 Laporan	20,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4 Laporan	50,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		%	100 %	48,000,000						100 %	150,000,000	
2	11	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	48,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	10 Orang	150,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2	11	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	%		%	100 %	1,986,318,100						100 %	1,740,000,000	
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	266,836,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	4 Paket	150,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	15,914,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1 Paket	70,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	8,356,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			300 Laporan	1,695,210,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	300 Laporan	1,500,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaanjasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	%	100 %	520,035,300						100 %	370,000,000	
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	23,098,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1 Laporan	50,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	119,997,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1 Laporan	120,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	15,252,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1 Laporan	50,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	361,687,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1 Laporan	150,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2	11	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	235,177,500						100 %	300,000,000	
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			10 Unit	181,481,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	10 Unit	200,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	53,696,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	3 Unit	100,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	%		%	100 %	211,860,000					100 %	250,000,000	
2	11	2	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	211,860,000					1 Dokumen	250,000,000	
2	11	2	2.02	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun			1 Dokumen	211,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kab. Balangan	1 Dokumen	250,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	%		%	100 %	894,009,200					100 %	1,140,000,000	
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengukuran Kualitas Lingkungan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	803,772,800					1 Dokumen	1,000,000,000	
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1 Dokumen	145,835,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pemerintah Kab. Balangan dan Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			1 Dokumen	58,189,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pemerintah Kab. Balangan dan Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan			1 Dokumen	599,747,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pemerintah Kab. Balangan dan Masyarakat	1 Dokumen	700,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2	11	3	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian informasi lingkungan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	45,300,000						1 Dokumen	70,000,000	
2	11	3	2.02	1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	45,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pemerintah Kab. Balangan dan Masyarakat	1 Laporan	70,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkuagan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Lokasi		Lokasi	1 Lokasi	44,936,400						1 Lokasi	70,000,000	
2	11	3	2.03	4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				1 Dokumen	44,936,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kab. Balangan dan Masyarakat	1 Dokumen	70,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi yang terpelihara baik	%		%	100 %	2,928,553,700						100 %	2,700,000,000	
2	11	4	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan RTH yang dikelola Lingkungan Hidup	Hektar		Hektar	120.621 Hektar	2,928,553,700						120.621 Hektar	2,700,000,000	
2	11	4	2.01	3 Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				8.4 Ha	504,487,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kab. Balangan dan Masyarakat	8.4 Ha	700,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4	2.01	4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				112.221 Ha	2,424,065,900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kab. Balangan dan Masyarakat	112.221 Ha	2,000,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	5		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	%		%	100 %	67,145,700						100 %	140,000,000	
2	11	5	2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase pengawasan pengendalian B3 dan Limbah B3	%		%	100 %	35,629,900						100 %	70,000,000	
2	11	5	2.01	2 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				2 Laporan	35,629,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Tempat Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	2 Laporan	70,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2	11	5	2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten	%		%	100 %	31,515,800					100 %	70,000,000	
2	11	5	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya			1 Dokumen	31,515,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Tempat Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	1 Dokumen	70,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	%		%	100 %	84,479,700				100 %	170,000,000	
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tempat Usaha/Kegiatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%		%	100 %	84,479,700				100 %	170,000,000	
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			1 Dokumen	48,899,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Tempat Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1 Laporan	35,579,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Tempat Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	1 Laporan	70,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	7			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	%		%	100 %	20,186,500				100 %	70,000,000	
2	11	7	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA, Keraifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang diakui	Kelompok		Kelompok	1 Kelompok	20,186,500				1 Kelompok	70,000,000	
2	11	7	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			1 Dokumen	20,186,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Dokumen	70,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2	11	8		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%		%	100 %	25,338,000						100 %	70,000,000	
2	11	8	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang megikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan	Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	25,338,000						1 Lembaga	70,000,000	
2	11	8	2.01	3 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				140 Orang	25,338,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	140 Orang	70,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	9		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%		%	100 %	108,957,000						100 %	150,000,000	
2	11	9	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	Penghargaan		Penghargaan	1 Penghargaan	108,957,000						1 Penghargaan	150,000,000	
2	11	9	2.01	1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				5 Entitas	108,957,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat	5 Entitas	150,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%		%	100 %	39,040,000						100 %	70,000,000	
2	11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rasio penanganan pengaduan masyarakat	Rasio		Rasio	1 Rasio	39,040,000						1 Rasio	70,000,000	
2	11	10	2.01	1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				1 Dokumen	39,040,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Dokumen	70,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	%		%	99%	6,185,535,400						99%	8,750,000,000	
2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase sampah terkelola	%		%	99 %	6,185,535,400						99 %	8,750,000,000	
2	11	11	2.01	2 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				1 Laporan	1,497,152,600		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Laporan	750,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	3 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				14.58 Ton	4,278,354,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat	14.58 Ton	7,000,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				2 Unit	410,028,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat	2 Unit	1,000,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL						4,907,217,188							4,221,140,090	
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP) DISDUKCAPIL	Nilai		Nilai	72,40 (BB) Nilai	4,234,102,988						72,40 (BB) Nilai	3,426,532,490	
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%		%	100 %	51,515,200						100 %	37,259,950	
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	51,515,200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DISDUKCAPIL	6 Dokumen	37,259,950	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%		%	100 %	3,212,894,488						100 %	2,735,818,040	
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	3,207,998,488	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DISDUKCAPIL	27 Orang/bulan	2,733,322,240	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	4,896,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DISDUKCAPIL	2 Dokumen	2,495,800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%		%	100 %	126,592,400						100 %	55,000,000	
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	26,592,400	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DISDUKCAPIL	60 Paket	30,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	100,000,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DISDUKCAPIL	5 Orang	25,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	%		%	100 %	284,468,200						100 %	190,007,000	
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	11,995,300	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DISDUKCAPIL	7 Paket	12,915,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	24,899,600	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DISDUKCAPIL	2 Paket	8,050,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	14,055,300	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DISDUKCAPIL	7 Paket	10,727,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105 Laporan	233,518,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DISDUKCAPIL	105 Laporan	158,315,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan		bulan	12 bulan	190,319,300						12 bulan	122,483,100	
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				8 Laporan	110,653,100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DISDUKCAPIL	8 Laporan	78,400,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	79,666,200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DISDUKCAPIL	2 Laporan	44,083,100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan		bulan	12 bulan	368,313,400						12 bulan	285,964,400	
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	218,792,300	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DISDUKCAPIL	21 Unit	177,445,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	18,000,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DISDUKCAPIL	20 Unit	8,050,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	131,521,100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DISDUKCAPIL	1 Unit	100,469,400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%		%	-KK 100%	278,343,900						-KK 100%	262,421,850	
2	12	2					%			- KTP-el 9895%							- KTP-el 100%		
							%		%	- KIA 40%							- KIA 50%		
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP elektronik	%		%	100 %	271,131,200						100 %	255,606,250	
2	12	2	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				29000 Dokumen	240,787,400	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Balangan	29000 Dokumen	228,038,800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	2.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				2000 Dokumen	30,343,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Balangan	2000 Dokumen	27,567,450	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%		%	75 %	7,212,700						75 %	6,815,600	
2	12	2	2.03	2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				200 Dokumen	7,212,700	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Balangan	200 Dokumen	6,815,600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	%		%	76 %	213,426,800						78 %	259,415,000	
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%		%	99 %	203,195,600						99 %	196,409,000	
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				6500 Dokumen	32,293,600	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DISDUKCAPIL	6500 Dokumen	105,335,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 Layanan	170,902,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai DISDUKCAPIL	5 Layanan	91,074,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2	12	3	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%		%	100 %	10,231,200						100 %	63,006,000	
2	12	3	2.02	1Kordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				50 Laporan	10,231,200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Balangan	50 Laporan	63,006,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	%		%	100 %	174,481,000						100 %	263,781,900	
2	12	4	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	%		%	82 %	50,325,200						82 %	32,574,000	
2	12	4	2.01	1Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	21,370,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Balangan	2 Dokumen	21,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4	2.01	2Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				8 Dokumen	28,954,400	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Balangan	8 Dokumen	11,574,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%		%	100 %	124,155,800						100 %	231,207,900	
2	12	4	2.03	3Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	84,202,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Balangan	1 Laporan	202,649,700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4	2.03	5Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	39,953,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Balangan	1 Laporan	28,558,200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	5		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan profil kependudukan	%		%	100 %	6,862,500						100 %	8,988,850	
2	12	5	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan	%		%	100 %	6,862,500						100 %	8,988,850	
2	12	5	2.01	2Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	6,862,500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Balangan	1 Dokumen	8,988,850	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						16,124,151,790							15,543,204,000	
2	15	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Nilai		Nilai	68,50 Nilai	5,107,526,840						68,50 Nilai	6,083,204,000	
2	15	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	%		%	100 %	83,140,000						100 %	165,000,000	
2	15	1	2.01	1Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	80,140,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan Kab. Balangan	2 Dokumen	160,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	3,000,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan Kab. Balangan	12 Laporan	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%		100 %	3,913,896,420						100 %	4,160,200,000	
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			35 Orang/bulan	3,841,020,420	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan Kab. Balangan	35 Orang/bulan	4,015,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	15	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	72,876,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan Kab. Balangan	12 Dokumen	145,200,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		100 %	89,749,000						100 %	250,000,000	
2	15	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			35 Orang	89,749,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Karyawan karyawati Dinas Perhubungan	35 Orang	250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100 %	496,265,700						100 %	761,700,000	
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	14,643,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Karyawan karyawati Dinas Perhubungan	1 Paket	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	38,204,500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Karyawan karyawati Dinas Perhubungan	3 Paket	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	24,858,600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Karyawan karyawati Dinas Perhubungan	12 Paket	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			120 Dokumen	4,800,600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Karyawan karyawati Dinas Perhubungan	120 Dokumen	12,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			217 Laporan	413,759,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Karyawan karyawati Dinas Perhubungan	217 Laporan	579,700,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	287,278,420					12 Bulan	355,900,000	
2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	10,000,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan Kab. Balangan	12 Laporan	55,900,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	144,011,520	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan Kab. Balangan	12 Laporan	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	133,266,900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan Kab. Balangan	12 Laporan	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	237,197,300						12 Bulan	390,404,000	
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	191,217,300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	6 Unit	290,404,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	45,980,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	2 Unit	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	%		%	86%	11,016,624,950						91%	9,460,000,000	
						Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	%			57.95%							85.97%		
						Persentase Sarana Prasarana terminal yang memadai	%			36.67%							53.33%		
						Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai	%			66.67%							77.78%		
						Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	%			100%							100%		
2	15	2				Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	Nilai		Nilai	0.35							0.39		
						Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	%		%	57.45 %							57.45 %		
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpasang	%		%	57.45 %	8,791,992,600						57.45 %	5,100,000,000	
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				135 Unit	3,750,740,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Ruas Jalan Kabupaten Balangan	135 Unit	600,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				500 Unit	5,041,252,600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Ruas Jalan Kabupaten Balangan	500 Unit	4,500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	PAD dari retribusi pelayanan terminal	Rupiah		Rupiah	7000000 Rupiah	51,533,000						7000000 Rupiah	150,000,000	
2	15	2	2.03	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Orang	51,533,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Terminal Kabupaten Balangan	1 Orang	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	90,610,000						10 Dokumen	350,000,000	
						Persentase Pelayanan Perparkiran	%		%	62.22 %							62.22 %		
2	15	2	2.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				10 Dokumen	90,610,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Titik Parkir di Kabupaten Balangan	10 Dokumen	350,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	%		%	86 %	472,939,000						86 %	585,000,000	

2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	151,890,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Unit	220,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	43,126,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kendaraan Bermotor Wajib Uji	2 Orang	45,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				1568 Unit	112,699,100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1568 Unit	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	50,220,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	115,003,900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kendaraan Bermotor Wajib Uji	10 Unit	120,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diselenggarakan	Laporan		Laporan	3 Laporan	1,210,733,600						3 Laporan	2,625,000,000	
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				200 Laporan	1,120,814,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Lalu Lintas Kabupaten Balangan	200 Laporan	2,500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	89,918,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Lalu Lintas Kabupaten Balangan	4 Laporan	125,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit		Unit	14 Unit	398,816,750						14 Unit	650,000,000	
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				14 Unit	398,816,750	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pelajar dan Masyarakat di Kabupaten Balangan	14 Unit	650,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
											16,230,460,494							12,966,124,680	
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan keterbukaan informasi publik Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	%		%	82 %	6,337,694,442						82 %	5,880,120,128	
							BB	BB	72.40 BB								72.40 BB		
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	57,200,700						3 Dokumen	72,622,000	
						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	47,751,900	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Diskominfosan	3 Dokumen	60,302,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	9,448,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Diskominfosan	1 Laporan	12,320,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	16	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan		Orang/Bulan	13 Orang/Bulan	3,889,685,342							13 Orang/Bulan	3,831,312,650	
					Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan								12 Bulan		
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			13 Orang/bulan	3,889,685,342				Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Karyawan/ti Diskominfosan		13 Orang/bulan	3,831,312,650	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang		Orang	46 Orang	302,230,500							46 Orang	470,250,000	
					Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket		Paket	195 Paket								195 Paket		
2	16	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			140 Paket	68,230,500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Karyawan/ti Diskominfosan		140 Paket	96,250,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			68 Orang	234,000,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Karyawan/ti Diskominfosan		68 Orang	374,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen		Dokumen	72 Dokumen	1,255,053,200							72 Dokumen	552,415,358	
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	610 Laporan								610 Laporan		
					Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Paket		Paket	10275 Paket								10275 Paket		
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket		Paket	50 Paket								50 Paket		
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket		Paket	10 Paket								10 Paket		
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			50 Paket	13,279,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Karyawan/ti Diskominfosan		50 Paket	14,604,953	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Paket	48,002,900	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Karyawan/ti Diskominfosan		10 Paket	52,800,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			10275 Paket	20,930,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Karyawan/ti Diskominfosan		10275 Paket	19,017,405	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			72 Dokumen	9,609,600	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Karyawan/ti Diskominfosan		72 Dokumen	15,180,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				610 Laporan	1,163,230,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Karyawan/ti Diskominfosan	610 Laporan	450,813,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan			Laporan	12 Laporan	339,571,500						12 Laporan	393,991,620	
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan			Laporan	12 Laporan							12 Laporan		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan			Laporan	500 Laporan							500 Laporan		
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	53,894,500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Karyawan/ti Diskominfosan	500 Laporan	35,574,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	66,898,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Karyawan/ti Diskominfosan	12 Laporan	101,310,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	218,779,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Karyawan/ti Diskominfosan	12 Laporan	257,107,620	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit			Unit	5 Unit	493,953,200						5 Unit	559,528,500	
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	222,773,200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Karyawan/ti Diskominfosan	5 Unit	259,528,500	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	271,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Karyawan/ti Diskominfosan	1 Unit	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan	%		%	82%	5,870,971,900							84%	2,750,842,235	
						Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	%	%	85%	90%										
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	Dok			Dok	24 Dok	5,870,971,900						24 Dok	2,750,842,235	
						Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	Dok			Dok	1 Dok							1 Dok		
						Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	Dok			Dok	12 Dok							12 Dok		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Dok			Dok	48 Dok							48 Dok		
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dok			Dok	30 Dok							30 Dok		
						Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	Dok			Dok	20 Dok							20 Dok		
						Jumlah layanan hubungan media	Layanan			Layanan	40 Layanan							40 Layanan		
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				24 Dokumen	89,085,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kabupaten Balangan	24 Dokumen	102,542,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	

2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				48 Dokumen	131,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kabupaten Balangan	48 Dokumen	168,597,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	903,480,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kabupaten Balangan	1 Dokumen	241,093,600	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	116,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kabupaten Balangan	12 Dokumen	72,704,500	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				40 Layanan	4,383,969,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kabupaten Balangan	40 Layanan	1,862,492,139	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				30 Dokumen	101,157,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kabupaten Balangan	30 Dokumen	132,979,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				20 Dokumen	145,620,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kabupaten Balangan	20 Dokumen	170,434,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan	%		%	40%							60%		
2	16	3				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%		%	18%	4,021,794,152						18%	4,335,162,317	
						Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%		%	40 %							40 %		
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	Unit		Unit	1 Unit	794,879,600						1 Unit	873,180,000	
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	794,879,600	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kabupaten Balangan	1 Unit	873,180,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	16	3	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Dok		Dok	1 Dok	3,226,914,552						1 Dok	3,461,982,317	
						Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Layanan		Layanan	2 Layanan							2 Layanan		
2	16	3	2.02	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	382,637,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kabupaten Balangan	1 Dokumen	91,410,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Layanan	2,844,276,952	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kabupaten Balangan	2 Layanan	3,370,572,317	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						214,436,000							242,110,000	
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data yang tersedia untuk mengukur target perencanaan	%		%	65 %	214,436,000						80 %	242,110,000	
						Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Data		Data	3 Data	214,436,000						3 Data	242,110,000	
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Dok		Dok	1 Dok							1 Dok		
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	161,970,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	SKPD Kabupaten Balangan	1 Dokumen	56,925,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral									Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
						Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				3 Dokumen	52,466,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	SKPD Kabupaten Balangan	3 Dokumen	185,185,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	20	2	2.01	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah									Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						28,634,800							29,040,000	
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	%		%	22 %	28,634,800						26 %	29,040,000	
						Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah provinsi berbasis elektronik dan non elektronik	Laporan		Laporan	1 Laporan	28,634,800						1 Laporan	29,040,000	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				24 Laporan	28,634,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	SKPD Kabupaten Balangan	24 Laporan	29,040,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						7,185,207,900							6,464,672,200	
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persen		Persen	100 Persen	6,385,176,700						100 Persen	5,910,811,200	
						Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Bulan		Bulan	12 Bulan	21,200,400						12 Bulan	21,200,400	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10,170,400	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	2 Dokumen	10,170,400	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	11,030,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	5 Laporan	11,030,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

2	17	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	5,470,032,000						12 Bulan	4,925,882,000	
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			40 Orang/bulan	5,273,660,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	40 Orang/bulan	4,729,510,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	17	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	196,372,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	12 Dokumen	196,372,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	395,605,300					12 Bulan	336,389,800	
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	13,677,100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	1 Paket	13,677,100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	82,795,500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	2 Paket	23,580,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	30,860,100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	2 Paket	30,860,100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1 Dokumen	8,267,700	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	1 Dokumen	8,267,700	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	260,004,900	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	1 Laporan	260,004,900	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang penunjang urusan pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	20,934,400					12 Bulan	20,934,400	
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			13 Unit	20,934,400	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	13 Unit	20,934,400	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

2	17	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	331,658,800						12 Bulan	331,658,800	
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	135,289,700	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	1 Laporan	135,289,700	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	196,369,100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	1 Laporan	196,369,100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah sebagai penunjang urusan pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	145,745,800					12 Bulan	145,745,800	
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			50 Unit	123,825,200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	50 Unit	123,825,200	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			170 Unit	21,920,600	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	170 Unit	21,920,600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS	Persen		Persen	4 Persen	72,167,600					5 Persen	72,167,600	
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Koperasi		Koperasi	6 Koperasi	72,167,600					6 Koperasi	72,167,600	
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			6 Unit Usaha	22,824,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Koperasi	6 Unit Usaha	22,824,800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja			23 Unit Usaha	49,342,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Koperasi	23 Unit Usaha	49,342,800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Yang Memperoleh Pendidikan Dan Latihan Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	Persen		Persen	10.18	39,046,400						10.18	39,046,400	
2	17	5					Persen		Persen	29.00							30.00		
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang Dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	39,046,400						2 Kegiatan	39,046,400	
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				60 Orang	39,046,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Koperasi	60 Orang	39,046,400	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang skala usahanya bertambah	Persen		Persen	0.32	285,370,400						0.34	285,370,400	
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Kegiatan Pendataan, Kemitraan dan Pelatihan Perijinan Usaha Mikro	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	285,370,400						6 Kegiatan	285,370,400	
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				11567 Dokumen	139,143,100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	UMKM	11567 Dokumen	139,143,100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				16 Unit Usaha	86,584,200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	UMKM	16 Unit Usaha	86,584,200	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				40 Unit Usaha	59,643,100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	UMKM	40 Unit Usaha	59,643,100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Sudah Menerapkan E-Commerce	Persen		Persen	0.32 Persen	403,446,800						0.32 Persen	157,276,600	
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UKM yang skala usahanya meningkat	UMKM		UMKM	25 UMKM	403,446,800						25 UMKM	157,276,600	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				55 Unit Usaha	403,446,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	UMKM	55 Unit Usaha	157,276,600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						1,845,298,700							1,495,298,700	
3	30	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (%)	Persen		Persen	12 Persen	57,010,000						15 Persen	57,010,000	
3	30	2	2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi dan perizinan yang dikeluarkan	Buah		Buah	70 Buah	35,230,000						70 Buah	35,230,000	
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	35,230,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pelaku Usaha	1 Dokumen	35,230,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	2	2.01									Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3	30	2	2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Pengusaha waralaba yang mempunyai izin	Buah		Buah	20 Buah	21,780,000						20 Buah	21,780,000	
				Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				30 Dokumen	21,780,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pelaku Usaha	30 Dokumen	21,780,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	2	2.03									Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3	30	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENINGKATAN SAPRAS	Persen		Persen	60 Persen	949,088,500						70 Persen	949,088,500	
3	30	3	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola	Buah		Buah	4 Buah	882,980,500						4 Buah	882,980,500	
					Jumlah pembangunan dan atau revitalisasi pasar	Buah		Buah	1 Buah					1 Buah				
3	30	3	2.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	150,979,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pedagang	3 Unit	150,979,600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3	30	3	2.01	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	732,000,900	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pedagang	4 Unit	732,000,900	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3	30	3	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan padagang yang tertata	Persen		Persen	40 Persen	66,108,000						40 Persen	66,108,000	
3	30	3	2.02	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	35,971,600	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pedagang	1 Dokumen	35,971,600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			1 Dokumen	30,136,400	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pedagang	1 Dokumen	30,136,400	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	Persen		Persen	7.6 Persen	114,664,100					7.4 Persen	114,664,100	
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kali		Kali	60 Kali	114,664,100					60 Kali	114,664,100	
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	75,337,500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Masyarakat dan Pelaku Usaha	12 Laporan	75,337,500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	39,326,600	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Laporan	39,326,600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha setelah promosi(%)	Persen		Persen	29.05 Persen	467,513,800					57 Persen	117,513,800	
3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi	Kali		Kali	1 Kali	467,513,800					1 Kali	117,513,800	
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				10 Pelaku Usaha	430,874,700	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	80,874,700	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
3	30	5	2.01	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina				3 Pelaku Usaha	36,639,100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	36,639,100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
						Persentase Barang Beredar Yang Diawasi yang sesuai dengan ketentuan	Persen		Persen	78.00							79.00	
						Persentase alat – alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	Persen		Persen	22.00							24.00	
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE BARANG BEREDAR YANG DIAWASI YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persen		Persen	78 Persen	210,812,300					78 Persen	210,812,300	

3	30	6	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang sudah ditera/tera ulang	Buah		Buah	1200 Buah	210,812,300						1200 Buah	210,812,300	
					Jumlah temuan barang tidak layak edar	Buah		Buah	80 Buah							80 Buah		
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			1200 Unit	144,209,600	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pelaku Usaha	1200 Unit	144,209,600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			50 Orang	66,602,700	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pelaku Usaha	50 Orang	66,602,700	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Jumlah produk yang dipasarkan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga	Persen		Persen	27 Persen	46,210,000					30 Persen	46,210,000	
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan promosi dan pemasaran	Kali		Kali	8 Kali	46,210,000					8 Kali	46,210,000	
3	30	7	2.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			10 UMKM	46,210,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pelaku Usaha	10 UMKM	46,210,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1,212,895,900								1,182,895,900
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Persen		Persen	10 Persen	196,141,800					10 Persen	166,141,800	
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Laporan		Laporan	1 Laporan	196,141,800					1 Laporan	166,141,800	
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			1 Dokumen	196,141,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Dalam Perekonomian	IKM	1 Dokumen	166,141,800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE PRODUK INDUSTRI YANG BERSERTIFIKAT HALAL	Persen		Persen	8.71 Persen	79,758,300					10,10 Persen	79,758,300	
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rekomendasi penerbitan izin usaha industri	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	79,758,300					3 Kegiatan	79,758,300	

3	31	3	2.01	1	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				1 Dokumen	79,758,300	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	IKM	1 Dokumen	79,758,300	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PROFIL IKM YANG BERKEMBANG	Persen		Persen	0.58 Persen	936,995,800						1.58 Persen	936,995,800	
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan informasi	Laporan		Laporan	1 Laporan	936,995,800						1 Laporan	936,995,800	
3	31	4	2.01	1	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	124,230,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	IKM	1 Dokumen	124,230,800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	812,765,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	IKM	1 Dokumen	812,765,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3,189,675,800							4,861,486,800	
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja	%		%	30 %	52,598,600						30 %	93,486,800	
2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja (RTK)	%		%	100 %	52,598,600						100 %	93,486,800	
2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 dokumen	23,569,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Tenaga Kerja	1 dokumen	44,992,200	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	7	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro				10 perusahaan	29,028,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Tenaga Kerja	10 perusahaan	48,494,600	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten/ bersertifikat kompetensi	%		%	4 %	1,922,640,000						4 %	3,330,000,000	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster	%		%	24 %	1,770,395,000						24 %	3,145,000,000	
	2	7	3	2.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun N				644 orang	1,025,897,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Peserta Pelatihan	644 orang	3,145,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
										Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil									
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
	2	7	3	2.01	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				4 Lembaga	744,498,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Peserta Pelatihan	4 Lembaga	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil							
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang Terakreditasi	%		%	100 %	79,160,000						100 %	100,000,000	
	2	7	3	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				3 Lembaga	79,160,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3 Lembaga	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil							
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
2	7	3	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%		%	100 %	73,085,000						100 %	85,000,000	
	2	7	3	2.04	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				20 Perusahaan	73,085,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perusahaan Kecil	20 Perusahaann	85,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja didalam dan luar negeri	%		%	55 %	966,106,500						60 %	985,000,000	
2	7	4	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja	%		%	100 %	798,176,400						100 %	355,000,000	
	2	7	4	2.01	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL				60 Oarang	112,234,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Tenaga Kerja	60 Oarang	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	2	7	4	2.01	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				20 Orang	412,430,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Tenaga Kerja	20 Orang	80,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

2	7	4	2.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				5 Orang	27,500,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Tenaga Kerja	5 Orang	65,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja				20 Orang	246,010,600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Tenaga Kerja	20 Orang	60,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	7	4	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPTKS yang memiliki izin/ terdaftar di Kabupaten Balangan	LPTKS			LPTKS	1 LPTKS	11,428,800					1 LPTKS	60,000,000	
2	7	4	2.02	2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku				2 Lembaga	11,428,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	2 Lembaga	60,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase dokumen informasi pasar kerja	%			100 %	97,379,300						100 %	370,000,000	
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja Online				12 Dokumen	12,105,700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Tenaga Kerja	12 Dokumen	70,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair /Bursa Kerja				10 Orang	85,273,600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Tenaga Kerja	10 Orang	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	7	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI/ CPMI / Masyarakat yang mendapatkan layanan	%			100 %	59,122,000						100 %	200,000,000	
2	7	4	2.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya				10 Orang	14,141,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	PMI (Pra dan Purna Penempatan)	10 Orang	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	7	4	2.04	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan				20 Orang	44,980,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	PMI (Pra dan Purna Penempatan)	20 Orang	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

							Persentase PPHI yang difasilitasi	%		%	100 %						100 %		
2	7	5				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	%		%	100 %	248,330,700					100 %	453,000,000	
							Persentase PPHI yang difasilitasi	%		%	100 %						100 %		
2	7	5	2.01			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%		%	100 %	35,170,000					100 %	120,000,000	
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	35,170,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perusahaan	1 Laporan	120,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	7	5	2.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%		%	100 %	213,160,700					100 %	333,000,000	
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				3 Perkara	128,395,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perusahaan	3 Perkara	240,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA	
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				3 Perkara	16,690,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perusahaan	3 Perkara	38,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA	
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	68,075,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perusahaan	1 Lembaga	55,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI	
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						11,658,542,863					11,274,887,540		
2	18	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Nilai		Nilai	70,40 (BB) Nilai	10,896,614,263					70,40 (BB) Nilai	10,671,586,400	
2	18	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	%		%	100 %	87,425,000					100 %	117,510,400	
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	17,485,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	SKPD	2 Dokumen	13,750,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	17,485,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	SKPD	1 dokumen	15,159,100	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	17,485,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	SKPD	1 dokumen	12,017,500	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	17,485,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	SKPD	2 Laporan	54,637,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	17,485,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	SKPD	2 Laporan	7,143,400	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%		%	100 %	8,613,898,613						100 %	8,701,064,900	
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 orang/bulan	7,331,644,613	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perangkat Daerah	50 orang/bulan	8,215,627,200	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 dokumen	1,212,244,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perangkat Daerah	12 dokumen	443,520,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 dokumen	35,005,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perangkat Daerah	12 dokumen	8,875,900	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	35,005,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perangkat Daerah	1 laporan	8,875,900	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

2	18	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	17,495,000						100 %	207,483,600	
2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			50 paket	17,495,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perangkat Daerah	50 paket	57,426,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	%		%	100 %	635,719,000						100 %	235,400,000	
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	8,996,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perangkat Daerah	1 paket	9,900,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			20 Paket	310,145,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perangkat Daerah	20 Paket		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 paket	19,962,400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perangkat Daerah	1 paket	27,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			60 laporan	296,615,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perangkat Daerah	60 laporan	198,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					109,514,000							77,000,000	
2	18	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2 Unit	43,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		2 Unit		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Unit	66,514,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian		4 Unit	77,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						

2	18	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	634,647,700						12 bulan	1,087,871,500	
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	449,809,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perangkat Daerah	12 Laporan	442,480,500	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	184,838,500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perangkat Daerah	12 Laporan	645,391,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	797,914,950					12 bulan	245,256,000	
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			31 unit	234,854,950	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pemerintah Daerah	31 unit	165,880,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	563,060,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pemerintah Daerah	2 unit	79,376,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
					Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha		%		%	2						2		
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	%		%	1	82,437,400					1	151,488,700	
2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	dokumen		dokumen	1 dokumen	55,902,400					1 dokumen	112,850,100	
						PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen						1 dokumen		
						Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	dokumen		dokumen	1 dokumen						1 dokumen		
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			1 dokumen	6,859,600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pelaku Usaha	1 dokumen	57,850,100	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

2	18		2	2.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				25 Kegiatan Usaha	49,042,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pelaku Usaha	25 Kegiatan Usaha	55,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
														Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	2	2.02			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Investasi Kabupaten/Kota	potensi		potensi	1 potensi	26,535,000						1 potensi	38,638,600	
2	18	2	2.02	1		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 dokumen	7,510,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pelaku Usaha	1 dokumen	22,209,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
														Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	2	2.02	2		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 dokumen	19,025,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pelaku Usaha	1 dokumen	16,429,600	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
														Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	3				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi (Milyar Rupiah)	Rupiah		Rupiah	210,000,000,000 Rupiah	58,443,600						210,000,000,000 Rupiah	75,815,300	
2	18	3	2.01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pameran Penanaman Modal	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	58,443,600						2 kegiatan	75,815,300	
							Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on one meeting	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan							2 kegiatan		
2	18	3	2.01	1		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen	17,352,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Investor	1 dokumen	19,231,300	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
														Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	3	2.01	2		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 dokumen	41,091,600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Investor	1 dokumen	56,584,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
														Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
							Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	%		%	100 %							100 %		
2	18	4				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Konsultasi dan Penaduan sesuai SOP	%		%	100 %	426,926,800						100 %	124,096,640	
							Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP0	%		%	100 %							100 %		
2	18	4	2.01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang	Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	kegiatan		kegiatan	12 kegiatan	426,926,800						12 kegiatan	124,096,640	
							Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	izin		izin	700 izin							700 izin		
2	18	4	2.01	1		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				700 Pelaku Usaha	34,436,100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Masyarakat, Pelaku Usaha, Perusahaan	700 Pelaku Usaha	37,888,400	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
														Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				700 kegiatan usaha	20,248,400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Masyarakat, Pelaku Usaha, Perusahaan	700 kegiatan usaha	22,273,240	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				4 orang	353,124,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Masyarakat, Pelaku Usaha, Perusahaan	4 orang	51,975,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				700 Kegiatan Usaha	19,117,500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Masyarakat, Pelaku Usaha, Perusahaan	700 Kegiatan Usaha	11,960,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%		%	100 %	87,980,800						100 %	99,088,500	
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Realisasi Penanaman Modal	laporan		laporan	4 laporan	87,980,800						4 laporan	99,088,500	
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				25 Kegiatan Usaha Usaha	14,486,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perusahaan	25 Kegiatan Usaha Usaha	14,486,400	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				25 Pelaku Usaha	33,305,600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perusahaan	25 Pelaku Usaha	38,112,800	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				25 Kegiatan Usaha	40,188,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perusahaan	25 Kegiatan Usaha	46,489,300	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

2	18	6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	%		%	100 %	106,140,000						100 %	152,812,000	
2	18	6	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	%		%	100 %	106,140,000						100 %	152,812,000	
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			6 dokumen	106,140,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Masyarakat	6 dokumen	152,812,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						534,846,384							342,500,000	
3	32	3		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga transmigrasi yang terampil	%		%	16 %	111,352,000						16 %	126,500,000	
3	32	3	2.01	1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga transmigrasi yang terampil	orang		orang	20 orang	111,352,000					20 orang	126,500,000	
3	32	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3 Laporan	14,985,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Warga Transmigrasi	3 Laporan	16,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3	32	3	2.01	2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)			1 Dokumen	96,367,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Warga Transmigrasi	1 Dokumen	110,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3	32	4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	%		%	19.05 %	423,494,384						19.20 %	216,000,000	
3	32	4	2.01	1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang Dibina	Satuan Permukiman		Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	423,494,384					1 Satuan Permukiman	216,000,000	
3	32	4	2.01	1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah kepala keluarga Transmigran yang dibina			75 Kepala Keluarga	15,117,000	Kab. Balangan, Lamphong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Kawasan Transmigrasi	75 Kepala Keluarga	16,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3	32	4	2.01	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan			1 Satuan Permukiman	408,377,384	Kab. Balangan, Lamphong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Kawasan Transmigrasi	1 Satuan Permukiman	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							17,750,677,472						13,085,427,325	
2	19	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DISPORAPAR	Nilai		Nilai	80 Nilai	8,876,390,472						80 Nilai	9,801,442,526	
2	19	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	400,806,000						7 Dokumen	454,809,849	
2	19	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	333,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	7 Dokumen	151,603,283	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	67,406,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	1 Laporan	151,603,283	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan SKPD	Bulan		Bulan	12 Bulan	6,323,735,772						12 Bulan	7,344,879,845	
2	19	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			32 Orang/bulan	6,323,735,772		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	32 Orang/bulan	7,000,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		Orang	50 Orang	67,984,800						50 Orang	327,000,000	
2	19	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			74 Paket	67,984,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	74 Paket	163,500,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum PD	Bulan		Bulan	12 Bulan	657,109,400						12 Bulan	606,700,848	
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	86,259,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	12 Paket	101,116,808	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket	45,198,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	5 Paket	101,116,808	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			100 Paket	69,819,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	100 Paket	101,116,808	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			7 Dokumen	10,005,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	7 Dokumen	101,116,808	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 Laporan	445,826,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	100 Laporan	101,116,808	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Watu Pengadaan BMD yang di Administrasi PD sesuai standar	Bulan		Bulan	12 Bulan	555,146,900						12 Bulan	350,000,000	
2	19	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	555,146,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	2 Unit	175,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

2	19	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	429,400,400						12 Bulan	335,510,850	
2	19	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	181,199,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	12 Laporan	111,836,950	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	248,201,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	12 Laporan	111,836,950	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Waktu Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	Bulan		Bulan	12 Bulan	442,207,200					12 Bulan	382,541,134	
2	19	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			30 Unit	234,667,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	30 Unit	191,270,567	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	207,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	ASN	2 Unit	191,270,567	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wira usaha muda	persen	persen		15%	861,856,100					20%	91,774,800	
2	19	2				Persentase pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan	persen		persen	30%						40%		
						Persentase wira usaha muda	persen		persen	20 persen						20 persen		
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda pelopor, wirausaha muda dan pemuda kader	orang		orang	254 orang	861,856,100					254 orang	53,074,800	
2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			20 Orang	27,728,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	20 Orang	17,691,600	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			0 Orang	27,918,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	0 Orang	17,691,600	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan			45 Orang	806,210,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	45 Orang	17,691,600	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase prestasi olah raga yang diraih	persen		persen	40 persen	7,255,756,300					50 persen	3,074,996,999	
2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang berprestasi yang dibina oleh SKO, PPLP dan PPLM	orang		orang	20 orang	2,317,319,000					20 orang	720,965,200	
2	19	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar			2 Dokumen	542,816,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pelajar dan atlet	2 Dokumen	360,482,600	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				9 Unit	1,774,502,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pelajar dan atlet	9 Unit	360,482,600	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan yang diikuti pada even tingkat daerah	kejuaraan		kejuaraan	2 kejuaraan	694,548,100						2 kejuaraan	1,000,000,000	
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	694,548,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pelajar dan atlet	1 Dokumen	1,000,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang diikutkan pada pembinaan dan pengembangan prestasi tingkat provinsi	orang		orang	25 orang	113,054,000						25 orang	67,000,000	
2	19	3	2.03	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				2 Pelatda	113,054,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Atlet	2 Pelatda	67,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olah raga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan	organisasi		organisasi	8 organisasi	2,850,000,000						8 organisasi	887,031,800	
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1 Organisasi	2,850,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	organisasi olah raga	1 Organisasi	887,031,800	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi dan tradisional	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	1,280,835,200						5 kegiatan	399,999,999	
2	19	3	2.05	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				3 Laporan	1,203,425,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Masyarakat Balangan	3 Laporan	133,333,333	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	3	2.05	5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				5 Dokumen	77,409,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Masyarakat Balangan	5 Dokumen	133,333,333	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentasi partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan	persen		persen	60 persen	756,674,600						60 persen	117,213,000	
2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	kwaran		kwaran	8 kwaran	756,674,600						8 kwaran	117,213,000	
2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				8 Organisasi	756,674,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Anggota dan Pengurus Pramuka	8 Organisasi	117,213,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						1,791,925,800							2,920,137,000	
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARWISATA	Persentase Kunjungan Wisata	persen		persen	100 persen	839,242,700						100 persen	1,434,459,000	
3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisata	orang		orang	31017 orang	839,242,700						31017 orang	1,434,459,000	
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				14 Lokasi	645,389,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pokdarwis dan pengunjung wisata	14 Lokasi	1,000,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				4 Unit	109,163,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pokdarwis dan pengunjung wisata	4 Unit	309,711,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Laporan	84,690,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pokdarwis dan pengunjung wisata	4 Laporan	124,748,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama kunjungan wisata	hari		hari	2 hari	710,528,500						2 hari	1,215,302,000	
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam dan di luar negeri	event		event	10 event	710,528,500						10 event	1,215,302,000	
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	183,772,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Masyarakat	0 Dokumen	805,926,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Laporan	526,756,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Masyarakat	10 Laporan	160,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentasi Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	persen		persen	20 persen	242,154,600						20 persen	270,376,000	
						persentase produk kreasi unggulan	persen		persen	30 persen							30 persen		
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM dalam pembekalan sektor kepariwisataan	orang		orang	20 orang	242,154,600						20 orang	270,376,000	
3	26	5	2.01	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				4 Laporan	90,094,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pokdarwis dan masyarakat balangan	4 Laporan	106,614,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				25 Orang	152,060,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Pokdarwis dan masyarakat balangan	25 Orang	163,762,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						9,379,232,399							10,117,500,389	
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja	(B) Nilai / Angka		(B) Nilai / Angka	62,50 (B) Nilai / Angka	7,651,673,499						62,50 (B) Nilai / Angka	7,951,601,289	
2	23	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	persen		persen	100 persen	267,822,700						100 persen	278,158,300	
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	226,917,100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Dokumen	255,665,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

2	23	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	20,502,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	13,990,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	20,402,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Laporan	8,503,300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan yang Berlaku	persen		persen	100 persen	5,838,986,255						100 persen	6,013,741,789	
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	5,743,366,655	Semua Kab/Kota, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Orang/bulan	5,924,181,139	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	87,481,200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Dokumen	79,649,950	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,941,200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Laporan	4,850,700	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4060000 Laporan	4,197,200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4060000 Laporan	5,060,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

2	23	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan yang Berlaku	persen		persen	100 persen	207,719,400						100 persen	217,800,000	
2	23	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			2 Paket	175,079,400	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Paket	167,800,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			6 Orang	32,640,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	6 Orang	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan yang Berlaku	persen		persen	100 persen	488,263,900					100 persen	524,435,100	
2	23	1	2.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	10,966,300	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Paket	8,052,200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	25,152,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Paket	29,766,900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	7,112,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	9,200,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	445,032,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Laporan	477,416,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	bulan		bulan	12 bulan	471,851,544					12 bulan	511,830,200	
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	218,100,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Laporan	196,787,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

2	23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	80,881,900	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Laporan	97,700,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	172,869,644	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Laporan	217,342,700	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	bulan		bulan	12 bulan	377,029,700						12 bulan	405,635,900	
2	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	200,250,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	25 Unit	230,065,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	176,779,700	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	8 Unit	175,570,900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks pembangunan literasi Masyarakat	persen		persen	17 persen	1,513,975,300						20 persen	1,877,329,000	
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Ma	persen		persen	8 persen	1,226,046,100						8 persen	1,554,128,000	
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				2 Layanan	50,628,400	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Layanan	51,840,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				2 Perpustakaan	27,241,400	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Perpustakaan	48,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	43,053,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	5 Orang	49,879,250	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				6 Layanan	799,622,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	6 Layanan	884,040,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				1000 Eksemplar	216,154,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1000 Eksemplar	268,999,250	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1000 Eksemplar	89,346,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1000 Eksemplar	251,369,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kegemaran membaca masyarakat	persen		persen	65 persen	287,929,200						65 persen	323,201,000	
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				2 Lokus	265,489,700	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Lokus	278,488,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	2	2.02	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				3 Orang	22,439,500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	3 Orang	44,713,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Cakupan Peningkatan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	persen		persen	30%	213,583,600						40%	288,570,100	
2	23	3	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	persen		persen	30 persen	213,583,600						30 persen	288,570,100	
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				2 Orang	4,399,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Orang	8,972,450	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

2	23	3	2.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				2 Eksemplar	209,184,600	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Eksemplar	279,597,650	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						1,437,898,600							2,141,514,450	
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	persen		persen	16.67%	823,401,500						30%	1,150,418,150	
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis Pencipta Arsip	persen		persen	100 persen	403,755,900						100 persen	567,536,100	
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				5 Berkas	338,015,100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	5 Berkas	276,361,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				2 Berkas	33,455,700	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Berkas	245,890,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	32,285,100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Laporan	45,285,100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang yang dipreservasi	persen		persen	100 persen	231,889,100						100 persen	287,212,050	
2	24	2	2.02	1	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI				10 Arsip	195,972,400	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	10 Arsip	239,761,250	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				10 Arsip	35,916,700	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	10 Arsip	47,450,800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	J pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	persen		persen	100 persen	187,756,500						100 persen	295,670,000	
2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				8 Pengguna	36,000,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	8 Pengguna	35,680,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			1 Laporan	151,756,500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Laporan	259,990,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip daerah	persen		persen	20 persen	427,470,300					30 persen	743,065,500	
2	24	3	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang terdaftar diselamatkan /dilindungi	arsip		arsip	1 arsip	234,666,500					1 arsip	395,766,500	
2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			1 Arsip	234,666,500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Arsip	395,766,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	24	3	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah yang terdaftar Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terdaftar	Daftar		Daftar	1 Daftar	192,803,800					1 Daftar	347,299,000	
2	24	3	2.03	3	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan			1 Arsip	192,803,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Arsip	347,299,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	24	4			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Prosentasi Pelayanan Perijinan dan Penggunaan Arsip	persen		persen	40 persen	187,026,800					60 persen	248,030,800	
2	24	4	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Pengguna yang terdaftar Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Di Lembaga Kearsipan Daerah	SOP		SOP	1 SOP	187,026,800					1 SOP	248,030,800	
2	24	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan			1 SOP	187,026,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	1 SOP	248,030,800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
				SEKRETARIAT DAERAH							49,302,375,581								42,741,966,076			
4	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Nilai		Nilai	70.40 (BB) Nilai	49,302,375,581						70.40 (BB) Nilai	42,741,966,076				
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disampaikan Tepat Waktu	%		%	100 %	1,193,375,600						100 %	224,890,700				
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1,139,551,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	2 Dokumen	192,351,200	SEKRETARIAT DAERAH			
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	53,823,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	6 Laporan	32,539,500	SEKRETARIAT DAERAH			
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan yang Berlaku	%		%	100 %	14,807,978,868						100 %	13,403,603,168				
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	14,660,319,668		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	12 Orang/bulan	13,194,020,648	SEKRETARIAT DAERAH			
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	102,610,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	116,287,500	SEKRETARIAT DAERAH			
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	27,838,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	1 Laporan	28,457,520	SEKRETARIAT DAERAH			
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD				12 Laporan	17,210,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	12 Laporan	64,837,500	SEKRETARIAT DAERAH			
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										

4	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	%		%	100 %	321,725,000						100 %	210,000,000	
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	321,725,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sekretariat Daerah	1 Paket	210,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	%		%	100 %	11,921,700,690						100 %	12,342,361,000	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2 Paket	516,188,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	2 Paket	231,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	2,803,689,190		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	1 Paket	1,596,656,250	SEKRETARIAT DAERAH	
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	741,307,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	1 Paket	419,948,300	SEKRETARIAT DAERAH	
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	986,802,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	1 Paket	1,039,500,000	SEKRETARIAT DAERAH	
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	783,267,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	1 Paket	457,830,450	SEKRETARIAT DAERAH	
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			467 Laporan	6,090,446,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	467 Laporan	8,597,426,000	SEKRETARIAT DAERAH	
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	7,493,794,000						12 Bulan	6,528,057,900	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	3,524,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	1 Laporan	2,173,344,600	SEKRETARIAT DAERAH	
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,387,667,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	12 Laporan	1,035,285,300	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,582,126,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	12 Laporan	3,319,428,000	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12,409,563,623						12 Bulan	8,743,245,618	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				50 Unit	2,655,565,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	50 Unit	1,529,185,000	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	529,404,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	20 Unit	403,840,500	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	5,396,407,273		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	3 Unit	3,471,993,618	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1,736,775,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	3 Unit	1,462,971,500	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	2,091,412,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	3 Unit	1,875,255,000	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pimpinan yang dilayani Administrasi Keuangannya	%		%	100 %	1,154,237,800						100 %	1,289,807,690	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	260,197,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	12 Orang/Bulan	273,207,690	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	494,040,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	1 Paket	516,600,000	SEKRETARIAT DAERAH		
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil								
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	2 Orang/Bulan	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH		
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil								
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
4	1			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1			SEKRETARIAT DAERAH								1,561,558,000								1,608,475,500	
4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebijakan di Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana Serta Bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang terlaksana dan berkualitas	%		%	100 %	1,561,558,000							100 %	1,608,475,500			
4	1	1	2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Nilai				1,561,558,000							77.6 Nilai	1,608,475,500			
					Nilai Laporan Kinerja Pemda	Nilai											13.52 Nilai				
					Nilai Laporan Kinerja Pemda	%											100 %				
					Persentase Bagian pada Setda yang memiliki Nilai IKM Baik	%											100 %				
					Persentase SKPD dengan Dokumen Jabatan Lengkap (ANJAB, ABK, EVAJAB)	%											100 %				
					Persentase SKPD dengan Kualifikasi Nilai SAKIP BB	%											63.33 %				
					Persentase SKPD dengan Nilai IPP Baik	%											100 %				
					Persentase SKPD (Unit Pelayanan Publik) yang memiliki Nilai IKM Baik	%											100 %				
					Persentase SKPD (Unit Pelayanan Publik) yang Memiliki Nilai IKM Baik	%											100 %				
					Persentase SKPD yang melaksanakan Tata Laksana dengan Baik	%											100 %				
					Persentase SKPD yang memiliki nilai Budaya Kerja Baik	%											33.33 %				
					Persentase SKPD yang memiliki nilai Budaya Kerja Baik	Nilai											77.6 Nilai				
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	492,405,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	504,165,000	SEKRETARIAT DAERAH		
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil								
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	386,225,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	2 Laporan	420,282,500	SEKRETARIAT DAERAH		
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil								
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								

4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	682,928,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	684,028,000	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH														
											1,725,674,700							1,878,487,800	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebijakan di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi yang terlaksana dan Berkualitas	%		%	100 %	1,725,674,700						100 %	1,878,487,800	
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Cakupan Media Informasi Komunikasi Publik yang Mempublikasikan Kegiatan Pembangunan Daerah di Kabupaten Balangan	%		%	100 %	1,725,674,700						100 %	1,878,487,800	
						Persentase Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilayani	%		%	100 %							100 %		
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				10 Laporan	525,948,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	10 Laporan	598,488,450	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				5 Laporan	582,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	5 Laporan	614,247,900	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				5 Laporan	616,925,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah	5 Laporan	665,751,450	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH														
											1,602,573,000							1,884,769,610	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan di Bidang Administrasi Pemerintahan Administrasi Kewilayahan dan Otonomi dan Kerjasama Daerah yang Terlaksana dan Berkualitas	%		%	100 %	1,602,573,000						100 %	1,884,769,610	
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Pilar Batas Daerah Sesuai Titik Koordinat	Pilar		Pilar	20 Pilar	1,155,418,000						20 Pilar	1,351,668,360	
						Persentase Kecamatan dengan Kualitas PATEN Predikat Baik	%		%	100 %							100 %		
						Persentase SKPD yang Menyusun bahan LPPD secara Sistematis dan Data Terisi Lengkap	%		%	100 %							100 %		
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	642,378,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah	1 Dokumen	858,169,200	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	304,447,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah	1 Dokumen	184,023,840	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	208,592,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah	1 Dokumen	309,475,320	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	447,155,000						10 Dokumen	533,101,250	
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				10 Dokumen	447,155,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Sekretariat Daerah	10 Dokumen	533,101,250	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						19,203,377,200							16,344,486,961	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan di Bidang Bina Mental dan Spiritual, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana dan Berkualitas	%		%	100 %	19,203,377,200						100 %	16,344,486,961	
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang tepat sasaran	%		%	100 %	19,203,377,200						100 %	16,344,486,961	
						Persentase Tempat Ibadah yang berfungsi dengan Baik	%		%	100 %							100 %		
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	10,103,938,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	12,219,559,853	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	8,947,958,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	3,873,580,008	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	151,481,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	251,347,100	SEKRETARIAT DAERAH	
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil							
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						1,058,291,200								1,110,721,500	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan di Bidang Perundang-undangan, Bidang Bantuan Hukum dan Bidang Dokumentasi dan Informasi yang terlaksana dan berkualitas	%		%	100 %	1,058,291,200						100 %	1,110,721,500		
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang Berhasil di Harmonisasikan	%		%	100 %	1,058,291,200						100 %	1,110,721,500		
						Pesentase Kasus/Pengaduan yang terselesaikan	%		%	100 %							100 %			
						Tingkat Kepuasan Layanan Produk Hukum dan Informasi Hukum	%		%	100 %							100 %			
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				1 Dokumen	554,542,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sekretaris Daerah	1 Dokumen	451,570,000	SEKRETARIAT DAERAH	
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil							
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	341,727,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis	Sekretaris Daerah	2 Kasus	494,832,125	SEKRETARIAT DAERAH	
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil							
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				2 Dokumen	162,022,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis	Sekretaris Daerah	2 Dokumen	164,319,375	SEKRETARIAT DAERAH	
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil							
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						981,817,000								841,541,290	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD	%		%	100 %	981,817,000						100 %	841,541,290		
						Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi	%		%	100 %							100 %			
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Telaahan/arahan Kebijakan yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	981,817,000						100 %	841,541,290		
						Persentase Temuan Monitori dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	%		%	100 %							100 %			

4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah				4 Dokumen	361,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Sekretariat Daerah	4 Dokumen	359,010,000	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	227,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Sekretariat Daerah	4 Laporan	281,698,790	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	392,327,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah	4 Laporan	200,832,500	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						989,243,700							781,527,340	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Bidang Perekonomian, Bidang Sumberdaya Alam yang terlaksana dan berkualitas	%		%	100 %	989,243,700						100 %	781,527,340	
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Sektor Perekonomian yang Berhasil ditindaklanjuti oleh SKPD Terkait	%		%	80 %	794,039,500						80 %	581,273,590	
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	88,765,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Sekretariat Daerah	4 Dokumen	100,152,000	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	193,619,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Sekretariat Daerah	4 Laporan	220,139,080	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	405,334,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	103,783,560	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	106,321,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	157,198,950	SEKRETARIAT DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

4	1	3	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Permasalahan yang Berhasil di Fasilitasi dan ditindaklanjuti	%		%	20 %	195,204,200						20 %	200,253,750						
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			1 Dokumen	40,123,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	42,129,150	SEKRETARIAT DAERAH						
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			1 Dokumen	93,452,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	98,124,600	SEKRETARIAT DAERAH						
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			1 Dokumen	61,629,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sekretariat Daerah	1 Dokumen	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH						
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1			SEKRETARIAT DAERAH										1,175,358,650					1,396,779,640				
4	1	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan di Bidang Pengelolaan PBJ, Bidang Pengelolaan LPSE, Bidang Pembinaan dan Advokasi PBJ yang terlaksanaan dan Berkualitas	%		%	100 %	1,175,358,650						100 %	1,396,779,640						
4	1	3	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	%		%	50 %	1,175,358,650						50 %	1,396,779,640						
					Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan	%		%	100 %							100 %							
					Persentase Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif	%		%	88 %							88 %							
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1 Dokumen	398,749,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sekretariat Daerah	1 Dokumen	450,766,080	SEKRETARIAT DAERAH						
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			1 Dokumen	387,438,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sekretariat Daerah	1 Dokumen	439,812,500	SEKRETARIAT DAERAH						
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil											
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											

4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				10 Orang	389,170,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekretariat Daerah	10 Orang	506,201,060	SEKRETARIAT DAERAH		
													Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil								
													Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum								
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	2			SEKRETARIAT DPRD										42,057,706,972						46,957,111,951	
4	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0	Persen			Persen	100 Persen	29,021,081,072						100 Persen	28,605,425,961		
					Laporan		Persen		Persen	100 Persen								100 Persen			
					Prosentase pemenuhan administrasi laporan keuangan		Persen		Persen	100 Persen								100 Persen			
4	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan		persen			persen	100 persen	316,755,000						100 persen	393,860,500		
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	53,689,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Dokumen	80,025,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					1 Dokumen	30,319,600	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Dokumen	33,352,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD					1 Dokumen	20,372,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Dokumen	22,473,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD					1 Dokumen	36,401,200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Dokumen	40,051,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD					1 Dokumen	21,340,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Dokumen	23,661,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3 Laporan	147,476,300	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	3 Laporan	186,312,500	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	7,155,300	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Laporan	7,986,000	SEKRETARIAT DPRD	

4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Terfasilitasinya administrasi dan pelaporan keuangan SOPD	bulan		bulan	12 bulan	3,161,155,892						12 bulan	3,058,318,909	
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	3,110,804,292	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	26 Orang/bulan	3,002,757,909	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	8,366,500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Dokumen	9,251,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	14,176,700	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Laporan	15,675,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	5,023,600	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Dokumen	5,555,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	22,784,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Laporan	25,080,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	persen		persen	100 persen	484,580,000						100 persen	579,370,000	
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	69,980,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Paket	118,250,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	414,600,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	75 Orang	461,120,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	bulan		bulan	12 bulan	3,482,904,800						12 bulan	4,109,744,319	
						Waktu Pelayanan Administrasi Keuangan	bulan		bulan	12 bulan							12 bulan		
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	60,017,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	3 Paket	66,018,700	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	377,264,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Paket	231,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	222,113,300	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Paket	414,975,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	518,015,500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	6 Paket	371,395,419	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	53,000,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Paket	58,300,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				6 Dokumen	146,650,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	6 Dokumen	161,315,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	104,700,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Paket	115,170,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	104,600,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	20 Laporan	313,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	1,896,545,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	120 Laporan	2,378,070,200	SEKRETARIAT DPRD

4	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan		bulan	12 bulan	3,298,495,500						12 bulan	2,493,073,000	
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	491,100,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Laporan	540,210,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 Laporan	289,983,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	6 Laporan	319,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	2,517,412,500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Laporan	1,633,863,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan		bulan	12 bulan	1,388,392,500					12 bulan	1,562,467,935	
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			6 Unit	291,050,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	6 Unit	320,155,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			20 Unit	319,075,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	20 Unit	350,982,500	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	74,850,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	20 Unit	82,335,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	703,417,500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	3 Unit	775,995,435	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	bulan		bulan	12 bulan	16,562,854,980					12 bulan	16,050,046,298	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			25 Orang/Bulan	16,131,151,180	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	25 Orang/Bulan	15,386,746,298	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			4 Paket	361,703,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Paket	586,300,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			25 Orang	70,000,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	25 Orang	77,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	bulan		bulan	12 bulan	325,942,400					12 bulan	358,545,000	
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan			4 Paket	325,942,400	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Paket	358,545,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Nilai	Nilai	IKM minimal Baik	13,036,625,900						IKM minimal Baik	18,351,685,990	
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Raperda yang telah di bahas oleh DPRD dan telah di sampaikan ke bagian hukum	persen		persen	100 persen	4,171,332,500					100 persen	6,067,662,700	
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			4 Dokumen	955,276,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Dokumen	1,708,334,320	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			7 Dokumen	2,495,691,700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	7 Dokumen	3,256,358,380	SEKRETARIAT DPRD

4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				4 Dokumen	595,364,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Dokumen	970,970,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	125,000,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Dokumen	132,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAANKEUANGAN DAERAH	persen		persen	100 persen	250,151,800						100 persen	275,167,200	
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	13,968,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Dokumen	54,001,200	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	12,452,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Dokumen	51,876,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	84,306,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Dokumen	51,876,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	82,384,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Dokumen	51,876,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	11,942,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Dokumen	13,662,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	45,097,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Dokumen	51,876,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	prosentase Rapat kerja yang difasilitasi dengan baik	persen		persen	100 persen	214,003,600						100 persen	235,405,500	
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				4 Laporan	30,187,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Laporan	33,209,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				4 Laporan	31,964,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Laporan	35,200,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				4 Laporan	18,042,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Laporan	34,540,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				4 Laporan	30,185,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Laporan	33,209,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				4 Laporan	15,616,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	4 Laporan	33,209,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	9,134,600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	1 Dokumen	10,054,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				3 Dokumen	28,519,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	3 Dokumen	31,372,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				2 Dokumen	50,354,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	2 Dokumen	24,612,500	SEKRETARIAT DPRD

4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	prosentase Rapat kerja yang difasilitasi dengan baik	persen		persen	100 persen	2,306,552,600						100 persen	2,454,900,250	
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	872,865,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	3 Dokumen	964,920,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				20 Dokumen	1,062,478,600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	20 Dokumen	1,081,506,250	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	175,909,500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Dokumen	193,600,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				12 Dokumen	195,299,500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Dokumen	214,874,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	PRESENTASE ASPIRASI MASYARAKAT YANG DAPAT DI AKOMODIR(DI BAHAS) OLEH DPRD	persen		persen	100 persen	1,151,332,700						100 persen	1,266,466,300	
4	2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				125 Laporan	57,150,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	125 Laporan	62,865,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	37,937,300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	3 Dokumen	41,701,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	1,056,245,400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	3 Dokumen	1,161,900,300	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Dokumen Kerja sama antar daerah yang di setuju	persen		persen	100 persen	503,263,600						100 persen	554,206,400	
4	2	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				3 Dokumen	503,263,600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	3 Dokumen	554,206,400	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	persen		persen	100 persen	4,439,989,100						100 persen	7,497,877,640	
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				15 Dokumen	4,000,813,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	15 Dokumen	7,035,404,640	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				8 Laporan	90,637,100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	8 Laporan	78,628,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	106,430,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	12 Dokumen	117,150,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				15 Dokumen	242,108,200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	0	15 Dokumen	266,695,000	SEKRETARIAT DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	1				PERENCANAAN						12,293,568,865							9,302,870,767	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai		Nilai	70,4 (BB) Nilai	8,621,244,665						70,4 (BB) Nilai	7,395,176,917	
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Dokumen			Dokumen	10 Dokumen	141,497,600					10 Dokumen	182,147,350	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	18,726,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNSD Kab. Balangan	3 Dokumen	49,585,679	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	39,030,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNSD Kab. Balangan	4 Dokumen	68,728,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	83,741,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNSD Kab. Balangan	3 Dokumen	63,833,672	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan jasa administrasi keuangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	5,704,974,015						12 Bulan	6,692,862,909	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	5,630,888,415		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNSD Kab. Balangan	12 Orang/bulan	6,609,191,820	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pemenuhan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	56,787,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNSD Kab. Balangan	12 Bulan	73,501,402	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				2 dokumen	8,809,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNSD Kab. Balangan	2 dokumen	10,169,687	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran				2 dokumen	8,489,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNSD Kab. Balangan	2 dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	597,600,000						100 %	169,642,000	
5	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNSD Bappedalitbang kab. Balangan	1 Paket	21,780,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	567,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNSD Bappedalitbang kab. Balangan	0 Orang	147,862,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Upaya peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM) pegawai				12 Bulan							12 Bulan		

5	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi,sarana & prasarana perkantoran	%		%	100 %	960,463,000						100 %	350,524,658	
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	22,904,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNSD Bappedalitban g Kab. Balangan	1 Paket	28,637,917	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	486,085,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNSD Bappedalitban g Kab. Balangan	1 Paket	254,281,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan			12 Bulan	84,921,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNSD Bappedalitban g Kab. Balangan	12 Bulan	67,605,241	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan			12 Bulan	9,672,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNSD Bappedalitban g Kab. Balangan	12 Bulan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,Tersedianya makanan dan minuman utk kegiatan tamu			12 Bulan	356,879,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNSD Bappedalitban g Kab. Balangan	12 Bulan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Barang		Barang	2 Barang	60,000,000				2 Barang	0		
5	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perencanaan bangunan kantor bappeda			12 Bulan	60,000,000		Pendapatan Bagi Hasil	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNSD Bappedalitban g Kab. Balangan	12 Bulan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan administrasi,sarana & prasarana perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	813,996,000				12 Bulan	0		
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet			12 Bulan	199,442,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNSD Bappedalitban g Kab. Balangan	12 Bulan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kerja terpelihara dgn baik,persentase ruangan /tempat kerja yg bersihTersedianya kebutuhan alat tulis kantor			12 Bulan	614,553,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNSD Bappedalitban g Kab. Balangan	12 Bulan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	342,714,050				12 Bulan	0		
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik			12 Bulan	181,783,250		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sarana Dan Prasarana Bappedalitban g Kab. Balangan	12 Bulan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang terpelihara dengan baik				12 Bulan	160,930,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Sarana Dan Prasarana Bappedalitban g Kab. Balangan	12 Bulan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional propinsi kabupaten)	%		%	98.6%	1,443,030,500						98.8%	1,907,693,850	
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyediaan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD)	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	1,088,428,000						4 Dokumen	948,644,350	
5	1	2	2.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				3 Dokumen	132,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	3 Dokumen	159,125,850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	40,852,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Berita Acara	42,299,750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	197,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Berita Acara	306,288,800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	717,186,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	2 Dokumen	440,929,950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemenuhan ketersediaan Data & Informasi perencanaan pembangunan daerah	%		%	72 %	174,600,000						72 %	702,103,700	
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	124,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Dokumen	351,255,850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	50,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Buku	350,847,850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyediaan dokumen pengendalian,evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	180,002,500						10 Dokumen	256,945,800	
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	137,330,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	2 Laporan	159,330,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				8 Laporan	42,672,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	8 Laporan	97,615,800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi & Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan & pembangunan manusia dengan nilai baik				93,40%	2,229,293,700						94,20%	0	
5	1	3					%		%	93,40%							94,20%		
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaanSKPD dengan nilai baik(gakorpemerintahan & pembangunan manusia)	%		%	54 %	1,151,638,700						54 %	0	
5	1		3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	439,155,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1		3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			1 Laporan	244,157,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1		3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			1 Laporan	112,441,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1		3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			1 Laporan	109,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1		3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	49,756,800				Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1		3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1 Laporan	53,856,800				Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1		3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1 Laporan	34,847,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1		3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			1 Laporan	107,784,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

[illegible]

5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan yang di verifikasi subbid ekonomi (Renstra, renja, dan renja perubahan)				9 dokumen	9,426,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	9 dokumen		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi (dokumen pengendalian tahun berjalan dan movev tahun n-2 SKPD) subid sinfrastruktur dan kewilayahan				5 Kegiatan	25,821,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	5 Kegiatan		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepentingan bidang kewilayahan				5 kegiatan	142,818,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	5 kegiatan		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	237,097,800		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Laporan		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						2,103,407,900								818,510,000	
					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi	Nilai	Nilai		60 (Sangat Inovatif)	2,103,407,900							65 (Sangat Inovatif)	818,510,000	
5	5	2				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	%		%	100								100		
5	5	2	2.01			Pemenuhan Jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan SKPD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	318,520,800						3 Dokumen		0	
5	5	2	2.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	179,220,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Laporan		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	139,300,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku Kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Laporan		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pemenuhan penelitian & pengembangan daerah bidang pemerintahan,sosial dan kependudukan yg dimanfaatkan SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1,443,160,000						1 Dokumen	818,510,000		
5	5	2	2.03	3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				2 Dokumen	94,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku kepentingan SKPD Kab. Balangan	2 Dokumen	218,130,000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	369,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Dokumen		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5	5	2	2.03	5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	94,320,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Dokumen		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	104,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pemangku kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Dokumen		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.03	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	254,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Dokumen		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	94,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Dokumen	115,720,000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				3 Dokumen	431,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku kepentingan SKPD Kab. Balangan	3 Dokumen	484,660,000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan teknologi yangg diaring	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	341,727,100						2 Dokumen	0		
						Pemenuhan Dokumen Inovasi Dan Teknologi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen							2 Dokumen			
5	5	2	2.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	341,727,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemangku kepentingan SKPD Kab. Balangan	1 Laporan		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	2				KEUANGAN						251.796.201.045								252.883.772.426	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	%		%	100 %	21,299,649,011						100 %	149,701,814,755		
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	%		%	100 %	239,682,400						100 %	167,707,100		
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	51,349,700	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	2 Dokumen	26,565,000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	115,080,100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	6 Laporan	96,673,500		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	73,252,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	1 Laporan	44,468,600		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

5	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	14,388,297,642						100 %	147,284,926,545	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	13,738,181,342	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	14 Orang/bulan	134,911,842,783	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			6 Dokumen	130,985,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	6 Dokumen	37,501,288	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6 Laporan	65,125,500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	6 Laporan	70,869,494	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			6 Laporan	454,005,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	6 Laporan	12,264,712,980	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	2,574,175,200						100 %	159,253,765	
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	133,863,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	1 Paket	82,500,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			200 Orang	67,312,200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	200 Orang	74,293,890	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			320 Orang	2,373,000,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	320 Orang	2,459,875	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	859,717,809						100 %	794,318,525	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	92,394,100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	1 Paket	102,094,850	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	427,917,909	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	1 Paket	406,625,340	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	15,490,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	1 Paket	11,539,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				360 Dokumen	31,500,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	360 Dokumen	7,699,835	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				346 Laporan	292,415,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	346 Laporan	266,359,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	289,710,000						100 %	118,800,000	
5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				25 Unit	289,710,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	25 Unit	118,800,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
															Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan				
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	896,689,000						100 %	205,236,350	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	329,768,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	12 Laporan	40,230,300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	137,921,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	12 Laporan	111,100,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	429,000,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	12 Laporan	53,906,050	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	2,051,376,960						100 %	971,572,470	
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	369,196,900	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	20 Unit	381,673,600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	669,440,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	10 Unit		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	1,012,740,060	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	20 Unit	589,898,870	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	87	225.942.195.034						88	98,948,989,001	
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	%		%	100 %	1,926,431,200						100 %	1,569,667,200	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	146,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	2 Dokumen	160,622,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	144,770,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	2 Dokumen	159,247,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	534,733,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	30 Dokumen	76,285,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	36,860,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	30 Dokumen	40,546,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	323,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	2 Dokumen	356,180,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	321,120,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	2 Dokumen	353,232,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	419,128,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	2 Dokumen	423,555,200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%		%	100 %	2,716,429,800						100 %	2,053,212,240	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	482,036,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	12 Dokumen	525,840,700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	54,382,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	12 Dokumen	396,081,070	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				100 Dokumen	265,132,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	100 Dokumen	200,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				3 Laporan	334,824,000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	3 Laporan		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
															Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan				
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	392,417,500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	12 Dokumen	355,374,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	194,775,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	2 Dokumen	575,915,670	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	992,862,200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	100 Orang		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah disampaikan Tepat Waktu	%		%	100 %	2,010,347,300						100 %	1,438,681,421	
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				768 Dokumen	334,845,900	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pengelola Keuangan SKPD, Sub Unit SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan	768 Dokumen	334,845,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				18 Laporan	134,900,900	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pengelola Keuangan SKPD, Sub Unit SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan	18 Laporan	116,916,541	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				608 Laporan	105,033,100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pengelola Keuangan SKPD, Sub Unit SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan	608 Laporan	101,178,630	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	237,353,700	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pengelola Keuangan SKPD, Sub Unit SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan	1 Dokumen	126,314,600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	271,049,400	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pengelola Keuangan SKPD, Sub Unit SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan	1 Dokumen	364,899,200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	927,164,300	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pengelola Keuangan SKPD, Sub Unit SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan	100 Orang	394,526,550	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	219.288.986.734						100 %	93,887,428,140	
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				6 Laporan	203.429.441.840	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	6 Laporan	90,909,309,370	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				6 Laporan	14,500,000,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	6 Laporan	1,485,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				6 Laporan	1,359,544,894	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	6 Laporan	1,493,118,770	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	%		%	42	2,243,230,400						45	2,198,885,100	

5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	2,243,230,400						100 %	2,198,885,100	
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	238,774,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	SKPD	2 Dokumen	238,774,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				60 Dokumen	102,931,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	60 Dokumen	119,507,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				0 Dokumen	139,136,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	0 Dokumen	210,845,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				0 Laporan	108,460,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	0 Laporan	95,834,600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				0 Laporan	386,150,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	0 Laporan	598,769,850	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				0 Laporan	49,641,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	0 Laporan	49,187,450	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				0 Dokumen	265,358,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	0 Dokumen	429,426,650	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				0 Laporan	856,966,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	0 Laporan	343,132,750	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0 Orang	95,811,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	0 Orang	113,406,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB, % Penerimaan PAD selain PBB P-2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan Non PAD	%		%	100 %	2,311,126,600						100 %	2,034,083,570	
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	%		%	100 %	2,311,126,600						100 %	2,034,083,570	
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	288,761,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	2 Dokumen	254,879,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	225,381,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	3 Laporan	218,823,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	285,280,500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	1 Laporan	286,708,180	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				42000 Obyek Pajak	214,859,900	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	42000 Obyek Pajak	366,508,010	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3500 Layanan	402,976,400	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	3500 Layanan	283,448,550	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	91,327,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	12 Dokumen	100,522,730	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	243,875,200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	12 Dokumen	103,940,700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	189,242,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	12 Dokumen	196,218,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	369,421,200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	12 Dokumen	223,034,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	3				KEPEGAWAIAN										10,902,617,800				10,775,919,200			
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	(B)		(B)	67 (B)	6,338,113,200						67 (B)	6,041,399,600				
						Persentase pemenuhan/ketersediaan penunjang pelaksanaan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan	%		%	100 %							100 %					
						Persentase Pencatatan Pengelolaan Aset dalam Kondisi Baik	%		%	100 %							100 %					
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%		%	100 %	83,459,000						100 %	58,385,000				
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	27,827,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perencanaan, penganggaran serta monitoring, evaluasi dan kinerja perangkat	8 Dokumen	17,378,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil									
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Dokumen	27,190,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perencanaan, penganggaran serta monitoring, evaluasi dan kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	18,815,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil									
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen	28,442,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perencanaan, penganggaran serta monitoring,	3 Dokumen	22,192,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA			
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil									
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan berlaku	%		%	100 %	4,923,747,000						100 %	5,211,851,400				
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	4,832,588,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Penatausahaan dan pelaporan keuangan	39 Orang/bulan	5,140,656,400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA			
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									

5	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				750 Dokumen	64,709,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Penatausahaan dan pelaporan keuangan perangkat daerah	750 Dokumen	52,676,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	26,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Penatausahaan dan pelaporan keuangan perangkat daerah	5 Laporan	18,519,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai ketentuan	%		%	100 %	386,017,700						100 %	275,829,200	
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	86,162,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Ketersediaan sarana kebutuhan perangkat daerah	4 Paket	78,753,200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4680 Dokumen	26,208,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Ketersediaan sarana kebutuhan perangkat daerah	4680 Dokumen	16,833,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	273,646,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Ketersediaan sarana kebutuhan perangkat daerah	90 Laporan	180,243,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	%		%	100 %	322,053,800						100 %	78,519,000	
5	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				21 Unit	322,053,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Barang milik daerah/aset kebutuhan perangkat daerah	21 Unit	78,519,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	409,278,400						12 bulan	240,701,000	
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	114,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Jasa penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	12 Laporan	109,409,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	295,278,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Jasa penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	12 Laporan	131,292,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	213,557,300						100 %	176,114,000	
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	119,677,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Barang milik daerah/aset yang dimiliki dan dikuasai perangkat daerah	25 Unit	115,030,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	93,880,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Barang milik daerah/aset yang dimiliki dan dikuasai perangkat daerah	1 Unit	61,084,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks			Indeks	90	4,564,504,600					90	4,734,519,600	
						Indeks Profesionalitas (IP) ASN	Indeks			Indeks	80						85		
						Indeks Sistem Merit	Indeks			Indeks	270						275		
5	3	2				Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks			Indeks	60						65		
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini	%		%	100 %	395,768,700						100 %	642,872,500	
						Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK	%		%	60 %							60 %		
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	133,942,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perencanaan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, informasi kepegawaian,	1 Dokumen	421,174,800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	67,933,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perencanaan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, informasi kepegawaian, pemberhentia	1 Dokumen	42,747,900	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	55,100,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perencanaan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, informasi	1 Lembaga	22,664,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	138,792,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Perencanaan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, informasi kepegawaian,	1 Laporan	156,285,800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
													Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

[illegible]

5	3	2	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat	%		%	100 %	377,105,000						100 %	208,395,500	
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1 Laporan	124,168,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, dan	1 Laporan	84,925,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			6 Orang	103,675,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, dan	6 Orang	24,740,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			200 Orang	55,380,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, dan	200 Orang	26,416,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			1 Laporan	66,862,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, dan	1 Laporan	49,265,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilyani			5 Dokumen	27,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, dan	5 Dokumen	23,049,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	4			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1,431,528,000							2,699,591,300	
					Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	%		%	75%								80%	
					Persentase Calon ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan/Latsar	%		%	100%	1,431,528,000							100%	2,699,591,300
5	4	2		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														
5	4	2	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar	%		%	100 %	1,431,528,000						100 %	2,699,591,300	
					Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial/kepemimpinan	%		%	100 %							100 %		
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			2 Laporan	1,431,528,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pengembangan kompetensi manajerial/kepemimpinan ASN	2 Laporan	2,699,591,300	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
												Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6	1			INSPEKTORAT DAERAH							14,019,722,010						8,576,046,438			
6	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Inspektorat	nilai		nilai	72 (BB) nilai	9,959,929,610						72 (BB) nilai	6,870,465,700			
					Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	persentase		persentase	100 persentase							100 persentas e				
6	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	%		%	100 %	89,172,000						100 %	67,518,000			
6	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	38,488,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Kabupaten Balangan	2 Dokumen	41,987,000	INSPEKTORAT		
6	1	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	50,684,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Kabupaten Balangan	4 Laporan	25,531,000	INSPEKTORAT		
6	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	6,483,187,160						100 Persen	4,868,057,900			
6	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	6,483,187,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Inspektorat	44 Orang/bula n	4,868,057,900	INSPEKTORAT		
6	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	298,164,000						100 Persen	602,000,000			
6	1	1	2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	26,244,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Inspektorat	4 Paket	52,000,000	INSPEKTORAT		
6	1	1	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				32 Orang	271,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Inspektorat	32 Orang	220,000,000	INSPEKTORAT		
6	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	1,211,004,100						100 Persen	749,046,650			
6	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	443,074,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Inspektorat	6 Paket	82,500,000	INSPEKTORAT		
6	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	51,290,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Inspektorat	2 Paket	36,306,050	INSPEKTORAT		
6	1	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				120 Dokumen	4,799,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Inspektorat	120 Dokumen	10,164,000	INSPEKTORAT		
6	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	711,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Inspektorat	65 Laporan	620,076,600	INSPEKTORAT		
6	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	Persen		Persen	100 Persen	654,001,300						100 Persen	0			
6	1	1	2.07	9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	654,001,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Inspektorat	1 Unit	0	INSPEKTORAT		

6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	303,187,550						12 Bulan	311,219,260	
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4,996,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Inspektorat	12 Laporan	6,473,500	INSPEKTORAT
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	137,057,950		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Inspektorat	36 Laporan	143,748,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	161,133,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Inspektorat	12 Laporan	160,997,760	INSPEKTORAT
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	921,213,500						12 Bulan	272,623,890	
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	143,528,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Inspektorat	0 Unit	182,584,160	INSPEKTORAT
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	777,684,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Inspektorat	1 Unit	90,039,730	INSPEKTORAT
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen		Persen	78 Persen	3,265,760,000						80 Persen	847,841,857	
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase SKPD di Wilayah yang bebas temuan	Persen		Persen	68 Persen	3,107,370,000						68 Persen	104,060,357	
						% SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja Minimal BB	Persen		Persen	55 Persen							55 Persen		
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				33 Laporan	94,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan	33 Laporan	104	INSPEKTORAT
										Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan									
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				10 Laporan	102,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan	10 Laporan	113	INSPEKTORAT
										Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan									
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				2 Laporan	14,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan	2 Laporan	16	INSPEKTORAT
										Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan									
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	7,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan	1 Laporan	8	INSPEKTORAT
										Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan									
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				6 Laporan	2,783,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan	6 Laporan	104,060,000	INSPEKTORAT
										Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan									
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	105,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan	2 Dokumen	116	INSPEKTORAT

6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Hasil Pemeriksaan Investigasi/kasus yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	158,390,000						100 Persen	743,781,500		
						Persentase SKPD/Desa di Wilayah yang bebas Temuan Keuangan Material Eksternal	Persen		Persen	53 Persen							53 Persen			
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	36,790,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan	2 Laporan	610,021,500	INSPEKTORAT	
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				73 Laporan	121,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan	73 Laporan	133,760,000	INSPEKTORAT	
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK / WBBM	Jumlah		Jumlah	WBBM : 2	794,032,400						WBBM : 2	857,738,881		
						Level Maturitas SPIP	Level		Level	3 (3,05)									3 (3,1)	
						Level kapabilitas APIP	Level		Level	3									3	
						Indeks Integritas	Indeks		Indeks	79									80	
6	1	3				Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	Jumlah		Jumlah	- WBK :3 - WBBM : 3 Jumlah									- WBK :3 - WBBM : 3 Jumlah	
						Level kapabilitas APIP	Level		Level	3 Level									3 Level	
						Level Maturitas SPIP	Level		Level	3 (3,05) Level									3 (3,05) Level	
						Nilai PMPRB	Nilai		Nilai	72 Nilai									72 Nilai	
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pencapaian Indikator MCP	Persen		Persen	76 Persen	794,032,400						76 Persen	857,738,881		
						prentase SKPD yang menyusun profil risiko sesuai dengan standart yang berlaku	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen			
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				30 perangkat daerah	62,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		30 perangkat daerah	136,306,500	INSPEKTORAT	
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				15 perangkat daerah	119,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		15 perangkat daerah	131	INSPEKTORAT	
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	562,612,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		1 Kegiatan	557,840,250	INSPEKTORAT	
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				21 perangkat daerah	49,440,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		21 perangkat daerah	163,592,000	INSPEKTORAT	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN						4,451,658,125							4,213,794,376		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)	Nilai		Nilai	70 Nilai	3,657,641,625						70 Nilai	3,484,716,026		
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	%		%	100 %	50,456,000						100 %	24,812,150		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	38,806,900	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Lamphong	4 Dokumen	16,364,700	KECAMATAN LAMPHONG	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	11,649,100	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Lamphong	4 Laporan	8,447,450	KECAMATAN LAMPHONG	

7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang terlaksana	%		%	100 %	3,120,885,125						100 %	3,019,733,376	
						Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %							100 %		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	3,120,885,125	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kecamatan Lamphong	21 Orang/bulan	3,019,733,376	KECAMATAN LAMPIHONG
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%		%	100 %	5,200,000						100 %	38,500,000	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	5,200,000	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Lamphong	7 Orang	38,500,000	KECAMATAN LAMPIHONG
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana dengan baik	%		%	100 %	144,537,400						100 %	107,802,200	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,585,100	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Lamphong	1 Paket	3,351,700	KECAMATAN LAMPIHONG
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 Bulan	133,952,300	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Lamphong	12 Bulan	104,450,500	KECAMATAN LAMPIHONG
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana dengan baik	%		%	100 %	237,498,400						100 %	223,865,840	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	81,896,800	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Lamphong	12 Bulan	94,380,000	KECAMATAN LAMPIHONG
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	59,040,500	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Lamphong	4 Laporan	44,535,150	KECAMATAN LAMPIHONG
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan pelayanan umum				12 Bulan	96,561,100	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Lamphong	12 Bulan	84,950,690	KECAMATAN LAMPIHONG
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	99,064,700						100 %	70,002,460	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	87,864,700	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Lamphong	18 Unit	63,292,460	KECAMATAN LAMPIHONG
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	11,200,000	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Lamphong	2 Unit	6,710,000	KECAMATAN LAMPIHONG
7	1	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	%		%	100 %	47,617,000						100 %	67,274,020	
7	1	1	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	%		%	100 %	47,617,000						100 %	67,274,020	
7	1	1	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0 Laporan	47,617,000	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Lamphong	0 Laporan	67,274,020	KECAMATAN LAMPIHONG
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			4 Laporan				4 Laporan						

7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%		%	100 %	390,347,300						100 %	353,529,000	
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	%		%	100 %	329,823,000						100 %	314,600,000	
7	1	3	2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	329,823,000	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat kecamatan lamphong	0 Laporan	314,600,000	KECAMATAN LAMPIHONG
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1128 Laporan							1128 Laporan		
7	1	3	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	%		%	100 %	60,524,300						100 %	38,929,000	
7	1	3	2.06	12 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah laporan Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas				1 laporan	60,524,300	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Lamphong	1 laporan	38,929,000	KECAMATAN LAMPIHONG
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	%		%	100 %	65,011,000						100 %	39,657,860	
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	65,011,000						100 %	39,657,860	
7	1	4	2.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	65,011,000	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Lamphong	1 Laporan	39,657,860	KECAMATAN LAMPIHONG
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	meningkatkan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		%	100 %	213,055,600						100 %	175,119,120	
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	%		%	100 %	213,055,600						100 %	175,119,120	
7	1	5	2.01	7 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	213,055,600	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Lamphong	1 Dokumen	175,119,120	KECAMATAN LAMPIHONG
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase usulan musrenbang yang di akomodir; Persentase RT yang menyampaikan laporan,Persentase jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	%		%	100 %	77,985,600						100 %	93,498,350	
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	77,985,600						100 %	93,498,350	
7	1	6	2.01	2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				27 Dokumen	6,780,400	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Lamphong	27 Dokumen	41,832,560	KECAMATAN LAMPIHONG
7	1	6	2.01	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	56,208,000	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Lamphong	1 Dokumen	35,998,710	KECAMATAN LAMPIHONG
7	1	6	2.01	13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				190 Dokumen	14,997,200	Kab. Balangan, Lamphong, Simpang Tiga	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Lamphong	190 Dokumen	15,667,080	KECAMATAN LAMPIHONG

				UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN							4,361,245,637					3,332,059,219				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai / predikat LAKIP SKPD	dokumen		dokumen	4 dokumen	3,724,746,237						4 dokumen	2,734,909,219			
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen		dokumen	4 dokumen	3,335,000						4 dokumen	250			
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3,335,000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kantor Kecamatan Batumandi	1 Laporan	250	KECAMATAN BATUMANDI		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan waktu pembayaran gaji dan tunjangan	bulan		bulan	14 bulan	3,078,978,437						14 bulan	2,232,180,219			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2,792,871,437	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kantor Kecamatan batumandi	25 Orang/bula n	2,069,570,000	KECAMATAN BATUMANDI		
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	282,638,000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kantor Kecamatan batumandi	12 Dokumen	162,360,219	KECAMATAN BATUMANDI		
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	3,469,000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kantor Kecamatan batumandi	4 Laporan	250	KECAMATAN BATUMANDI		
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	bulan		bulan	12 bulan	103,193,200						12 bulan	89,000,000			
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	23,793,200	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kantor Kecamatan Batumandi	2 Paket	24,000,000	KECAMATAN BATUMANDI		
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				8 Orang	79,400,000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kantor Kecamatan Batumandi	8 Orang	65,000,000	KECAMATAN BATUMANDI		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	bulan		bulan	12 bulan	303,336,700						12 bulan	193,750,000			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,375,000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kantor Kecamatan Batumandi	1 Paket	5,825,000	KECAMATAN BATUMANDI		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	34,276,600	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kantor Kecamatan Batumandi	1 Paket	17,400,000	KECAMATAN BATUMANDI		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	62,729,400	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kantor Kecamatan Batumandi	1 Paket	44,015,000	KECAMATAN BATUMANDI		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17,966,700	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kantor Kecamatan Batumandi	1 Paket	14,010,000	KECAMATAN BATUMANDI		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	180,989,000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kantor Kecamatan Batumandi	1 Laporan	112,500,000	KECAMATAN BATUMANDI		

7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	bulan		bulan	12 bulan	114,480,700						12 bulan	98,769,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	83,441,800	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kantor Kecamatan Batumandi	12 Laporan	72,600,000	KECAMATAN BATUMANDI
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	31,038,900	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kantor Kecamatan Batumandi	1 Laporan	26,169,000	KECAMATAN BATUMANDI
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	bulan		bulan	12 bulan	121,422,200					12 bulan	120,960,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			9 Unit	44,218,500	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kantor Kecamatan Batumandi	9 Unit	40,000,000	KECAMATAN BATUMANDI
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0 Unit	25,153,100	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kantor Kecamatan Batumandi	0 Unit	52,480,000	KECAMATAN BATUMANDI
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			18 Unit							18 Unit		
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	52,050,600	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kantor Kecamatan Batumandi	1 Unit	28,480,000	KECAMATAN BATUMANDI
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	%		%	88,50%	12,518,300					89%	13,500,000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	laporan		laporan	1 laporan	12,518,300					1 laporan	13,500,000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			0 Laporan	12,518,300	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Batumandi	0 Laporan	13,500,000	KECAMATAN BATUMANDI
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1 Laporan							1 Laporan		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase akomodasi usulan hasil musrenbang kecamatan	%		%	100%	298,101,400					100%	284,750,000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa	%		%	100%	273,101,400					100%	270,750,000	
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			1 Dokumen	10,301,400	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Batumandi	1 Dokumen	12,350,000	KECAMATAN BATUMANDI
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0 Laporan	262,800,000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Batumandi	0 Laporan	258,400,000	KECAMATAN BATUMANDI
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2 Laporan			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan		

7	1	3	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					25,000,000							14,000,000	
7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		1 Keluarga	25,000,000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		1 Keluarga	14,000,000	KECAMATAN BATUMANDI
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan pemerintahan umum dan trantib, koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan wasbang dengan lintas sektor	%	%	100%	7,167,400					100%	9,250,000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketenteraman dan ketertiban dengan lintas sektor	%	%	100%	7,167,400					100%	9,250,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	7,167,400	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Batumandi	1 Laporan	9,250,000	KECAMATAN BATUMANDI
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	%	%	100%	256,419,300					100%	223,800,000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	%	%	100%	256,419,300					100%	223,800,000	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		500 Orang	96,219,300	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Batumandi	500 Orang	70,050,000	KECAMATAN BATUMANDI
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		4 Dokumen	160,200,000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Batumandi	4 Dokumen	153,750,000	KECAMATAN BATUMANDI
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	%	%	100%	62,293,000					100%	65,850,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	%	%	100%	62,293,000					100%	65,850,000	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen	10,051,400	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Batumandi	1 Dokumen	20,300,000	KECAMATAN BATUMANDI

7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				18 Dokumen	18,301,400	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Batumandi	18 Dokumen	12,300,000	KECAMATAN BATUMANDI
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	8,298,000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Batumandi	1 Dokumen	8,300,000	KECAMATAN BATUMANDI
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	17,244,200	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Batumandi	1 Dokumen	18,350,000	KECAMATAN BATUMANDI
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	8,398,000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Batumandi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Batumandi	1 Dokumen	6,600,000	KECAMATAN BATUMANDI
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						4,225,814,867							4,477,797,476	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	%		%	100 %	3,328,491,567						100 %	3,599,573,176	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disampaikan Tepat Waktu	%		%	100 %	14,902,900						100 %	16,901,060	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9,985,300	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Dokumen Perencanaan SKPD, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	10,887,800	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2,217,600	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Dokumen Perencanaan SKPD, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2,682,900	KECAMATAN AWAYAN
															Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD			
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2,700,000	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Dokumen Perencanaan SKPD, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3,330,360	KECAMATAN AWAYAN

7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	%		%	100 %	2,728,697,367						100 %	3,008,356,616	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2,666,219,867	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Dokumen Administrasi Keuangan SKPD	25 Orang/bulan	2,932,801,466	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	60,800,000	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Administrasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	72,930,000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2 Laporan	1,677,500	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Administrasi Keuangan SKPD	2 Laporan	2,625,150	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	%		%	100 %	12,500,000						100 %	147,400,000	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	12,500,000	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Paket	37,400,000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	%		%	100 %	325,542,300						100 %	222,933,700	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16,968,300	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bahan logistik kantor dan perjalanan dinas	1 Paket	15,304,500	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	63,902,900	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bahan logistik kantor dan perjalanan dinas	4 Paket	64,170,600	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	19,919,100	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bahan logistik kantor dan perjalanan dinas	6 Paket	19,698,600	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				277 Laporan	224,752,000	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Bahan logistik kantor dan perjalanan dinas	277 Laporan	123,760,000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	61,892,700						100 %	23,826,000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	61,892,700	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan dan Mesin	10 Unit	23,826,000	KECAMATAN AWAYAN

7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	79,409,300						100 %	80,119,800	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	57,669,200	Kab. Balangan, Aawayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Jasa kebersihan, komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	55,000,000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	21,740,100	Kab. Balangan, Aawayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Jasa kebersihan, komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	25,119,800	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	105,547,000						100 %	100,036,000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	46,436,400	Kab. Balangan, Aawayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	13 Unit	41,268,000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	20,104,600	Kab. Balangan, Aawayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	50 Unit	16,500,000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	39,006,000	Kab. Balangan, Aawayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Barang Milik Daerah	2 Unit	42,268,000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	%		%	100 %	260,832,500						100 %	176,815,500	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan terhadap Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Nilai		Nilai	85 Nilai	260,832,500						85 Nilai	176,815,500	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	260,832,500	Kab. Balangan, Aawayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 Laporan	176,815,500	KECAMATAN AWAYAN
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase akomodasi usulan hasil musrenbang kecamatan	%		%	100 %	297,372,000						100 %	272,040,000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa	%		%	100 %	297,372,000						100 %	272,040,000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	297,372,000	Kab. Balangan, Aawayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kelompok Pemberdayaa n Masyarakat	2 Laporan	272,040,000	KECAMATAN AWAYAN

7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor	%		%	100 %	32,116,600						100 %	33,890,000	
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	32,116,600						100 %	33,890,000	
7	1	4	2.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	32,116,600	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	TNI, POLRI dan ASN	2 Laporan	33,890,000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	%		%	100 %	199,334,000						100 %	283,928,800	
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Awayan	%		%	100 %	199,334,000						100 %	283,928,800	
7	1	5	2.01	7 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				4 Dokumen	199,334,000	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggara urusan pemerintahan umum	4 Dokumen	283,928,800	KECAMATAN AWAYAN
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengelolaan keuangan dan aset desa	%		%	100 %	107,668,200						100 %	111,550,000	
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan	%		%	100 %	107,668,200						100 %	111,550,000	
7	1	6	2.01	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	74,500,000	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Desa di Kecamatan Awayan	12 Dokumen	80,400,000	KECAMATAN AWAYAN
7	1	6	2.01	13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	33,168,200	Kab. Balangan, Awayan, Putat Basiun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Desa di Kecamatan Awayan	1 Dokumen	31,150,000	KECAMATAN AWAYAN
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						3,904,546,820							3,895,299,300	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Nilai		Nilai	68,20 Nilai	3,147,869,820						68,20 Nilai	3,154,055,300	
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen		Persen	100 Persen	24,947,800						100 Persen	22,038,200	
7	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	24,438,200	Kab. Balangan, Halong, Halong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kantor Kecamatan Halong	2 Dokumen	20,038,200	KECAMATAN HALONG
7	1	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	271,4	Kab. Balangan, Halong, Halong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kantor Kecamatan Halong	4 Dokumen	1,000,000	KECAMATAN HALONG

7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	238,2	Kab. Balangan, Halong, Halong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kantor Kecamatan Halong	4 Laporan	1,000,000	KECAMATAN HALONG
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan yang Berlaku	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,810,438,020					12 Bulan	2,786,234,600	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			322 Orang/bulan	2,673,882,020	Kab. Balangan, Halong, Halong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kantor Kecamatan Halong	322 Orang/bulan	2,673,878,600	KECAMATAN HALONG
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	136,556,000	Kab. Balangan, Halong, Halong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kantor Kecamatan Halong	1 Dokumen	112,356,000	KECAMATAN HALONG
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	126,617,800					12 Bulan	90,942,500	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	6,731,800	Kab. Balangan, Halong, Halong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kantor Kecamatan Halong	1 Paket	5,839,500	KECAMATAN HALONG
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	119,886,000	Kab. Balangan, Halong, Halong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kantor Kecamatan Halong	1 Laporan	85,103,000	KECAMATAN HALONG
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	114,733,000					12 Bulan	109,000,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	28,805,000	Kab. Balangan, Halong, Halong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kantor Kecamatan Halong, Camat Halong dan Warga Masyarakat	1 Laporan	34,000,000	KECAMATAN HALONG
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	85,928,000	Kab. Balangan, Halong, Halong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kantor Kecamatan Halong, Camat Halong dan Warga Masyarakat	1 Laporan	75,000,000	KECAMATAN HALONG
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	71,133,200					12 Bulan	65,840,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			13 Unit	44,513,200	Kab. Balangan, Halong, Halong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kantor Kecamatan Halong dan Masyarakat	13 Unit	50,000,000	KECAMATAN HALONG
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	26,620,000	Kab. Balangan, Halong, Halong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kantor Kecamatan Halong dan Masyarakat	3 Unit	15,840,000	KECAMATAN HALONG
7	1	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83	138,256,400					84	111,108,000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PATEN yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan	Persen		Persen	100 Persen	138,256,400					100 Persen	111,108,000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1 Laporan	138,256,400	Kab. Balangan, Halong, Halong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Halong	1 Laporan	111,108,000	KECAMATAN HALONG

7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif	Persen		Persen	100 Persen	346,500,000						100 Persen	340,000,000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen		Persen	100 Persen	321,500,000						100 Persen	315,000,000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	321,500,000	Kab. Balangan, Halong, Halong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Desa di Kecamatan Halong	1 Laporan	315,000,000	KECAMATAN HALONG	
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						25,000,000						25,000,000		
7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				35 Keluarga	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		35 Keluarga	25,000,000	KECAMATAN HALONG	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penurunan jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	Persen		Persen	100 Persen	2,886,400						100 Persen	9,015,000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Waktu Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,886,400						12 Bulan	9,015,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2,886,400	Kab. Balangan, Halong, Halong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Forkopimcam dan Seluruh Pemerintahan Desa Se Kecamatan Halong	1 Laporan	9,015,000	KECAMATAN HALONG	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen		Persen	100 Persen	148,437,800						100 Persen	200,000,000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persen		Persen	100 Persen	148,437,800						100 Persen	200,000,000	
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	148,437,800	Kab. Balangan, Halong, Halong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Halong	1 Dokumen	200,000,000	KECAMATAN HALONG	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik dan hasil musyawarah pembangunan yang disetujui	Persen		Persen	100 Persen	120,596,400						100 Persen	81,121,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	Persen		Persen	100 Persen	120,596,400						100 Persen	81,121,000	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	111,900,000	Kab. Balangan, Halong, Halong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Desa Se Kecamatan Halong	1 Dokumen	59,300,000	KECAMATAN HALONG	
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	8,696,400	Kab. Balangan, Halong, Halong	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Desa Se Kecamatan Halong	1 Dokumen	8,321,000	KECAMATAN HALONG	

UNSUR KEWILAYAHAN																			
KECAMATAN											3,768,904,052					3,368,303,252			
7	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Nilai		Nilai	70.40 Nilai	2,887,796,652						70.40 Nilai	2,560,198,352	
7	1	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	dokumen		dokumen	6 dokumen	73,148,800						6 dokumen	46,596,700	
7	1	1	2.01																
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	61,608,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Juai	2 Dokumen	38,390,000	KECAMATAN JUAI
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				2 Dokumen	5,879,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Juai	2 Dokumen	3,066,700	KECAMATAN JUAI
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	5,660,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Juai	2 Laporan	5,140,000	KECAMATAN JUAI
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,481,984,752						12 Bulan	2,236,106,752	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2,393,443,552		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Juai	22 Orang/bula n	2,163,364,152	KECAMATAN JUAI
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	88,541,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Juai	4 Dokumen	72,742,600	KECAMATAN JUAI
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya admininstrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,720,000						12 Bulan	36,320,000	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				15 Orang	2,720,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Juai	15 Orang	36,320,000	KECAMATAN JUAI
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	67,127,700						12 Bulan	76,335,800	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,460,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Juai	1 Paket	6,270,000	KECAMATAN JUAI
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,706,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Juai	1 Paket	10,000,000	KECAMATAN JUAI
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25,040,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Juai	1 Paket	28,339,800	KECAMATAN JUAI
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	29,920,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Juai	1 Laporan	31,726,000	KECAMATAN JUAI

7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	131,299,000						12 Bulan	89,089,100	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	38,260,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Juai		1 Laporan	7,200,000	KECAMATAN JUAI
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	86,905,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Juai		12 Laporan	78,000,000	KECAMATAN JUAI
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6,133,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Juai		1 Laporan	3,889,100	KECAMATAN JUAI
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	131,516,400						12 Bulan	75,750,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	38,135,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Juai	9 Unit	36,750,000	KECAMATAN JUAI
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	93,381,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Juai	1 Unit	39,000,000	KECAMATAN JUAI
7	1	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%		%	80	77,438,100						80	79,165,300	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	68,737,700						1 Laporan	56,765,300	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	68,737,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		1 Laporan	56,765,300	KECAMATAN JUAI
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	%		%	100 %	8,700,400						100 %	22,400,000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	8,700,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		1 Laporan	22,400,000	KECAMATAN JUAI
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	%		%	60 %	349,937,900						65 %	317,741,400	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Laporan		Laporan	1 Laporan	303,237,000						1 Laporan	291,491,400	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						5,129,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		11,907,400	KECAMATAN JUAI
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	39,924,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	1 Dokumen	20,000,000	KECAMATAN JUAI

7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	258,182,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	1 Laporan	259,584,000	KECAMATAN JUAI
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	laporan		laporan	1 laporan	46,700,900						1 laporan	26,250,000	
7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				50 Keluarga	46,700,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	50 Keluarga	26,250,000	KECAMATAN JUAI
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penurunan jumlah pelanggaran K3 (keterlibatan, ketentraman dan keindahan)	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	82,544,500						1 Kegiatan	50,800,000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	82,544,500						1 Kegiatan	50,800,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	82,544,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	1 Laporan	50,800,000	KECAMATAN JUAI
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		%	100 %	247,950,400						100 %	270,761,000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	247,950,400						1 dokumen	270,761,000	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	72,747,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	500 Orang	137,920,200	KECAMATAN JUAI
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	175,203,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	1 Dokumen	132,840,800	KECAMATAN JUAI

7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik	%		%	100 %	123,236,500						100 %	89,637,200	
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	123,236,500						1 Dokumen	89,637,200	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1 Dokumen	17,915,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	1 Dokumen	11,877,600	KECAMATAN JUAI
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			1 Dokumen	59,602,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	1 Dokumen	51,269,800	KECAMATAN JUAI
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			1 Dokumen	45,718,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	1 Dokumen	26,489,800	KECAMATAN JUAI
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1			KECAMATAN														
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Disiplin Aparatus	%		%	100 %	6,360,424,783						100 %	5,002,193,044	
7	1	1			Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%		%	100 %							100 %		
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Documen		Documen	4 Documen	12,753,000						4 Documen	14,055,690	
					Tersampainya dokumen perencanaan, penganggaran tepat waktu	%		%	100 %							100 %		
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10 Laporan	12,753,000	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai di Lingkungan Kecamatan Paringin	10 Laporan	14,055,690	KECAMATAN PARINGIN
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%		%	100 %	4,339,952,933						100 %	3,820,354,044	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Dokumen	4,339,952,933	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai diLingkungan Kantor Kecamatan Paringin	1 Dokumen	3,765,354,044	KECAMATAN PARINGIN
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					35 Orang/bulan			35 Orang/bulan				
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	%		%	100 %	13,996,000						100 %	18,462,500	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			40 Paket	13,996,000	Kab. Balangan, Paringin, Paringin Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Paringin	40 Paket	12,000,000	KECAMATAN PARINGIN

7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%		%	100 %	374,246,500						100 %	491,636,530	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	10,812,200	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai diLingkungan Kantor Kecamatan Paringin	1 Dokumen	22,000,000	KECAMATAN PARINGIN
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket							1 Paket		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	34,332,300	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai diLingkungan Kantor Kecamatan Paringin	1 Paket	27,500,000	KECAMATAN PARINGIN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	23,100,200	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pegawai diLingkungan Kantor Kecamatan Paringin	1 Paket	32,946,980	KECAMATAN PARINGIN
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	12,801,600	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai diLingkungan Kantor Kecamatan Paringin	1 Dokumen	11,484,000	KECAMATAN PARINGIN
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	293,200,200	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai diLingkungan Kantor Kecamatan Paringin	1 Laporan	386,705,550	KECAMATAN PARINGIN
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah yang dapat mendukung kinerja	%	%	100 %	26,678,000						100 %	11,000,000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			10 Unit	26,678,000	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kantor Kecamatan	10 Unit	11,000,000	KECAMATAN PARINGIN
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	%	100 %	704,724,750						100 %	505,564,840	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	112,296,550	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Paringin	1 Laporan	133,244,760	KECAMATAN PARINGIN
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	592,428,200	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Paringin	1 Laporan	372,320,080	KECAMATAN PARINGIN
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	%	100 %	131,258,900						100 %	141,119,440	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			26 Unit	77,666,900	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai diLingkungan Kantor Kecamatan Paringin	26 Unit	82,725,808	KECAMATAN PARINGIN

7	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	53,592,000	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Pemerataan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pegawai diLingkungan Kantor Kecamatan Paringin	3 Unit	58,393,632	KECAMATAN PARINGIN
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86	88,328,000						87	79,865,280	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan	%		%	100 %	88,328,000						100 %	79,865,280	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	88,328,000	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Paringin dan Masyarakat	1 Laporan	79,865,280	KECAMATAN PARINGIN
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase akomodasi usulan hasil musrenbang kecamatan	%		%	100 %	297,425,200						100 %	346,005,000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%		%	100 %	229,307,200						100 %	296,505,000	
						Terdatanya jumlah Lembaga	%		%	100 %							100 %		
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	8,707,200	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kecamatan Paringin dan Masyarakat Desa/ kelurahan	1 Dokumen	11,000,000	KECAMATAN PARINGIN
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	220,600,000	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Kecamatan Paringin dan Masyarakat Desa/ kelurahan	1 Dokumen	274,505,000	KECAMATAN PARINGIN
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				72 Laporan							72 Laporan		
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	%		%	100 %	68,118,000						100 %	49,500,000	
7	1	3	2.06	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				60 Keluarga	14,414,400	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan dan Masyarakat Desa/ Kelurahan	60 Keluarga	16,500,000	KECAMATAN PARINGIN
7	1	3	2.06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				60 Keluarga	14,414,400	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan dan Masyarakat Desa/ Kelurahan	60 Keluarga	16,500,000	KECAMATAN PARINGIN

7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				60 Keluarga	39,289,200	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan dan Masyarakat Desa/ Kelurahan	60 Keluarga	16,500,000	KECAMATAN PARINGIN
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketenteraman dan ketertiban dengan lintas sektor	%		%	100 %	22,025,200						100 %	27,500,000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	%		%	100 %	12,810,800						100 %	16,500,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	12,810,800	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Paringin	0 Laporan	16,500,000	KECAMATAN PARINGIN
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	%		%	100 %	9,214,400						100 %	11,000,000	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	9,214,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan	1 Laporan	11,000,000	KECAMATAN PARINGIN
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	%		%	100 %	249,900,100						100 %	330,000,000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan di Kecamatan	%		%	100 %	249,900,100						100 %	330,000,000	
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				5 Dokumen	249,900,100	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan dan Masyarakat	5 Dokumen	330,000,000	KECAMATAN PARINGIN
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa terbib administrasi keuangan dan aset desa	%		%	100 %	99,136,200						100 %	137,500,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi Penyusunan Pearaturan Desa dan peraturan Kepala Desa	%		%	100 %	99,136,200						100 %	137,500,000	
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	11,001,800	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Paringin	1 Dokumen	11,000,000	KECAMATAN PARINGIN

7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	14,119,600	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Paringin	1 Dokumen	16,500,000	KECAMATAN PARINGIN
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				28 Dokumen	14,740,300	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Paringin	28 Dokumen	22,000,000	KECAMATAN PARINGIN
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				14 Dokumen	12,940,000	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Paringin	14 Dokumen	22,000,000	KECAMATAN PARINGIN
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	19,406,500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Paringin	1 Dokumen	27,500,000	KECAMATAN PARINGIN
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				14 Dokumen	26,928,000	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Paringin	14 Dokumen	38,500,000	KECAMATAN PARINGIN
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN														
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di kelurahan	%		%	100 %	1,130,049,800						100 %	1,660,262,000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di kelurahan	%		%	100 %	1,130,049,800						100 %	1,660,262,000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	830,049,000	Kab. Balangan, Paringin, Paringin Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan	10 Unit	830,131,000	KECAMATAN PARINGIN
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				18 Pokmas / Ormas	300,000,800	Kab. Balangan, Paringin, Paringin Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	830,131,000	KECAMATAN PARINGIN
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN														
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di kelurahan	%		%	100 %	1,130,229,000						100 %	1,663,117,700	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di kelurahan	%		%	100 %	1,130,229,000						100 %	1,663,117,700	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	728,565,100	Kab. Balangan, Paringin, Paringin Timur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kelurahan	10 Unit	419,865,800	KECAMATAN PARINGIN
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				14 Pokmas / Ormas	401,663,900	Kab. Balangan, Paringin, Paringin Timur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	1,243,251,900	KECAMATAN PARINGIN

7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN							3,128,141,108							2,875,623,132	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Nilai		Nilai	B Nilai	2,483,144,208						B Nilai	2,274,038,132		
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50,469,600						1 Dokumen	40,430,000			
					Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen											
					Jumlah dokumen perencanaan SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen											
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen	5,770,100	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNS	0 Dokumen	6,140,000	KECAMATAN TEBING TINGGI		
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen																
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	5,799,500	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNS	1 Dokumen	7,655,000	KECAMATAN TEBING TINGGI		
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	38,900,000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	PNS	1 Laporan	26,635,000	KECAMATAN TEBING TINGGI		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	laporan		laporan	1 laporan	2,026,361,108					1 laporan	1,894,942,877			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			15 Orang/bulan	1,984,161,108	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	15 Orang/bula n	1,879,642,877	KECAMATAN TEBING TINGGI		
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			4 Dokumen	42,200,000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	4 Dokumen	15,300,000	KECAMATAN TEBING TINGGI		
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	orang		orang	15 orang	12,500,000					15 orang	16,500,000			
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			2 Paket	12,500,000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai	2 Paket	16,500,000	KECAMATAN TEBING TINGGI		
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket		paket	1 paket	129,311,000						1 paket	132,771,950			
					Cakupan waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah	laporan		laporan	30 laporan							30 laporan				
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	900	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	pegawai	1 Paket	900	KECAMATAN TEBING TINGGI		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	4,335,200	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	pegawai	1 Paket	5,702,000	KECAMATAN TEBING TINGGI		
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan								

7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	22,313,300	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	pegawai	1 Paket	29,869,950	KECAMATAN TEBING TINGGI
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,362,500	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	pegawai	1 Paket	3,500,000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	99,400,000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	pegawai	30 Laporan	92,800,000	KECAMATAN TEBING TINGGI
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan				
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	unit		unit	2 unit	23,290,900						2 unit	24,000,000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	23,290,900	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Karyawan/wati Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	2 Unit	24,000,000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran	laporan		laporan	12 laporan	139,756,600						12 laporan	97,815,000	
						cakupan waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	paket		paket	1 paket							1 paket		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	62,442,000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Karyawan/wati Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	12 Laporan	38,456,000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20,400,000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Karyawan/wati Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	12 Laporan	18,000,000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	56,914,600	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Karyawan/wati Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	1 Laporan	41,359,000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan waktu pemeliharaan gedung kantor	paket		paket	1 paket	101,455,000						1 paket	67,578,305	
						Cakupan waktu pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	unit		unit	10 unit							10 unit		
						Cakupan waktu pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	unit		unit	15 unit							15 unit		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	63,190,000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Karyawan/wati Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	15 Unit	36,900,000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	6,600,000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Karyawan/wati Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	10 Unit	7,800,000	KECAMATAN TEBING TINGGI

7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	31,665,000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Karyawan/wati Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	1 Unit	22,878,305	KECAMATAN TEBING TINGGI
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	%		%	100 %	55,774,000						100 %	85,535,000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan yang dilimpahkan ke kecamatan	bulan		bulan	12 bulan	55,774,000						12 bulan	85,535,000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0 Laporan	55,774,000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	0 Laporan	85,535,000	KECAMATAN TEBING TINGGI
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan							12 Laporan		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa	%		%	100 %	220,572,500						100 %	215,000,000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	bulan		bulan	12 bulan	183,374,500						12 bulan	200,000,000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	183,374,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	12 Laporan	200,000,000	KECAMATAN TEBING TINGGI
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan				
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	orang		orang	20 orang	37,198,000						20 orang	15,000,000	
7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				20 Keluarga	37,198,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	20 Keluarga	15,000,000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor	%		%	100 %	40,798,000						100 %	10,000,000	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	umlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	%		%	100 %	40,798,000						100 %	10,000,000	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	40,798,000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	0 Laporan	10,000,000	KECAMATAN TEBING TINGGI

7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan pemerintahan umum dan sosial kemasyarakatan	%		%	100 %	227,280,200						100 %	204,060,000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	bulan		bulan	12 bulan	227,280,200						12 bulan	204,060,000	
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	227,280,200	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	12 Dokumen	204,060,000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN); persentase desa yang ikut dalam lomba desa dan jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	%		%	100 %	100,572,200						100 %	86,990,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	bulan		bulan	12 bulan	100,572,200						12 bulan	86,990,000	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				24 Dokumen	67,686,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Desa	24 Dokumen	72,640,000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	32,886,200	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Desa	1 Dokumen	14,350,000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN						5,054,776,851							3,958,238,034	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4,439,345,251						4 Dokumen	3,383,940,534	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	2,727,100						4 Dokumen	4,777,600	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2,727,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Paringin Selatan	4 Dokumen	4,777,600	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Bulan		Bulan	14 Bulan	3,520,888,251						14 Bulan	3,009,462,934	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	3,484,628,251		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Paringin Selatan dan Kelurahan Batu Piring	25 Orang/bulan	2,947,242,934	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	36,260,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Paringin Selatan dan Kelurahan Batu Piring	12 Dokumen	62,220,000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN

7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	23,443,300						12 Bulan	35,300,000	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	23,443,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan dan Kelurahan Batu Piring	1 Paket	15,300,000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	394,311,700						12 Bulan	119,717,700	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	10,324,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan dan Kelurahan Baru Piring	1 Paket	2,000,000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	56,683,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan dan Kelurahan Baru Piring	1 Paket	21,217,700	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10 Laporan	327,304,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan dan Kelurahan Baru Piring	10 Laporan	96,500,000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					48,859,400							0	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			8 Unit	11,317,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		8 Unit	0	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	37,541,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan		4 Unit	0	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	320,870,200					12 Bulan	172,962,300	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	80,176,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan dan Kelurahan Batu Piring	12 Laporan	86,400,000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	240,693,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan dan Kelurahan Batu Piring	12 Laporan	86,562,300	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	15 Unit	128,245,300					15 Unit	41,720,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12 Unit	110,845,300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan dan Kelurahan Batu Piring	12 Unit	41,720,000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			41 Unit	17,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan dan Kelurahan Batu Piring	41 Unit	0	KECAMATAN PARINGIN SELATAN

7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai		Nilai	87	43,560,000						88	43,120,000	
7	1	2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PATEN Yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan	Nilai		Nilai	87	43,560,000						88	43,120,000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1 Laporan	43,560,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan dan Masyarakat	1 Laporan	43,120,000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Akomodasi Usulan Hasil Musrenbang Desa	Persen		Persen	100 Persen	378,652,500						100 Persen	330,180,000	
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen		Persen	100 Persen	234,300,000						100 Persen	208,225,000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0 Laporan	234,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan, Kelurahan Batu Piring dan Masyarakat	0 Laporan	204,175,000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan							1 Laporan		
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Akomodasi Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	83,040,000						100 Persen	82,115,000	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			0 Lembaga Kemasyarakatan	3,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan, Kelurahan Batu Piring dan Masyarakat	0 Lembaga Kemasyarakatan	39,875,000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			1 Laporan	79,340,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan, Kelurahan Batu Piring dan Masyarakat	1 Laporan	42,240,000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7	1	3	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	61,312,500						100 Persen	39,840,000	
7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			10 Keluarga	61,312,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan dan Masyarakat	10 Keluarga	39,840,000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Ketentraman dan keteriban Dengan Lintas Sektor	Persen		Persen	100 Persen	26,620,000						100 Persen	25,320,000	
7	1	4	7.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Peneggakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	26,620,000						100 Persen	25,320,000	

7	1	4	7.04	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	26,620,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan dan Masyarakat	1 Laporan	25,320,000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN		
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	Persen		Persen	100 Persen	114,129,100						100 Persen	129,350,000			
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	114,129,100						100 Persen	129,350,000			
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	114,129,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan dan Masyarakat	1 Dokumen	129,350,000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik, Persentase desa dengan pencatatan aset desa baik, Persentase hasil musyawarah pembangunan yang disetujui	Persen		Persen	100 Persen	52,470,000						100 Persen	46,327,500			
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen		Persen	100 Persen	52,470,000						100 Persen	46,327,500			
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan dan Masyarakat	1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN		
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	14,520,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan dan Masyarakat	1 Dokumen	21,495,000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN		
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	36,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan dan Masyarakat	1 Dokumen	17,090,000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN							1,106,141,000							1,106,141,000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Akomodasi Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	1,106,141,000						100 Persen	1,106,141,000			
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Akomodasi Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	1,106,141,000						100 Persen	1,106,141,000			
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	785,770,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan, Kelurahan Batu Piring dan Masyarakat	2 Unit	785,770,400	KECAMATAN PARINGIN SELATAN		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	320,370,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan, Kelurahan Batu Piring dan Masyarakat	4 Pokmas / Ormas	320,370,600	KECAMATAN PARINGIN SELATAN		
TOTAL											1,371,964,300,318								1,550,915,873,053		